

Model rancangan formulasi kebijakan yang digagas oleh tim peneliti di tahun 2016 (tahun pertama), adalah: model *win-win solution*, di satu sisi tetap menjaga keberterahan tradisi *Manak Salah* karena sangat sulit menghapuskan hal tersebut dengan keberadaan masyarakat desa Padang Bulia disebabkan ikatan *niskala* turun temurun dari masyarakat setempat. Di sisi lain keberterahan tradisi harus memperhatikan jaminan perlindungan hak asasi manusia berupa prosedur pengenaan sanksi dan perlakuan adat terhadap pihak keluarga yang mempunyai kembar *buncing* (*manak salah*). Misalnya; : (1) Kedua orang tua beserta bayinya disediakan fasilitas perumahan yang layak yang memenuhi standar layak huni dengan difasilitasi tenaga medis mendampingi proses pengasingan, warga masyarakat atau *krama desa* secara bergiliran mengunjungi pihak keluarga yang terkena sanksi *kasepekan* sebagai sikap kepedulian terhadap sesama (*menyama braya*), walaupun pindah ke rumah darurat sementara Aparatur Desa Adat tetap secara intensif dan bergiliran melakukan kunjungan tentang kondisi pihak keluarga yang terkena sanksi *kasepekan* tersebut. (2) Selama dalam pengungsian, kedua orang tua sang bayi serta sang bayi sendiri tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan keluar desa, tapi justru dikunjungi oleh *krama desa* yang lain.

Penjyediaan fasilitas MCK yang memadai dan layak sesuai standar *hygiene and sanitation*. (4) Sehari menjelang berakhirnya pengungsian atau pengucilan ini sang orang tua diwajibkan untuk melakukan upacara adat lainnya berupa upacara *pecaruan* di Jaba Pura Desa, yang dibantu kesiapannya oleh seluruh *krama desa* secara keseluruhan sehingga membantu meringankan beban pihak keluarga yang terkena sanksi tadi. (5) Demikian juga halnya dengan sehari setelahnya sang orang tua bayi kembar *buncing* ini pun diharuskan pula melakukan upacara melasti ke laut atau *segara* yang diyakini sebagai pelarungan segala kesialan. Namun karena bantuan *krama desa* dalam persiapan upacara sangat membantu

meringankan keluarga si bayi dari segi pembiayaan. (6) Dan keterlibatan *krama desa* ikut ambil bagian membantu, dapat dilihat pada ritual penutup terhitung sehari se usai melakukan upacara melasti selama 3 hari si orang tua bayi beserta bayinya bersembahyang di tiga Pura Desa yang mempunyai Balai Agung Pegat. Dan seiring berakhirnya masa sembahyang di hari yang ketiga ini maka masa pengasingan ini pun selesai dan yang bersangkutan diperbolehkan kembali ke rumahnya atau melakukan perjalanan ke luar desa.

Oleh sebab itu aturan ini perlu disesuaikan dengan keadaan jaman sekarang, sesuai dengan sistem fleksibel dan dinamis, apabila mengacu kepada sistem hukum adat, karena biarpun hukum kerajaan dan hukum adat itu berbeda tetapi cakupannya tentang kebiasaan masyarakat meresepikan sebuah aturan, hukum kerjaan dan hukum adat ada sebuah korelasi sesuai dengan historis lahirnya hukum adat yang lahir dari kebiasaan yang berakibatkan sebuah hukum. Jadi, pengaturan tentang Hak Asasi Manusia pada keberlakuan tradisi manak salah perlu ditinjau kembali keberadaannya yang bertujuan : (1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. (2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. (3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. (4) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam pengkajian mengenai tradisi *manak salah* sudah semestinya awig-awig adat disesuaikan dengan hukum formal. Maksudnya, bagaimana agar aturan hukum tradisional ini tidak melanggar aturan hukum yang lebih tinggi yang dibuat oleh negara

2. Saran

Upaya Perlindungan, Pemajuan, Dan Pemenuhan HAM dengan langkah *win-win solution* ini, meliputi: Beberapa langkah penegakan dan perjuangan hak asasi manusia bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia adalah sebagai berikut: Sosialisasi Hak Asasi Manusia; (Untuk menegakkan hak asasi manusia, langkah pertama adalah memasyarakatkan hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dari usaha ini, antara lain sebagai berikut,

Agar manusia respek terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai inti hak asasi manusia. (a) Tumbuhnya kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia. (b) Mempercepat proses demokratisasi sehingga dapat dicegah munculnya kekuasaan yang sewenang-wenang.

Pendidikan HAM

Dalam rangka internalisasi nilai-nilai, hak asasi manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan manusia sejak dini, pada sekolah, kampus, dan media massa. Sebagai suatu tata nilai, hak asasi manusia untuk bisa dipahami, dihayati, dan diamalkan melalui proses yang panjang. Pembentukan sikap dan kebiasaan memerlukan interaksi dengan lingkungan di bawah pimpinan, guru, atau tokoh masyarakat.

3) Advokasi HAM

Advokasi adalah dukungan, pembelaan atau upaya, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sederhana. Tujuan advokasi terhadap

HAM adalah untuk mengubah lembaga-lembaga masyarakat dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan untuk memperoleh akses dari tuntutan pengambilan keputusan.

Kelembagaan

Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi ini dimaksudkan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(a). Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional. (b). Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan meratifikasinya

Agar terciptanya masyarakat adat yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga hukum adat mereka sendiri sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran antara peraturan adat dan jaminan serta perlindungan HAM bagi setiap warga negara Indonesia. Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan akan tetap hidup dalam selama masyarakat masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka. Oleh karena itu keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional adalah memperkaya khazanah hukum, oleh karenanya dalam penerapannya juga harus mempertimbangkan aspek HAM dan keadilan bagi masyarakat sebab hukum adat akan selalu ada dan hidup didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Carspecken, P. (1998). *Critical Ethnography in Educational Research: A Theoretical and Practical Guide*. London and New York: Routledge.

Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Seleta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT Eresco.

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran negara Nomor.... Tambahan Lembaran Negara Nomor

Undang Undang No. 09 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum;

Undang Undang No. 39 Tahun 1999
Tentang HAM;

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan HAM;

No. 23/ 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
Tentang HAM;

Keputusan No. 10/DPRD/1951 tentang
penghapusan “*manak salah*”

PUTUSAN DESA ADAT SEBAGAI LEGITIMASI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PERKAWINAN NYENTANA DI KABUPATEN TABANAN

Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windari, Ni Putu Rai Yulianti

Email: niktsariadnyani@gmail.com

ABSTRACT

The research was motivated by any form of marriage matriarki are generally held at the Balinese Hindu community often identified by the term nyentana (nyeburin) when assessed at a glance looks like a form of marriage matriarki found on society Kabau Minang (West Sumatra). In the process was similar to that of marriage matriarki, but essentially aligned with Purusa or patriarchal system developed by Balinese Hindu community. So, there is accommodation of a combination of two elements that indicate no gender role in it blend harmoniously integrated and support the effective enforceability of law in indigenous communities. It can be viewed from the perspective of gender studies in customary law that is based on the structural-functional theory nyentana mating system that is identified with a form of marriage matriarki in reality refers to the direction of the inheritance system plates to Purusa.

Kind of normative juridical research, with an assessment of customary law in marriage nyentana Hindu Bali. Strengthening traditional institutions in terms of sanctions and compliance provides the connective power of its own to the applicable law, and if necessary confirmed by awig awig customs that have holding capacity in terms of validity. Nyentana as an alternative form of marriage in a keluarha not have male offspring so that the status of women confirmed to be a man (putrika) indicating an appreciation on the role of gender harmony as progressors descent. Consequently there is a gender-based publishing policy that accommodates the role of women in dalamnya.

Keywords: Customary Law Hindu Bali, gender, matriarki, nyentana, marriage, Purusa.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya bentuk perkawinan matriarki yang umumnya terselenggara pada masyarakat Hindu Bali sering diidentikkan dengan istilah nyentana (nyeburin) apabila dikaji secara sekilas tampak seperti bentuk perkawinan matriarki yang dijumpai pada masyarakat Minang Kabau (Sumatra Barat). Secara proses memang serupa dengan bentuk perkawinan matriarki, namun secara esensi selaras dengan sistem purusa atau patriarki yang dikembangkan oleh masyarakat Hindu Bali. Jadi, terdapat akomodasi dari perpaduan dua unsur yang mengindikasikan ada peranan gender di dalamnya berbaur dan terintegrasi secara harmonis mendukung efektifitas keberlakuan hukum dalam masyarakat adat. Hal ini dapat ditinjau dari perspektif kajian mengenai gender dalam hukum adat bahwa berdasarkan teori struktural fungsional sistem perkawinan nyentana yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa.

Jenis penelitian yuridis normatif, dengan pengkajian hukum adat Hindu Bali dalam perkawinan nyentana. Penguatan lembaga adat dari segi sanksi dan kepatuhan memberikan daya ikat tersendiri terhadap hukum yang berlaku, dan apabila perlu dikukuhkan melalui awig-awig adat sehingga memiliki daya ikat dari segi keberlakuannya. Bentuk perkawinan nyentana sebagai alternatif dalam suatu keluarha tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga status perempuan dikukuhkan menjadi laki-laki (putrika) hal ini mengindikasikan adanya penghargaan pada peran gender yang harmonis sebagai pelanjut keturunan. Konsekwensinya adalah dimuatnya kebijakan berbasis gender yang mengakomodasi peran perempuan di dalamnya.

Kata Kunci: Hukum Adat Hindu Bali, gender, matriarki, nyentana, perkawinan, purusa.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hilman Hadikusuma (1990: 10 dan 27) mengatakan [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat. UU Perkawinan, menurut Hilman (1990: 28-29), menempatkan hukum agama sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan perkawinan. Yurisprudensi yang menyatakan bahwa perkawinan disebut sah sesudah kedua mempelai melakukan upacara *mabyakaon* (*mabyakala*) Yurisprudensi tersebut adalah Keputusan *Raad Kertha* Singaraja Nomor 290/Crimineel, 14 April 1932 yang mempertimbangkan dalam putusannya bahwa selam *mabyakaon* belum dilakukan maka perkawinan belum dipandang sah. Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Mei 1960 menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah menurut Hukum Adat Bali apabila telah dilakukan *pabyakaonan* atau *mabyakaon*. Demikian pula keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 281/Pdt/1966/PTD tanggal

Oktober 1966 (Suyatna, 1997). Jika tak dilaksanakan menurut hukum agama, maka perkawinan tidak sah. Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut *mekala-kalaan* yang dipimpin *Pinandita*.

Pasal 2 ayat (1) menegaskan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Bagi umat Hindu perkawinan harus disahkan menurut ketentuan hukum Hindu yang sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat adat Bali. Dari segi pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Bali juga telah dipengaruhi oleh *lokacara* dan *desa dresta*. Menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung, 1986), sahnya perkawinan ditentukan

oleh adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*).

Berdasarkan penelitian pada tahun pertama yang sudah berlangsung, pada dasarnya bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali sangat dipengaruhi oleh tradisi adat dan hukum agama Hindu

sehingga keberlangsungannya juga berdasarkan kesepakatan bersama dari masyarakat desa adat setempat. Hasil penelitian di tahun pertama menunjukkan fakta bahwa bentuk perkawinan matriarki yang umumnya terselenggara pada masyarakat Hindu Bali sering diidentikkan dengan istilah *nyentana* (*nyeburin*) apabila dikaji secara sekilas tampak seperti bentuk perkawinan matriarki yang dijumpai pada masyarakat Minang Kabau (Sumatra Barat). Hal ini dilihat dari prosesi perkawinannya yang menarik masuk pasangan laki-laki ke keluarga perempuan dan perempuan yang memegang peranan penting dalam kaitannya dengan melanjutkan keturunan dan pewarisan. Akan tetapi letak perbedaannya jelas, bahwa sistem *nyentana* (*nyeburin*) yang dimaksudkan di sini adalah sama dengan perkawinan ambil anak yaitu mengawini anak laki-laki untuk masuk menjadi anggota pihak keluarga wanita dan tinggal pula di sana. *Nyentana/nyeburin* dikenal pula dengan sebutan *pekidi* atau diminta, artinya si laki-laki tersebut diminta menjadi menantu dan meneruskan keturunan pihak wanita. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya. Jadi anggota yang meneruskan klan bapak mertua.

Ditinjau dari perspektif kajian mengenai gender dalam hukum adat bahwa berdasarkan teori struktural fungsional sistem perkawinan *nyentana* yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan *lempeng* ke *purusa*. Karena berdasarkan struktur fungsi peran yang dilakoni oleh masing-masing pihak, baik anak laki-laki maupun perempuan Bali di dalam keluarga, terdapat nilai-nilai fundamental yang ajeg yang tetap terus dijaga keberlangsungannya seperti (1) norma atau

kaidah dalam keluarga yang harus tetap dipatuhi seperti rasa hormat kepada orang tua, patuh, berbakti, *suputra*, *satya*, dan sebagainya. (2) status atau kedudukan di dalam keluarga, misalnya orang tua terutama Bapak atau Ayah tidak dapat dipisahkan dengan anak perempuannya; istri selalu mendukung suami dalam segala hal yang sifatnya positif; tatkala anak perempuan berstatus sebagai seorang Ibu ketika mempunyai putra, beliau akan sangat tergantung dengan anak laki-lakinya. (3) Peran yang harus dilakoni seorang anak perempuan adalah *swadharmaning pianak*, *swadharmaning rabi*, *swadharmaning rerama*.

Kajian *socio cultural* mengenai pandangan masyarakat yang masih perlu diluruskan mengenai bentuk perkawinan matriarki dari segi prosesnya terhadap bentuk perkawinan *nyentana* yang pada dasarnya berbeda dari segi esensinya yang cenderung lempeng ke *purusa* (laki-laki) dan bukan seperti pemahaman kalangan masyarakat Bali pada umumnya yang cenderung memandang bahwa perkawinan *nyentana* cenderung lempeng ke *predana* (perempuan); dan (3) kajian yuridis, yurisprudensi MA No. 200K/Sip/1958 tentang sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali dengan tujuan tidak menimbulkan multi tafsir dari maksud dan tujuan keberlakuan hukum itu sendiri

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun pemetaan terhadap realisasi kebijakan selama penelitian berlangsung pada tahun pertama untuk lebih lanjut di tahun kedua, peneliti mengkaji mengenai terdapat perubahan atau tidak dari segi paradigma masyarakat, pelaksanaan kebijakan maupun target sasaran dari kebijakan yang dirancang. Maka peneliti merumuskan sejauhmanakah legitimasi secara formal terhadap Putusan Desa Adat dalam bentuk awig-awig tentang Perkawinan *Nyentana* dinilai penting bagi daya ikat masyarakat adat?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui legitimasi secara formal terhadap Putusan Desa Adat dalam bentuk awig-awig tentang Perkawinan

Nyentana dinilai penting bagi daya ikat masyarakat adat. Tujuannya agar terdapat kodifikasi dalam bentuk *Sima*, *Perarem*, dan *Awig-Awig*).

4. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Memberikan sumbangsih terhadap pembalikan cara berpikir di kalangan masyarakat Hindu Bali bahwa kaum perempuan juga dapat sebagai penerus keturunan dan memperoleh hak terhadap warisan orang tua apabila statusnya sudah dikukuhkan sebagai *putrika* (*sentana rajeg*), yaitu anak perempuan yang sudah disepakati berdasarkan *pauman* keluarga inti maupun keluarga *dadia* bahwa memang yang bersangkutan memang dipercaya sebagai ahli waris dan penerus keturunan dengan catatan melahirkan anak laki-laki yang dapat meneruskan keberlangsungan keluarga secara periodik.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya temuan/inovasi penelitian, yaitu berupa model formulasi kebijakan tentang bentuk perkawinan matriarki berbasis gender dalam bentuk rancangan naskah akademik untuk mengakomodir paradigma masyarakat yang masih keliru dari segi pemahaman tentang gender dalam hukum adat perkawinan Hindu Bali, sebagai respon terhadap upaya penyebarluasan informasi tentang rancangan model kebijakan telah ditargetkan pada tahun pertama disusun naskah akademik, dan di tahun berikutnya naskah akademik akan menjadi masukan bagi rancangan kebijakan mengenai bentuk perkawinan matriarki dari segi penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan hukum adat yang bersifat populis.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengkajian hukum adat Hindu Bali dalam menelaah bentuk perkawinan matriarki. Adanya persepsi yang keliru di kalangan masyarakat antara proses dan esensi bentuk perkawinan matriarki perlu diklarifikasi secara terbuka untuk memberikan informasi aktual kepada warga masyarakat adat akan pentingnya pemahaman mengenai hak dan

kewajiban setiap individu berdasarkan hukum adat Hindu sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan bersama.

Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi peneliti ditentukan secara purposive sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan mengambil sampel di daerah Bali bagian selatan di bandingkan dengan Bali bagian utara, serta daerah Bali bagian Timur dibandingkan dengan Bali bagian Barat. Dalam kaitannya dengan penyelarasan tujuan penelitian maka di tahun ke-2 dengan melihat implementasi dari model rancangan kebijakan di tahun sebelumnya untuk keberhasilannya perlu adanya studi komparasi antara beberapa daerah, yaitu (Denpasar dengan Singaraja, dan Tabanan dengan Karangasem).

Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah responden yang dinilai berperan dengan kajian permasalahan penelitian dan dinilai berkompeten memberikan informasi yang akurat terhadap permasalahan penelitian yang terjadi. Adapun subjek penelitian yang dimaksudkan, yaitu: yaitu: (1) pasangan suami istri yang melakukan perkawinan matrilineal, (2), orang tua dan keluarga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan matrilineal, (3), tokoh agama dan tafsir weda (kitab suci agama Hindu), (4) tokoh adat (orang yang dituakan di setiap desa adat), (5) tokoh masyarakat formal (anggota legislatif, eksekutif, dan tokoh pemerintahan daerah lainnya), (6) tokoh pemuda, (7) anggota masyarakat, (8) PHDI (organisasi tertinggi agama Hindu) Provinsi Bali.

Sedangkan objek penelitian yang menjadi fokus kajian di tahun kedua adalah: faktor penyebab di sebagian wilayah propinsi Bali pernah terjadi penolakan terhadap bentuk perkawinan matriarki; Putusan Desa Adat dalam bentuk awig-awig tentang Perkawinan *Nyentana* diupayakan memiliki legitimasi secara formal; realisasi rancangan kebijakan berbasis gender yang sudah tertuang dalam bentuk naskah akademik di tahun pertama dapat dituangkan ke dalam bentuk hukum positif di tahun kedua.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan data, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen,

kuisisioner terbuka dan tertutup, (5) *focus groups discussion*.

Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Keseluruhan data ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan statistik sesuai dengan karakteristik data yang dibutuhkan untuk mengurai masing-masing permasalahan penelitian. Miles dan Huberman (1992: 83), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

C. PEMBAHASAN

Legitimasi secara Formal terhadap Putusan Desa Adat dalam Bentuk Awig-Awig tentang Perkawinan *Nyentana* Dinilai Penting bagi Daya Ikat Masyarakat Adat

Dalam perkawinan *nyentana*, seorang laki-laki ikut dalam keluarga isterinya, tinggal di rumah isteri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Van Dijk (1991: 35) menulis bahwa laki-laki tadi 'dilepaskan dari golongan sanaknya dan dipindahkan ke dalam golongan sanak si perempuan'. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya. "Jadi anggota yang meneruskan klan bapak mertua," tulis Van Dijk.

Di luar bentuk perkawinan yang umum, di beberapa daerah di Bali, terutama Tabanan, Badung, Gianyar, dan Bangli sudah lazim pula ditemui bentuk perkawinan yang sekarang lazim disebut *nyeburin*. Di beberapa tempat bentuk perkawinan ini lebih dikenal dengan sebutan *nyentana* atau *nyaluk sentana* (Korn, 1978). Dalam bentuk perkawinan ini justru suamilah yang mengikuti istri. Secara sepintas, bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem *kepurusa* yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki (*purusa*). Tetapi bila diamati secara seksama, perkawinan *nyeburin* ternyata tetap konsisten dengan sistem

kekeluargaan *kepurusa* sebab dalam perkawinan ini status istri adalah *purusa* karena telah ditetapkan sebagai *sentana rajeg* dalam keluarganya.

Sentana rajeg (*sentana* = keturunan, ahli waris; *rajeg* = kukuh, tegak; *karajegang* = dikukuhkan, ditegakkan) adalah anak perempuan yang *kerajegang sentana* yaitu dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan atau *purusa*. Dalam Kitab *Manawa Dharmacastra* (IX:127), *sentana rajeg* disebut dengan istilah *putrika yang* kedudukannya sama dengan anak laki-laki, yaitu sebagai pelanjut keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya (Sudantira, 2002a).

Bentuk perkawinan matriarki (*nyentana*) atau *nyeburin* yang mula-mula berkembang pada masyarakat Tabanan ini diterima secara luas oleh masyarakat Bali, khususnya Bali Selatan. Model kawin *nyentana* ini menjadi solusi yang mampu menyelesaikan persoalan keluarga yang hanya mempunyai keturunan perempuan. Dalam perkembangan selanjutnya perkawinan *nyentana* menjadi alternatif jika hanya mempunyai keturunan perempuan.

Aturan dalam perkawinan *nyentana* dengan perkawinan yang lazim dilakukan dalam masyarakat kebanyakan juga sedikit unik. Dalam perkawinan biasa, lazimnya seorang lelaki yang melamar seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Namun dalam perkawinan *nyentana* si gadislah yang melamar si lelaki untuk dijadikan suaminya untuk selanjutnya diajak tinggal di rumah sigadis. Sementara itu keturunannya akan menjadi milik dan melanjutkan keturunan keluarga istrinya tadi.

Karena konsekwensi inilah yang mengakibatkan perkawinan *nyentana* banyak ditentang oleh masyarakat Bali khususnya yang berada di wilayah Karangasem.

Di tengah penolakan oleh sebagian masyarakat Bali di wilayah tertentu terhadap perkawinan *nyentana*, di sisi lain perkawinan *nyentana* justru dilegalkan secara adat. Banjar Kekeran di Desa Penatahan, Penebel, Tabanan dijadikan desa model setara oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan

aktivis perempuan di Bali. Desa ini dinilai memiliki dan menerapkan hukum adat yang memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan untuk anak dan perempuan. Berdasarkan informasi dari Kepala Dusun Kekeran I Nyoman Sugiarta, bahwa pihak perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban setara di adat dan keluarga. “Leluhur kami sudah memberikan contoh bagaimana hidup damai, yang penting kesepakatan bersama. Kebiasaan turun temurun ini tidak diketahui kapan dimulai. Ikhwil kesetaraan ini karena pemuka adat dan warga fleksibel dengan aturan pernikahan dan kewajiban adat. Misalnya, tidak ada perbedaan atau diskriminasi ketika *nyentana* dan menyetujui konsep *Pada Gelahang*.”

Tanggapan lain justru datang dari daerah Klungkung, dan Jembrana bahwa daerah tersebut tidak melazimkan bentuk perkawinan *nyentana* (matriarki secara proses), bahkan walaupun dalam keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki, pihak keluarga dapat mengambil alternatif dengan menunjuk pihak keluarga sampingan dari garis keturunan *purusa* (laki-laki) untuk bertindak selaku ahli waris atau dengan jalan mengangkat anak dengan prosesi upacara adat. Sedangkan di daerah kabupaten Buleleng bentuk perkawinan menyerupai perkawinan *nyentana* (matriarki secara proses) dijumpai hanya saja masih bisa dihitung dengan jari. Dilangsungkannya bentuk perkawinan ini tidak diketahui secara jelas pihak siapa saja yang menyetujuinya karena aparat desa adat maupun desa dinas hanya hadir sebagai saksi dan juru catat dalam pendaftaran perkawinan. Apabila terjadi konflik di kemudian hari status hukum dan pewarisan tidak diketahui secara pasti siapa pihak yang turut andil berkontribusi untuk membantu penyelesaiannya. Jaminan status hukumnya lemah karena masyarakat secara mayoritas masih menganut sistem perkawinan patriarki di daerah tersebut.

Menyangkut ketentuan pencatatan perkawinan ini, memang masih memerlukan penjelasan untuk dapat diberlakukan disemua

wilayah hukum Indonesia yang secara nyata masing-masing daerah memiliki budaya yang secara nasional juga diakui dan dihormati seperti ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain yang beragama islam, pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Aturan ini kemudian dipertegas lagi oleh SK Menteri Dalam Negeri No.221 a tahun 1975, yang menentukan bahwa pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu dan Budha dilakukan di kantor catatan sipil.

Ketentuan diatas tentunya menimbulkan persoalan bagi masyarakat Hindu di Bali. Sebab masyarakat Hindu di Bali tidak melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, melainkan dicatatkan oleh Banjar, karena anggota banjar adalah umat hindu yang sudah berkeluarga (Astuti, 1981 :6).

Guna mengantisipasi persoalan diatas, pada tanggal 19 September 1975, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengeluarkan Surat Keputusan No. 16/Kesra/IUC/504/1975, yaitu menunjuk para camat seluruh Bali sebagai pencatat perkawinan untuk umat Hindu dan Budha.

Pada tanggal 1 Oktober 1988, SK ini diganti dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No.241 tahun 1988 yang isinya menunjuk para penyuluh agama Hindu di tingkat kecamatan, Bendesa Adat / Kelian Adat sebagai pegawai pembantu pencatat perkawinan.

Kemudian tanggal 1 Januari 1990 berlaku SK Gubemw Kepala Daerah Tingkat I Bali No.233 tahun 1990, yang sekaligus mengganti SK No.241 tahun 1988. Materi SK Gubernur No.233 tahun 1990 adalah menunjuk kepala urusan pemerintahan kecamatan, Bendesa Adat

Kelian Adat di tingkat desa di propinsi Bali sebagai pembantu pegawai pencatatan perkawinan bagi umat hindu Warga Negara Indonesia di wilayahnya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan sahnya perkawinan ini, masyarakat Bali sebenarnya tidak mengenal istilah demikian (sah). Yang dikenal untuk mengakui perkawinan adalah istilah puput (selesai). Dalam hal ini bahwa sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali sukar ditunjukkan dengan suatu kejadian (peristiwa) saja karena untuk sahnya perkawinan tersebut perlu dilalui rangkaian kejadian yang makin lama makin tumbuh untuk menyempurnakan kedudukan suami isteri yang bersangkutan. Akta perkawinan dan pencatatan perkawinan bukanlah merupakan tanda sahnya perkawinan, tetapi hanyalah sebagai bukti otentik perkawinan, dan fungsi pencatatan hanyalah bersifat administratif saja.

Gede Pudja juga mengemukakan bahwa suatu perkawinan menurut hukum hindu adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama, bukan pada tata administratif, tetapi untuk kepastian hukum, administratif itu diperlukan sebagai alat pembuktian yang kuat. Walaupun itu dilakukan mendahului pengesahan perkawinan, menurut hukum Hindu yang dicatat bukanlah perkawinannya tetapi akan dilakukan perkawinan dan ini tidak menjamin bahwa perkawinan itu akan dilakukan sah menurut agama

Di dalam membicarakan perkawinan belum lengkap apabila belum dibicarakan tentang agama hindu, baik yang berhubungan dengan perkembangan hindu di Indonesia dan perkawinan di Bali. Kedua hal itu erat sekali sangkut pautnya, untuk memperdalam pengertian tentang agama hindu itu harus disertai dengan adanya pemeluk agama yang terpusat pada suatu pulau, yaitu Bali. Orang-orang Bali yang beragama hindu tersebar agak luas di Indonesia, maka sumber aktivitas kehidupan agama ini masih terpusat di Bali. Bila disini akan dibicarakan mengenai perkawinan matriarki dari segi proses (*nyentana*), maka pembicaraan itu terbatas dalam soal-soal yang erat hubungannya dengan agama Hindu.

Agama Hindu telah tumbuh dan berkembang dalam proses perkawinan yang harmonis, yang awal mulanya masih samar-samar yang makin lama makin terdapat corak yang lebih hingga sampai sekarang ini. Pertumbuhannya ini erat sekali dengan perkembangan perkawinan *nyentana* pada masyarakat di Bali, yang dipengaruhi oleh sistem kekebaratan condong ke *purusa*. Di dalam perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengalami proses transisi dalam lapangan agama Hindu, sehingga penyesuaian bentuk perkawinan dengan sistem kekerabatan di Bali terus berkembang.

Di dalam agama Hindu dikenal pula tentang aturan adat. Adat dalam suatu agama Hindu adalah mutlak, perlu, fungsional. Fungsionalnya karena adat bertujuan mengadakan pembaharuan-pembaharuan di lapangan kerohanian masyarakat di Bali. Persoalan adat di dalam agama Hindu salah satunya terpusat pada bentuk perkawinan di Bali, hakekat hidup, dan merupakan aturan adat dari masa ke masa.

Dalam bentuk perkawinan *nyentana* ini, suami yang berstatus sebagai *pradana* dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya selanjutnya masuk dalam keluarga *kepurusa* istrinya. Dengan demikian keturunan dalam keluarga *kepurusa* itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus *purusa*. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, sehingga menunaikan kewajiban (*swadharma*) dan mendapatkan haknya (*swadikara*) dalam keluarga ibu.

Ciri yang menunjukkan bahwa bentuk perkawinan tersebut adalah *nyeburin* bukanlah semata-mata karena suami (umumnya) tinggal di rumah keluarga istri, melainkan lebih dapat dilihat dari fakta bahwa upacara pengesahan perkawinan (*pasakapari*) dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah yang mengantarkan sajen-sajen *pemelepehan* (*jauman*) ke rumah keluarga mempelai laki-

laki sebagai sarana untuk melepaskan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya (Panetja, 1986).

Beberapa orang menganggap bahwa bentuk perkawinan *nyeburin* ini sebagai penghargaan terhadap perempuan Bali karena dengan diangkat statusnya sebagai *sentana rajeg*, perempuan yang kawin *kaceburin* sekaligus menjadi ahli waris dari harta orang tuanya. Dikaitkan dengan pewarisan, barangkali pandangan tersebut ada benarnya karena anak perempuan yang semula bukan sebagai ahli waris dapat menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. Tetapi dalam kasus tertentu, sesungguhnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan anak perempuan dalam memilih jodoh. Akibat dari tanggungjawabnya yang akan ditetapkan sebagai *sentana rajeg* yang harus "tinggal di rumah" ia harus berhati-hati jatuh cinta pada laki-laki, karena ia mesti menyelidiki dan memastikan terlebih dahulu bahwa laki-laki yang mendekatinya mau *nyentana*. Di jaman di mana banyak keluarga melaksanakan keluarga berencana dengan semboyan "dua anak cukup, laki-perempuan sama saja", tentu saja cukup sulit menemukan laki-laki yang bersedia *nyentana*. Dengan demikian, perempuan itu bisa "terpenjara" dengan statusnya sebagai *sentana rajeg*.

Ketua Majelis Desa Pekraman (MDP) Tabanan, Suartanayasa, mengatakan kemampuan tokoh adat Desa Kekeran adalah contoh baik memengaruhi kepercayaan masyarakat. "Awig-awig atau peraturan adat juga harus memperhatikan hak perempuan dan anak dan hak asasi manusia".

MDP Tabanan baru menyosialisasikan hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) ini ke 150 desa pakraman dari 346 desa pakraman yang dimiliki oleh Kabupaten Tabanan. Sejumlah hasil Pasamuhan MUDP Bali akhir tahun lalu menghasilkan keputusan khusus soal hak perempuan dan anak dalam hukum adat Bali.

Sosialisasi putusan ini di Tabanan dilakukan dengan pelatihan kader pendidikan budaya tentang gender. Sasarannya ibu-ibu PKK. Dua desa, yakni Penebel dan Kediri, menjadi proyek percontohan tentang pendidikan gender. Tujuan bahwa pendidikan gender dimasukkan ke dalam dunia pendidikan melalui bidang studi atau ekstrakurikuler agar generasi muda paham apa perannya di masyarakat. Untuk menghilangkan ketakutan anak-anak muda Bali pada adat. Ida Ayu Adnya Ningsih, seorang guru mengaku setuju jika masalah adat segera dimasukkan dalam pendidikan. “Agar siswa sedari dini mengetahui bagaimana sebenarnya hukum adat Bali yang juga menghormati hak perempuan,” ujarnya. Menurutnya, pengenalan adat termasuk pendidikan karakter bangsa yang bisa diimplementasikan pada semua bidang studi. Pengurus Harian MUDP Bali I Ketut Sudantra mengatakan, adat Bali sudah mengakomodir suara perempuan. Dalam Pasamuan Agung III MDP Bali 15 Oktober 2010 telah diputuskan perkawinan *pada gelahang* dapat diterima, sebagai jalan keluar bagi keluarga yang punya anak tunggal, baik laki-laki saja atau perempuan. Perkawinan *pada gelahang* juga bisa dipilih sebagai alternatif perkawinan *nyentana*. Semuanya tergantung kesepakatan bersama antara pasutri yang akan menikah dan keluarga masing-masing.

Ritual *patiwangi*, yaitu jenis hukuman berat yang bisa mencabut hak perempuan di keluarganya sendiri. Oleh karenanya ritual *patiwangi* yang merendahkan harkat dan martabat perempuan juga ditinggalkan. Pasamuan Agung III MDP juga memutuskan hak dan kewajiban suami istri. Jika terjadi perceraian perempuan mendapatkan hak atas harta guna kaya, sebanyak sepertiga dari harta bersama. Hukum adat juga mengizinkan ibu tetap mengasuh anaknya tanpa memutuskan hubungan dengan bapaknya selaku purusa. Asal tetap menjaga hubungan baik antara anak dengan ayah dan keluarga besar ayahnya. Perempuan yang pulang kembali ke rumah asalnya setelah bercerai, diterima kembali oleh

keluarga asalnya dengan status mulih daa. Begitu juga laki-laki yang pernah kawin *nyentana*. Laki-laki kembali ke rumah asalnya dengan status mulih taruna. Untuk seterusnya mereka akan melaksanakan kewajiban dan memunyai hak di keluarga asal lagi.

Ni Nengah Budawati, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) Bali mengatakan Banjar Kekeran telah memberi contoh berjalannya rasa keadilan dan kesetaraan. Tidak saja awig-awignya yang mendukung, tapi tokoh adat juga berperan. “Perkawinan pada gelahang dan *nyentana* menjadi hal biasa,” tegasnya. Bagi perempuan berkasta yang menikah dengan laki-laki biasa, tambahnya, tidak mendapat hukuman dan diskriminasi seperti ritual *Patiwangi*.

Ajaran agama dan aturan adat mempunyai jalinan yang sangat erat. Dasar dari aturan di dalam agama Hindu ialah di dalam praktek kehidupan yang sewajarnya harus diikuti dan dipakai sebagai pedoman yang mutlak. Ajaran agama hindu sangat perlu bagi kehidupan individu dan masyarakat Bali, sebab ia merupakan benang merah yang menuntun kehidupan individu dan masyarakatnya ke arah keserasian tindakan dan tingkah laku. Tanpa adanya adat di dalam suatu kehidupan masyarakat, maka akan mengalami bencana dan kehancuran. Ditinjau dari segi agama, maka adat itu tidak lain dari pada materialisasi keagamaan di dalam tingkah laku penganutnya.

Perkawinan *nyentana* didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dan pada hukum agama Hindu, seperti yang di kemukakan oleh Soeripto dalam tulisannya bahwa : Hadat adalah hukum asli Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari, dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain baik di kota-kota maupun dan lebih-lebih di desa-desa, yaitu hukum yang didasarkan atas hukum

melayu Polinesia ditambah dengan disana-sini hukum agama.

Apabila perselisihan mengenai perkawinan *nyentana* tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka masyarakat akan membawa perkaranya ke depan pengadilan desa adat. Pengadilan desa adat adalah pengadilan rakyat yang terbuka, dan masyarakatlah yang menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar yang bersangkutan.

Menurut masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor genealogis atau hubungan darah, ada 3 macam yaitu :

Hubungan darah menurut garis laki-laki.

Hubungan darah menurut garis perempuan.

Hubungan darah menurut garis Ibu dan Bapak.

Hubungan darah menurut garis laki-laki, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Kalau hubungan darah menurut garis perempuan, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan, sedangkan hubungan darah menurut garis Ibu dan Bapak, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Susunan masyarakat hukum adat Bali adalah berdasarkan keturunan laki-laki atau Bapak (*saking kepurusa*). Pada umumnya disebut dengan istilah *tunggal sanggah*, *tunggal dadya*, atau *tunggal kawitan*. Istilah tersebut berarti suatu kekeluargaan yang mempunyai ketunggalan bapak leluhur dan arwahnya selalu dipuja dalam tempat pemujaan yang berupa *sanggah* atau *merajan*, pura *dadya* dan pura *kawitan*. Hukum adat Bali yang berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara-upacara adat serta upacara pengabenan terhadap orang tua yang meninggal dan mengurus harta kekayaan adalah anak laki-laki. Demikian halnya pada pihak keluarga yang melaksanakan perkawinan *nyentana* keseluruhan kewajiban di atas dibebankan kepada perempuan yang menyandang status *putrika*.

Adapun maksud perkawinan *nyeburin* tersebut adalah untuk memasukkan calon suami itu kedalam kasta calon isteri dan menganggap seolah-olah ia sebagai perempuan, sedangkan calon istri sebagai laki-laki. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat hukum adat Bali dan anak laki-laki merupakan penerus keturunan otang tuanya. Apabila sa.tu keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja, maka agar ada yang meneruskan keturunan orang tuanya, anak perempuan itu akan dikawinkan secara *nyeburin* sehingga tidak ada pembayaran jujur.

Perkawinan *nyeburin* seperti sudah disebut diatas status anak perempuan yang di tingkatkan menjadi anak laki-laki disebut *sentana rajeg* atau *sentana luh* dan anak laki-laki yang mengawini anak perempuan tersebut statusnya sebagai anak perempuan. Jadi dalam perkawinan ini si suami masuk kedalam kasta isterinya dan keluar dari ikatan kekeluargaan asalnya.

Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebut Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jenis perkawinan yang ada juga beragam yang secara umum dibagi dua yakni perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*. Kalau melakukan perkawinan biasa yakni logisnya pria meminang wanita untuk dijadikan istri tidak akan bermasalah. Jenis perkawinan berikutnya yakni *nyentana* atau *nyeburin* di mana pria dipinang wanita. Jenis perkawinan inilah yang banyak menimbulkan masalah. Dalam perkawinan ini, wanita berstatus sebagai *Sentana Rajeg* yang akan melanjutkan keturunannya. Dalam masyarakat Hindu Bali, anak laki-laki memang mempunyai nilai penting dalam melanjutkan keturunan. Karena, anak laki-lakilah yang akan mewarisi adat maupun melanjutkan "*sidikara*" dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan anak perempuan yang tidak memiliki kewajiban seperti anak laki-laki. Akibatnya, keluarga

yang tidak memiliki anak laki-laki akan berusaha mencari sentana untuk melanjutkan keturunannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *putrika* merupakan proses perubahan status dan kedudukan perempuan secara adat untuk menjadi laki-laki walaupun secara biologis masih tetap merupakan perempuan. Sehingga perempuan *putrika* memiliki kedudukan dan kewajiban sebagai : (1) Sebagai laki-laki dalam keluarga dalam hal menentukan keluarga. (2) Ahli waris bagi keluarga. (3) Penerus keturunan keluarga. (4) pengurus keluarga. (5) Menjadi anggota desa adat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. (6) Meneruskan tradisi yang telah diwariskan keluarga. (7) Membina keutuhan keluarga.

Menurut Manawa Dharmasastra, perkawinan *nyentana* sah. Pada azasnya, sistem kekerabatan dalam masyarakat Bali menganut sistem Patrilineal. Di mana, keturunan yang dilahirkan mengikuti keluarga pihak ayahnya. Tujuan perkawinan secara kasat mata hanya untuk melanjutkan keturunan suatu keluarga (dinasti). Masalah akan timbul manakala suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sehingga, untuk menghindari keputungan keluarga (putusnya keturunan) keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki ini akan menetapkan salah seorang anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* (statusnya ditingkatkan menjadi laki-laki yang akan mewarisi milik orang tuanya).

Dalam agama Hindu, tidak ada sloka ataupun pasal yang melarang perkawinan *nyentana*. Karena pihak keluarga laki-laki akan dianggap tidak memiliki harga diri. Kitab Manawa Dharmasastra sebagai sumber hukum positif yang berlaku bagi umat Hindu secara tegas menyebutkan mengenai status anak wanita yang ditegakkan sebagai penerus keturunan dengan sebutan *Putrika* (perempuan yang diubah statusnya menjadi laki-laki). Sloka 127 kitab tersebut secara gamblang menyebutkan "Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang

perempuan menjadi demikian (status lelaki) menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan". Dari uraian sloka tersebut, jelaslah bahwa perkawinan *nyentana* dibolehkan. Lelaki yang mau *nyentana* inilah yang disebut *Sentana*. Dengan demikian, argument yang mengatakan pelarangan terhadap perkawinan *nyentana* harus dipandang tidak beralasan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Demikian halnya dengan pembagian warisan dalam perkawinan *Nyentana*. Dalam Cloka 132 Manawa Dharmasastra disebutkan, "Anak dari wanita yang diangkat statusnya menjadi laki-laki sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki-laki (kakek). Ia akan menyelenggarakan *Tarpana* bagi kedua orang tuanya, maupun datuk ibunya".Selanjutnya Sloka 145 menyebutkan "Anak yang lahir dari wanita yang statusnya ditingkatkan akan menjadi ahli waris seperti anak sendiri yang sah darinya. Karena hasil yang ditimbulkan adalah untuk dari pemilik tanah itu menurut UU"

D. PENUTUP

1. Simpulan

Di dalam perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengalami proses transisi dalam lapangan agama Hindu, sehingga penyelarasan bentuk perkawinan dengan sistem kekerabatan di Bali terus berkembang. Di dalam agama Hindu dikenal pula tentang aturan adat. Adat dalam suatu agama Hindu adalah mutlak, perlu, fungsional. Fungsionalnya karena adat bertujuan mengadakan pembaharuan-pembaharuan di lapangan kerohanian masyarakat di Bali.

5.2 Saran

Jika bentuk perkawinan *nyentana* (matriarki dari segi proses) pada masyarakat Hindu Bali tidak dilandasi dasar hukum yang kuat akan menimbulkan berbagai persoalan

yang berkaitan dengan status, kedudukan, dan tanggungjawab masing-masing pihak. Hendaknya perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan adat yang berlaku. Konskwensinya pihak desa Adat maupun pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan harus tetap memperhatikan kaidah hukum adat yang memperhatikan hak-hak perempuan Bali dalam kerangka kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Aditjondro, G. 2003. *Gerakan Anti-Pengusuran Tanah serta Implikasi Politiknya. Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Yayasan Haumaini di SoE, Timur, Tengah, Selatan, NTT 27 Juni s/d Juli 2003.
- Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Bali: Cet, CV Kayumas Agung, Denpasar.
- Astiti Putra Tjok Istri. 1981 *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama di Bali*. Biro Dokumentasi dan Publikasi FH dan PM, Denpasar.
- Artadi, I Ketut. 2007. *Hukum Adat Bali*. Bali: Harian Pustaka Bali Post.
- Benny H. Hoed. 2007. 'Derrida VS Strukturalisme De Saussure' dalam *Majalah BASIS No.11-12, November-Desember 2007*.
- Bernard Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Chidir Ali. 1981. *Hukum Adat Bali dan Lombok dalam Yurisprudensi Indonesia*. Jilid 1. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Korn, V.E. 1972. *Hukum Adat Waris di Bali*. Terjemahan I Gede Wajan Pangkat. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- Lasmawan, W. 2002. *Sasih Nembelas sebagai Lembaga Desa Adat dalam Pemerintahan Desa Tradisional Bali. Laporan Penelitian*. Singaraja: FKIP UNUD.
- Lewis Coser . 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Motode-Metode Baru*. (Tjejep Rohendi Penerjemah). Jakarta : UI Press.
- Mr. B. Ter Haar. 1991. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj. K. Ng. Soebakti Peosponoto. Cet- Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nezar Patria. 1999. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pudja, Gede, Tjokorda Rai Sudharta. *ManavaDharmastra*. Surabaya: Paramita (MDS.III.27 s/d 34).
- R. Soebekti. 1991. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: Alumni.
- Soekanto. 1958. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Geroengan.
- Suyatna, G. 1982. *Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional dan Peranannya dalam Pembangunan. Disertasi*. Bogor: Fak. Pertanian IPB
- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terj. A. Soehardi. Cet-3. Bandung: Vorkink-Van

- Hoeve Bandung-‘S
Gravenhage, tanpa tahun.
- Wiyana, K. 2003. *Palinggih di Pamerajan*.
Denpasar: Upada Sastra.
- Windia. 2008. *Bias Gender: Perkawinan
Terlarang Pada Masarakat
Bali*. Denpasar: Udayana
University Press.
- 1997. *Tanya Jawab Hukum Adat
Bali*. Denpasar: Upada Sastra.

Sumber Perundang-Undangan:

- Departemen Dalam Negeri Propinsi
Daerah Tingkat I
Bali, *Pedoman Pelaksanaan
No. 1 Tahun 1974 dan
Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975 Bagi Umat
Hindu/Budha di Bali*.

Sumber Media Cetak:

- Harian Umum Nusa, tanggal 04
Pebruari 20011
- Harian Umum Nusa, tanggal 05
Pebruari 20010
- Bali Post, 10 Januari 2010
- Bali Post, 27 Januari 2012
- Bali Post, 20 Mei 2011
- Tokoh Edisi, 19 Mei 2013

Sumber Internet:

- <https://saripuddin.wordpress.com/fungsionalisme-struktural-talcott-parsons/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>
- <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/JURNAL-ILMIAH.pdf>
- <http://valasiseng.blogspot.com/2009/10/teori-hegemoni-gramsci.html>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt536e24137294b/kedudukan-hukum-perkawinan-%E2%80%98nyentana%E2%80%99-di-bali>
- <http://underground-paper.blogspot.com/2013/04/feminisme-di-indonesia.html>
- <http://irapurwitasari.blog.mercubuana.ac.id/author/hegemoni-budaya/>
- Cook, Guy. 1997. *Discourse*. Oxford: Oxford University Press.

SISTEM TATA KELOLA USAHA PERTANIAN SEMANGKA MELALUI PENGURUSAN IJIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Ketut Sudiarmaka, Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami

Email: ktsudiarmaka.undiksha@gmail.com

ABSTRACT

The main purpose of science and technology for society (IbM) Watermelon Farmers Group in Klungkung are: (1) provide additional insight through training and mentoring the processing of raw materials to be variants of watermelon fruit snacks and beverages as a cottage industry products; (2) enhance the skills of partners with supplies such as product marketing management training; structuring the corporate governance standards in terms of watermelon crop prices, the preparation of simple bookkeeping Training, Provide support equipment; (3) Partner is able to coordinate internal marketing in the farming community of Subak in supporting market expansion.

Target management is designed for 8 (eight) months of implementation P2M by proposing to construct three (3) types of simple bookkeeping containing prihal group administration bookkeeping, bookkeeping regarding stock levels of products are available, and keeping track product sales that have been made. Compiling a standard price based on agreement between partners with distributors and consumers through a memorandum of agreement on cooperation. Designing packaging processing result cottage industry raw material watermelon.

The annual outputs are designed to be produced during the process of conducting IbM Watermelon Farmers in Klungkung regency, three (3) types of simple bookkeeping, certificates of participants, design and product packaging attractive. In addition to the above outcome, the end of the implementation of P2M also generated output in the form of a final report P2M program, scientific articles published in national journals ISSN ber.

Program implementation methods used in achieving these objectives are (1) socialization, training, and mentoring penembangan knowledge, skills and abilities in the fields of production processing, management accounting, marketing and penadaan equipment, entering business relationships. Accompany and monitor partner in the practice of all science and technology transferred. Sustainability program, which continues in a partner.

ABSTRAK

Tujuan utama ipteks bagi masyarakat (IbM) Kelompok Petani Semangka di Klungkung ini adalah: (1) memberikan tambahan wawasan melalui pelatihan dan pendampingan pengolahan bahan baku buah semangka menjadi varian panganan dan minuman sebagai produk industri rumahan; (2) meningkatkan keterampilan mitra dengan bekal pelatihan manajemen pemasaran produk seperti; penataan terhadap tata kelola usaha dari segi standar harga hasil panen semangka, Pelatihan penyusunan pembukuan sederhana, Memberikan bantuan peralatan produksi; (3) Mitra mampu melakukan koordinasi pemasaran di intern komunitas petani subak dalam menunjang perluasan pasar.

Target manajemen yang dirancang selama 8 (delapan) bulan pelaksanaan P2M oleh pengusul dengan menyusun 3 (tiga) jenis pembukuan sederhana yang memuat prihal pembukuan administrasi kelompok, pembukuan mengenai jumlah stok produk yang tersedia, dan pembukuan yang mencatat hasil penjualan produk yang telah dilakukan. Menyusun standar harga berdasarkan kesepakatan antara mitra dengan distributor dan konsumen melalui nota kesepakatan kerjasama. Mendesain kemasan hasil pengolahan industri rumahan berbahan baku buah semangka.

Luaran tahunan yang dirancang untuk dapat dihasilkan selama proses penyelenggaraan IbM Kelompok Petani Semangka di Kabupaten Klungkung, 3 (tiga) jenis pembukuan sederhana, sertifikat peserta pelatihan, desain dan kemasan produk yang menarik. Selain luaran di atas, diakhir pelaksanaan P2M juga dihasilkan luaran berupa laporan akhir program P2M, artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber ISSN.

Metode pelaksanaan program yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut berupa (1) Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penembangan wawasan, keterampilan dan kemampuan pengolahan di bidang produksi, manajemen pembukuan, pemasaran dan penadaan peralatan,menjalin relasi usaha. Mendampingi dan memonitor mitra dalam melakukan praktek terhadap seluruh ipteks yang ditransfer. Keberlanjutan program yaitu berlanjut di mitra.

Kata kunci: Dawan, Gunaksa, industri rumah tangga, Klungkung, pembukuan, petani, produksi, Sampalan, Subak Baler Margi, Subak Delod Margi, Semangka, manajemen, relasi bisnis.

A. PENDAHULUAN

Kelompok petani semangka di Subak Sampalan Baler Margi mengelola lahan sekitar 4 Ha, lokasi mitra terletak di desa Sampalan kecamatan Dawan dengan luas wilayah 7,8 Km² atau 11,87% yang terdiri dari 12 (dua belas) desa dan merupakan bagian dari wilayah kabupaten Klungkung. Dari kampus Undiksha kira-kira berjarak 150 Km, dapat ditempuh dengan jalur darat menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Jumlah penduduk kecamatan Dawan kurang lebih 175.05 juta jiwa (Data Statistik, BPS Klungkung : 2013). Rekapitulasi berdasarkan data monografi kecamatan ditunjukkan oleh tim pengusul mengingat, kedua mitra terletak dalam satu kecamatan tetapi berbeda desa, yakni desa Sampalan bertugas mengelola Subak Baler Margi, dan Subak Sampalan

Kelod dikelola oleh desa Gunaksa, keduanya terletak di kecamatan Dawan kabupaten Klungkung. Kelompok petani ini dikoordinir oleh I Wayan Budiarta, selaku mitra pertama dalam P2M yang tim pengusul ajukan. Menurut keterangan mitra permasalahan yang dihadapi kelompoknya cukup serius terkait dengan persoalan anjloknya harga semangka di pasaran. Biasanya peristiwa ini dialami oleh petani apabila musim panen raya semangka tiba, harga semangka jatuh di pasaran, contoh riil petani semangka kalau tergantung dari harga pasar lazimnya, petani biasanya menjual ke distributor/pengepul dengan harga borongan per 1 mobil *pick up* seharga Rp.1.000.000,- s/d Rp.2.000.000,-. Mekanisme pasar seperti ini dapat berjalan dengan teratur apabila tingginya tingkat permintaan pesanan semangka oleh distributor/pengepul yang secara langsung datang ke petani. Petani juga dapat dibantu

dengan sistem pemasaran hasil panen secara cepat, walaupun jumlah keuntungan yang diperoleh tidak seberapa dibandingkan dengan menjual langsung ke pasar. Terjadi pola hubungan simbiosis mutualisme antara petani dengan distributor/pengepul, di satu sisi petani dibantu tugas-tugasnya di dalam memasarkan semangka hasil panennya, di sisi lain distributor memperoleh harga berdasarkan kesepakatan petani. Sebaliknya ketika musim panen melimpah, menyebabkan harga semangka anjlok di pasaran bahkan bisa sampai setengah harga dari harga semula, yaitu sekitar kisaran Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000 per mobil *pick up*.

Permasalahan di atas, yang paling mengkhawatirkan bagi mitra mengingat tidak ada keseimbangan antara biaya perawatan (pembelian bibit, pembelian pupuk, pengairan, pembersihan gulma dari tanaman semangka, dan sebagainya yang menunjang kegiatan pertanian), jika dikalkulasikan dengan harga hasil panen tidak sebanding bahkan petani semangka cenderung merugi karena tidak kembali modal. Berikut rekapitan hasil analisis situasi menurut permasalahan mitra, misalkan untuk setiap petak tanah pertanian menghabiskan 20 kantong bibit semangka dengan kisaran harga Rp.7.500,- (Rp.150.000,-). Untuk jenis semangka biasa dengan biji, Rp.11.000, (Rp.220.000,-) semangka tanpa biji, dan Rp.15.000,- untuk semangka kuning (*honey den melon*) kalkulasinya sekitar Rp.16.000, jumlah biaya yang dihabiskan per petak lahan berkisar Rp.300.000,-. Dengan intensitas pemeliharaan yang secara terus-menerus sepanjang menunggu waktu panen per petani dengan luas setiap satu petak lahan jumlah biaya yang dihabiskan merupakan modal awal petani sekitar Rp dua ratus tiga puluh ribu setiap petak untuk bibitnya saja, belum pupuk, pengairan, dan tenaga pemetik semangka diperkirakan total biaya yang dihabiskan sampai dengan panen tiba sekitar Rp.250.000,- selama kurun waktu tiga bulan. Dengan harga pemeliharaan yang cukup mahal dan harga jual buah semangka yang relatif

murah, maka keuntungan mitra sangat minim. Mahalnya harga bibit, pupuk, pengairan, kebutuhan untuk jasa pemetik semangka menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan petani. Dari aspek lain, antara rentang waktu perawatan dan pemasaran tidak seimbang, hal ini disebabkan dari sistem pemasaran yang hanya terbatas menunggu jasa distributor/pengepul justru mempengaruhi lemahnya keterampilan petani dalam upaya penjualan hasil panen.

Padahal pengakuan petani setempat yang dijadikan mitra menyatakan bahwa semangka yang dijumpai penjualannya di pasar tradisional dan swalayan sekitar wilayah Gianyar, Karangasem, Badung, dan Denpasar adalah semangka lokal dari Klungkung, demikian juga pemasaran semangka melalui jasa pedagang kaki lima yang terdapat di sepanjang *baypass* Ida Bagus Mantra, seputar wilayah Sanur adalah merupakan semangka hasil panen petani Klungkung. Dilihat dari luas jangkauan pemasaran, semestinya mitra dapat meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya. Kondisi yang terjadi malahan sebaliknya, mitra cenderung merugi karena harga pasaran naik turun dan kecenderungannya adalah turun.

Kurangnya keterampilan memasarkan ditambah dengan kurangnya relasi bisnis dalam mengembangkan usaha pemasaran hasil panen, terlebih lagi dengan pengelolaan manajemen usaha yang konvensional dari segi administrasi jual-beli hanya cukup kesepakatan dengan bukti nota penjualan antara mitra dengan distributor/pengepul berpengaruh terhadap pengelolaan manajemen kelompok yang tidak sehat karena belum dapat diukur jumlah pemasukan yang diperoleh oleh petani dengan tingkat pengeluaran yang sudah dihabiskan.

Mitra juga mengakui bahwa selama ini untuk memperoleh penghasilan tambahan perkembangan terakhir mitra yang pada awalnya hanya terbatas pada jasa pemasaran distributor/pengepul dengan sistem jemput bola ke petani, oleh petani diimbangi dengan memberdayakan para istri petani membantu

untuk memasarkan hasil panen semangka dengan membuka lapak-lapak kecil di pinggir jalan sekitar jalan raya Klungkung-Denpasar. Usaha tersebut juga tidak difasilitasi oleh keterampilan manajemen usaha yang baik, karena para 7 istri petani hanya menjual tanpa mencatatkan jumlah hasil panen yang dijual dan jumlah semangka yang mampu terjual. Demikian juga, ketika sepi pembeli istri petani kebingungan dan menjualnya dengan cara eceran yaitu dalam bentuk semangka potong yang dibungkus plastik. Diperhatikan dari segi kemasan kurang menarik karena pembeli lebih terkesan dengan kemasan yang sudah dipress seperti yang dijumpai pada swalayan dan supermarket serta konsumen lebih yakin dapat menjamin ketahanan buah yang sudah diiris.

Tersedianya buah semangka dengan jenis sama, dipasarkan di swalayan terdekat menyebabkan lapak milik mitra kalah saing dengan swalayan yang lebih menjanjikan kemasan yang menarik dan dari segi jaminan daya tahan buah. Kendala lain banyaknya semangka yang busuk, karena mitra tidak memiliki keterampilan mengolah menjadi produk makanan maupun minuman dalam bentuk industri rumahan (*home industry*), menyebabkan semangka yang dipetik dalam waktu 5 hari dibuang sia-sia dan menjadi konsumsi pakan ternak babi dan sapi mitra.

Mitra kedua, adalah I Wayan Widiarsa sebagai koordinator pada Subak Delod Margi yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat desa Gunaksa kecamatan Dawan kabupaten Klungkung. Permasalahan mitra kedua hampir serupa dengan mitra pertama, I Wayan Widiarsa menyampaikan bahwa permasalahan muncul adalah waktu panen, harga semangka per kilogram cenderung di bawah standar sehingga petani cenderung merugi. Mitra biasanya menjual hasil panennya kepada distributor/pengepul atau menjual langsung pada masyarakat di sekitarnya tanpa disadari petani hanya akan memperoleh $\frac{1}{4}$ % keuntungan dari skala 100%. Harga jual buah semangka sangat variatif, di mana pada saat panen harga buah semangka per kilogram

dibeli oleh distributor/pengepul dengan harga Rp.10.000,- sampai Rp.11.000,-. Sedangkan di tingkat konsumen akhir harga jual buah semangka konsumsi per 1 kilogram dapat mencapai Rp.16.000,- sampai Rp.18.000,-. Dengan harga jual yang relatif rendah tampaknya kurang sebanding dengan biaya yang dihabiskan mulai dari pembibitan, pembelian pupuk, pemeliharaan tanaman semangka, tenaga kerja dan penanganan pasca panen. Rendahnya harga jual buah konsumsi mendorong tumbuhnya inisiatif mitra untuk memberdayakan peran para istri untuk mampu mengolah hasil panen buah semangka menjadi berbagai bahan yang dapat dijual dengan harga yang memadai, namun harapan mitra belum mampu terwujud karena istri mitra tidak memiliki keterampilan pengolahan (Pudyatmoko, 2009 : 17).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini rencananya bermitra dengan dua orang yaitu koordinator dari Kelompok Petani Semangka Subak Baler Margi di desa Sampalan (I Wayan Budiarta) dan koordinator Kelompok Petani Semangka Subak Delod Margi di desa Gunaksa kedua mitra berada di wilayah kecamatan Dawan kabupaten Klungkung. Mitra 1 mempunyai 8 10 petak lahan dengan jumlah penebaran bibit semangka sekitar 20 kantung bibit x 10 petak lahan sehingga jumlah rata-rata pembibitan per 10 petak lahan adalah 200 kantung, di samping itu mitra mempunyai 1 buah lapak penjualan semangka, sebagai bentuk pemasaran alternatif yang sifatnya tradisional demi mendukung penambahan jumlah pendapatan keluarga mitra. Mitra kedua, juga mengelola 8 petak lahan pertanian untuk buah semangka, namun tidak memiliki lapak penjualan semangka, mitra kedua hanya menjual hasil panen tergantung pada jasa distributor/pengepul, dan sisanya dijual langsung ke pasar secara kulakan. Jadi, orientasi komoditi hasil panen semangka kedua mitra baru hanya menyasar pada penjualan buahnya saja, mitra belum dapat memproduksi sebuah inovasi pembuatan produk berbahan baku buah

semangka. Mitra mengalami kesulitan pada saat panen raya tiba, pasokan semangka melimpah, di satu sisi petani kebingungan untuk memasarkan, di sisi lain kemampuan pengolahan belum dikuasai mitra. Minimnya sarana dan prasarana produksi, ditambah dengan belum dikuasainya keterampilan mengolah buah semangka menunjukkan karakteristik bahwa sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat petani semangka di Klungkung yang kurang tanggap terhadap manfaat alih fungsi teknologi. Permasalahan ini dipengaruhi oleh situasi di lapangan bahwa kedua mitra sulit mengkoordinir anggotanya untuk membidangi dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan pengolahan buah semangka sebagai produk industri rumah tangga. Ditambah lagi pihak yang memfasilitasi program pelatihan dan pembimbingan pengolahan produk belum ada selama ini. Dari aspek kemasan juga belum mendukung kelayakan konsumsi hasil panen dari mitra, karena masih dibungkus dengan plastik biasa sehingga buah semangka cepat busuk dan tidak memiliki daya tahan lama.

Permasalahan utama yang disepakati untuk dapat dipecahkan oleh tim pengusul bersama dengan mitra berupa: (1) Belum dikuasainya keterampilan pengolahan bahan baku buah semangka sebagai bahan baku untuk menghasilkan industri rumah tangga berupa makanan dan minuman berbahan dasar buah semangka; (2) Belum dimilikinya program pembukuan yang permanen secara administratif yang dapat menunjang keberlangsungan pengembangan usaha mitra;

kurangnya wawasan mitra dalam menjalin kerjasama untuk pengembangan pemasaran hasil panen buah semangka menjadi sumber permasalahan utama belum dikembangkannya relasi bisnis untuk memperluas jaringan pemasaran hasil panen, baik di tingkat daerah maupun luar daerah Bali; (4) Belum mampu didesain bentuk kemasan yang menarik dan dapat menjamin mutu buah semangka yang dipasarkan; (5) Belum tersedianya dan prasana penunjang aktifitas produksi. Syarat pokok

untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mitra yang sifatnya berkelanjutan dan sejahtera adalah mendorong terjadinya pengembangan keterampilan untuk menumbuhkan kreatifitas secara mandiri. Untuk menjadikan mitra petani semangka di kabupaten Klungkung yang mandiri dan sejahtera, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra kelompok petani Subak di Klungkung harus ditanggulangi secara efektif, efisien, dan terarah. Untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh mitra P2M, diperlukan usaha-usaha terpadu sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani semangka di Klungkung. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya, yaitu: (1) Pelatihan pembuatan dan penggunaan buah semangka untuk kreasi produk industri rumah tangga, dalam hal ini akan dilakukan pengolahan buah semangka menjadi olahan rumah tangga, seperti kripik, jaja, kue, manisan, dodol, dan sebagainya yang didilatihkan dan didampingi oleh instruktur tamu dari jurusan PKK FTK Undiksha. (2) Melakukan pendataan dan pendekatan kepada mitra untuk koordinasi program transfer ipteks untuk dimintakan kesediaannya sebagai peserta pelatihan manajemen produksi, pembukuan sederhana, dan pemasaran produk; (3) Pelatihan *public relation* kepada mitra bertujuan untuk pembekalan keterampilan dan penguasaan kemampuan menjalin komunikasi dengan organisasi subak antar daerah, menjalin relasi dengan donatur untuk menunjang pengembangan usaha, dan merintis pendirian koperasi subak yang kuat dan mandiri; (4) Pelatihan merancang desain produk yang menarik dan memenuhi standar kelayakan BPOM; (5) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang produksi.

A. TARGET DAN LUARAN

Target luaran tahunan yang meliputi aspek bisnis mitra Kelompok Petani Semangka di Kabupaten Klungkung, diantaranya meliputi: pelaksanaan proses produksi juga dibantu dengan memberikan bantuan berupa peralatan produksi seperti; blander, alat

pencetakan bolu kukus, pencetakan agar-agar, pisau iris, dan mixer. Membuatkan daftar (*list*) produk yang dihasilkan melalui pemanfaatan pembukuan sederhana secara teratur sehingga kuantitas penjualan hasil panen dapat terlihat dari tabel permintaan dan pengeluaran hasil panen oleh mitra.

Target manajemen yang dirancang selama 8 (delapan) bulan pelaksanaan P2M oleh pengusul dengan menyusun 3 (tiga) jenis pembukuan sederhana yang memuat perihal pembukuan administrasi kelompok, pembukuan mengenai jumlah stok produk yang tersedia, dan pembukuan yang mencatat hasil penjualan produk yang telah dilakukan. Menyusun standar harga berdasarkan kesepakatan antara mitra dengan distributor dan konsumen melalui nota kesepakatan kerjasama. Mendesain kemasan hasil pengolahan industri rumahan berbahan baku buah semangka.

Luaran tahunan yang dirancang untuk dapat dihasilkan selama proses penyelenggaraan IbM Kelompok Petani Semangka di Kabupaten Klungkung, 3 (tiga) jenis pembukuan sederhana, sertifikat peserta pelatihan, desain dan kemasan produk yang menarik. Selain luaran di atas, diakhir pelaksanaan P2M juga dihasilkan luaran berupa laporan akhir program P2M, artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber ISSN

METODE PELAKSANAAN Metode

pendekatan yang ditawarkan

untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama untuk kedua aspek utama dalam kurun waktu realisasi program

IbM, yaitu diantaranya: lingkup kegiatan kedua mitra secara garis besar dibagi menjadi tiga aspek kegiatan, yaitu aspek produksi, manajemen pembukuan dan pemasaran Ridwan, (2006: 88) (1) Kegiatan di aspek produksi ditekankan pada kegiatan pengolahan pasca panen raya untuk menyiasati permasalahan buah semangka busuk jika tidak laku dijual, alternatif kegiatan yang diharapkan

untuk mampu diwujudkan kepada mitra melalui transfer ipteks berupa teknologi pengolahan buah semangka menjadi penganan rumahan sehingga bernilai ekonomis dalam bentuk produk industri rumahan yang dapat dikembangkan oleh istri mitra.

Bentuk kegiatannya berupa, pengolahan jus buah semangka, pengolahan semangka menjadi permen, semangka menjadi bahan campuran kue dan makanan, kegiatan ini akan dipandu oleh instruktur tamu dari Jurusan PKK FTK Undiksha, dengan harapan dapat memberikan bekal wawasan dan keterampilan pengolahan bahan baku buah semangka menjadi berbagai kreasi kue, masakan, maupun minuman yang kaya akan vitamin C. Pelatihan dan pendampingan akan dilakukan oleh tim pengusul bersama instruktur tamu dari jurusan PKK, mulai dari tahapan bimbingan keterampilan melalui kursus pemilihan bahan selama 2 bulan, praktek pengolahan selama 2 bulan dan praktek pemasaran selama 2 bulan termasuk juga pemilihan kemasan yang menarik untuk bungkus produk, dan tahapan evaluasi 2 bulan, jadi lama waktu berlangsung selama 8 bulan dengan tingkat ketercapaian yang diharapkan sekitar 75% dari 0% keterampilan mitra. Kegiatan produksi ini bertujuan memberikan tambahan wawasan mengenai teknik pengolahan buah semangka menjadi produk makanan maupun minuman sebagai alternatif penyediaan produk hasil olahan semangka berbasis industri rumah tangga; (2) Dalam hal manajemen pembukuan, transfer ipteks tim pengusul kepada mitra dilakukan dengan cara (a) meningkatkan pengetahuan mengenai manajemen pemasaran produk; (b) mampu memiliki keterampilan dalam menyusun daftar produk dengan program pembukuan sederhana sesuai Modul Panduan Manajemen Usaha; (3) Menjalin kerjasama dengan pemilik swalayan maupun koordinator pasar untuk menentukan skala prioritas untuk perluasan jaringan pasar dan peningkatan penjualan hasil panen semangka pertiga bulan waktu panen berlangsung. (4) Merancang kemasan yang menarik, dan

memperhatikan standar kelayakan produk dari segi daya tahan dan rentang waktu boleh dikonsumsi; (5) Memberikan bantuan alat produksi pengolahan buah semangka. Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan, yaitu melalui diskusi yang dilakukan oleh Tim Pengusul program dengan mitra kedua kelompok tersebut disepakati beberapa rencana kegiatan yang merupakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kesediaan mitra untuk bekerjasama dalam melaksanakan program ini ditunjukkan dengan surat ketersediaan mitra Beberapa pendekatan yang ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra.

PEMBAHASAN

Hasil yang Dicapai

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat “IbM” dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2016 yang telah dilaksanakan program yaitu: pendidikan dan pelatihan manajemen produksi dan kewirausahaan. Hal yang masih berlangsung sampai saat ini adalah pendampingan kelompok dalam pengurusan ijin usaha perdagangan (SIUP) dengan karakteristik usaha bersama kelompok (UBK).

Berdasarkan tujuan utama dalam program pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan. Secara rinci tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan hasil perkebunan semangka secara produktif di *Subak* Pegatepan desa Gelgel kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung”. Melalui program penyuluhan ini diharapkan para petani dapat meningkatkan hasil panen, menentukan permintaan pasar dengan menyediakan produk yang lebih bervariasi, melakukan usaha intensifikasi pangan yang sadar lingkungan. Secara rinci tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk:

Meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan hasil perkebunan semangka secara produktif dengan melibatkan peran serta partisipasi ibu

rumah tangga (istri petani) untuk pengolahan industri rumah tangga berbahan baku semangka sisa hasil sortir;

Membuat inovasi baru terkait jenis produk yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi, di sektor bahan baku mentah, kuliner dan kerajinan .

Pengembangan manajemen pemasaran dengan menasar waserda, mini market ataupun hotel-hotel yang tentunya jumlah permintaannya dalam kategori berjumlah lebih banyak.

- d. Menumbuhkan pola pikir/*mindset* petani tentang pertanian ramah lingkungan dengan media bio kompos. Penetapan standar harga pasar secara koordinatif antar petani yang tergabung dalam *krama subak* dengan memantau secara intensif perkembangan segmen pasar secara rutin melalui catatan pembukuan

Manfaat Kegiatan

Berdasarkan tujuan program pengabdian masyarakat di atas, maka secara realistis implementasi program penyuluhan intensifikasi pangan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan usaha perkebunan semangka untuk menunjang peningkatan hasil usaha tani di *subak* Pegatepan desa Gelgel kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Para petani (*krama subak*), (1) penyuluhan intensifikasi pangan berwawasan lingkungan memproduksi hasil pangan untuk permintaan mentah, olahan kuliner dan usaha kerajinan yang bergerak di bidang industri rumah tangga. (2) Inovasi jenis produksi baru oleh para petani yang sifatnya lebih variatif. (3) pelatihan catatan pembukuan sederhana, maka semua modal usaha dan biaya produksi dapat terhitung dengan baik dan meningkatkan pendapatan petani sesuai dengan

pengelolaan yang dilakukan secara kelompok dengan sistem bagi hasil.

Kegiatan usahatani dengan pemanfaatan bio kompos sebagai pengganti pupuk organik.

Subak Pegatepan desa Gelgel, secara langsung program penyuluhan ini telah mendorong tumbuhnya diversifikasi usaha ekonomi yang diyakini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sistem pasar yang adil dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung, (1) dapat melahirkan kebijakan mikro e yang berpihak pada petani (krama subak). (2) peningkatan pendapatan para petani secara otomatis akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Klungkung dari sektor retribusi dan pajak pendapatan agrobisnis berwawasan lingkungan.

3. Khalayak Sasaran Strategis

Khalayak sasaran strategis dalam kegiatan ini adalah krama subak, istri petani (ibu-ibu rumah tangga) di subak Pegatepan . Disisi lain desa Gelgel merupakan salah satu desa percontohan sentra pertanian rakyat, khususnya usaha perkebunan semangka manis dan ketan. Model pengembangan setra usaha pertanian rakyat ini diharapkan untuk menjadi contoh desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Klungkung khususnya dan di propinsi Bali pada umumnya. Dalam mengembangkan usahatani sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Selain itu, kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan berbagai pihak, antara lain: (1) Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung; (2) Kesatuan Krama Subak Pegatepan, dan (3) Kepala Desa Gelgel yang masyarakatnya menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Semua pihak di atas, akan memperoleh manfaat yang sangat esensial dan aplikatif dalam kaitannya dengan upaya peningkatan wawasan pengetahuan dan keterampilan para

petani semangka untuk sadar akan arti pentingnya pemberdayaan lingkungan secara potensial dan produktif.

E. METODE PELAKSANAAN PROGRAM

Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan di lokasi rencana program ini akan dilaksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa ada seperangkat permasalahan yang saat ini dihadapi oleh para petani di *Subak* Pegatepan desa Gelgel kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung, yaitu: (1) Tingkat partisipasi kerja istri petani masih sangat minim dalam pengelolaan industri rumah tangga.

Jenis produk yang ditawarkan masih belum variatif. (3) Manajemen pemasaran yang masih lemah. (4) Pola pikir/*mindset* petani yang belum sadar lingkungan. (5)

Koordinasi kebijakan makro ekonomi yang masih belum berpihak bagi petani. Salah satu alternatif yang dipandang cukup urgen untuk dilakukan adalah dengan melaksanakan program penyuluhan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan hasil perkebunan semangka secara produktif di *Subak* Pegatepan desa Gelgel kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung. Melalui program penyuluhan ini diharapkan para petani dapat meningkatkan hasil panen, menentukan permintaan pasar dengan menyediakan produk yang lebih bervariasi, melakukan usaha intensifikasi pangan yang sadar lingkungan. Tingkat ketahanan pangan di rumah tangga dan individu dapat terpenuhi. Masalah-masalah distribusi dan mekanisme pasar yang berpengaruh pada harga, daya beli rumah tangga yang berkaitan pendapatan rumah tangga. Memiliki pemahaman tentang tata cara berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam menentukan pola harga dan perlu acuan catatan

pembukuan yang jelas untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan modal awal, biaya produksi, biaya pengiriman, menentukan harga jual yang sesuai dengan biaya produksi dan menentukan laba rugi usaha yang dilakukan. Secara langsung program penyuluhan ini telah mendorong tumbuhnya diversifikasi usaha ekonomi yang diyakini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Metode Pelaksanaan Program

Sesuai dengan fokus masalah dan tujuan dari kegiatan ini, maka metode yang digunakan adalah metode penyuluhan terprogram dengan sistem kelompok yang bersifat terminal. Artinya untuk melatih petani *subak* Pegatepan desa Gelgel akan dilakukan program pelatihan secara terjadwal kepada setiap kelompok petani. Pelatihan tersebut akan menggunakan sistem kelompok, dimana kepada setiap kelompok petani termasuk istri petani akan diberikan satu paket program pelatihan yang dilakukan secara demokratis, yang diawali dengan pengenalan pengetahuan dan keterampilan tentang intensifikasi pangan, keterampilan tata boga dan kerajinan, teknik pembukuan sederhana, kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung menerapkan intensifikasi pangan membuat pupuk kompos, pengolahan kuliner dan kerajinan serta menyusun pembukuan sederhana dengan tutor dari Undiksha Singaraja. Kemudian kepada mereka akan dikondisikan untuk bisa mengikuti kegiatan yang diprogramkan dalam penyuluhan secara mandiri dengan tetap didampingi oleh tim pelaksana/tutor. Rentang waktu pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap pengajuan proposal, perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dengan melibatkan petani *subak* Pegatepan desa Gelgel kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini.

Adapun materi yang diberikan selama pelatihan meliputi : (1) pentingnya usaha

intensifikasi pangan, (2) manajemen pemasaran, (3) pemberdayaan lingkungan dengan teknologi tepat guna serta (4) pembukuan sederhana dalam usaha, (5) keuntungan penggunaan penetapan harga standar dalam segmen pasar antar petani, (3) penghitungan modal usaha dan harga jual dengan sistem pembukuan dan (4) dokumentasi alat-alat produksi melalui pembukuan.

3. Model Latihan

Pengembangan model pelatihan intensifikasi pangan, manajemen pasar, pemanfaatan teknologi tepat guna dan penyusunan pembukuan sederhana dan penghitungan laba rugi sistem kelompok bagi para petani di *subak* Pegatepan desa Gelgel, akan diawali dengan orientasi lapangan, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, studi literatur, dan oprasionalisasi kegiatan. Orintasi lapangan dan identifikasi masalah adalah cara untuk lebih mengenali masalah yang dihadapi oleh para petani di *subak* Pegatepan desa Gelgel, sehingga dari sana bisa dicarikan alternatif pemecahan masalahnya. Kegiatan selanjutnya adalah mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh para petani semangka melalui studi literatur. Terakhir adalah pelaksanaan program sebagaimana telah disepakati bersama. Untuk memperlancar pelatihan dengan sistem kelompok ini, maka para petani semangka yang ada di *subak* Pegatepan desa Gelgel akan dibagi menjadi empat kelompok. Masing-masing kelompok akan mendapatkan paket pelatihan dengan materi yang sama.

F. PENUTUP

1. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat "IbM KelompokKelompok Petani Semangka di Klungkung berupa Tingkat partisipasi yang tinggi dari mitra program pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program, terlihat dari pelatihan. Pelaksanaan program

mampu menghasilkan luaran-luaran yang diharapkan oleh program pengabdian kepada masyarakat.

2. Saran

Tingginya kreatifitas kelompok Kelompok Petani Semangka di Klungkung dalam mengolah hasil kebun menjadi hasil olahan kuliner mendapatkan perhatian khusus, sehingga menjadi keberlanjutan program dari kegiatan “IbM Kelompok Kelompok Petani Semangka di Klungkung .

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.

**PUTUSAN MUDP BALI NO. 01/KEP/PSM-3MDP
BALI/X/2010 SEBAGAI LEGITIMASI FORMAL ANAK
PEREMPUAN BERHAK MEWARIS DI KABUPATEN
BULELENG**

Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windari
Universitas Pendidikan Ganesha
Email: sariadnyani@yahoo.co.id

ABSTRACT

The background of this research is the study of the legal status of women Bali weak in terms of inheritance, since according to the Customary Law Bali rightful heir only male offspring and the families of men and men adopted children .. Women in the Indigenous and Tribal Peoples Bali still suffer discrimination in terms of the provisions law. One study saw the normative regulation as if there is a gap between what terumus in Customary Law on the one hand and national law on the other (legal dualism) were contradictory. In the daily reality always can be found women who experience discrimination in terms of inheritance, and do not have access to State Courts.

In general, this study aims to (1) to determine the causal factors that in some parts of Buleleng before MUDP never be a conflict of inheritance; (2) to determine the importance of a formal legitimacy to the verdict MUDP. (3) To determine the inheritance model of policy formulation. This study was conducted over two years, from 2015 until 2016. The output of the study described as follows: (1) the outcome of the first: the design and development of policy on a more customary provisions guaranteeing women's rights by law (2) the outcome of

scientific articles in journals accredited national / international as Pandecta law journal, and recommendations with regard to the referral draft academic paper designed by the researchers to be proposed to the relevant agencies as a reference in determining this hukum. Penelitian using empirical juridical approach with regard to room the scope of legal science. This research is located in Buleleng regency. Given that the research objectives are broad and complex then the first and second year of this research will be applied to the review of the effectiveness of the Decision MUDP. For some aspects of the decisions concerning the sociological aspects of research sosiolegal analysis is required in every design in order to realize the legal justice for the people.

Keywords: *Discrimination treatment, Customary Law, Policy, Decisions, Contradictory, heir, Women Bali.*

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah kajian terhadap status hukum perempuan Bali lemah dari segi pewarisan, karena menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki. Wanita di dalam Hukum Adat Masyarakat Bali masih mengalami diskriminasi dari segi ketentuan hukum. Salah satu kajian melihat pengaturan yang normatif seolah-olah terdapat jurang antara apa yang terumus dalam Hukum Adat di satu sisi dan Hukum Nasional di sisi yang lain (dualisme hukum) yang kontradiktif. Pada kenyataan sehari-hari selalu saja dapat dijumpai perempuan-perempuan yang mengalami diskriminasi dalam hal waris, dan tidak mempunyai akses kepada Peradilan Negara.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui faktor penyebab bahwa di sebagian wilayah Buleleng sebelum MUDP pernah terjadi konflik pewarisan; (2) untuk mengetahui pentingnya legitimasi secara formal terhadap putusan MUDP. (3) Untuk mengetahui model formulasi kebijakan pewarisan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Luaran penelitian dijabarkan sebagai berikut: (1) luaran tahun I: perancangan dan pengembangan kebijakan tentang ketentuan adat yang lebih menjamin hak-hak perempuan secara hukum; (2) luaran tahun II: artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/internasional seperti jurnal Hukum Pandecta, dan rekomendasi yang berkaitan dengan rujukan draft naskah akademik yang dirancang oleh peneliti untuk diusulkan ke instansi terkait sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang berkaitan dengan ruang lingkup ilmu hukum. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Buleleng. Mengingat bahwa sasaran penelitian bersifat luas dan kompleks maka pada tahun pertama dan kedua penelitian ini akan diaplikasikan pada peninjauan kembali terhadap efektifitas Keputusan MUDP. Untuk beberapa aspek keputusan yang menyangkut aspek sosiologis maka dibutuhkan analisis sosiolegal research dalam setiap rancangannya dalam rangka mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat. Hasil penelitian: (1) Sistem purusa yang berlaku pada masyarakat Bali menyebabkan perempuan Bali bukan merupakan ahli waris; (2) Legitimasi adat Bali tentang pewarisan terhadap perempuan Bali dikukuhkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung; (3) Model formulasi kebijakan pewarisan berbasis gender dalam hukum Adat Bali yang memberikan kesempatan bagi perempuan Bali mewaris berdasarkan Keputusan dari MUDP Bali No. 1 Tahun 2010.

Kata Kunci: Diskriminasi Perlakuan, Hukum Adat, Kebijakan, Keputusan, Kontradiktif, Mewaris, Perempuan Bali.

A.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Merujuk pada ketentuan konstitusi yang memberikan ruang gerak pengaturan untuk skala kebijakan di tataran masyarakat lokal yang masih kental terikat dengan adat, hukum adat dinilai mampu membawa pengaruh positif dengan pelibatan unsur masyarakat lokal dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini berlangsung dari terbitnya Perda No.03 tahun 2001 tentang Desa Pakraman menjadi cikal bakal perhatian pemerintah terhadap kesatuan masyarakat adat secara menyeluruh dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan notabene pluralisme hukum. Pada dasarnya realisasi Keputusan Adat dalam penerapannya sampai dengan sekarang penting untuk dilakukan peninjauan mengingat masyarakat adat dihadapkan pada berbagai masalah klasik

antara lain lemahnya sanksi adat, banyak keputusan yang dinilai masih kontradiksi dengan tingkat kebutuhan hukum masyarakat adat, kurang pemahaman terhadap substansi kebijakan karena kurang adanya sosialisasi dari pihak prajuru adat, masih terjadi diskriminasi perlakuan terhadap kaum perempuan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama keterbatasan kaum perempuan yang kurang memiliki pemahaman tentang tata cara beracara di muka pengadilan.

Kondisi sosial budaya matri lokal yang masih dinilai mengalami diskriminasi dapat dilihat dari gambaran perihal waris yang ditentukan dengan mendasarkan pada garis keturunan laki-laki. Bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan dan sama sekali tidak diberikan keturunan anak laki-laki, maka dianggap ini sebuah malapetaka, nasib tidak mujur dan berbagai makna yang

mengkhawatirkan, Anak perempuan, tidak sebagai penerus keturunan dalam Hukum Hindu pada Masyarakat Adat di Bali yang menganut sistem patrilineal. Apabila terjadi perkawinan di luar lingkungan keluarga purusha (sistem keturunan laki-laki), maka ia tidak mendapatkan hak terhadap harta kekayaan orang tuanya. Anak laki-laki yang mewarisi semua harta warisan, keturunan, membayar hutang orang tua, dan melakukan upacara kematian ngaben jika orang tua meninggal, sebab anak laki-laki sebagai garis purusha (sistem keturunan laki-laki) yang dipersiapkan untuk melanjutkan keturunan. Tidak demikian dengan nasib dan kedudukan anak perempuan, apabila anak perempuan menikah dengan orang yang bukan dalam garis purusha (sistem keturunan laki-laki) maka ia dianggap sudah keluar dari lingkungannya (clan, soroh atau marga), maka anak perempuan tidak memiliki kewajiban terhadap orang tua dan clannya. Hal tersebut menyebabkan wanita tidak diberikan hak untuk mewaris. Hanya jika saudara prianya mengikhlaskan untuk memberikan suatu pemberian sama rata atau memilih untuk tidak menikah sepanjang hidup atau wanita dapat berposisi purusha (sistem keturunan laki-laki) apabila perkawinan dilakukan dengan sistem nyentana (Wibawa, 2006 : 98-99).

Hal ini memberikan gambaran relasi timpang dalam aspek *gender* antara perempuan dan laki-laki pada sistem pewarisan adat di Bali sangat jelas terungkap bahwa kedudukan perempuan Bali sangat subordinatif terhadap laki-laki Bali, dan gerakan dari laki-laki untuk mengukuhkan proses itu sangat kuat. Hal tersebut menimbulkan keluhan-keluhan dari kaum perempuan di Bali terhadap ketidakadilan keadaan tersebut, sementara itu dalam berbagai instrumen Peraturan Perundangan Nasional telah terumus berbagai instrumen hukum yang menjamin persamaan hak antara wanita dan pria. Melihat pengaturan yang normatif seolah-olah terdapat jurang antara apa yang terumus dalam Hukum Adat di satu sisi dan Hukum Nasional di sisi yang lain,

Subekti (1991 : 4). Pada kenyataan sehari-hari selalu saja dapat dijumpai perempuan-perempuan yang mengalami diskriminasi dalam hal waris, dan tidak mempunyai akses kepada Peradilan Negara, Irianto (2005 : 4). Keadaan terhadap perlakuan yang diskriminatif ini kemungkinan besar masih diterima oleh banyak perempuan Bali yang dengan pasrah menerima Hukum Adat tersebut, dalam perkara-perkara di pengadilan terhadap pembagian waris di Bali banyak hakim yang memutus perkara dengan berpedoman pada Hukum Adat tersebut. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung M.A. tgl.3-12-1958 No.200 K/Sip/1958 menurut Hukum Adat Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli waris ialah hanya keturunan laki-laki dari pihak keluarga laki-laki dan anak angkat lelaki. Yurisprudensi Mahkamah Agung M.A tgl. 1-6-1955 No. 53 K/Sip/1952 menetapkan menurut Hukum Adat di Bali, jika seseorang wafat meninggalkan seorang anak laki-laki, maka anak itu adalah satu-satunya ahli waris, yang berhak untuk mengajukan gugatan tentang peninggalan almarhum bapaknya.

Perkembangan terakhir mulai 2010 sampai dengan sekarang, Masyarakat Adat Bali telah mengalami perkembangan khususnya terhadap persamaan hak dalam pewarisan bagi perempuan Bali yang telah diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KeP/Psm-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010, tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).

Salah satu implementasi keputusan MUDP ini terlihat di Kota Denpasar, di mana di Denpasar Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/ KeP/ Psm-3/ MDPBali/ X/ 2010 ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Bali di Desa Pakraman mereka. Hasil keputusan MDP (Majelis Desa Pakraman) Bali

ini merupakan pilihan hukum di dalam proses pembagian waris bagi anak perempuan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kajian empiris di atas, maka permasalahan pokok dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah legitimasi formal terhadap putusan MUDP? (2) Bagaimanakah model formulasi kebijakan pewarisan terhadap perempuan Bali berhak mewaris?

Tujuan Khusus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kajian empiris di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut: (1) untuk mengetahui legitimasi formal terhadap putusan MUDP; (2) untuk mengetahui model formulasi kebijakan pewarisan terhadap perempuan Bali berhak mewaris.

4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Hukum Adat memberikan pengaruh daya ikat bagi masyarakat adat dalam menjalankan setiap aktifitas adat yang senantiasa berpedoman atas hasil pemufakatan bersama seperti yang terselenggara pada proses pesamuan yang ditetapkan oleh para pemangku kebijakan adat yang dalam hal ini adalah Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali.

Berdasarkan eksplorasi peneliti, belum ada penelitian lain yang melakukan kajian tentang penelitian ini dalam bentuk skripsi, tesis atau penelitian yang lain. Namun demikian, ada beberapa tulisan lain yang mirip dengan tema ini, yaitu terhadap penelitian yang berjudul:

Penelitian Rimawati, Sasmita (2012) mengenai Pengembangan Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Bali. Berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP mengkaji mengenai proses pembuatan hingga berlakunya Keputusan Pasamuan Agung III MUDP BALI No. 01/Kep/PsM-3/MDP

BALI/X/2010, serta pembagian waris bagi wanita dalam Hukum Waris Adat Bali, Sedangkan untuk merancang kebijakan menyesuaikan dengan langkah teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang mengacu dari naskah akademik. Output dari realisasi terhadap hasil dari ide dan karya nyata yang dibuat oleh Majelis Utama Desa Pakraman, tokoh, pemerhati Hukum Adat Bali dan pemerhati perempuan berdasarkan partisipasi dan keikutsertaan seluruh Majelis Desa Pakraman kabupaten maupun kecamatan mengenai kedudukan perempuan di Bali.

Penelitian Maya Kania, “Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Karo Menurut Hukum Adat (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1542/K/Pdt/1999” tanggal 24 Mei 2000)”, Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan dan meletakkan alternatif pemecahan terhadap pembagian waris bagi wanita dalam Hukum Waris Adat Bali.

Persamaan penelitian yang dilakukan penelitian dengan peneliti lain adalah “analisis yuridis terhadap hak waris anak perempuan menurut hukum adat”. Beranjak dari proposisi di atas, tampak bahwa masyarakat Hindu Bali sedang mengalami masalah, karena disatu sisi setiap keluarga harus mempunyai ahli waris dan penerus keturunan keluarga, namun di sisi lain belum ada awig-awig desa adat yang berlaku secara umum pada masyarakat Hindu Bali yang mengatur perihal waris. Kondisi ini, menjadikan perempuan Bali mengalami berbagai permasalahan, yang berkaitan dengan legalitas formalnya, secara adat dan hukum. Bahkan di beberapa daerah, seperti Singaraja, Karangasem, Negara, kurang mengetahui hasil pesamuan MUDP Provinsi Bali. Peran Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali penting kiranya dalam mensosialisasikan hasil pesamuan kepada pemangku desa adat untuk pemantapan pemahaman mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan adat.

Sementara penelitian ini akan lebih diarahkan pada realisasi isi Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali No. 01/Kep/PsM-3/MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010 dengan melakukan kajian terhadap substansi keputusan dalam hubungannya dengan tingkat keberterimaan masyarakat dalam penerapan keputusan tersebut dan daya ikat keputusan tersebut dalam hal mengatur perihal hak perempuan Bali berhak mewaris. Di sisi lain, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal penetapan keputusan adat secara prosedural formal di Kabupaten Buleleng. Disamping itu, penelitian ini juga akan memberikan nilai manfaat yang mendasar dalam kaitannya dengan bagaimana pengambilan keputusan bagi penentuan hak waris perempuan yang selama ini belum memperoleh perhatian secara maksimal. Semua hal tersebut nantinya akan dijabarkan dalam rancangan naskah ilmiah akademis berupa jurnal ilmiah terakreditasi dengan kajian terhadap realisasi isi keputusan MUDP Provinsi Bali yang menyelaraskan pada *decision tree* untuk penentuan daya ikat ketentuan perihal hak mewaris perempuan Bali sebagai luaran inovatif dari penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pengkajian terhadap realisasi Keputusan Pasamuhan Agung MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Pendekatan yuridis empiris diterapkan dalam lingkup penelitian yang berkaitan dengan kegiatan analisis yang dilakukan menggunakan metoda-metoda analisis yang bersifat teoritis atau normatif. Pendekatan ini digunakan untuk

menghasilkan usulan atau konstruksi formulasi kebijakan yang dapat memecahkan masalah.

Pendekatan empiris: diterapkan dalam rangka menjustifikasi hasil kegiatan analisis dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan pendekatan teoritis dan evaluatif. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menjelaskan sebab akibat dari suatu kebijakan. Dalam pendekatan ini digunakan metoda-metoda yang dapat menjelaskan hubungan sebab akibat berdasarkan analisis kondisi faktual yang diperoleh dari observasi terhadap gejala-gejala yang timbul.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa rasional, yaitu: (1) untuk mengungkap efektifitas keberlakuan hukum dalam lingkup masyarakat adat terutama menyangkut perihal status perempuan berhak mewaris dilihat dari segi daya ikat keputusan MUDP dalam hal pembagian warisan bagi perempuan yang dijalankan masyarakat Bali di Kecamatan sampel kecamatan di Kabupaten Buleleng setelah berlakunya Keputusan Pasamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KeP/PsM-3/MDP Bali/X/2010. (2) hampir di sebagian wilayah Buleleng pernah terjadi konflik adat yang disulut oleh permasalahan perempuan berhak mewaris, (3) sampai saat ini hampir di Kabupaten Buleleng belum melegitimasi secara yuridis formalefektifitas realisasi isi keputusan MUDP tersebut, sehingga sering menjadi pemicu terjadinya konflik pewarisan dan konflik penerusan keturunan serta konflik adat. Berdasarkan rasional di atas, maka penelitian ini dilihat dari lokasi pelaksanaannya memilih Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian.

Teknik Penentuan Sampel

Obyek penelitian adalah Realisasi Isi Keputusan MUDP ada di Kabupaten Buleleng. Data primer terangkum dalam studi pendahuluan, data tersebut dikumpulkan melalui kunjungan langsung ke objek penelitian guna mendapatkan data yang

diperlukan, yaitu dengan cara wawancara terstruktur dan sistematis dengan distribusi angket selaku sebaran informasi serta diperkuat dengan acuan observasi ke lapangan. Data diambil bukti otentik dokumen keputusan MUDP yang dijadikan pedoman pengkajian realisasinya oleh penelitian. variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas adalah Keputusan Pasamuan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KeP/PsM-3/MDP Bali/X/2010. Sedangkan, variabel terikatnya adalah kedudukan perempuan Bali dalam memperjuangkan hak mewaris. Data primer diperoleh dari Analisis perilaku pelaku pelaksana keputusan MUDP termasuk masyarakat yang disasar keberlakuan keputusan MUDP tersebut. Data sekunder : dari data yang diambil dari Majelis Desa Pakraman di lokasi penelitian, referensi yang relevan dengan topik penelitian, dari studi literatur atau studi kepustakaan (*desk research*), data pemangku kebijakan prajuru adat desa pakraman maupun warga adat, Identifikasi produk-produk di lokasi penelitian, laporan hasil studi atau kajian terdahulu, publikasi yang relevan dan terkait.

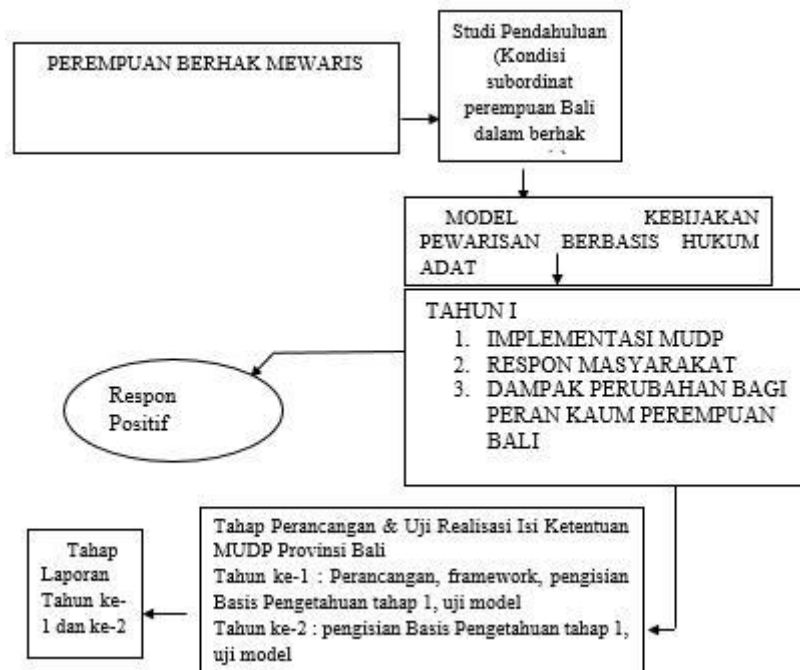
3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis data kualitatif hasil penelusuran data: (1) Data jenisbahan hukum berupa Keputusan MUDP, Data monografi desa, (2) Studi empiris yang mencakup studi, terhadap kebijakan publik,

sumberdaya aparatur adat dalam hal perancangan, pengusulan, proses, pembahasan, dan penetapan keputusan publik, (4) Evaluasi terhadap Aplikasi.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan data, yaitu: (1) wawancara, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) kuisioner. Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data data kuantitatif. Keseluruhan data ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan statistik sesuai dengan karakteristik data yang dibutuhkan untuk mengurai masing-masing permasalahan penelitian.

Sacara paradigmatik bagan alir penelitian ini dapatdigambarkansebagai berikut:



PEMBAHASAN

Legitimasi Formal terhadap Putusan MUDP

Dalam hukum adat waris di Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka kedudukan anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Namun kalau kita simak dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961, yang menentukan sebagai berikut: “Berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakekat persamaan hak antara pria dan wanita dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang yang meninggalkan waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam harta bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”.

Walaupun keputusan Mahkamah Agung ini untuk masyarakat Tanah Karo, tetapi karena dianggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, berarti juga termasuk di Bali. Sehingga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa kedudukan anak perempuan Bali adalah sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki. Juga kalau kita simak keputusan Mahkamah Agung No.100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 yang menyatakan: “karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung”. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan bahwa anak perempuan dan janda dinyatakan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Walaupun keputusan dari Mahkamah Agung itu merupakan suatu produk hukum yang berlaku secara umum di Indonesia, namun untuk masyarakat adat Bali masih tetap

mempertahankan ketentuan dalam hukum waris adat yang berlaku sebelumnya yaitu yang menentukan bahwa kedudukan anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Karena pada lazimnya perubahan hukum dilaksanakan atas pertimbangan bahwa hukum yang lama sudah tidak sesuai

lagi dengan perasaan keadilan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tetapi terhadap keputusan Mahkamah Agung itu dilakukan perubahan hukum di dalam hukum yang masih tetap hidup dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, dirombak dan digantikan dengan suatu hukum baru yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sehingga sudah pasti tidak dapat diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan dengan cepat dan spontan.

Selain keputusan Mahkamah Agung tersebut, dewasa ini pewarisan pada masyarakat Bali telah mengalami perkembangan khususnya terhadap persamaan hak dalam pewarisan bagi perempuan hindu Bali, yaitu yang diatur dalam keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) No.01/Kep/Psm-3/MDP Bali /X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 tentang hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pakar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof.Dr.Wayan P.Windia, S.H.,M.Si, yang menentukan sebagai berikut: Sesudah tahun 2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3 MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010, Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris *purusha* setelah dipotong 1/3 untuk *harta pusaka* dan kepentingan pelestarian. Hanya jika perempuan Bali yang pindah ke agama lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas maka tetap terbuka dengan memberikan *jiwa dana* atau bekal sukarela.

Jika melihat fenomena perubahan tersebut seharusnya perempuan Hindu Bali yang telah menikah dan tidak menjadi *purusa* berhak untuk mendapatkan warisan dari harta orangtua maupun suaminya. Namun dalam

implementasinya memerlukan waktu yang relatif lama serta perjuangan yang tidak mudah dikarenakan hal tersebut menyangkut masalah tradisi yang sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Bali. Sehingga dalam pelaksanaannya sekarang terhadap kedudukan perempuan dalam sistem waris adat Bali masih berpatokan pada ketentuan dari hukum adat yang sudah ada dari jaman dahulu di mana perempuan bukan berkedudukan sebagai ahli waris sehingga ia tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua maupun suaminya. Namun meskipun anak perempuan bukan berkedudukan sebagai ahli waris, akan tetapi ia berhak juga menikmati atas bagian dari harta warisan orang tuanya selama tidak terputus haknya. Adapun kehilangan hak menikmati dari harta warisan itu dapat terjadi apabila anak perempuan itu: a.) Kawin keluar dan b.) Dipecat sebagai anak oleh orang tuanya.

2. Model Formulasi Kebijakan Pewarisan

Perkembangan dankemajuan jaman serta semakin gencarnya diserukan persamaan gender atau persamaan emansipasi antara laki-laki dengan perempuan yang tujuannya adalah menempatkan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama antara anak laki-laki maupun dengan anak perempuan, maka ketentuan yang ada dalam hukum waris adat Bali menjadi tidak adil bagi anak perempuan Hindu. Karena pada jaman sekarang, bukan hanya anak laki-laki saja yang bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dari orang tuanya, tetapi anak perempuan pun sekarang banyak ikut memegang andil dalam menanggung kewajiban-kewajiban dari orang tuanya. Namun karena tidak ada perubahan yang secara fundamental atas ketentuan dalam hukum waris adat Bali maka ketentuan tersebut tetap berlaku dan berjalan.

Walau pada hakekatnya anak perempuan bukan ahli waris menurut hukum adat waris Bali, namun dalam kenyataannya ada anak perempuan yang berhak untuk mendapat bagian harta kekayaan orang tuanya dan ada yang tidak berhak untuk menjadi ahli

waris dari harta kekayaan orang tuanya. Sehubungan dengan hal tersebut maka akan dibahas mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum adat waris Bali, yang meliputi:

Anak Perempuan Sebagai Penerima Waris.

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa hukum adat mengenal adanya perubahan-perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki. Dengan adanya perubahan status tersebut maka perempuan dalam perkawinannya ia berstatus sebagai suami. Perempuan yang demikian disebut perkawinan *kaceburin* dan perempuan yang berubah status tersebut disebut dengan *Sentana Rajeg*. Disamping adanya perubahan status hukum adat juga mengenal sistem pengangkatan anak, yang mana pengangkatan anak juga merupakan jalan

keluar bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki atau sama sekali tidak mempunyai keturunan. Pengangkatan anak ini juga merupakan upaya untuk meneruskan generasi.

Jadi dengan adanya perubahan status bagi perempuan, maka bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki tetap akan mempunyai ahli waris yang akan mewarisi harta kekayaannya. Karena dengan adanya perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki maka juga akan merubah hak dan kewajibannya di dalam keluarga yang bersangkutan. Perempuan yang berubah status yang disebut dengan *sentana rajeg* maka akan mempunyai hak untuk mewarisi. Hal ini telah menjadi Yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Juli 1961 Nomor 81/ptd/1976/pdt, dan putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar tanggal 18 Agustus 1970 Nomor 2/PTD//1979/pdt, yang berbunyi “anak angkat (*sentana*) menurut Hukum Adat Bali adalah ahli waris dari orang tua angkatnya.

Dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya perempuan bisa menjadi ahli waris dengan jalan perubahan status yaitu dari status perempuan menjadi status laki-laki. Jadi agar

anak perempuan dapat menerima harta warisan sebagai pemberian nafkah hidup bahkan dapat menjadi ahli waris apabila anak perempuan tersebut diberi status sebagai *Sentana Rajeg* dan memilih bentuk perkawinan kaceburin.

Juga dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 100/Sip/1967, tanggal 14 Juni 1968, menyatakan bahwa “karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan Yurisprudensi yang dianut oleh mahkamah Agung”. Dari kedua Keputusan mahkamah Agung tersebut, maka seorang anak perempuan dan janda harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari orang tuanya, karena Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 dianggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia termasuk Bali, dimana keputusan tersebut harus dianggap mengikat.

Di dalam kenyataannya, masyarakat Bali pada umumnya masih mempertahankan hukum adat lama yaitu masih mempertahankan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak untuk menjadi ahli waris. Tetapi dari sudut pandang lain, dapat ditemukan bahwa masyarakat adat Bali banyak melakukan terobosan-terobosan terhadap ketentuan hukum adat waris Bali tersebut. Adapun bentuk terobosan yang dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan beberapa harta yang dimiliki oleh pewaris kepada anak perempuannya. Pemberian ini diberikan sebagai pengupa jiwa atau bekal hidup kepada anak perempuannya, istilah lain juga disebut dengan tetatadan.

Semua ini secara materiil memang bisa disamakan dengan hibah yang diukenal dalam hukum perdata barat. akan tetapi berhak atas bagian harta warisan selama tidak terputus haknya tersebut yang besarnya 1:2 dengan bagian warisan anak laki-laki”.

Dari konsep-konsep yang telah diuraikan tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa walaupun pada hakekatnya perempuan bukan ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali,

namun perempuan berhak mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya, dimana dalam praktek pemberian tersebut dipergunakan dengan berbagai macam istilah diantaranya harta tetatadan, bekal hidup, pengupa jiwa dan juga disebut jiwa dana. Sesungguhnya dengan pemberian orangtua kepada anaknya yang perempuan, di dalam kitab agama Pasal 263 disebutkan: “apabila saat masih hidup sorang laki-laki memberikan barang kepada bininya atau kepada anaknya serta sudah diberitahukan dengan terang kepada anak-anaknya dan bininya yang lain, maka pemberian jiwa dana namanya. Maka anak-anak yang lain tiada boleh menuntut jiwa dana itu melainkan yang mendapatkannya tetap berkuasa atas kekayaan itu”.

Jadi dilihat dari ketentuan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa orang tua dapat memberikan harta kekayaan kepada anak perempuannya dengan jalan hibah atau jiwa dana yang nantinya akan digunakan sebagai bekal hidup bagi anak perempuannya yang telah kawin keluar. Pemberian orang tua kepada anak perempuan yang berupa hibah (jiwa dana) baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, maka barang-barang tersebut tetap melekat maupun menjadi hak dari anak tersebut, walaupun ia nantinya ia kawin keluar.

Sebagai konsekuensi dianutnya sistem kekeluargaan Patrilineal maka peranan perempuan dalam hubungannya dengan harta warisan tidaklah begitu besar. Bahkan pendapat umum dimasyarakat hingga sekarang belum dapat memberikan hak untuk mewaris kepada anak perempuan. Namun demikian tidaklah berarti anak perempuan sama sekali tidak mendapat harta kekayaan orang tuanya, sebab dikalangan orang tua yang mampu maka pada saat anak perempuannya melangsungkan perkawinannya, diberikanlah hadiah. Hadiah ini

disebut bebaktaan, isisnya ketupat, bekel dan ada juga yang disebut istilah tetatadan. Hadiah ini dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak dapat

berupa tanah tegalan dan tanah sawah. Namun dalam masyarakat kebanyakan hadiah tersebut berupa barang-barang yang bergerak, misalnya: berupa perhiasan, maupun perabot rumah tangga. “Perkawinan keluar dari anak perempuan tersebut yang dikenal dengan istilah “*Putri Ninggalin Kedaton* (seorang putri yang meninggalkan istana), oleh karenanya tidak mendapatkan hak untuk mewaris.”

Sedangkan bagi anak perempuan yang belum kawin keluar, maka setelah orang tuanya meninggal dunia maka anak perempuan tersebut mendapatkan bagian-bagian dari warisan

orang tuanya dengan syarat harta warisan yang diterimanya tersebut tidak dapat diperjual belikan, namun hanya dapat menikmati hasilnya saja. Sesungguhnya dengan pemberian orang tua kepada anaknya yang perempuan, di dalam kitab agama Pasal 263 disebutkan: “apabila saat masih hidup seorang laki-laki memberikan barang kepada bininya atau kepada anaknya serta sudah diberitahukan dengan terang kepada anak-anaknya dan bininya yang lain, maka pemberian jiwa dana namanya. Maka anak-anak yang lain tiada boleh menuntut jiwa dana itu melainkan yang mendapatkannya tetap berkuasa atas kekayaan itu.

Jadi dilihat dari ketentuan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa orang tua dapat memberikan harta kekayaan kepada anak perempuannya dengan jalan hibah atau jiwa dana yang nantinya akan digunakan sebagai bekal hidup bagi anak perempuannya yang telah kawin keluar. Pemberian orang tua kepada anak perempuan yang berupa hibah (jiwa dana) baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, maka barang-barang tersebut tetap melekat maupun menjadi hak dari anak tersebut, walaupun ia nantinya ia kawin keluar.

D.PENUTUP

1. Kesimpulan

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang yang meninggalkan waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam harta bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”. Keputusan Mahkamah Agung ini untuk masyarakat Tanah Karo, tetapi karena dianggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, berarti juga termasuk di Bali. Sehingga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa kedudukan anak perempuan Bali adalah sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki. Juga kalau kita simak keputusan Mahkamah Agung No.100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 yang menyatakan: “karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung”. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan bahwa anak perempuan dan janda dinyatakan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Model formulasi kebijakan pewarisan di Bali dapat berupa persamaan gender atau persamaan emansipasi antara laki-laki dengan perempuan yang tujuannya adalah menempatkan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama antara anak laki-laki maupun dengan anak perempuan.

2. Saran

Dimulai setelah dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KeP/PsM-3/MDP Bali/X/2010 wanita di Bali sudah berhak mewaris dengan sendirinya tanpa adanya proses hibah wasiat, penunjukan maupun pemberian yang bersifat sementara. Keputusan ini dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mendapatkan hak bagi wanita di dalam pewarisan, apabila wanita menginginkannya. Notaris PPAT diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum dan informasi mengenai

perkembangan Hukum Waris di Bali kepada klien yang membutuhkan. Masalah mengenai pewarisan sudah semestinya diatur di dalam satu aturan yang seragam dan jelas sehingga tercipta suatu kepastian hukum.

Sengketa terhadap hak mewaris tidak saja dapat diselesaikan melalui ranah hukum pengadilan tetapi juga dapat diselesaikan melalui cara musyawarah keluarga atau musyawarah adat. Namun yang terpenting di dalam penyelesaian sengketa kewarisan harus senantiasa menjaga kerukunan dan keharmonisan di antara anggota keluarga. Selain itu Kepala Desa Adat di lingkungan Majelis Desa Pakraman kecamatan, maupun kabupaten dan Hakim sebaiknya lebih aktif di dalam mengikuti informasi khususnya mengenai perkembangan pewarisan di Bali. Agar dapat menyelesaikan sengketa pewarisan dengan adil dan mengikuti perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, Luh Putu. 2011. Kesetaraan Dalam Hukum Adat
Bali <http://www.balisruti.or.id/kesetaraan-dalam-hukum-adat-bali.html>.
Diakses tanggal 28 Juni 2013. Pukul 14.00 Wita.
- Aripta Wibawa, Made. 2006. *Wanita Hindu Sebuah Emansipasi Kebablasan*. Denpasar: PT Empat Warna Komunikasi.
- Bali Post. 2013. *Wanita Bali Multi Fungsi tetapi Dipinggirkan*.
<http://www.balipost.co.id/mediadet ail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=62487>. Diakses tanggal 28 Juni 2013. Pukul 14.05 Wita.
- Bayu Krisna, I Gusti Ngurah. 2011. *Cara Pembagian Menurut Adat Hindu Bali*.
<http://www.balipost.co.id/mediadet ail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=62487>. Diakses tanggal 28 Juni 2013. Pukul 14.30 Wita.
- Fahmi, I. 2014. *Etika Bisnis; Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal [Balisruti.2011. Suara Millenium Development Goals.\(MDGs\), Edisi No. 1 Januari-Maret 2011.](#)
- Ilman Hadikusuma. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- Maya Kania, 2000. *Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Karo Menurut Hukum Adat (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1542/K/Pdt/1999" tanggal 24 Mei 2000*. Yogyakarta: Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.
- Ridwan Halim. 1985. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rimawati, Tody Sasmitha. 2012. *Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Bali Berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali*. Yogyakarta: Laporan akhir penelitian, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada
- Subekti. 1991. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung* cetakan ke 4. Bandung: Alumni.
- Sulistyowati Irianto. 2005. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.\
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wolk, H. I., Tearney, M. G., Dodd, J. L. 2001. *Accounting Theory. A Conceptual and Institutional Approach*. South-Western College Publishing, 5th Edition.
- Wayan P.Windya, 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi

dan Publikasi Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
Windia., Wayan P. <http://hukum> online.com.
2014. *Hak Waris Perempuan*

Menurut Hukum Adat Bali.
Denpasar: Artikel Ilmiah FH
UNUD.

PANYELAMAN: MERAWAT KERUKUNAN ANTARUMAT AGAMA MELALUI DIALOG KULINER (STUDI KASUS DI DESA MELAYA, MELAYA, JEMBRANA, BALI)

Tuty Mariyati¹, Luh Putu Sri Ariyani², Nengah Bawa Atmadja³

¹Jurusan Pendidikan Sejarah, FHIS, Undiksha; ²Jurusan D3 Perpustakaan, FHIS, Unidiksha; ³Jurusan Pendidikan Sejarah, FHIS, Undiksha

ABSTRACT

This paper is the result of qualitative research with critical paradigm located at Melaya village. This village was chosen for its plurality. In diversity they live in harmony. This is because of their ability to handle a variety of problems, such as the difference in diet between Muslims and Hindus. Muslims are prohibited from eating and allowed to eat beef. While Hindus may eat pork and prohibit beef. This dichotomy is addressed through the creation of panyelaman. The results of this research showed that the dichotomy is not only referring to religious texts, but also refers to academic study. This condition does not bring the conflict, because they develop a strategies of cultural adaptation in the form of panyelaman culinary. Panyelaman provides space for cultural dialogue between Hindus and Muslims. It is very important not only as a bridge to mutual understanding cross-religiously and cross-cultural, but also as a social capital for inter-religious harmony in the frame of Bhineka Tunggal Ika.

Keywords: pluralistic society; inter-religious harmony; culinary; cultural dialogue.

ABSTRAK

Makalah ini hasil penelitian kualitatif memakai paradigma kritis yang dilakukan di desa Melaya. Desa ini dipilih karena warganya pluralistik. Walaupun demikian mereka hidup rukun. Kondisi ini disebabkan oleh kemampuan mereka mengatasi berbagai masalah, misalnya pola makan yang berbeda antara umat Islam dan Hindu. Umat Islam mengharamkan babi dan boleh makan daging sapi. Umat Hindu boleh makan babi dan melarang makan daging sapi. Dikotomi ini ditanggulangi lewat penciptaan panyelaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola makan yang berdikomi tidak saja mengacu pada teks agama, tetapi juga mengacu kepada kajian akademik. Kondisi ini tidak memunculkan konflik, karena mereka mengembangkan strategi adaptasi budaya berbentuk kuliner panyelaman. Panyelaman memberikan ruang bagi dialog kultural antara umat Hindu dan umat Islam. Hal ini sangat penting tidak saja sebagai jembatan untuk saling memahami secara lintas agama dan lintas budaya, tetapi juga sebagai modal sosial bagi kerukunan antarumat agama dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Kata-kata Kunci: Masyarakat pluralistik; kerukunan antarumat beragama; kuliner; dialog kultural.

PENDAHULUAN

Negara Kasatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara pluralistik, yakni menyatukan berbagai etnis, agama, ras, golongan, dll. Gagasan ini mencerminkan bahwa berbicara tentang SARA, yakni suku, agama, ras dan hubungan antara golongan pada masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan. SARA membentuk satu kesatuan mozaik budaya yang Bhineka Tunggal Ika dan basis perekatnya adalah dasar negara Pancasila (Atmadja, 2016).

Agama merupakan jantung kebudayaan yang tercermin pada kepercayaan dalam masyarakat. Kepercayaan terkait dengan nilai dan tertuang dalam relasi dan tindakan manusia. Kepercayaan atau agama dapat menghilhami dan menyatukan atau bisa pula sebaliknya, memecah belah dan menghancurkan (Bhaidawy, 2001). Aspek-aspek tertentu dalam agama acap kali berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini dapat dihidupkan tidak sekedar untuk membedakan antara agama yang satu dan yang lainnya. tetapi bisa pula digunakan oleh pihak-pihak

tertentu yang sedang memperebutkan kekuasaan. Dengan demikian disadari maupun tidak, perbedaan dapat berperan sebagai pemicu bagi konflik antar agama.

Berkenaan dengan itu menarik dicermati hubungan antarumat beragama di desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pada desa ini terdapat lima agama, yakni Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan Budha. Hubungan antara umat Islam dan Hindu sangat menarik dikaji, karena pada aspek tertentu memiliki ajaran berbeda. Misalnya, agama Islam mengharamkan daging babi, sebaliknya menghalalkan daging sapi. Agama Hindu membolehkan umatnya memakan daging babi, sebaliknya melarang memakan daging sapi. Umat Hindu dan Islam di desa Melaya sangat intensif terlibat dalam interaksi sosial. Misalnya, jika ada keluarga Muslim menikahkan anaknya mereka mengundang tetangga, keluarga dan/atau sahabatnya yang beragama Hindu. Pola ini berlaku pula bagi agama Hindu. Dalam kegiatan seperti ini maka penyajian kuliner sangat penting sebab ritual dinilai menyalahi tradisi jika tidak ada jamuannya.

Anutan sistem nilai yang bertolak belakang dalam penyajian kuliner dapat memunculkan masalah baik bersumberkan pada pola makan daging yang berbeda bahkan bertolak belakang maupun tata cara penyembliannya. Bahkan, orang Islam dan orang Hindu sama-sama boleh memakan daging ayam. Namun orang Islam menentukan tata cara penyembliannya, yakni harus secara Islami sehingga ayam menjadi halal. Hasil wawancara terhadap informan menunjukkan cara memasaknya pun dipertanyakan, terutama kemungkinan terkontaminasi oleh daging babi. Walaupun masalah ini kelihatannya sepele, namun penting dicermati karena merupakan titik rawan bagi hubungan antaragama. Gagasan ini sejalan dengan paparan Bhaidawy (2001) bahwa masalah-masalah kecil menyangkut hubungan antaragama tidak boleh dianggap sepele, sebab peluang bagi

kemunculan konflik antaragama sangat terbuka.

Permasalahan daging yang berdikotomik sebagai sumber konflik teratasi secara baik di desa Melaya dengan cara memunculkan kuliner *panyelaman*. *Panyelaman* sangat penting bagi pembentukan masyarakat Bhineka Tunggal Ika di desa Melaya. Walaupun *panyelaman* sudah melembaga namun orang Islam belum paham tentang *panyelaman* baik yang menyangkut substansi dan proses pengadaannya sehingga keraguan di kalangan orang Islam tetap ada. Begitu pula orang Hindu tidak memahami latar belakang orang Islam mengharamkan daging babi. Orang Islam pun belum memahami latar belakang orang Hindu melarang umatnya memakan daging sapi.

Gejala ini mencerminkan bahwa pemahaman orang Islam dan Hindu tentang *panyelaman* belum menyentuh aspek esensial secara maknawi. Dengan meminjam gagasan Wijayanto (2011) hal ini menandakan bahwa tindakan mereka belum sepenuhnya sadar makna sehingga mengarah kepada memetika. Pola tindakan seperti ini memiliki kelemahan mengingat pemahaman akan makna sesuatu yang mengacu kepada suatu nilai, tidak saja membentuk tindakan manusia, tetapi juga memperkuatnya (Poloma, 2010; Ritzer, 2012; Irianto, 2015). Pemaknaan sangat penting, karena dapat memantapkan suatu tindakan berdasarkan epistemologi dan aksiologi yang jelas landasannya yang mengacu kepada suatu nilai.

Bertolak dari gagasan tersebut makalah ini secara khusus mengkaji dua masalah pokok, yakni: *pertama*, latar belakang agama Islam mengharamkan daging bagi dan agama Hindu melarang umatnya memakan daging sapi. *Kedua*, makna *panyelaman* bagi dialog antaragama guna mewujudkan kerukunan umat beragama, khususnya Hindu dan Islam. Kajian ini sangat penting, tidak saja untuk menambah pengetahuan, tetapi juga berfungsi praksis guna merawat kerukunan beragama antara umat Hindu dan Islam.

Kerukunan umat beragama amat penting bagi pembentukan NKRI berbasiskan Bhineka Tunggal Ika.

Kajian terhadap kedua masalah ini menggunakan pendekatan teori interpretatif (Irianto, 2015; Jones, Bradbury dan Boutillier, 2016; Lauer, 1989; Ritzer, 2012; Wuisman, 2013; Zeitlin, 1995). Teori ini berasumsi bahwa tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari terikat pada tataran ideasional, yakni nilai, norma, kebiasaan termasuk agama. Tindakan sosial dan artefak yang dipakai merupakan simbol pembawa makna yang mengacu kepada tatanan ideasional. Pembawa makna bisa berupa gerak-gerik, badan, kelakuan nyata, bentuk interaksi antar manusia, benda, unsur lingkungan, dan lain-lain. Semuanya merupakan simbol atau tanda, yakni sebagai ekspresi dari suatu makna (Wuisman, 2013: 31). Gagasan ini berimplikasi bahwa pemahaman atas tindakan sosial dan artefak yang digunakannya, begitu ruang dan waktu yang menyertainya tidak hanya mengacu kepada realitas, tetapi mengacu pula pada dunia ide yang ada di baliknya.

Tindakan sosial secara mewartu dan meruang dapat berbentuk komunitas. Warga komunitas selalu berdiferensiasi, misalnya atas dasar agama, etnis, ras, dll. Kondisi ini mengakibatkan gagasan ideasional mereka berbeda-beda yang berlanjut pada pemaknaan mereka terhadap realitas juga berlainan. Perbedaan ini dapat memicu timbulnya konflik. Dengan mengacu kepada Goble (1987) konflik dapat mengakibatkan individu dan/atau masyarakat menjadi sakit. Konflik menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan rasa aman.

Berkenaan dengan masyarakat menerapkan mekanisme untuk meminimalisir konflik guna menciptakan masyarakat yang sehat atau harmoni. Dengan mengacu kepada Parsons (dalam Ritzer, 2012; Turner dan Maryanski, 2010; Zeitlin, 1995) setiap masyarakat melakukan AGIL, yakni *Adaptation* (A) (adaptasi), *Goal attainment* (G) (Pencapaian Tujuan), *Integration* (I)

(Integrasi) dan *Latency* (L) (Pemeliharaan Pola). Penyelenggaraan AGIL guna mewujudkan kerukunan membutuhkan dialog. Apalagi dalam masyarakat pluralistik dialog sangat bermanfaat. Sebab, melalui dialog orang yang berbeda agama misalnya, dapat saling memahami secara lintas agama guna menumbuhkan kerukunan berbasiskan Bhineka Tunggal Ika (Sumartana, Sunardi dan Wajidi, 2004; Sunardi, 2004; Najid, 2004; Abdullah, 2004).

METODE PENELITIAN

Makalah ini merupakan bagian kecil dari penelitian kami berjudul “Kerukunan Umat Beragama dalam Jaring Kekuasaan di Desa Melaya, Melaya, Jembrana, Bali (Perspektif Teori Kubus Kekuasaan dan Konstruktivisme Interpretatif) (Mariyati, Ariyani, dan Atmadja, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis paradigma kritis (Lubis, 2015; Agger, 2003). Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam terhadap informan yang ditunjuk secara purposif, seperti Kepala Desa, *Prajuru Desa Pakraman*, tokoh-tokoh adat dan agama (mewakili lima agama di desa Melaya), warga masyarakat, dll. Wawancara dilengkapi dengan observasi, misalnya terhadap pemukinam warga desa desa, tempat ibadah, kehidupan sehari-hari, kegiatan makan bersama, dll. Studi dokumen tidak kalah pentingnya, ditujukan pada data statistik, notulen rapat, dll. Teknik pengumpulan data ini dipakai secara bergantian atau saling melengkapi dalam konteks triangulasi.

Data dianalisis mengikuti langkah-langkah, yakni konseptualisasi, hasil konseptualisasi, pembuktian, dan objektivasi (Samuel, 2012). Konseptualisasi berbentuk kegiatan menggali konsep-konsep emik tentang panyelesaian dan aspek-aspek lain yang terkait dengannya. Konsep-konsep emik didalami dengan cara menggali makna-makna tersembunyi secara dekonstruktif. Artinya, peneliti melakukan interpretasi terhadap konsep-konsep emik, disertai pembongkaran

terhadap nilai-nilai, ideologi, kepentingan, tujuan-tujuan atau kegunaan-kegunaan yang tidak disadari dan/atau yang bersembunyi di balik sajian *panyelaman* dan berbagai tindakan sosial yang menyertainya. Dengan cara ini terbentuk hasil konseptualisasi yang memuat makna denotatif dan konotatif.

Hasil konseptualisasi memerlukan pembuktian lewat pengumpulan data secara lebih dalam dan lebih luas, melalui wawancara, observasi dan/atau studi dokumen. Hasil konseptualisasi yang teruji kesahihannya, merupakan bahan baku untuk membentuk narasi guna menjawab masalah penelitian. Narasi diperkuat dengan cara objektivasi, yakni membandingkan dan melakukan penguatan melalui teori-teori sosial kritis. Dengan demikian terbentuk narasi yang menjawab masalah penelitian secara kritis dan terkait dengan teori sosial yang sudah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Melaya adalah bagian dari Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Desa ini sangat mudah dijangkau, karena terletak di pinggir jalan raya Denpasar – Gilimanuk. Ibukota kecamatan Melaya, terlatak di desa ini sehingga wajar jika berbagai fasilitas umum ada di desa Melaya. Desa ini sangat menarik karena dapat dipandang sebagai pencerminan Indonesia mini. Sebab, desa ini memuat lima agama, yakni Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan Budha. Begitu pula etnis di desa ini beragam, seperti etnis Bali, Jawa, Madura, Bugis, dll.

Walaupun desa ini multiagama dan multietnik, namun mereka dapat hidup rukun. Gejala ini menandakan mereka memiliki mekanisme tersendiri untuk mengelola konflik. Hal ini mencakup di dalamnya tentang pengelolaan makanan, yakni memunculkan

panyelemanan sehingga dua agama yang berdikotomi keyakinannya tentantan daging (babi versus sapi = Islam versus Hindu) terselesaikan dengan baik – harmoni sosial terwujudkan secara baik pula.

Pemaknaan Babi dan Sapi bagi Agama Hindu dan Islam

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan mengacu kepada Goble (1987) gagasan ini terkait dengan posisi makanan, yakni jika manusia tidak makan dia akan sakit, bahkan dapat berujung pada kematian. Walaupun makanan termasuk kebutuhan dasar, namun manusia tidak bisa memakan segalanya. Apa yang boleh dimakan, bagaimana cara memakannya, begitu pula pengolahannya, bergantung pada kebudayaan. Kebudayaan memprogram tindakan manusia tentang makanan sehingga masalah makanan tidak lagi hanya berkaitan dengan masalah instink, melainkan diprogram oleh budaya. Pendek kata, ada aturan tertentu yang mengaur tentang pola makan yang mengacu kepada sistem nilai.

Sistem nilai bisa bersumberkan pada agama sehingga legitimasinya amat kuat. Agama mengacu kepada dosa dan tidak berdosa yang berlanjut pada hadiah neraka bagi yang melanggar atau surga bagi yang menaatinya. Atmadja (2010, 2014) menunjukkan bahwa rasa berdosa adalah mekanisme kontrol sosial internal yang sangat kuat bagi seseorang untuk bertindak taat asas dalam masyarakat. Betapa eratny hubungan antara urusan makan dengan agama dapat dicermati pada posisi sapi dan babi. Agama Hindu melarang umatnya memakan daging sapi – boleh makan babi, sebaliknya agama Islam mengharamkan babi – boleh memakan daging sapi. Nilai agama yang dipakai acuan dapat dicermati pada Tabel 1.

Tabel 1
Perbandingan gagasan Islam dengan babi haram dan
Hindu tentang larangan memakan daging sapi

Agama Islam	Agama Hindu
• Ajaran Islam mengharamkan umatnya mengonsumsi daging babi dan/atau memanfaatkan seluruh anggota tubuh babi. Alasannya sebagai berikut. (1) Babi adalah tempat menampung berbagai penyakit, misalnya cacing pita (<i>Taenia solium</i>), cacing spiral (<i>Trichinella spiralis</i>), cacing tambang (<i>Ancylostoma duodenale</i>), cacing paru (<i>Paragonimus pulmonaris</i>), cacing usus (<i>Fasciolopsis buski</i>), cacing <i>Schistosoma japonicum</i>), bakteri <i>tuberculosis</i> (TBC), bakteri kolera (<i>Salmonella choleraensis</i>), bakteris <i>Brucellosis suis</i>, Virus cacar (<i>Small pox</i>), Virus kudis (<i>Scabies</i>), Parasit protozoa <i>Balantidium coli</i>, parasit protozoa <i>Taxoplasma gondii</i>. (2) Daging babi banyak mengandung lemak yang sulit dicerna sehingga tubuh tidak bisa memanfaatkan zat gizi secara optimal. Kantung urine babi sering bocor sehingga urine babi merembes ke dalam daging. Akibatnya, daging babi tercemar kotoran. Lemak punggung (<i>back fat</i>) tebal dan mudah rusak oleh proses ranciditas aksiodatif (tengik), tidak layak	Orang Hindu yang tidak memakan daging sapi bukan karena daging sapi haram atau binatangnya jelek, tetapi karena orang Hindu menghormati sapi. Penghormatan terhadap sapi terkait dengan simbolisasi yang terkandung pada sapi dalam konteks berbagai aspek dalam ajaran Hindu. Filsafat dasar dalam agama Hindu adalah menekankan pada hubungan harmonis antara manusia dengan manusia (<i>Pawongan</i>), manusia dengan alam semesta (<i>Palemahan</i>), dan manusia dengan Tuhan/dewa-dewa sebagai personifikasi-Nya (<i>Parhyangan</i>) – gagasan ini mengacu kepada <i>Tri Hita Karana</i>, kesejahteraan bergantung pada harmoni sosial, ekologis dan teologis. Sapi adalah simbolisasi dari alam semesta, yakni bumi. Bumi adalah tempat hidup bagi <i>stawira</i> (tumbuh-tumbuhan), <i>janggama</i> (binatang) dan manusia yang memiliki <i>Tri Pramana</i> (<i>sabda</i>, <i>bayu</i>, dan <i>idep</i> = suara, tenaga, dan pikiran). Bumi adalah ruang bagi manusia untuk hindu dan menacri kehidupan. Gagasan ini berimplikasi bahwa membunuh dan/atau memakan daging sapi dapat dimaknai sebagai tindakan manusia melecehkan alam semesta atau bumi sebagai

- dikonsumsi manusia.
- (5) Babi merupakan carrier virus/penyakit Flu Burung (*Avian influenza*) dan Flu Babi (*Swine Influenza*). Babi menularkan berbagai penyakit, seperti pengerasan urat nadi, naiknya tekanan darah, nyeri dada yang menekan, radang (nyeri) pada sendi-sendi tubuh. Mamakan babi yang terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya, tetapi juga menyebabkan peningkatan kolesterol tubuh dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh. Daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan usus besar. Daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan *Trachenea lolipoli* dapat berpindah ke manusia. DNA babi mirip dengan manusia sehingga sifat buruk babi dapat menular kepada manusia, misalnya rakus, kotor, jorok, dll.

tempat tinggalnya – bertentangan dengan cita-cita manusia harmonis dengan alam (Palemahan).

Sapi atau lembu Nandini adalah Wahana dewa Siwa. Tindakan memakan daging sapi dapat bermakna mencedrai hubungan manusia dengan Siwa – bertentangan dengan cita-cita manusia berhubungan harmonis dengan Tuhan/dewa-dewa (Parhyangan). Apalagi Siwa adalah Palebur – semua manusia takut mati walaupun kematian adalah keniscayaan.

Dalam ritual agama di Bali sapi digunakan sebagai *petulangan*, misalnya *ngaben* untuk *sulinggih* (pendeta) – *petulangan* adalah lembu putih (Nandini), karena diyakini mampu mengantarkan roh ke alam surga (*Siwa Loka*). Gagasan ini bermakna makan daging sapi membuat hubungan disharmonis dengan *sulinggih* – umat Hindu bergantung pada *sulinggih* dalam melakukan ritual, misalnya *ngaben* dan *memukur*.

Ritual *bhuta yadnya* di Bali menggunakan sapi putih sebagai penolak bala – didapatkan khusus dari Desa Taro, Payangan, Gianyar. Alangkah tidak eloknya binatang yang berjasa lalu dimakan dagingnya. Sapi menghasilkan berbagai produk bagi manusia, air kencing sapi, kotoran sapi, susu sapi, susu asam dan ghee.

Kelimanya disebut *Panca Gavya*. Bahkan di Bali ternak sapi merupakan teman setia petani, tidak saja karena sapi adalah pabrik pupuk kandang,

tetapi juga sumber tenaga kerja dan tabungan keluarga. Jasa seperti memunculkan gagasan bahwa sapi secara ideal dihormati antara lain dengan cara tidak memakan dagingnya.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID. SCOLAND diunduh pada hari Senin, 24 Oktober 2016; Darmayasa, 1993. *Keagungan Sapi Menurut Weda*, Denpasar: Manigjeni; Ketut Wiana, 1993. "Sapi Binatang Utama Kata Pengantar". Dalam Darmayasa, 1993. *Keagungan Sapi Menurut Weda*, Denpasar: Manigjeni. Halaman 1-21.

Tabel 1 menunjukkan bahwa agama Islam yang mengharamkan babi ternyata memiliki alasan sangat kuat dilihat dari sudut pandang ilmiah. Sebaliknya, agama Hindu yang melarang umatnya memakan daging lebih menekankan pada alasan religius-magis, sosial, budaya dan ekonomi. Walaupun menunjukkan perbedaan, namun sesuai dengan makna dialog agama maka gagasan ini tidak dinilai atas dasar benar salah (Banawiratma, 2004; Sunardi, 2004), tapi kemafaatannya bagi umat Hindu dan Islam.

Dengan mengacu kepada Hans Kung (dalam Sunardi, 2004: 86) kemanfaatannya menyangkut tiga aspek sebagai berikut.

- a. Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan dan nilai-nilai, ritus dan simbol-simbol orang lain atau sesama kita, maka kita dapat memahami orang lain secara sungguh-sungguh.
- b. Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat memahami iman kita sendiri secara sungguh-sungguh; kekuatan dan kelemahan, segi-segi yang konstan dan yang berubah-ubah.

Hanya jika berusaha memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat - meskipun ada perbedaannya - dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai (Hans Kung dalam Sunardi, 2004: 86).

Pendek kata, sesuai dengan prinsip dasar dialog agama maka perbedaan pandangan antara agama Hindu dan Islam tentang babi dan sapi tidak dinilai atas dasar benar dan salah, tetapi dalam konteks dialog agama guna menumbuhkan modal budaya bagi pencapaian kerukunan antarumat beragama.

Panyelemanan: Adaptasi Budaya Berbentuk Kuliner

Dalam perspektif AGIL desa Melaya terikat pada tujuan (*G = Goal attainment*) mewujudkan masyarakat harmonis, rukun dan damai – kebutuhan dasar manusia akan rasa aman dan cita-cita *Tri Hita Karana*. Pencapaian tujuan ini membutuhkan integrasi (*I = Integration*) antarwarga desa dan *latency* (*L = Pemeliharaan Pola*). Pembentukan kondisi ini tidak mudah, karena keragaman agama dan etnis dapat memunculkan konflik. Sumber konflik antara lain pola makan berbeda bahkan berdikotomi antara umat Hindu dan Islam.

Dalam urusan makan umat Hindu tidak seruwet umat Islam. Secara tekstual agama Hindu melarang (menganjurkan) umatnya agar tidak memakan daging sapi, namun kenyataannya banyak orang Hindu secara diam-diam mengabaikannya. Orang Hindu lebih luwes menerima makanan, tidak saja memakan daging babi, tetapi juga daging lainnya termasuk daging sapi. Kondisi ini berbeda daripada umat Islam, yakni haram memakan daging babi. Bahkan bisa pula orang Islam menolak memakan daging lain yang disembelih tidak secara Islami. Orang Bali menyatu dengan daging babi, apalagi ada

banten tertentu yang mamakai daging *babi* sehingga memperkuat tradisi pesta makan babi.

Kondisi ini memunculkan masalah terutama di kalangan umat Hindu yang ingin mengundang orang Islam dan suatu kegiatan keagamaan. Pada umumnya informan menyatakan mengundang tetangga, sahabat atau keluarga – mengingat banyak orang Hindu memiliki keluarga orang Islam karena ikatan perkawinan atau *juang kajuang*. Dengan mengacu kepada Durkheim (1989) hal ini disebut fungsi sosial agama, yakni memperkuat solidaritas. Pemupukan solidaritas sosial amat penting bagi desa Melaya yang bercorak pluralistik. Solidaritas sosial adalah modal sosial bagi kelangsungan hidup desa Melaya.

Kendala pembentukan solidaritas yang bersumberkan pada makanan merlukan pemecahan. Apalagi makan bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ritual dalam suatu agama (Koentjaraningrat, 1982). Pada masyarakat Bali atau bahkan pada masyarakat Indonesia pada umumnya, makan bersama dalam kegiatan ritual misalnya perkawinan selalu ditutup dengan kegiatan makan. Makan sebagai bagian penting dalam ritual tentu saja menjadi kurang pantas jika mengundang orang Islam dan hidangannya penuh dengan daging babi. Solidaritas sosial sebagai aspek ikutan dari ritual secara otomatis terganggu karena kehadiran daging babi.

Dalam rangka mengatasi kendala ini maka orang Bali melakukan adaptasi (A=*Adaptation*) terhadap pola makan sehingga melahirkan kuliner *panyeleman*. *Panyelaman* bermakna sebagai makanan khusus, terutama daging untuk orang Islam yang bahan bakunya nonbabi, misalnya ayam, ikan laut, telur, dll. Namun, bersamaan dengan semakin kuatnya kesadaran beragama di kalangan umat Islam antara lain karena pengaruh pendidikan agama, maka persyaratan *panyeleman* tidak lagi hanya daging nonbabi, tetapi cara menyembelih dan memasaknya pun harus Islami. Bahkan ada pula orang Islam yang tidak kurang nyaman memakai piring milik orang Bali karena

dianggap pernah digunakan sebagai wadah bagi makanan yang berbahan baku daging babi. Dengan demikian makna *panyelaman* menjadi luas, tidak saja mengacu kepada makanan daging nonbabi, tetapi juga cara menyembelih, memasak dan menyajikannya adalah secara Islami.

Gagasan seperti ini bisa saja mencerminkan adanya emosionalitas di kalangan umat Islam. Walaupun demikian kondisi seperti ini tidak bisa dinafikan, mengingat bahwa emosi keagamaan merupakan bagian integral dari suatu agama (Koentjaraningrat, 1982). Berkenaan dengan itu Morin (2005) menyatakan manusia selalu berwajah ganda, yakni sebagai *homo (animal) rational* dan *homo demens* sehingga tindakannya tidak selamanya berpegang pada asas rasionalitas, tetapi bisa pula mengacu pada asas emosionalitas - bertindak secara tidak masuk akal. Dalam kondisi seperti ini orang Hindu di desa Melaya mengdaptasikan *panyelaman* ke arah persyaratan yang lebih holistik guna membangun solidaritas sosial sebagai modal sosial bagi kerukunan umat beragama.

Strategi yang mereka kembangkan adalah pada saat menyiapkan *panyelaman*, dengan cara mereka meminta tolong kepada tetangga dan/atau keluarganya yang beragama Islam. Mereka diminta untuk menyiapkan *panyeleman* secara holistik, mulai dari menyembelih binatang sampai dengan memasak dan menyajikannya di ruag makan lengkap dengan labelnya, yakni *panyeleman*. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, orang yang menunggu hidangan *panyeleman* dapat pula diambilkan dari orang Islam. Bahan baku untuk *panyeleman* dan/atau peralatan yang digunakan disediakan oleh tuan rumah atau orang Islam yang ikut menangani *panyeleman*. Masalah tempat makan yang dikhawatirkan terkontaminasi secara mudah dapat diselesaikan lewat pemakaian wadah makan tradisional, yakni *ingka* yang beralaskan kertas. Pola ini lebih efisien daripada memakai piring karena tidak memerlukan waktu dan

tenaga untuk mencuci – sekali pakai langsung dibuang. Begitu pula minuman steril dari kemungkinan penceraan daging babi, mengingat bahwa pesta makan yang terkait dengan ritual apapun pada masyarakat Bali minumannya adalah minuman botolan atau gelas, yakni Coca-Cola, Teh Botol Sosro, Aqua gelas, dll.

Pengerahan tenaga untuk mempersiapkan dan menyuguhkan *panyeleman* lewat kegiatan tolong-menolong berjalan dengan baik, karena pola pemukiman orang Hindu dan Islam berbaur — hubungan ketetanggaan sebagai jembatan bagi pengembangan modal sosial berlaku di desa Melaya. Begitu pula kedua belah pihak banyak berkerabat karena perkawinan. Hal ini memunculkan hubungan sosial yang inklusif sehingga setiap saat bisa diubah menjadi modal sosial untuk mengerjakan suatu kegiatan. Kondisi ini terkait pula dengan nilai-nilai kolektivisme masih berlaku pada masyarakat desa Melaya.

Rangkaian kegiatan ini sesuai dengan agama Islam yang termuat pada Al-Quran. Artinya, keberadaan *panyeleman* baik tentang proses pembuatan maupun penyajian dan pengonsumsiannya dapat diterima oleh agama Islam. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari gagasan agama Islam sebagai berikut.

Praktik budaya lokal menjadi basis implementasi ajaran-ajaran Islam. Keberadaan tradisi atau pranata sosial-budaya yang sudah ada tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran universal Al-Quran. Kedudukan Al-Quran menjadi *guiding line* bagi proses enkulturasi terhadap adat istiadat yang berjalan. Dengan demikian, masyarakat dapat berislam tanpa harus kehilangan tradisi mereka. Di sinilah letak keautentikan Islam, yaitu ketika masyarakat menjalankan ajaran agamanya dalam konteks kebudayaan yang dimilikinya (Sodiqin, 2008: 209).

Dengan demikian, pola sebagai sumber konflik dapat diatasi lewat strategi *panyelaman*. Kondisi ini tidak bertentangan dengan agama Islam, terbukti bahwa *panyeleman* melembaga pada umat Islam di desa Melaya. Hal ini amat penting karena *panyelaman* tidak saja sebagai simbol pemersatu, tetapi juga memberikan pula ruang bagi umat Hindu dan Islam di desa Melaya untuk menjaga kerukunan antarumat agama dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Panyeleman sebagai Dialog Kuliner

Permasalahan krusial dalam hubungan antaragama pada masyarakat pluralistik adalah membangun kerukunan berbasis Bhineka Tunggal Ika. Pencapaian sasaran ini bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dialog.

Dialog adalah percakapan mengenai persoalan bersama antara dua atau lebih orang dengan perbedaan pandangan, yang tujuan utamanya adalah agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain sehingga ia dapat berubah dan tumbuh (Swidler, 1983). Berubah dalam arti bahwa setiap partisipan dialog yang belajar mendengarkan dari orang lain secara terbuka, jujur dan simpatik sehingga dapat mengalami posisi orang lain secara lebih tepat. Sedapat mungkin supaya pemahaman ini seolah-olah menjadi orang dalam – “*from within*”. Dengan pemahaman semacam ini diharapkan setiap peserta dialog akan dapat mengubah prasangka, stereotif, dan celaan yang selama ini disandarkan pada partner dialog. Dikatakan semakin tumbuh karena dialog mengantarkan setiap partisipan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dan semacamnya tentang berbagai hal berkaitan dengan partner dialognya dari sumber primer dan ia

dapat mendiskusikannya (Bhaidawy, 2001: 25).

Najib (2005) menunjukkan dialog antaragama bisa dilakukan dengan aneka cara, misalnya dialog kultural. Dialog kultural dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana orang yang berbeda agama makan bersama dan/atau bergotong royong menangani suatu masalah dalam masyarakat. Dalam konteks ini Najib (2005: 177) menjelaskan bahwa “dialog antaragama mestinya harus lebih mengandalkan pada mekanisme kulturalnya, tidak hanya pada tingkatan intelektual-teologis. Dialog kultural ini lebih penting dan mengena”.

Bertolak dari pemikiran ini maka tradisi *panyelaman* di desa Melaya termasuk dialog kultural. Mengingat, *pertama*, *panyelaman* adalah kebudayaan Bali. Kuliner ini disuguhkan kepada umat Islam pada saat berlangsungnya pesta sehingga orang berbeda agama dan berbeda pola makan dapat makan bersama. *Kedua*, penyiapan dan penyajian kuliner *panyeleman* melalui sistem tolong, begitu pula pada saat menyantapnya yang melibatkan orang Islam dan orang Hindu memungkinkan kedua belah pihak dapat saling beramah tamah, termasuk di dalamnya mereka membicarakan masalah-masalah sosial dan agama dalam konteks saling membelajarkan diri ke arah pemahaman lintasagama. Aspek-aspek ini sangat penting, yakni dapat digunakan sebagai modal sosial dan budaya bagi pembentukan kerukunan antarumat beragama di desa Melaya.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan bahwa desa Melaya merupakan Indonesia mini. Masing-masing, SARA sebagai pencerminan NKRI ada di desa Melaya. Walaupun desa Melaya bercorak SARA, namun SARA tidak bersifat destruktif, melainkan konstruktif. Kondisi ini berkaitan

dengan kemampuan desa ini mengelola SARA secara baik. Gejala ini tercermin misalnya pada pengelolaan masalah makanan yang bertolak belakang antara umat Islam dan Hindu. Umat Islam menghalkan daging sapi dan mengharamkan daging babi, sebaliknya umat Hindu membolehkan makan daging babi dan melarang makan daging sapi. Perbedaan ini tidak hanya mendasarkan pada teks agama - berdimensi emosionalitas, tetapi juga kajian akademik - berdimensi rasionalitas sehingga legitimasinya amat kuat. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele, mengingat pemicu konflik antaragama pemicunya sering kali karena masalah sepele.

Kondisi ini dapat diatasi melalui strategi adaptasi budaya berbentuk kuliner *panyelaman*. Kahadiran *panyelaman* tidak saja memberikan peluang bagi orang Islam untuk ikut dalam kegiatan pesta makan tanpa mengorbankan keyakinannya, tetapi terjadi pula dialog kultural yang disimbolkan lewat *panyeleman* - untuk lebih mudahnya dapat disebut dialog kuliner *panyeleman*. Dialog ini sangat penting, yakni sebagai jembatan untuk saling memahami secara lintas agama dalam konteks modal sosial guna menumbuhkembangkan kerukunan antarumat agama dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2005. “Etika Dialog Antar Agama”. Dalam Elga Sarapung, Noegroho Agoeng, dan Alfred B. Jogoena ed. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Interfidei. Halaman 111-134.
- Agger, Ben. 2003. *Teori Sosial Kritis Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. [Penerjemah Nurhadi]. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Atmadja, N.B. 2010. *Ajeg Bali: Gerakan Identitas Kultural dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.

- Atmadja, N.B. 2014. *Saraswati dan Ganesha sebaai Simbol Paradigma Interpretativisme dan Positivisme: Visi Integral Mewujudkan Iptek dari Pembawa Musibah Menjadi Berkah bagi Umat Manusia*. Denpasar: Pustaka Larasan & IbiKK Undiksha.
- Atamadja, N.B. 2016. "Peran Intelektual dalam Mewujudkan Masyarakat Multikultur Indonesia". Dalam I Wayan Ardika ed. *Harmoni Sosial Lintas Budaya*. Denpasar: Udayana University Press. Halaman 170-193.
- Banawiratma, J.B. 2005. "Bersana Saudara-saudari Beriman Lain Perspektif Gereja Katolik". Dalam Elga Sarapung, Noegroho Agoeng, dan Alfred B. Jogoena ed. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Interfidei. Halaman 15-35.
- Berger, Peter dan Thomas Luckmann. 1991. *The Social Construction of Reality a Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Books.
- Bhaidawy, Zakiyuddin. 2001. *Dialog Global dan Masa Depan Agama*. Universaitas Muammadiyah Surakarta.
- Darmayasa, 1993. *Keagungan Sapi Menurut Weda*, Denpasar: Manikgeni.
- Durkheim, Emile. 1989. *Sosiologi dan Filsafat*. [Penerjemah Soedjono Dirdjosiswojo]. Jakarta: Erlangga.
- Goble, Frank G. 1971. *The Third Force, The Psychology of Abraham Maslow*. New York: Washington Square Press.
- Irianto, Agus Maladi. 2015. *Interaksi Simbolik PendekatanAntropologis Merespon Keseharian*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri.
- Jones, Pip, Liza Bradbury dan Shaun Le Boutilier. 2016. *Pengantar Teori-teori Sosial*. [Achmad Fedyani Saifuddin]. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1982. *Sejarah Teori Antropologi Jilid 1*. Jakarta: UI Press.
- Lauer, Robert H. 1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. [Penerjemah Alimandan]. Jakarta: Bina Aksara.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer dari Teori Kritis, Cultural Studies, Feminisme, Poskolonial hingga Multikulturalisme*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Najib, Emha Ainun. 2005. "Dialog Antaragama dan Batas-Batasnya". Dalam Elga Sarapung, Noegroho Agoeng, dan Alfred B. Jogoena ed. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Interfidei. Halaman 177-203.
- Mariyati, Tuty, Luh Putu Sri Ariyani dan Nengah Bawa Atmadja. 2016. *Kerukunan Umat Beragama dalam Jaring Kekuasaan di Desa Melaya, Melaya, Jembrana, Bali (Perspektif Teori Kubus Kekuasaan dan Konstruktivisme Interpretatif)*. Singaraja: Undiksha.
- Morin, Edgar. 2005. *Tujuh Materi Penting bagi Dunia Pendidikan*. [Penerjemah Imelda Kusumastuty dkk.]. Yogyakarta: Kanisius.
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. [Penerjemah. Tim Yasogama]. Jakarta: Rajawali Pers.
- REPUBLIKA.CO.ID. SCOLAND – Ajaran Islam mengharamkan umatnya mengkonsumsi daging babi dan atau memanfaatkan seluruh anggota tubuh babi. Diunduh pada hari Senin, 24 Oktober 2016
- Ritzer, G. 2012. *Dari Teori Soziologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmoder*. [Penerjemah Alimandan]. Jakarta: Prenada Media.

- Samuel, Hanneman. 2012. *Peter Berger Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Kepik.
- Sodiqin, Ali. 2008. *Antropologi Al-Quran Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Yogyakarta: Al-Ruzz Media.
- Sumartana, Th., St. Sunardi dan Farid Wajidi. 2005. "Manuju Dialog Antar Iman". Dalam Elga Sarapung, Noegroho Agoeng, dan Alfred B. Jogoena ed. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Interfidei. Halaman ix-xxvii.
- Sunardi, St. 2005. "Dialog Cara Baru Beragama Sumbangan Hans Kung bagi Dialog Antar Agama". Dalam Elga Sarapung, Noegroho Agoeng, dan Alfred B. Jogoena ed. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Interfidei. Halaman 67-110.
- Tilaar. H.A.R. 2007. *Indonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Turner, Jonathan H. dan Alexandra Maryanski. 2010. *Fungsionalisme*. [Anwar Efendi dkk.]. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiana, Ketut. 1993. "Sapi Binatang Utama Kata Pengantar". Dalam Darmayasa, 1993. *Keagungan Sapi Menurut Weda*, Denpasar: Manigeni. Halaman 1-21.
- Wijayanto, Eko. 2011. *Evolusi Kebudayaan Perspektif Darwinian tentang Kondisi Sosial Budaya*. Jakarta: Salemba Humaniak.
- Wuiman, Jan J.J. 2013. *Teori dan Praktik Memperoleh Kembali Kenyataan supaya Memperoleh Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zeitlin, Irving M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. [Penerjemah Anshori dan Juhandi]. Yogyakarta: UGM Press.

NILAI KEARIFAN LOKAL CERITA RAKYAT BALI YANG RELEVAN UNTUK PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SD KELAS I

I WAYAN RASNA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

wayanrasna@ymail.com

HP : 08123970262

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) cerita rakyat apa yang cocok diajarkan kepada siswa SD kelas 1 dan 2) nilai kearifan lokal apa yang ada dalam cerita rakyat tersebut. Untuk tujuan dimaksud, sampel penelitian ditentukan secara purposif, yaitu guru SD kelas I yang mengajarkan Bahasa Bali, pakar cerita rakyat (Made Taro, DK Djareken, Buda Gautama, Suardiana dan pakar pendidikan. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan instrumen berupa kartu data serta wawancara. Data diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) cerita rakyat yang cocok diajarkan kepada siswa SD kelas I adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut : 1) cerita rakyat yang mengajarkan keadaan seperti santun dalam bertutur, berinteraksi, bersikap, bersosialisasi, pendidikan, keimanan, dan mendongeng 5 menit. Nilai kearifan lokal yang ada dalam cerita rakyat adalah : 1) cinta kasih (karuna); 2) Tri Hita Karana ; 3) Tri Parartha ; 4) Lascarya 5) Kewaspadaan ;

Khurma phala ; 7) santun; 8) Tri Dandim ; 9) Mitia Hrdaya. Saran yang disampaikan adalah cerita rakyat yang cocok diajarkan hendaknya memenuhi kriteria keadaan (kejujuran, keimanan, dan menghormati) sehingga melancarkan PBM.

Kata kunci : cerita, rakyat, relevan, pendidikan karakter

1. Pendahuluan

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memiliki rencana Induk Penelitian (RIP) dengan peta jalan sebagai berikut. 1) Kondisi Eksisting (2007-2011) 2; masa pemantapan (2012-2016) dan masa pengembangan (2016-2020) (RIP Undiksha, 2012: 22-24). Tahun 2015 masuk masa pemantapan yang meliputi bidang riset unggulan dan bidang riset nonunggulan.

Usulan penelitian yang berjudul "Integrasi Nilai Kearifan Lokal Cerita Rakyat Bali ke Buku Pelajaran Bahasa Bali dalam Pendidikan Karakter Siswa SD kelas I termasuk ke dalam riset unggulan sesuai dengan RIP Undiksha 2012. Riset unggulan dengan strategi Pendidikan Nilai dan karakter ini bertema Pendidikan berbasis nilai dan karakter seharusnya mengakomodasi perkembangan sains dan teknologi melalui pengintegrasian di antaranya. Perkembangan sains dan teknologi memang dibutuhkan untuk menopang berbagai hal kehidupan manusia di bumi, namun hal ini dapat berdampak kemaslahatan maupun kenestapaan umat

manusia. Sehubungan dengan hal ini perkembangan sains wajib dibingkai dengan nilai budaya karakter bangsa.

Peningkatan sains dengan nilai budaya karakter bangsa ini dengan subtema/topik pengembangan model pembelajaran untuk transformasi ideologi Bangsa. Berkaitan dengan hal ini implementasi tindakan sebagai bentuk real makropedagogik perlu mendapatkan penanganan yang serius, seperti sikap saling menghormati dan menghargai, tenggang rasa, tepo seliro, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membina kerukunan umat beragama, membela kebenaran dan mengembangkan rasa cinta tanah air. Penanganan ini diperlukan karena bentuk real makropedagogik ini tidak akan turun dari langit, meski langit mau runtuh, impian untuk membuat orang saling menghormati tidak datang tiba-tiba tetapi melalui proses pembinaan yang panjang mentradisi, membudaya dalam kehidupan (Setyani 2012:3) banyak usaha kantin kejujuran yang bangkrut, karena belum bangkitnya sikap jujur pada anak-anak

(Samani dan Hariyanto, 2012 : 2). Bahkan harian Kompas terbitan Senin 20 Juni 2011 menulis Kerusakan Moral Mencemaskan sebagai headline yang terpampang di halaman depan berita tersebut menyatakan bahwa:

Sepanjang 2004-2011 Kementrian Dalam Negeri mencatat 158 Kepala Daerah yang terdiri atas Gubernur, Bupati dan wali Kota tersangkut kasus korupsi

42 anggota DPR terseret Korupsi pada kurun waktu 2008-2011

30 Anggota DPR Periode 1999-2004 dari parpol terlibat kasus dugaan suap pemilihan Deputy Gubernur Senior BI

Kasus Korupsi terjadi di sejumlah institusi seperti KPU, Komisi Yudisial, KPPU, Ditjen Pajak dan Bank Indonesia.

Di sisi lain, untuk penegak hukum terungkap sejumlah kasus:

1) Sepanjang tahun 2010 M.A menjatuhkan sanksi kepada 107 hakim, baik berbentuk pemberhentian maupun teguran. Tahun sebelumnya, hakim yang tersangkut berjumlah 78

Sepanjang 2010 pegawai kejaksan yang dijatuhkan sanksi mencapai 288 orang, meningkat 60% di bandingkan 2009 sebanyak 181 orang. Dari 288 orang tersebut, 192 yang dijatuhi sanksi adalah jaksa

Sebanyak 294 polisi dipecat dari dinas POLRI dengan rincian 18 perwira, 272 bintara dan 4 orang tantama (Samani dan Hariyanto, 2012 :4)

Dunia pendidikan pun tak luput dari kecurangan seperti menyontek, mencontoh pekerjaan teman. Kompas Senin 20 juni 2011 menyatakan bahwa plagiat terjadi di sejumlah perguruan tinggi antara lain Bandung, Yogyakarta, Gorontalo dan Jakarta. Bahkan anak SD yang dianggap polos dan lugu sudah ada yang bertindak kriminal sehingga harus berurusan dengan pihak berwajib. Pedagog Jerman, FW Foerster (1869-1966) memokuskan pendidikan pada matra etis-

spiritual dalam proses pembentukan pribadi. Lahirnya pendidikan karakter merupakan representasi kemujudan pedagogi natural Rousseawian serta instrumentalisme pedagogis Deweyan.(Meitafitrealina dalam <http://blog.ummy.ac.id>). Sehubungan dengan kemujudan pedagogi natural inilah muncul salah satu bentuk karakter yang tidak terbayangkan untuk dilakukan oleh anak SD, yaitu sindikat pencurian di kalangan anak usia SD. Seorang anak SD ketahuan mencuri uang di sekolahnya beberapa kali. Aksi mencuri uang dan alat peraga IPA, yang dilakukan oleh sindikat pencuri ini mulai dicurigai pada saat libur kenaikan kelas tahun ajaran 2009/2010. Demikian juga kekerasan yang dilakukan oleh anak SD terhadap teman sekelasnya, yang seorang siswi SD di Bukit Tinggi di Musala. Hal yang serupa di Jakarta terjadi pada seorang siswa SD yang dilakukan oleh temanya sendiri sampai meninggal.Hal ini menunjukkan betapa rentannya moral bangsa ini,karena anak SD telah berbuat sangat jauh dari moral dan norma sebagai bangsa yang beradab. Karenanya karakter yang berkualitas perlu dibina sejak masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak (Dwi Antoro, 2012:1).

Ahli psikologi menyebut usia kanak-kanak sebagai usia emas (golden age). Disebut usia emas, karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia empat tahun. Peningkatan 30% berikutnya, terjadi pada usia delapan tahun (SD). Dan 20% sisanya pada usia SMP (Dwi Antoro 2012

1). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter sudah sepatutnya diberikan dalam ranah keluarga. Selanjutnya, materi pendidikan karakter menjadi materi wajib yang harus diberikan kepada anak SD.

Permasalahan yang Diteliti

Berdasarkan uraian latar belakang 1.1 di depan, maka permasalahan yang diteliti adalah seperti pada Tabel 01. berikut ini.

Tabel 01 : Rumusan Masalah

No	Rumusan Masalah
I	Tahun Pertama
1.1	Cerita rakyat apa yang cocok diajarkan kepada siswa SD Kelas I ?
1.2	Nilai kearifan lokal apa yang ada dalam cerita rakyat tersebut?
II	Tahun Kedua
2.1	Cerita rakyat Bali apa yang cocok diberikan untuk siswa SD kelas I menurut : (a) pakar, b) praktisi (guru)?
2.2	Nilai kearifan lokal apa yang cocok diberikan untuk siswa SD kelas I menurut : (a) pakar, b) praktisi (guru)?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai selama tiga tahun ialah:

- Mengetahui cerita rakyat yang cocok diajarkan kepada siswa SD kelas I (Tujuan tahun I)
- Mengetahui nilai kearifan lokal yang ada dalam cerita rakyat tersebut (Tujuan Tahun I)
- Menemukan cerita rakyat yang cocok diberikan untuk siswa SD kelas I menurut pakar dan praktisi.
- Menemukan nilai kearifan lokal cerita rakyat Bali yang cocok diberikan untuk siswa SD kelas I menurut pakar dan praaktisi.

Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Urgensi penelitian ini ialah ditemukannya solusi model pendidikan karakter bangsa melalui pengintegrasian nilai kearifan lokal cerita rakyat Bali yang relevan untuk pendidikan karakter Siswa SD kelas I. Ini berarti anak telah mendapatkan pendidikan karakter sejak awal, sehingga lebih mudah membinanya.

Temuan yang Ditargetkan

Temuan yang ditargetkan ialah ditemukannya nilai kearifan lokal cerita rakyat Bali yang relevan untuk pendidikan karakter siswa SD Kelas I

Kontribusi Hasil Penelitian terhadap Ilmu Pengetahuan.

Uraian latar belakang, permasalahan yang diteliti, tujuan khusus, urgensi penelitian dan temuan yang ditargetkan seperti terurai di depan, maka kontribusi, hasil penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan ialah memberikan model pendidikan karakter yang efektif dan berdaya guna melalui nilai kearifan lokal cerita rakyat Bali yang relevan untuk pendidikan karakter Siswa SD kelas I. Dengan demikian, guru bahasa Bali akan dimudahkan dalam mencari bahan untuk pembelajaran bahasa Bali dan pendidikan karakter.

1.1 Kearifan Lokal

Purna menyebutkan kearifan lokal adalah local wisdom atau local knowledge (Purna, 2010:2). Pemberlakuan undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22/1000 membuat kearifan lokal semakin diwacanakan. Hobsbown (1983) dalam Mudana (2003) mendefinisikan kearifan lokal sebagai seperangkat praktek yang biasanya ditentukan

oleh aturan-aturan yang diterima secara jelas atau samar-samar maupun suatu ritual atau sifat simbolik, yang ingin menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengulangan yang secara otomatis mengimplikasikan adanya keseimbangan dan keselarasan dengan masa lalu (Purna,2010:2). Kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai luhur budaya setempat. Itulah sebabnya, kearifan lokal merupakan entitas yang menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. (Geertz, 2007). Karena itu kearifan lokal merupakan kebenaran yang menradiasi pada suatu daerah (Gobyah, 2003).

Klasifikasi Kearifan Lokal

Klasifikasi kearifan lokal meliputi :

Tata Kelola; 2) Nilai – Nilai Adat; dan 3) Tata Cara dan Prosedur, termasuk dalam Pemanfaatan Ruang.

Tata Kelola

Sistem kemasyarakatan suatu daerah mengelola struktur sosial dan hubungannya dengan komunitas daerah seperti Dalian Natalu di Sumatra Utara, Nagari di Sumatra Barat, Kasultanan dan Kesunanan di Jawa, dan Banjar di Bali. Masyarakat Toraja memiliki lembaga dan organisasi sosial yang mengelola kehidupan di lingkungan pedesaan. Setiap daerah memiliki adat. Adat memiliki penguasa adat. Penguasa adat, wilayah disebut Bua (Buletin Tata Ruang, 2009). Kewenangan ketua adat dalam pengambilan keputusan dan sanksi serta denda sosial bagi pelanggar peraturan dan hukum adat.

Sistem Nilai

Sistem nilai merupakan tata nilai yang dikembangkan oleh komunitas tradisional yang mengatur etika penilaian baik – buruk, serta benar – salah. Contoh di Bali ada sistem nilai Tri Hita Karana yang menguatkan nilai kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Ketentuan adat harus ditaati oleh komunitasnya. Apa bila ada anggota komunitas yang melanggar, maka ia harus menerima sanksi adat.

Ciri – Ciri Kearifan Lokal

Budaya daerah adalah sistem atau cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya daerah tersusun dari berbagai unsur seperti agama, adat, bahasa, pertanian, peralatan (perkakas), pakaian (busana) arsitektur, maupun seni.

Ciri – Ciri Kearifan Lokal

Mampu bertahan terhadap budaya luar

Mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar

Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.

Mempunyai kemampuan mengendalikan

Mampu memberi arah pada perkembangan budaya

• Menggali Kearifan Lokal

Penggalian kearifan lokal merupakan usaha sadar untuk menjaga dan melindungi budaya tradisional dari gempuran ekonomi dan sosial masyarakat dunia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kini masyarakat dihantui krisis multidimensional dan meningkatnya degradasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengetahuan lokal menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya yang diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut oleh masyarakat dalam kurun waktu berabad (turun – temurun) seperti bidang pertanian, pengelolaan hutan secara adat, pelestarian sumber daya alam dan pelestarian sumber daya air. Beberapa hal perlu dipahami agar kearifan lokal itu dapat diterima,yaitu kearifan lokal itu

masih ada

sesuai dengan perkembangan masyarakat

sesuai prinsip NKRI

diatur dengan undang – undang

Contoh kearifan lingkungan yang digali dari kearifan lokal pada upaya pelestarian sumber daya air adalah : 1) adanya kepercayaan pada pohon rindang dan besar atau goa yang berpenghuni gaib. Konsep pamali larangan kencing di bawah pohon

besar, karena di bawahnya terdapat air yang merupakan perilaku masyarakat tradisional untuk memagari perilaku anak-cucu mereka agar tidak merusak alam sehingga kualitas air maupun debitnya terjaga.

Fungsi Kearifan Lokal

Sirtha (2003) menyatakan bahwa fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut (1) untuk konservasi SDA, 2) mengembangkan SDM, 3) sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, 4) sebagai petuah, pantangan, serta kepercayaan.

1.2 Pendidikan Karakter

Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan Karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya (Samani dan Hariyanto, 2012:43). Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh –sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada siswanya (Winton, 2010). Pendidikan karakter telah menjadi pergerakan pendidikan yang mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan pengembangan etika siswa. Sebab itu, pendidikan karakter harus merupakan upaya terencana untuk memfasilitasi peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai karakter secara terintegrasi dalam proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan pembinaan kesiswaan dan pengelolaan sekolah pada semua bidang urusan (Kemdiknas, 2011:2). Sejalan dengan hal ini, Ratna Megawangi (2004:95) menyebutkan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif pada lingkungannya. Sementara fakry Gaffar(2010:1) menyebutkan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seorang sehingga menjadi satu dalam perilaku

kehidupan orang itu dalam proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan pembinaan kesiswaan, dan pengelolaan sekolah pada semua bidang urusan (Kemdiknas, 2011:2). Sejalan dengan hal ini Ratna Megawangi (2004:95) menyebutkan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif pada lingkungannya. Sementara Fakry Gaffar (2010:1) menyebutkan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi

nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu.

Hakikat Pendidikan Karakter

Penanaman kebiasaan (*habituation*) yang baik adalah penting dalam pendidikan karakter. Berangkat dari kebiasaan ini diharapkan peserta didik, bukan hanya paham (kognitif) mana yang benar dan mana yang salah, tetapi mampu dan peka untuk merasakan (afektif) nilai yang baik dan terbiasa melakukan yang baik (psikomotor) (Kemdiknas, 2011:1). Hal ini berarti pendidikan karakter bukan hanya karakter yang baik (*moral knowing*), akan tetapi juga merasakan dengan baik atau *loving good (moral feeling)*, dan perilaku yang baik (*moral action*). Uraian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter memiliki arti lebih tinggi daripada pendidikan moral (Mulyasa 2011:3). Pendidikan karakter menekankan kebiasaan yang baik terus-menerus dipraktikkan dan

dilakukan (Kemdiknas, 2011:1; dan Mulyasa, 2011:3).

Nilai Kearifan Lokal

Pendidikan karakter melalui pendidikan bernapaskan kearifan lokal yang dikemas dalam cerita amat diperlukan (Rasna, 2015:16). Sehubungan dengan hal ini, maka pendidikan karakter bernapaskan

kearifan lokal akan dikemas melalui buku pelajaran Bahasa Bali siswa SD kelas I. Hal ini dilakukan karena bangsa Indonesia khususnya, dan bangsa-bangsa Timur lain pada umumnya menilai watak dan perilaku kita sebagai kesopanan atau ketidaksopanan (Efendi, 1982:5). Sadar akan hal ini, tampaknya usaha ke arah penegakan nilai-nilai moral dan nilai spiritual melalui pendidikan yang bernapaskan pendidikan karakter dalam kehidupan pelajar, remaja, dan masyarakat pada umumnya menjadi sangat vital (Nashir dalam Suara Karya, 15 Oktober 1993). Berdasarkan hal ini, semua pendidikan yang bernafaskan pendidikan karakter semestinya dimulai sejak usia dini, ketika anak mulai dapat menangkap dan menyadari dirinya (Atie Wardiman dalam Bali Post, 25 April 1997). Itulah sebabnya

nilai kearifan lokal cerita rakyat diintegrasikan ke buku pelajaran Bahasa Bali Siswa SD Kelas I, seperti cerita rakyat Tunjung Mas yang mengandung nilai kearifan lokal: a) *Karuna* (cinta kasih), b) *Tri Hita Karana*, khususnya hidup harmonis antara manusia dengan Tuhan (religius), dan

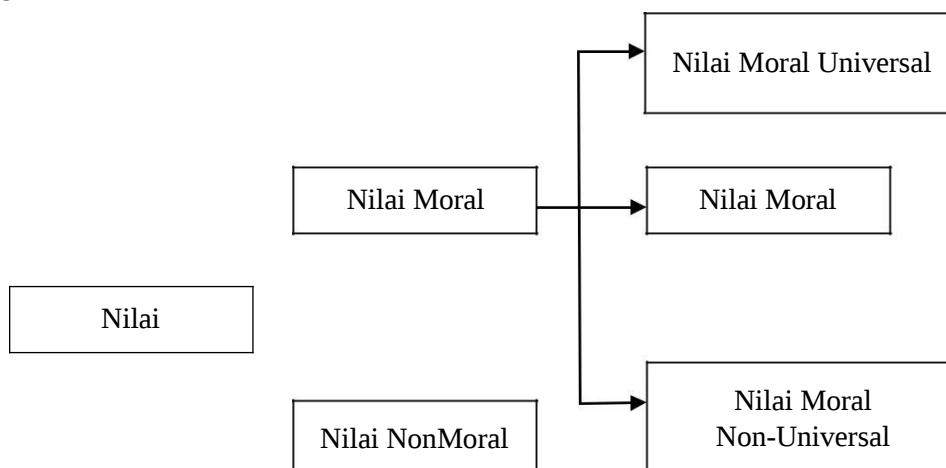
Tri Parartha (punya, asih, dan bhakti). Cerita rakyat Lipi Selem Bukit yang bernilai kearifan lokal: a) harmonisasi manusia-alam dan *lascarya*. Cerita rakyat Siap Badeng yang bernilai kearifan lokal: a) kewaspadaan, dan *karmapala*. Cerita rakyat Ayam Putih Bertelur Emas bernilai kearifan lokal: a) *Tri Dandim* (tiga unsur

pengendalian yaitu *namacika* (pikiran), *wacika* (perkataan), dan *kayika* (perbuatan) dan b) *Mithia Hrdaya* (hindari berpikiran buruk kepada orang lain) (Rasna, 2015:39-

Nilai-Nilai Karakter

Nilai-nilai utama karakter dipilih menjadi: 1) sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan, 2) sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan diri sendiri, 3) sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan keluarga, 4) sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa, dan 5) sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar (Samani dan Hariyanto, 2012:46-49 dan Asmani, 2011:36-41). Lickona (1992) membedakan nilai menjadi dua jenis, yaitu:

nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, ketidakmemihakan, kewajiban memenuhi janji, membayar utang, menyayangi anak. Nilai moral mengatakan apa yang harus dilakukan. Kita harus terikat pada nilai moral, bahkan ketika kita tidak menyukainya. Nilai nonmoral tidak mengandung kewajiban demikian. Nilai nonmoral mengekspresikan apa yang kita inginkan. Saya dapat secara pribadi menghargai kegiatan mendengarkan musik klasik, membaca novel yang bagus, ber-FB-an. Namun jelas tidak ada kewajiban untuk melakukannya (Kesuma dkk, 2011:63). Secara ringkas nilai dapat digambarkan seperti Tabel 03 berikut ini.



Kategori nilai menurut Lickona dalam Kesuma dkk., 2011: 65)

2. Metode

2.1 Desain dan Metode

2.1.1 Desain Penelitian

Sesuai masalah dan tujuan penelitian,
desain riset yang akan digunakan dalam

penelitian ini ialah desain riset deskriptif. Desain ini digunakan sebagai *grand design* dengan rentang waktu pelaksanaan selama tiga tahun (2016-2018). Tahapan penelitian ini digambarkan seperti Tabel 05 berikut ini.

Tabel 04. Bagan Alir Penelitian Kearifan

Lokal Cerita Rakyat Bali yang Relevan untuk Pendidikan Karakter Siswa SD Kelas I

Tahun I (2016)	Tahun II (2017)
Analisis kebutuhan data tahun I • Data cerita rakyat yang cocok untuk siswa SD kelas I • Nilai kearifan lokal yang ada dalam cerita rakyat •	Proses pengembangan meliputi: • Analisis nilai kearifan lokal cerita rakyat dari segi : kognitif, afektif dan psikomotor. • Penyempurnaan melalui uji pakar dan uji praktisi.
Luaran Penelitian • Laporan Penelitian • Artikel	Luaran Penelitian • Laporan Penelitian • Artikel

Rincian tahapan penelitian selama 2 tahun seperti berikut ini.

A. Tahun I Penelitian

A.1 Tahap Awal

Sesuai dengan kebutuhan data tahun pertama seperti terurai pada Tabel 05 di depan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantunan, berpola (karena ada panduan instrumen)

A.2 Pada saat Penelitian Berjalan Tahun I.

A.2.1 Pendekatan yang berkaitan dengan guru

Pendekatan ini untuk menggali data berkaitan dengan data cerita rakyat yang cocok untuk siswa SD kelas I. Diutamakan guru kelas I atau guru yang pernah, bahkan

berpengalaman mengajar di kelas I.

Pendidikan yang berkaitan dengan siswa.

Pendekatan ini berisi analisis keadaan awal siswa dalam bidang taksonomi Bloom (kognitif, afektif, dan psikomotor), selain itu juga dikaji pandangan anak tentang film cerita anak yang disukai. Informasi ini penting untuk menggali data faktor apa yang membuat anak senang pada cerita tersebut. Bila data ini bisa

diperoleh, diharapkan dapat diaplikasikan pada cerita rakyat.

Tahap Kedua

Pendekatan penelitian tahun kedua analisis cerita rakyat Bali yang relevan dari segi afektif, kognitif dan psikomotor yang dilanjutkan dengan uji pakar dan uji praktisi (guru) melalui desk evaluation. Hasil uji pakar dimaksudkan untuk merumuskan cerita rakyat

Bali dan nilainya yang relevan untuk anak SD kelas I. Hasil desk evaluation oleh guru SD kelas I bermanfaat sebagai alat uji validitas cerita rakyat Bali.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini dibedakan atas: a) populasi penelitian guru SD kelas I yang mengajarkan bahasa Bali; b) pakar pendidikan, diutamakan yang memahami bahasa Bali dan cerita rakyat; c) cerita rakyat, dan d) pakar cerita rakyat.

Penjaringan populasi penelitian guru SD kelas I dan pakar pendidikan sebagai informan kunci dilakukan secara purposif

berdasar kepakaran, pengalaman, dan kredibilitasnya. Mengingat langkanya pakar cerita rakyat, maka pakar cerita rakyat itu langsung dijadikan sampel, yaitu Made Taro untuk Badung, Wayan Buda Gautama untuk Gianyar, Dewa Ketut Djareken untuk Buleleng, dan Dr. Wayan Suardiana untuk Kodya. Sampel pakar pendidikan yang memahami cerita rakyat ditentukan secara purposif. Demikian juga sampel guru dan sampel cerita rakyat. Penelitian tahun I (2016) memakai sampel guru seperti tercantum pada Tabel 05.

Tabel 05. Sebaran Jumlah Sampel Penelitian Tahun I (2016)

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah SD	Jumlah Guru
1.	Buleleng	4	4
2.	Badung	4	4
3.	Kodya Denpasar	4	4
4.	Klungkung	4	4
5.	Tabanan	4	4
Total		20	20

Sebaran jumlah sampel penelitian tahun kedua (2017) sama dengan tahun I (2016).

datanya adalah seperti tercermin pada Tabel 06 berikut.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian yang akan dikumpulkan dan metode pengumpulan

Tahun No	Rumusan Masalah	Metode Pengumpulan Data	Instrumen	Analisa Data	Luaran
I / 1	Cerita rakyat apa yang cocok diajarkan kepada siswa SD kelas I	Dokumentasi	Kartu data	Metode Deskriptif Kualitatif	1. Laporan penelitian 2. Artikel
2	Nilai kearifan lokal apa yang ada dalam cerita rakyat tersebut	Dokumentasi	Kartu data		
II / 3	Cerita rakyat Bali apa yang	Kajian naskah,	Cerita rakyat Bali pedoman		1. Laporan penelitian

Tahun No	Rumusan Masalah	Metode Pengumpulan Data	Instrumen	Analisa Data	Luaran
	cocok diberikan untuk siswa SD kelas I menurut : (a) pakar, (b) praktisi (guru).	wawancara	wawancara		2. Artikel
4.	Nilai kearifan apa yang cocok diberikan untuk siswa SD kelas I menurut : (a) pakar, (b) praktisi (guru).	Wawancara dan pencatatan langsung	Pedoman wawancara, kertas dan pulpen	Deskriptif kualitatif	
5.	Bagaimana respon siswa secara akademik dan non-akademik	Observasi, wawancara, pencatatan langsung	Pedoman observasi, pedoman wawancara, kertas, dan pulpen	Deskriptif kualitatif	

3.4 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis pendekatan dan karakteristik penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif secara terus - menerus dari awal-akhir. Tahap analisis akan diawali dengan penyusunan data yang telah terkumpul, dikategorikan, pemolaan berdasar konsep kearifan lokal sampai dapat dirumuskannya simpulan.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Cerita rakyat yang cocok untuk SD Kelas I

Cerita rakyat yang cocok diajarkan kepada siswa SD Kelas I berdasar pendapat

Guru

Guru SDKelas I yang berpengalaman langsung di lapangan mengatakan bahwa materi cerita rakyat yang cocok diajarkan untuk siswa SD adalah

materi cerita rakyat yang diadaptasikan sesuai dengan :

Perkembangan kognitif anak
Perkembangan bahasa anak
Lingkungansosiokultural anak (etnopedagogi)
Lingkunganalam dan lingkungan belajar anak (ekopedagogi)

Perkembangan kognitif anak diperlukan karena cerita rakyat yang ada lebih banyak melihat dari sudut pandang nilai yang ingin disampaikan oleh penulisnya, tanpa mempertimbangkan untuk siapa konsumennya. Apalagi konsumennya adalah anak SD kelas I yang harus dicermati kebutuhan perkembangan belajarnya. Belajar akan terjadi sebagai dampak dari partisipasinya dengan baik untuk

belajar anak serta orang-orang terdekatnya termasuk guru dan orang tua. Anak usia SD kelas I menurut J.Piaget berada pada tahap praoperasional konkret yang bertumpu pada pengalaman langsung, sementara cerita rakyat yang disusun itu tidak mempertimbangkan untuk siapa cerita itu disusun. Oleh karena itu, cerita yang akan digunakan sebagai materi pembelajaran harus dimodifikasi kembali oleh guru sebelum digunakan sebagai bahan pembelajaran baik dari segi kosa katanya, struktur kalimatnya, tingkat kognitifnya, kesesuaian waktu yang dibutuhkan untuk membaca cerita rakyat dengan waktu yang tersedia dalam PBM untuk memfasilitasi anak dalam belajarnya. Anak-anak senang mengenal dan mengidentifikasi benda-benda yang berada di lingkungan sekitarnya, maka pendidik juga perlu memfasilitasi petunjuk-petunjuk yang sederhana dan khusus untuk dapat memfasilitasi anak dengan sebaik-baiknya.

Pakar Cerita Rakyat

Menurut pakar cerita rakyat, seperti Made Taro, W.Buda Gautama, Wayan Suardiana menyebutkan bahwa cerita rakyat yang ada perlu disesuaikan dulu sebelum digunakan sebagai materi pembelajaran, maka sebelum digunakan sebagai materi pembelajaran. Artinya, jika cerita rakyat itu akan digunakan sebagai materi pembelajaran, maka sebelum digunakan materi itu harus dimodifikasi sesuai dengan perkembangan siswa yang akan diajarnya baik menyangkut

psikologi perkembangan kognitif, perkembangan bahasa maupun menyangkut nilai-nilai yang relevan diajarkan kepada siswa. Sebab relevansi ini akan ikut menyumbang kepada tingkat pemahaman siswa. Tingkat pemahaman siswa dibantu oleh : a) perkembangan kognitif, b) perkembangan bahasa anak, c) lingkungan sosiokultural anak ; dan d) lingkungan alam anak. Di samping itu, pengidentifikasian cerita rakyat dimaksudkan juga untuk menyesuaikan antara materi dengan waktu yang tersedia. Misalnya, mendongeng 5 (lima) menit seperti yang disajikan Bapak Made Taro di harian Bali Post (Tokoh) setiap hari Minggu. Oleh karena cerita rakyat itu disusun jaman dahulu, yang kondisinya sangat berbeda dengan cerita kekinian maka guru perlu mengupayakan cara penyajian cerita rakyat sehingga siswa : 1) tertarik dengan cerita rakyat seperti anak tertarik dengan cerita anakyang ada di tv misalnya doraemon, 2) cerita yang utuh disajikan tanpa modifikasi, misalnya tidak menjadi lebih ringkas dengan bahasa yang tak sesuai dengan umur anak, maka cerita akan ditinggalkan, 3) mencermati kondisi ini alangkah baiknya, jika modifikasi itu dilengkapi dengan kemasan IT, bahasa sederhana dan sesuai umur siswa.

C. Pakar Pendidikan

Sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh pakar pendidikan bahwa cerita rakyat saat ini kurang diminati oleh anak-anak. Anak-anak lebih menyukai film cerita

anak yang ada di televisi dibandingkan dengan cerita rakyat. Setelah ditelusuri ternyata ada beberapa sebab yang membuat cerita rakyat ditinggalkan. Sebab itu adalah : 1) faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari cerita rakyat itu sendiri seperti setting cerita rakyat mengambil tempat di gunung, di hutan sehingga kurang cocok dengan lingkungan alam anak sekarang, di samping juga kurang cocok dengan psikologi perkembangan anak. Tokoh cerita rakyat memakai tokoh dewa pewayangan, yang merujuk kepada kesaktiannya tak sesuai/ kurang pas dengan tingkat kemampuan berpikir anak. Sebab anak berada pada posisi berpikir para operasional konkret, sementara materinya berada pada tingkat berpikir abstrak. Hal ini membuat ketidaknyambungan antara materi dengan kemampuan berpikir anak. Hal ini yang juga ikut menyumbang ditinggalkannya cerita. 3). Bahasa cerita rakyat cenderung tak sesuai dengan bahasa anak SD kelas satu. Sebab itu cerita rakyat perlu dimodifikasi sesuai kebutuhan. Faktor eksternal yang ikut mendukung adalah : 1) pendongeng saat ini sulit ditemukan. Berbeda dengan situasi tempo dulu. Para kakek dan nenek sekitar tahun 1960-an selalu setidaknya sering mendongeng terlebih dahulu sebelum cucunya tidur. Sekarang hal ini sulit ditemukan . yang ada sekarang malah para orang tua membelikan anak-anaknya alat elektronik sehingga orang tua bisa fokus pada pekerjaannya untuk mencari uang. Faktor eksternal yang kedua

adalah faktor IT. Sajian cerita dalam film anak-anak jauh lebih menarik dengan IT, dibandingkan dengan sajian cerita rakyat yang tanpa IT. Untuk menjadikan cerita rakyat itu diminati, maka sajian cerita rakyat harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini baik menyangkut faktor internal dan eksternal. Berdasar uraian tersebut dapat diketahui bahwa cerita rakyat yang cocok diajarkan untuk anak SD kelas 1 mempunyai ciri : sesuai perkembangan kognitif, sesuai perkembangan bahasa anak, 3) sesuai lingkungan sosiokultural dan lingkungan alam dan lingkungan belajar anak. Cerita rakyat yang ada masih perlu dimodifikasi sebelum digunakan sebagai bahan ajar.

3.2 Nilai Kearifan Lokal yang ada dalam Cerita Rakyat Bali

Nilai disiplin dan rajin pada Cerita Cupak Gerantang

Cerita cupak gerantang memiliki nilai disiplin dan rajin karena pagi-pagi I Grantang memikul alat membajak sambil menghalau tapi untuk membajak di sawah. Di samping nilai disiplin, nilai kesantunan juga ada dalam cerita rakyat ini. Hal ini terbukti ketika I grantang difitnah oleh I Cupak dengan mengatakan I Grantang bermain saja dan I Cupak yang bersusah payah membajak di sawah. Hal ini mengakibatkan I Grantang disiksa dan diusir ibunya. Keadaan ini dihadapi dengan sifat santun, penuh kebajikan dan pasrah menerima apa adanya.

Laran I Balian Sakti (Petaka Ilmu Si Dukun Sakti) Nilai Pengamalan Ilmu

Ilmu hendaknya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak dibenarkan memperoleh ilmu dengan mencuri dan berlaku curang. Ilmu harus diamankan dengan cara yang benar. Kesalahan mengamalkan tidak hanya berdampak buruk pada orang lain, tetapi juga berdampak buruk pada diri sendiri.

Nilai Pendidikan Tuwung Kuning
Cerita I Tuwung Kuning bernilai pendidikan mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak berjudi. Karena judi bukan hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga menimbulkan percekcoan dalam rumah tangga bahkan bisa jadi nyawa yang menjadi taruhannya.

Nilai Cinta Kasih Berlatar
Kesantunan Cerita Rakyat
Tunjung Mas

Cerita rakyat Tunjung Mas mengandung nilai kearifan local :

cinta kasih (karuna), seperti yang terdapat pada kutipan cerita ucapannya berkarakter santun. Sebab, santun adalah sifat halus dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilaku kepada semua orang (Mustari, 2014 :

Nilai Religius dalam Cerita
Tunjung Mas

Nilai religius terlihat dari perilaku si Pucang yang turun pelan-pelan ke kolam sambil berdoa, sebab nilai religius adalah nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan sesuai ajaran agama (Mustari, 2014 : 1).

Nilai Dermawan dan Asih sebagai
Bagian Tri Parartha Cerita
Tunjung Mas

Perilaku si Pincang berdasar konsep pendidikan karakter suka

menolong sebab suka menolong adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya membantu orang lain (mustari, 2014 : 183)

Nilai Lascarya (Tulus Ikhlas) dan Harmonisasi Manusia Alam
Cerita Lelipi Selem Bukit
Nilai lascarya (tulus ikhlas) terdapat pada cerita lelipi selem bukit dalam bentuk ketulusan I Tundeng yang mau mengorbankan diri menjadi ular siluman untuk mengabdikan pada I Jero Pasek untuk menjaga ladangnya.

Nilai Karma Phala pada cerita
Siap Badeng (Ayam Hitam)
Nilai karma phala pada cerita ini karena Men Kuuk berencana mengadakan pembunuhan kepada ayam hitam dan anak-anaknya yang menginap di rumahnya. Perbuatan ini justru membuat Men Kuuk menderita karena yang disergap ternyata dinding batu yang digunakan ayam untuk melindungi anak-anaknya. karena salah sasaran jadi kakinya tergelincir.

Nilai Tri Dandim (Tiga Unsur
Pengendalian Diri)

Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Cerita rakyat yang cocok diajarkan kepada siswa SD kelas 1 memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1) cerita rakyat itu mengajarkan keadaan seperti : a) kesantunan dalam bertutur, berinteraksi, bersikap, bersosialisasi, pendidikan; b) keimanan yang kuat dan c) kejujuran 2) bahasa cerita rakyat sederhana; 3) ceritanya singkat, semacam mendongeng 5 menit, namun tetap fokus pada karakter iman, jujur dan saling menghormati; 4) isinya sesuai dengan perkembangan kognitif

siswa sehingga tidak melampaui batas kemampuan siswa kelas I

Nilai kearifan loka yang ada dalam cerita rakyat adalah ; 1) karuna (cinta kasih) ; 2) Tri Hita Karana 3) Tri Parartha 4) Lascarya (tulus ikhlas); 5) kewaspadaan; 6) karma phala ; 7) santun; 8) Tri Dandim (tiga unsur pengendalian diri); 9) tidak berburuk sangka (Mithia Hrdaya)

4.2 Saran

Berdasar simpulan di atas, maka disarankan agar dalam pendidikan karakter siswa SD kelas I tidak memakai cerita rakyat secara utuh, tetapi dimodifikasi sesuai dengan ketersediaan waktu, kesiapan, umur anak, perkembangan kognitif. Pendidikan karakter yang relevan untuk siswa SD kelas I dimulai dari nilai keimanan, kejujuran, dan saling menghormati diberikan dan selalu ditekankan pada setiap jenjang dengan memberikan contoh pengungkapan pengalaman hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zakaria (ed). 1985. *Military Civilization Relations in South East*

Asia. Singapore: Oxford University Press.

Bali Post, 1996. *Hilangnya Keakraban Guru-Murid di Bali*.

Choesin, Ezra. M. 2002. *Connectionsn : Alternatif dalam Memahami Dinamika Pengetahuan Lokal dalam Globalisasi*. “dalam Antropologi Indonesia. Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik UI : Yayasan Obor Indonesia.

Geertz, Clifford.2000. *Negara Teater*. Penerjemah : Hartono Hadikusumo Yogyakarta : CV. Adipura.

Mudana, Gde. 2003. “Kearifan Lokal dari Wacana ke Praksis; (Artikel pada Harian Bali Post. 11 September.

Purna, I Made. 2009. *Penguatan Budaya Lokal Melalui Industri Kreatif untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Jnana Budaya*. Edisi 14 No. 14/VIII/2009. Denpasar.

Samani, Muchlas dan Hariyanto. 2012. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

BEBOTOH PEREMPUAN DI ARENA PERMAINAN CEKI: REPRESENTASI PERLAWANAN TERHADAP MITOS INSKLUSIF BERBASIS GENDER

Luh Putu Sendratari, I Ketut Margi

Jurusan Pendidikan Sosiologi, FHIS Universitas Pendidikan Ganesha. Jln Udayana, Singaraja, Bali

Lpsendra@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of research (1) to understand the background to linking tradition insklusif meceki with gender-based myths; (2) understand the background of Balinese women become bebotoh; (3) identify a form of resistance shown by women bebotoh against insklusif myths about meceki. The theory used is the theory of Bourdieu's habitus. Derrida's theory of deconstruction, and the desire of Lacan's theory, the theory of power and violence Bourdieu. The approach used is a qualitative approach. The data source is determined based on the source field and the source document. The results showed (1) factors behind one linking meceki with female gender-based myths Bali because there is a discrepancy between the myth of the female gender in the world percekian Bali; (2) factors behind women Bali became bebotoh namely First, ceki already historically in Balinese society. Second, the passion, the environment, the pressure psikhis; (3) The women bebotoh fought with a passion channeling pleasure, ambition to be a winner, lied to, leaving ideal gender roles. The resistance that eventually led to symbolic violence done to family members.

Keywords: *women bebotoh, insklusif myth, desire and ambition.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian (1) untuk memahami latar belakang dikaitkannya tradisi meceki dengan mitos insklusif berbasis gender; (2) memahami latar belakang perempuan Bali menjadi bebotoh; (3) mengidentifikasi wujud perlawanan yang ditunjukkan oleh perempuan bebotoh terhadap mitos insklusif tentang meceki. Teori yang digunakan adalah teori habitus dari Bourdieu, teori dekonstruksi dari Derrida, dan teori hasrat dari Lacan, teori kuasa dan kekerasan Bourdieu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data ditentukan berdasarkan sumber lapangan dan sumber dokumen. Hasil penelitian menunjukkan (1) faktor yang melatarbelakangi dikaitkannya meceki dengan mitos berbasis gender perempuan Bali karena terjadi ketidaksesuaian antara mitos tentang gender perempuan Bali dalam dunia percekian; (2) faktor yang melatarbelakangi perempuan Bali menjadi bebotoh yaitu Pertama, ceki sudah menyebar dalam masyarakat Bali. Kedua, hasrat, lingkungan, tekanan psikhis; (3) Para perempuan bebotoh melakukan perlawanan dengan hasrat menyalurkan kesenangan, ambisi menjadi pemenang, berbohong, meninggalkan peran gender yang ideal. Perlawanan yang dilakukan akhirnya melahirkan kekerasan simbolik kepada anggota keluarga.

Kata Kunci: *perempuan bebotoh, mitos insklusif, hasrat dan ambisi.*

PENDAHULUAN

Istilah *bebotoh* perempuan sebenarnya kontradiktif dengan stigma tentang perempuan sebagai makhluk rumahan yang pasif dan anggapan lain adalah makhluk yang tidak memiliki modal finansial. Sementara itu, julukan sebagai *bebotoh* yang berasal dari kata *toh* = taruhan jelas memerlukan modal. Stigma tentang perempuan semacam itu ternyata tidak

terbukti pada kasus tradisi *meceki* yang telah menyebar di Bali. Secara historis, keterlibatan perempuan Bali di arena *cekian* tampak nyata dari masa ke masa. Berdasarkan observasi atas aktivitas *meceki* di Bali, perempuan *bebotoh* memiliki dorongan hasrat *meceki* sama kuat dengan hasrat laki-laki *bebotoh*. Kehadiran perempuan Bali di arena judi (*meceki* = aktivitas berjudi) merupakan penyimpangan dari pola umum dari segi kultur Bali.

Permainan *meceki* sebagai salah satu bentuk perjudian merupakan wilayah terlarang bagi perempuan jika dilihat dari tatanan moralitas yang dibangun untuk perempuan. Di samping itu, perjudian bukanlah wilayah yang aman bagi perempuan karena stigma yang ditimpakan kepada perempuan yang berjudi lebih berat dibandingkan laki-laki, karena agama mengisyaratkan agar seorang perempuan bisa menjadi *Sadhwi* yaitu seorang yang berbudi dan mampu memperlihatkan kepribadian yang lebih tinggi (Sudarta, 1991:11). Di samping norma agama, dari sudut hukum pun berjudi dikategorikan perbuatan melanggar hukum. Namun, walaupun demikian kegiatan berjudi yang dilakukan oleh perempuan tetap eksis sampai saat ini. Hal ini menjadi pertanda bahwa *meceki* adalah dunia laki-laki merupakan representasi mitos yang berbasis gender yang ternyata dapat didekonstruksi berdasarkan fenomena empirik di Bali. Pertanyaannya adalah :mengapa *meceki* dikaitkan dengan mitos berbasis gender ? mengapa terdapat perempuan Bali yang menjadi *bebotoh* ? Apakah wujud perlawanan yang ditunjukkan oleh perempuan *bebotoh* terhadap mitos insklusif tentang *meceki* ?

Penelitian tentang keterlibatan perempuan dalam arena judi secara fundamental memiliki arti penting untuk membangun pengetahuan baru tentang perempuan Asia umumnya dan Bali pada khususnya yang selama ini pencitraannya sebagai makhluk yang lemah, tanpa kuasa, tidak otonom. Studi-studi tentang perempuan selama ini cenderung lebih memerhatikan keuniversalan persoalan perempuan ketimbang keunikan sekelompok pelaku. Dalam konteks inilah menurut Handayani (2010:v) pentingnya penelitian representasi sosial sebagai bentuk pemikiran praktis, secara sosial dielaborasi ditandai oleh suatu gaya dan logika khas, dan dianut oleh para anggota sebuah kelompok sosial atau budaya. Jadi, target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penemuan teori baru

tentang perempuan Bali untuk dasar pengembangan IPTEKS-Sosial Budaya dalam penanganan masalah sosial.

Teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menjawab pertanyaan penelitian adalah teori *habitus* dari Bourdieu. Teori ini dipakai dasar untuk memahami latar belakang munculnya perjudian. Di samping itu, dipakai juga teori dekonstruksi dari Derrida, dan teori hasrat dari Lacan. Kedua teori tersebut diharapkan akan membantu peneliti dalam memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan berjudi. Di samping ke dua teori pokok tersebut, digunakan juga teori bantu kuasa dan kekerasan dari Bourdieu untuk memperoleh pemahaman tentang wujud perlawanan dari kegiatan *meceki* yang dilakukan oleh perempuan.

Pierre Bourdieu mendefinisikan *habitus* sebagai pengkondisian yang dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. Hasil suatu *habitus* adalah sistem-sistem disposisi yang tahan waktu dan dapat diwariskan, struktur-struktur yang dibentuk, yang dimaksudkan berfungsi sebagai struktur yang membentuk, artinya menjadi prinsip penggerak dan pengatur praktik-praktik hidup dan representasi-representasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan (Bourdieu, 1992). *Habitus* merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Selanjutnya, *habitus* menjadi dasar kepribadian individu. Pembentukan dan berfungsinya *habitus* seperti lingkaran yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Menurut Haryatmoko (2003:4-23) keseragaman *habitus* dalam suatu kelompok menjadi dasar perbedaan gaya hidup dalam suatu masyarakat. Menurut Barbara Johnson (dalam Audifax, 2007:46), dekonstruksi adalah strategi mengurai teks. Istilah "de-konstruksi" sebenarnya lebih dekat dengan pengertian

etimologis dari kata "analisis" yang berarti 'mengurai, melepaskan, membuka' (*to undo*). Kedekatan etimologis ini menunjukkan bahwa dekonstruksi lebih dimaksudkan sebagai strategi mengurai struktur dan medan pemaknaan dalam teks daripada operasi hierarkis yang implisit dalam teks. Oleh karena itu, jika sebuah teks didekonstruksi, maka yang dihancurkan bukanlah makna, tetapi klaim bahwa satu bentuk pemaknaan terhadap teks "lebih benar" daripada pemaknaan lain yang berbeda.

Kegiatan *meceki* sebagai penyaluran hasrat perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya mengangkat teks sosial tentang hasrat perempuan yang diberitakan tanpa hasrat, tanpa ambisi, tanpa dorongan berkuasa. Dari perspektif Derrida pandangan ini perlu ditunda karena pada prinsipnya, perempuan juga memiliki strategi untuk menggapai kuasa atau melakukan aksi-aksi tandingan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi, masuknya perempuan pada arena judi dapat dilihat dari adanya hasrat yang melandasi, sehingga terjadi sublimasi pada diri perempuan melalui tindakan *meceki*. Di samping itu, representasi kuasa perempuan melalui *meceki* sesuai dengan prinsip dasar feminis.

Bentuk *narcissistic* hasrat memanifestasikan dirinya sebagai cinta/rasa suka (*love*) dan identifikasi sebagai hal yang subjektif genitif dan objektif genitif, mengindikasikan bahwa *other* bisa menjadi subjek ataupun objek dari hasrat, suatu distignif yang diformulasikan Freud sebagai perbedaan antara tujuan aktif dan pasif libido. *Ketiga*, "the other" bisa berupa imaji dari orang lain yang telah ada dalam daftar imajiner (*imaginary register*) atau kode yang mengonstitusi tatanan simbolik atau *other sex* dan/atau objek dari the *real*.

Implikasi yang dapat ditimbulkan dari tindakan berjudi adalah perolehan modal-modal. Menurut Bourdieu (1986:241) tentang konsep "kapital" dijelaskan sebagai akumulasi usaha yang diwujudkan dalam

bentuk materi atau dalam bentuk akumulasi lainnya. Menurut Sutanto (2003:44) dalam ranah sosial ada empat jenis modal, yakni sebagai berikut.

Pertama, modal ekonomi mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Kedua*, modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi, baik melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Termasuk modal budaya antara lain kemampuan menampilkan diri di depan publik, pemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, termasuk sertifikat (gelar kesarjanaan). *Ketiga*, modal sosial menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. *Keempat*, segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk modal simbolik.

Selanjutnya, apabila seseorang atau sekelompok orang ingin mempertahankan "kapital" yang dimiliki, mereka akan melakukan beberapa cara yang sering tidak bisa dilepaskan dari kekerasan (Hendrarti dan Herudjati, 2008:45). Konsep kekerasan, menurut pandangan para ilmuwan sosial pasca modern harus dilihat sebagai "ajang adu kekuatan dan perjuangan" seperti yang dianjurkan oleh Bourdieu (1991) atau yang senada dikemukakan oleh Foucault (1978:94). Jadi, kekerasan bisa terjadi di mana-mana, baik di rumah maupun di luar rumah.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mengikuti langkah metodologis yaitu penentuan lokasi penelitian secara purposive dengan mempertimbangkan kantong-kantong ceking yang ada di Bali, yaitu desa Pempatan (Karangasem), desa Pejeng (Gianyar), Denpasar, Songan (Bangli), Tejakula dan Banjar (Buleleng), Candikuning (Tabanan). Sumber data ditentukan berdasarkan sumber lapangan dan sumber dokumen yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan hasil penelitian sebelumnya; analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, display data, kesimpulan dan verifikasi yang dilandasi dengan prinsip triangulasi metode maupun sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meceki dalam Perspektif Mitos

Berpijak dari pemikiran Barth sebagaimana dikutip oleh Hoed (2011) bahwa mitos dari segi waktu dikelompokkan menjadi dua yaitu mitos masa lalu dan masa kini. Ditegaskan pula mitos yang dimaksud oleh Barth bukanlah mitos sebagaimana pengertian mitologi Yunani tentang dewa-dewa yang disebut mitos eksklusif, tetapi mitos sebagai bagian penting dari ideologi yang disebut mitos inklusif. Mitos menurut Barth bermula dari konotasi yang telah menetap di masyarakat, sehingga pesan yang didapat dari mitos tersebut sudah tidak lagi dipertanyakan oleh masyarakat. Intinya dalam kerja mitos telah terjadi pergeseran makna dari denotasi ke konotasi. Mitos dapat menjadi ideologi atau sebuah paradigma ketika sudah berakar lama, digunakan sebagai acuan hidup dan menyentuh ranah norma sosial yang berlaku di masyarakat. Di masyarakat Bali dikenal pula mitos yang berkaitan dengan citra perempuan ideal dengan sebutan *luh luih* (perempuan utama) dan perempuan *Sadhwi*. Kedua sebutan ini melahirkan stigma tentang perempuan Bali

sebagai *penjaga tradisi*, *penjaga moralitas keluarga*, *pengabdian keluarga* dan stigma ini ada dalam bingkai kultur patriarki. Stigma inilah yang akhirnya menjadi relevan ketika dikaitkan dengan aktivitas *meceki* (judi kartu). Keterkaitan antara keduanya, *meceki* di satu sisi dengan deretan stigma yang diproduksi melalui kultur patriarki merupakan paradoxa. Mitos kekinian yang ada dalam dunia per-*ceki* berupa wacana berikut ini.

1. *Meceki* adalah aktivitas yang memerlukan waktu yang relatif lama dan seringkali harus meninggalkan rumah

Meceki sebagai aktivitas perjudian memerlukan modal finansial, modal sosial

Meceki memerlukan stamina tinggi, kemampuan fisik yang prima

Ketiga wacana tersebut menjadi mitos inklusif dalam arti wacana tersebut berkaitan dengan ideologi yang ditujukan kepada laki-laki Bali yakni makhluk publik, pemilik modal (bisa melalui warisan), garis patriarki bisa menjadi alat memperluas modal sosial, fisik laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Dalam konteks analisis semacam ini terdapat keterkaitan antara mitos inklusif tentang *meceki* yang dipantaskan untuk laki-laki dengan mitos tentang peran gender perempuan. Perempuan Bali digenderkan sebagai perempuan yang dijauhkan dari aktivitas *meceki*.

Latar Belakang Perempuan Bali Masuk dalam Arena Meceki

Masuknya perempuan Bali di arena *ceki* tidak bisa dilepaskan dari latar historis munculnya permainan di Bali. Secara historis (abad XVIII), tradisi *meceki* sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Berpijak dari kisah historis permainan *ceki* yang semula tumbuh di lingkungan *puri* akhirnya tumbuh pula di luar *puri*. Beberapa *puri* di

Bali yang masih tampak meneruskan jejak historis permainan *meceki* adalah Puri Klungkung, Puri Kerambitan, Puri Gde Tabanan. Pengetahuan *meceki* diturunkan melalui cara melihat, menyimak, dan mencoba. Melalui ketiga proses tersebut, perempuan dikenalkan pengetahuan tentang *meceki* (Sendratari dan Margi,2015:5).

Temuan penelitian menunjukkan ada dua faktor besar yang melatarbelakangi masuknya perempuan Bali di arena *ceki*. Pertama, *ceki* sudah menyebar dalam masyarakat Bali. Kedua, hasrat, lingkungan, tekanan psikhis. Pada faktor pertama, ditemukan bahwa kantong-kantong per-*ceki*-an yang terdapat di Bali membuat perempuan

tetap eksis dalam permainan ini. Secara periodik aktivitas percekian tetap ada, bahkan ada juga tercatat kawasan yang menampilkan aktivitas ini hampir setiap hari, terutama saat situasi dirasakan aman dan akan meredup bahkan cenderung dihentikan beberapa lama ketika suasana dirasakan genting (gawat) atau ada pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan dsb. Beberapa Desa di Buleleng (Bny), Gianyar (Pjng), Tabanan (Cnd, Bly), Karangasem (Pmptn) merupakan contoh yang dapat dikategorikan mewakili situs aktivitas per-*ceki*-an. Kehadiran perempuan di arena *ceki* tidak lepas pula dari unsur hasrat. Pernyataan informan berikut sebagai representasi hasrat.

No	Representasi Hasrat	Terjemahan
1	<i>Urusan meceki tiang paling semangat. Biar sing ngelah pis pokokne lamen sube kirimine kode ajak timpale, jeg gede bayune. Panak tiang sing demen nepukin tiang meceki. Men kengkenang sing ngidang ngerem nyet te meceki. Jeg di tongos cekian care kesedot bayune, onyang bakat engsapang. Kurenan, panak aaah pokokne jeg pikiranne cuman di cekian dogen. Lamen sing maan meceki paling kenehe. Buine tiang memule di abian tetep nunas sice apang pemulane payu mael, kan ade anggon meceki</i>	Urusan <i>meceki</i> saya paling semangat. Walaupun tidak punya uang, yang penting jika sudah diberi kode sama teman, besarlah tenaganya. Anak saya sebenarnya tidak suka melihat saya <i>meceki</i> . Terus terang saya tidak bisa mengerem niat <i>meceki</i> . Saat di tempat <i>meceki</i> saya merasa tersedot tenaganya, semua menjadi lupa. Suami, anak pokoknya pikirannya hanya di cekian. Kalau tidak dapat <i>meceki</i> rasanya tidak enak. Saat saya bertani, doa saya satu saja, semoga tanaman saya laku mahal, kan bisa dipakai <i>meceki</i>)(Mng,38Th).
2	<i>Panak tiang nu cenik-cenik, ane paling cenik wawu umur 5 tahun. Lamen nyete meceki sube sing ngidang ngerem ape sing ingetang. Gegaen jumah beresang malu, ape buin kurenane nu jumah harus onyang ngenah pragat. Panak ane cenikan bang beline ane ngurusang, baang gen ye pipis, pragat sube urusane. Ape buin kurenan tiang sing jumah. Tanggung jawab rumahtangga kan urusan somah</i>	Anak saya masih kecil-kecil, yang paling kecil baru berumur 5 tahun. Ketika niat <i>meceki</i> sudah tidak bisa direm, semua hal jadi lupa. Pekerjaan rumah selesaikan dahulu, apalagi suami saya sedang di rumah, semua pekerjaan supaya kelihatan selesai. Anak yang kecil saya minta kakaknya yang ngurus, berikan saja uang, selesai sudah urusannya. Tanggung jawab rumahtangga adalah urusan istri (Mingg,35Th).

Sumber: Data Primer, 2016

Paparan pandangan dua informasi tersebut merupakan pandangan dominan yang tampak dari para perempuan *bebotoh*. Mereka mengakui dorongan bermain kartu cekian telah mengakar dalam dirinya dan kenikmatan bermain ditemukan seiring dengan situasi kalah maupun menang. Kedua kondisi itu diakui memiliki sumbangsih yang sama dalam menjaga hasrat berjudi. Ketika kalah, semangat berjudi bukannya pupus, tetapi justru semakin bergairah meneruskan permainan dengan harapan kemenangan akan menghampiri terus. Hal yang sama juga terjadi ketika menang dalam permainan. Harapan yang muncul agar selalu menang dan kemenangan adalah semangat untuk terus bermain. Diakui pula bahwa permainan yang semula dirasakan sebagai hiburan, mengusir kesepian, mencari kesibukan, mencari teman, menghilangkan kantuk [*kiap*], lama kelamaan dijadikan arena memanen kuasa untuk menambah modal finansial dan modal kultural. Dari ajang permainan ceki para perempuan *bebotoh* mengaku bisa mendapatkan tambahan modal untuk keperluan bersenang-senang, misalnya membeli makanan kesukaan, memberi bekal anak, *plesiran* bahkan ada pula yang memanfaatkan hasil berjudi untuk membangun modal sosial dengan cara meminjamkan uangnya kepada *bebotoh* yang kalah agar permainan tetap bisa berjalan. Walaupun mereka tidak mau disebut rentenir karena beberapa di antaranya tidak menarik bunga atas pinjaman tersebut, namun mereka sadar imbalan yang diperoleh berupa kesinambungan permainan di kalangan grup (Jro W, 55Th, Mngg, 35Th, Kt.Rn,38Th).

Faktor lingkungan merupakan determinan lain atas masuknya perempuan Bali di arena *cekian*. Lingkungan keluarga merupakan faktor menciptakan lingkaran yang masif atas masuknya perempuan di arena judi. Temuan menunjukkan aktivitas *meceki* di kalangan perempuan di Bali justru eksis di kalangan keluarga yang sengaja membangun kelompok eksklusif, di mana *in*

group dibangun dalam jaring kekerabatan antara ipar dengan ipar, mertua-menantu, bibi-ponakan, ponakan-ponakan, *mindon-mindon*. Jaringan antar keluarga diakui sekaligus menjadi benteng pengaman dari adanya incaran petugas keamanan dan aliran uang hanya berputar di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menjadi arena yang mampu membuat pertumbuhan generatif dari *group meceki*. Group perempuan *bebotoh* yang tumbuh di lingkungan keluarga di Bali dapat ditemui di Denpasar, Bangli, Gianyar, Karangasem dan Buleleng. Aspek lingkungan dapat juga dijelaskan bahwa perempuan Bali (yang sudah menikah) masuk ke arena *perceki-an* karena para suami mereka memiliki hobby/kesukaan yang sama. Lingkungan keluarga inti yang sama-sama memiliki kegemaran berjudi (termasuk *meceki*) memberi ruang yang luas bagi perempuan untuk menyalurkan hasrat *meceki*. Keluarga inti yang memiliki kegemaran sama beberapa di antaranya menyiapkan rumahnya untuk dijadikan arena bermain, bahkan ada yang menjadi bandar. Tugas bandar pada umumnya adalah: (1) menentukan jadwal bermain; (2) menghubungi para pemain (*in group* dan *out group*); (3) menyiapkan peralatan [meja, kursi/alas duduk, kartu]; (4) kebutuhan khusus [makan, minum, rokok, MCK, dll]. Para bandar yang sampai menyiapkan kebutuhan khusus memiliki penghasilan tambahan lewat tawaran kebutuhan pokok kepada para pemain. Di samping lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya di Bali membuka ruang pula untuk perempuan menjadi *bebotoh*. Kebiasaan *megebagan* (begadang saat ada yang meninggal), hari raya keagamaan merupakan contoh yang membuat permainan *meceki* menjadi eksis di Bali, bahkan diplesetkan bahwa kegiatan *meceki* sama dengan *ngilangang kiap* (mengusir rasa kantuk).

Para informan memiliki riwayat sebagai *bebotoh* tidak terlepas dari adanya bentukan lingkungan sekitar yang membuat

mereka mengenal sampai akhirnya “kecanduan” *meceki*. Beberapa riwayat yang dimiliki oleh beberapa informan seperti penuturan berikut ini.

“tiang lahir di keluarga sane ten uning indik mejudi, meceki. Duges bajang akeh ane nikang ting kurang bergaul ngajak timpal di banjar. Memang tiang jarang pesuh. Paling-paling pesun tiange mejalan masuk. Ke banjar tiang ten pati kecuali odalan di banjar. Padahal banjar tiang terkenal, tongosne di pusat kota Denpasar. Pas hari raya Galungan, Kuningan dumun di banjar tiang biasa wenten bazar sane ngelibata muda mudi. Tapi tiang ten sareng. Saat bazar tiang sempet cingak wenten anak meceki. Tapi tiang ten pati rungu. Tiang tahu ceki saat tiang menikah. Tiang nganten di keluarga yang tergolong sane kasub di banjar tiang. Keturunan keluarga suami tiang di samping terpendang juga kaya raya. Di keluarga suamilah tiang mengenal ceki melalui mertua perempuan saya yang tergolong jagoan dalam meceki. tiang sareng ipar-ipar yang lain (waktu itu ada tiga ipar) semuanya dilatih main ceki. Ngewai tiang sareng mertua, ipar meceki, setiap usan di paon, sampun siap-siap meceki. Jinah ten masalah. Mekelo-kelo tiang merase meceki sampun biasa sekadi anak istri ring puri. Mekelo-kelo tiang sadar ternyata matuan tiang anak jekehine sareng

pianak-pianakne. Apang tiang sayangange, tuutin tiang manten keneh matuan tiange” (Terjemahannya: saya lahir di tengah keluarga yang tidak tahu tentang judi. Pada waktu muda/remaja saya kurang bergaul sama teman di banjar. Saya tidak biasa pergi ke balai banjar. Padahal banjar saya terkenal

karena letaknya dekat dengan kota Denpasar. Ketika hari raya Galungan dan Kuningan tiba di banjar saya biasa ada bazar yang dikelola oleh muda-mudi. Tetapi saya tidak ikut. Saya sempat melihat di bazar ada orang sedang *meceki*. Tetapi saya tidak hirau. Saya baru mengenal kartu ceki ketika sudah menikah. Saya menikah di keluarga yang terkenal di banjar saya. Di samping terkenal, keluarga suami saya juga sangat kaya. Saya diperkenalkan kartu ceki oleh mertua saya yang ternyata jagoan dalam meceki. Ipar-ipar saya semua didorong oleh mertua perempuan untuk tahu bermain ceki. Hampir setiap hari kami meceki, biasanya setelah selesai di dapur, mulai siap-siap meceki. Uang bagi kami tidak masalah. Lama-lama kami menjadi terbiasa, layaknya seperti kehidupan di lingkungan puri. Tiang akhirnya sadar bahwa mertua perempuan saya ternyata sangat ditakuti dan disegani oleh anak-anaknya. Agar saya disayang, saya ikuti saja kemauan mertuanya (Gk Nnk,53th).

“yang nawang meceki ulian ajak-ajakan timpal. Duges jumah bajang memang sai tepuk anak meceki lamen ade anak mati, hari raya. Kale duges bajang sing taen tertarik meceki. Tapi jani muduhin, care sube kecanduan. Lamen sing man meceki jek paling. Maran-marane ningalin malu anak meceki, terus nyobak ee adi luung asane. Apa buin timpale jek semangat terus ngajakin, mekelo-kelo tepukin pejalan ngalih timpal terus ngalih pipis masih” (Terjemahannya: saya mengenal ceki karena ajakan teman. Pada waktu di rumah asal memang saya sering melihat orang *meceki* ketika ada

orang meninggal, hari raya. Saat itu saya belum tertarik bermain ceki. Tetapi sekarang menjadi ketagihan seperti kecanduan. Kalau tidak dapat meceki sering bingung. Awalnya, melihat dulu orang sedang meceki, kemudian mencoba ikut, ee enak rasanya. Apalagi teman sangat bersemangat terus ngajak, lama kelamaan ketemu jalan mencari teman kemudian tempat mencari uang)(Sra, 37th; Mdn, 38th).

“titiang uning mejudi kira-kira kls 5 SD. Memang waktu niki wawu uning main dom. Di jron tiang anak sampun biasa alit-alit sampun uning mejudi. Wenten piodalan ring pura-pura taler wenten judi mong-mongan, wenten anak padukan/sede-wenten masih anak megadang sambil meceki. Bes terus manten kenten dadosne indik mejudi sampun biasa. Tiang uning meceki taler wit saking penglisir tiang sampun sue uning meceki. Titiang meceki sareng keluarga manten, ten taen ngajak anak len. Paiketan semeton sampun sue nganggen pemargi antuk meceki” (Terjemahan: saya tahu berjudi kira-kira kls 5 SD. Memang waktu itu baru tahu main dom/kartu. Di rumah saya sudah biasa anak-anak kecil sudah kenal judi. Ketika ada upacara piodalan di pura, pasti ada kegiatan judi seperti *mong-mongan*, ada orang meninggal ada kegiatan orang-orang begadang sembari meceki. Karena terus menerus seperti itu, sehingga berjudi itu menjadi hal yang biasa. Kalau saya bisa meceki juga karena orang-orang tua saya dulu sudah biasa meceki. Saya meceki sama keluarga saja, tidak pernah mengajak orang lain. Kegiatan meceki di rumah saya sudah lama dijadikan alat untuk

mempererat ikatan keluarga)(Dy Km, 40th).

Dijadikannya arena *meceki* sebagai media untuk memproduksi kuasa tidak bisa dilepaskan dari pesona cekian yang menyebar dan bisa dimasuki oleh setiap orang tanpa mengenal usia, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi. Tradisi *meceki* berakibat terbukanya ruang bagi perempuan untuk menimba berbagai kuasa. Berpijak dari kasus yang ditemukan di lapangan, dipilihnya meceki karena dianggap bisa dijadikan wahana untuk merawat modal sosial dan memperbesar modal ekonomi. Bagian dari suatu modal sosial adalah menjadikan ikatan keluarga sebagai sebuah kekuatan untuk menyalurkan rasa kebersamaan, dorongan berbagi dan solidaritas. Hal ini tampak argumen yang selalu dikemukakan oleh informan yang berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi (ningrat, jeroan, puri) bahwa permainan ceki dengan keluarga membuat hubungan menjadi lebih erat, bisa saling memberi dan meminjam uang kepada mereka yang tidak punya uang untuk dipakai *meceki*. Keeratan antar anggota keluarga yang menjadi tim pemain ceki ditunjukkan pula dengan selalu saling menjaga perasaan maupun keamanan dari penggrebegan. Bermain dengan anggota keluarga jauh dianggap lebih aman dibandingkan harus mengundang orang lain. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus di keluarga Puri di Bali (Pr Ub, Pr Ptt) eksistensi ceki di kalangan perempuan justru digerakkan oleh mertua, ipar. Bahkan dalam kasus tertentu ditemukan adanya kisah seorang calon menantu yang hendak masuk ke lingkungan puri sudah lebih dahulu di *warning* agar kelak jika sudah menjadi menantu harus belajar meceki.

Fenomena dominan yang tergambarkan dari latar belakang dipilihnya meceki untuk mendapatkan kuasa adalah dorongan merawat modal sosial. Status yang telah dimiliki di keluarga tertentu,

pertemanan yang sudah terjalin dinilai sebagai hal yang urgen dalam hidup perempuan menikah. Melalui upaya merawat inilah para perempuan yang melakukan kegiatan *meceki* membangun imajinasinya agar status sosial yang telah dimiliki tetap terjaga di mata mertua, ipar. Kehidupan sosial yang diwarnai kebersamaan, keakraban antar anggota keluarga yang *meceki* dibayangkan akan diperoleh melalui arena *ceki*. Dalam kasus di lingkungan keluarga Puri, inilah yang menjadi faktor determinan sehingga perempuan memilih *meceki* sebagai arena mendapatkan kuasa yang mana *meceki* sudah menyebar dalam lingkungan yang ada di kehidupan perempuan.

Pada kasus khusus, ada perempuan yang dikategorikan jagoan *meceki* (Suks, 45th) karena yang bersangkutan hampir setiap hari *meceki*, bahkan beberapa kali tercatat tidak pulang ke rumah. Hal ini berakibat terjadinya tindak kekerasan oleh suaminya yang akhirnya mampu menghentikan kegemarannya *meceki*. Catatan lain yang ditemukan dari informan adalah *bebotoh* perempuan Bali dalam konteks lingkungan adalah terdapatnya kumpulan *bebotoh* perempuan yang menyalurkan hasrat *meceki* sebagai balasan atas perilaku suaminya yang kerap meninggalkan rumah sampai ke luar untuk berjudi. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis yang diwarnai dengan percecokan, kekerasan fisik dan psikis, dan perselingkuhan dibalas dengan mencari sublimasi lewat aktivitas *meceki*. Faktor lingkungan dan tekanan psikis yang dialami oleh perempuan *bebotoh* membuat mereka sulit ke luar dari lingkaran komunitas *meceki*.

Pada kasus yang sifatnya khusus ditemukan beberapa perempuan yang memilih *meceki* sebagai arena memproduksi kuasa karena alasan tekanan psikis yang dialami di dalam keluarga. Ada sekumpulan perempuan yang membentuk tim pemain yang sama-sama punya alasan memilih berjudi (*meceki*) sebagai balasan karena

suaminya menjadi penjudi ke luar desa meninggalkan rumah sampai sehari-hari. Jarangnya mereka bertemu diakui sebagai tekanan psikis. Lingkungan fisik dan kerja yang keras yang diwarisi oleh suaminya membuat mereka mencari sublimasi dengan memilih permainan yang sebanding dengan kebiasaan suami mereka. Ada di antaranya (Skr, 25th; KmW, 35th) yang kerap kali mengalami kekerasan simbolik maupun fisik merasa menemukan “hidup” yang lebih bergairah ketika *meceki*. Mereka puas berekspresi, puas menimba kebohongan untuk disebar ke pada anak dan suami. Saat suami tidak di rumah, mereka secara leluasa menjalankan peran sebagai ibu sesuai dengan apa yang dimau tanpa kontrol dari suami.

Kurenan tiang anak bebotoh sajan. Metajen paling sesai, lamen galungan meceki. Metajen kanti engsap mulih. Anak metajen joh, tiang sai sing nawang kije kaden pejalane. Kadang dingeh di buleleng, di Badung ah pokokne ileh-ileh. Jumah memang tiang baange gegaen di tambang, medagang oli. Jeg misang-misang rage ngidupang dewek apang panake payu medaar, mebelanje. Aminggu kadang duang minggu mare nepukin kurenan. tiang taen megerengan lantas tiang antemen baan tiang protes dia punya selingkuhan. Daripada sakit keneh adenan meceki (Km, W, 35th) (Terjemahan: suami saya penjudi kls berat. Adu ayam paling sering, tetapi ketika hari raya Galungan barulah *meceki*. Berjudi sabung ayam sampai lupa pulang. Berjudinya jauh dari rumah, saya seringkali tidak tahu entah kemana perjalanannya. Kadang-kadang saya dengar di Buleleng, di Denpasar, yach pokoknya ke mana-mana. Di rumah memang saya diberikan pekerjaan nafkah di tambang, berjualan oli. Saya berusaha sendiri untuk bertahan agar

bisa memberi anak makan dan belanja. Seminggu bahkan sering dua minggu baru lihat suami. Saya pernah bertengkar kemudian saya dipukul gara-gara saya protes dia punya selingkuhan. Daripada sakit hati lebih baik *meceki*.

Kasus yang ditemui di lapang tentang adanya perempuan Bali yang masuk ke arena ceki karena dorongan ketidakpuasan atas kondisi yang menekan di dalam keluarga, memang bukan merupakan kasus yang dominan tentang latar belakang perempuan Bali memilih arena *meceki* untuk memproduksi kuasa. Namun, kasus ini menjadi menarik ketika kasus yang menimpa Km, W akhirnya menjadi contoh bagi yang lain untuk mencari jalan keluar yang sama. Group *meceki* yang dimiliki oleh Km, W adalah perempuan yang menghadapi kondisi serupa di tengah keluarganya. Hal pertanda bahwa manusia mencari jalan untuk keluar dari masalah yang menghimpitnya menuju ke lingkungan yang dianggapnya akan memberikan rasa aman. Soliditas group ini tampak dari cara mereka menjaga *in group* dengan cara menjaga hasrat bermain satu sama lain, memberi semangat, saling merahasiakan, dan saling membantu modal *meceki*. Sejalan dengan terbentuknya soliditas kelompok, hasrat *meceki* semakin kuat, mereka merasa sulit keluar dari kebiasaan ini dan diakui *meceki* ibarat candu yang menjerat dan sekaligus memberi kepuasan dan kebebasan untuk menyalurkan ekspresi (kesenangan maupun kemarahan).

Wujud Perlawanan Perempuan Bebotoh terhadap Mitos Inklusif

Mitos inklusif dalam relasi perempuan dan laki-laki menjadi materi kehidupan sehari-hari antar keduanya. Perempuan umumnya ditimpakan mitos-mitos yang umumnya diterima tanpa *reserve*. Dalam kaitan aktivitas *meceki* terdapat beberapa mitos yang ditujukan untuk perempuan Bali, misalnya: “*anak luh sing pantes meceki, dadi bebotoh, ngalain umah*

kanti jam-jaman, megadang, sing inget ajak kurenan, pianak, mogbog” (perempuan sesungguhnya tidak pantas *meceki*, menjadi penjudi, meninggalkan rumah sampai berjam-jam, begadang, tidak ingat suami-anak, dan perilaku berbohong). Mitos inklusif semacam ini akhirnya menjadi ideologi yang mengurung perempuan Bali dalam tataran gender spesifik perempuan, yang selalu diartikan perempuan dalam lingkaran keluarga adalah orang rumahan, mengabdikan sama suami dan anak, tidak berbohong, dan selalu setia. Tetapi ideologi ini tidak berlaku di kalangan perempuan *bebotoh*. Temuan penelitian menunjukkan perempuan *bebotoh* melakukan perlawanan atas mitos inklusif yang ditimpakan pada perempuan Bali pada umumnya. Wujud perlawanannya adalah : (1) menjadi *bebotoh* tanpa takut stigma; (2) *meceki* lanjut saja, yang penting urusan rumah beres sesuai cara masing-masing; (3) sanggup juga mengimbangi fisik laki-laki untuk bertahan bermain; (4) tidak harus selalu jujur.

Beberapa pandangan informan yang merupakan representasi perlawanan dapat dicermati berikut ini.

“*sing saje ape anak luh sing dadi meceki, anak to permainan yen gen dadi milu, asal bise, asal wanen, asal ngelah pipis. Unduk gegaen jumlah anak dados atur. Nyakan, darang nasi, manting anak care janine sube ade anek nyemak, yang penting ngelah pipis. Panak tiang nu cenik belin ne baang ngajak. Lamen kurenan tiang nu jumlah pragatang malu apang ye sing galak. Lamen Galungan, rahinan gede apang suud malu mebanten mare meceki. Tiang biasa mogbog. Lamen takonange ajak kurenan: kengken menang ape kalah? Tiang sing ten ngorahang menang, orahang sube kalah, lamen sing ngelah pis nyilih malu 1 juta, kale de orahang anggon meceki, ngelah pis 2 juta, 1 juta pasti ade*

anggon meceki. Pokokne ten ade anak bebotoh itu jujur. Sebenarnya suami saya hanya beri ijin meceki hanya saat hari raya. Tapi, karena saya suka, mengkeb-mengkeb meceki” (Terjemahan: tidaklah benar perempuan itu tidak boleh *meceki*, itu kan permainan di mana setiap orang boleh ikut, asalkan bisa, berani dan punya uang. Masalah pekerjaan rumah tangga bisa diatur. Memasak nasi, lauk, nyuci saat ini kan sudah tidak masalah, yang terpenting punya uang. Anak saya yang masih kecil, saya suruh kakaknya yang jaga. Kalau suami saya di rumah, selesaikan terlebih dahulu semua pekerjaan supaya dia tidak marah. Saat hari raya Galungan, hari raya besar, selesai upacara barulah pergi ke tempat *meceki*. Saya biasa berbohong. Kalau di tanya sama suami: bagaimana menang atau kalah? Saya tidak pernah bilang menang, selalu bilang kalah. Kalau tidak punya uang pinjem dulu 1 juta, tapi tidak bilang untuk *meceki*, punya uang 2 juta, pasti ada 1 juta untuk *meceki*. Pokoknya, tidak ada *bebotoh* yang jujur. Sebenarnya, suami saya hanya memberi ijin *meceki* saat hari raya, tetapi karena saya senang, jadinya sembunyi-sembunyi saja”

Mitos tentang stereotip perempuan harus menang tidak terbukti dalam permainan *meceki*. Temuan menunjukkan bahwa kemenangan adalah target yang selalu dijaga oleh pemain. Sejalan dengan spirit judi, ternyata aktivitas *meceki* dirasakan sebagai hal yang bisa dijadikan wahana untuk memanen hasrat. Salah satunya adalah hasrat untuk mendapatkan modal. Memperbesar modal finansial akhirnya menjadi bagian penting dalam diri seorang *bebotoh*. Semua perempuan *bebotoh* mengakui bahwa kemenangan adalah bagian dari target

permainan. Menurut mereka, tidaklah sepenuhnya benar bahwa *meceki* itu sebagai hiburan untuk perempuan agar bisa keluar dari rutinitas. Keinginan menang selalu membayangi semangat untuk bermain dan bermain lagi. Sebaliknya, kekalahan adalah bayangan buruk yang mampu mengubah pensifatan perempuan, misalnya ramah, lemah lembut, penyayang, sabar dan sebagainya. Semua itu menjadi sirna ketika bayangan kalah dalam permainan mulai tampak. Pengalaman informan tentang ini adalah berikut ini.

“maran-maran main bih jeg kendel. Kenehe beh jani be lakar ngidang menang. Selalu keto bayanganne. Sing taen ngelah keneh kalah. Paling sing kenehe nah lamen jani ye kalah buin mani pasti kel menang, sing ade anak kalah dogen. Nah lamen sube tanda-tanda kalah be mulai paling, sebenge mulai len, jite kebus, otake kebus kenehe kebus, ah pokokne jek kebus. Misalne lamen ngabe pis 1 juta, tanda mulai jite kebus lamen sube kalah 500 mulai be jelek bayune. Lamen ade ane nundik atau nyanden bangras sube : ngoyooooongggg cang be kalah” (Terjemahannya: awal-awal bermain pasti muncul rasa senang. Dalam hati selalu berharap akan mendapat kemenangan. Selalu begitu bayangannya ketika akan bermain. Tidak pernah punya bayangan kalah. Paling tidak harapan yang dibangun, yach kalau umpama sekarang kalah, besok pasti menang, tidak ada orang bermain kalah terus. Ketika tanda-tanda kalah barulah bingung, forem muka berubah, pantas panas, otak panas, hati panas. Pokoknya semuanya panas. Misalnya, jika membawa uang 1 juta, tanda-tanda mulai pantas panas kalau sudah kalah mulai 500 ribu mulailah nggak enak perasaannya. Kalau ada yang

nyolek atau menggoda pasti marah dengan berucap: diaaaaaammmmmmm aku sudah kalah)(Mngk, 48th).

Alasan memperbesar modal ekonomi dari arena cekian sangat kentara di kalangan perempuan *bebotoh* yang taruannya skala menengah ke bawah. Mereka yang ada di kelas bawah secara ekonomi (misalnya taruhan 2000 dengan modal 30 -50 ribu rupiah) biasanya menaruh harapan yang besar untuk mendapatkan pelipatan finansial melalui kegiatan bermain ceki. Tetapi hal ini berlaku juga di kalangan *bebotoh* yang tergolong berkelas. Dalam konteks ini ditemukan seorang perempuan saudagar di wilayah Tabanan yang memiliki julukan ratu ceki (Mlw,60th) karena kegemarannya *meceki* dengan taruhan yang tinggi dengan pemain-pemain ber kelas dan dia terbiasa *meceki* di tempat istimewa yaitu hotel berbintang. Harapan menang tidak pernah pupus, terlebih dengan taruhan yang tidak main-main – dari uang tunai sampai mobil. Pamornya mulai memudar sejalan dengan usia dan suramnya kegiatan menjadi saudagar sayur mayur.

Di samping itu, ada pula perempuan yang merasa sangat menikmati dunia percekian karena dirasakan saat menang memberikan kebahagiaan yang luar biasa sehingga bisa memuaskan kebutuhannya. Berikut pengakuannya.

“beh lamen icang menang langsung be kedek ngakak sambil ngeyek timpal. Nah jani sube menang laku meli nasi di Pan Sukertene, ade anggon merebonding, binsep melali ke Toyabungkah, ngalih yeh panes ditu mememan apang seger lan gede bayune”(Terjemahannya: ketika menang langsung saya ketawa ngakak sembari menggoda teman yach sekarang sudah menang mau membeli nasi di Pak Sukerta, ada modal untuk merebonding, sebentar

mau plesiran ke Toyabungkah, mencari air panas untuk berendam supaya segar dan bertambah tenaganya) (Skrt, 25th).

Para perempuan *bebotoh* mengekspresikan kemenangan dengan berbagai cara. Harapan untuk menang selalu dipelihara sehingga perempuan *bebotoh* sulit keluar dari kegemarannya *meceki*. Pada kasus tertentu ada di antaranya yang tidak punya uang tetapi bisa *meceki*. Hal ini bisa terjadi karena bujukan teman yang mengajak bermain dengan meminta datang saja, soal uang untuk *meceki* didapat dari peminjaman para bandar yang mengajaknya.

Di daerah Gianyar, perempuan *bebotoh* memilih bertahan bermain ceki karena in group yang diajak *meceki* membentuk kelompok arisan bersamaan dengan *meceki*. Ada dua materi arisannya, *pertama* arisan uang, *kedua* arisan babi. Kedua jenis arisan tersebut biasanya dikelola oleh bandar. Uang yang diperoleh dari arisan di cekian dipakai untuk modal *meceki* kembali. Putaran aktivitas dan peluang menimba berbagai modal ekonomi membuat perempuan *bebotoh* merasa menikmati permainan *meceki* sebagai dunia yang menyenangkan untuk menimba kuasa.

Pada dasarnya, perempuan *bebotoh* melakukan perlawanan dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan stereotip gender perempuan, misalnya meluapkan hasrat bersenang-senang ke luar rumah : *lamen menang biasane kene : Beh nen cang kayeh di toye bungkah apang anget, terus meli nasi di pak sumantrene* (Terjemahan: yach, nanti saya kalau menang akan mandi di Toya Bungkah, biar hangat kemudian membeli nasi di Pak Sumantra), mencari uang, meluapkan amarah (terutama saat kalah) dengan mengumpat dengan kata-kata kasar : *ngoyong, wak be kalah* (Terjemahan: diammmmm, saya sudah kalah). Perempuan *bebotoh* tidak tampil sebagai perempuan pada tataran gender ideal. Mereka umumnya tampil dengan karakter : lugas, agresif dan

berani. Wujud perlawanan terhadap mitos insklusif masih terbatas pada perlawanan di lingkup internal keluarga inti. Perlawanan atas mitos inilah yang dijadikan dasar untuk memproduksi kuasa untuk memperoleh modal finansial, modal sosial dan modal intelektual. Temuan penelitian menunjukkan pula bahwa hasrat menyalurkan kesenangan, ambisi menjadi pemenang, meninggalkan peran gender yang ideal merupakan cerminan bahwa perempuan *bebotoh* menunjukkan cara perlawanan untuk ke luar dari pola umum peran gender perempuan Bali. Hanya saja, perlawanan yang dilakukan akhirnya melahirkan kekerasan simbolik yang ditunjukkan ke anggota keluarga (suami maupun anak-anak mereka).

PENUTUP

Hasrat menyalurkan kesenangan, ambisi menjadi pemenang, meninggalkan peran gender yang ideal merupakan cerminan bahwa perempuan *bebotoh* menunjukkan cara perlawanan untuk ke luar dari pola umum peran gender perempuan Bali. Hanya saja, perlawanan yang dilakukan akhirnya melahirkan kekerasan simbolik yang ditunjukkan ke anggota keluarga (suami maupun anak-anak mereka). Permainan *meceki* dikaitkan dengan mitos berbasis gender karena permainan *meceki* yang tergolong ke dalam aktivitas perjudian dari perspektif gender perempuan dihubungkan dengan urusan pantas dan tidak pantas terhadap perempuan. Terdapatnya perempuan *bebotoh* di Bali tidak bisa lepas dari perjalanan historis permainan *Mahyong* yang masuk ke Bali sekitar abad XVIII. Melihat, menyimak dan mencoba merupakan rangkaian yang dialami oleh para perempuan *bebotoh* sehingga dalam jangka waktu tertentu (biasanya tidak sampai 1 bulan) sudah berani bermain dengan para pemain yang sudah tergolong mahir. Di samping faktor historis, kondisi lingkungan, tekanan psikhis merupakan determinan lainnya yang

menyebabkan terbentuknya komunitas perempuan *bebotoh*. Sementara itu, wujud perlawanan yang tampak dari perempuan *bebotoh* adalah berani meninggalkan peran gender ideal, berani menunjukkan kemarahan dan berbohong untuk menemukan rasa aman.

Artikel ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan itu, terimakasih kepada Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti R.I, Kepala Desa Songan, Pejeng, Pempatan, Candikuning dan Sambirenteng, para informan yang telah membantu selama penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Audifax. 2007. *Semiotika Tuhan. Tafsir Atas Pembacaan Manusia Terhadap Tuhan*. Yogyakarta: Penerbit Pinus.
- Bourdieu, Pierre. 1986. The Form of Capital". Dalam *Handbook of Theory and Research for The Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- , 1992. *Language and Symbolic Power*. Diterjemahkan oleh Gino Raymond. Cambridge: Polity Press.
- Foucault, Michel. 1978. *The History of Sexuality: An Introduction*. Vol 1. Diterjemahkan oleh Robert Hurly. London : Penguin.
- Handayani, Christina Siwi. 2010. Menjawab Tantangan Kebutuhan Produksi Pengetahuan di Indonesia. Dalam Christina Siwi Handayani (Editor). *Representasi Sosial: Seksualitas, Kesehatan, dan Identitas. Kumpulan Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma. Halaman: iii-v.
- Haryatmoko. 2003. "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa, Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu". Dalam *Basis*. No. 11-12

- Tahun ke 52. November-Desember.
Yogyakarta: Yayasan Basis.
- Hendrarti, I.M dan Herudjati Purwoko. 2008.
Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural.
Jakarta : PT Indeks.
- Hoed, Beny. 2011. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sendratari, Luh Putu. 2015. *Kantong-kantong Cekian di Bali Dalam Perspektif Historis: Arena Bebotoh Perempuan*
Untuk Meraih Kuasa. Makalah
Disampaikan pada Seminar
Internasional di Universitas Negeri
Malang
- Sutanto, Irzanti dan Ari Anggari Harapan.
2003. *Prancis dan Kita: Strukturalisme, Sejarah, Politik, Film, dan Bahasa*. Muridan. S
Widjojo (Penyadur). Jakarta :
Wedatama Widya Sastra.

ANALISIS *MARKETING MIX* POP HOTEL SINGARAJA

N. Nym Yulianthini, N. L. Henny Andayani

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Jurusan D3 Perhotelan, Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: yulianthini_nyoman@yahoo.com

ABSTRACT

This research aimed to analyze the marketing mix (7P) at the POP Hotel Singaraja, problems that occur is the declining number of tourists coming to Bali. This study uses qualitative descriptive troubleshooting procedures investigated by describing / depicting the state of the subject / object of research. Data collection techniques through observation, interviews using descriptive research method qualitative data collection techniques are observation, interview and documentation study. The results of this research indicate that the hotel management demanded a flair for doing business strategies in order to increase the profit of companies where the marketing strategy is a strategy that should be applied by the company to maintain its viability. The marketing strategy that has been done, such as marketing mix 7P namely: Product, Place, Price, Promotion, Process, People and Physical Evidence. In addition, management also make improvements on the internal side, namely by strengthening the management functions of management. Based on the analysis of the marketing mix, that Pop Hotel Singaraja sell products in the form of rooms, food and drinks at the restaurant and swimming pool. All rooms are identical, the pop room where the rent is an average of Rp 300,000 / day. Pop Hotel Singaraja, in cooperation with travel agents travel agents both locally and with national and international travel agents. Promotion is done through online is via the web or offline. Pop Hotel always pay attention to all employees in providing services to fit with the corporate culture.

Keywords: marketing mix, business strategy, service, pop hotel

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bauran pemasaran jasa (7P) pada POP Hotel Singaraja, permasalahan yang terjadi adalah menurunnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mempergunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen hotel dituntut suatu kejelian untuk melakukan strategi bisnis guna meningkatkan profit perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan salah satu strategi yang harus diterapkan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Strategi pemasaran yang telah dilakukan, seperti bauran pemasaran jasa 7P yaitu: Product, Place, Price, Promotion, Process, People dan Physical Evidence. Di samping itu manajemen juga melakukan perbaikan dari sisi internalnya yaitu dengan memperkuat pengelolaan fungsi-fungsi manajemennya. Berdasarkan analisis marketing mix, bahwa Pop Hotel Singaraja menjual produknya berupa kamar, makanan dan minuman di restoran serta kolam berenang. Semua kamar sama jenisnya, merupakan pop room dimana harga sewanya rata-rata Rp 300.000/hari. Pop Hotel Singaraja, melakukan kerjasama dengan travel agent baik travel agent lokal maupun dengan travel agent nasional dan internasional. Promosi yang dilakukan melalui online yaitu melalui web maupun offline. Pop Hotel selalu memperhatikan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan agar sesuai dengan budaya perusahaan.

Kata Kunci: marketing mix, strategi bisnis, pelayanan, pop hotel.

1. PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah menjadi salah satu daerah tujuan wisata dunia yang terkenal di mancanegara. Agar tetap menjadi daerah tujuan wisata menarik, sarana dan prasarana bidang pariwisatanya tersebut terus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari para wisatawan, seperti perbaikan fasilitas pintu masuk kedatangan wisatawan. Bandara Ngurah Rai telah direnovasi menuju arah yang lebih baik, dengan melaksanakan pembaharuan secara fisik pada keberangkatan internasional dan perluasan areal parkir pesawat dan taxi. Dari perluasan areal tersebut, daya tampung bandara menjadi lebih besar dan jumlah pesawat yang mendarat akan lebih banyak, dengan demikian diharapkan jumlah wisatawan mancanegara maupun domestik akan mengalami peningkatan, tetapi berdasarkan fakta hingga akhir tahun 2014 kunjungan wisatawan yang datang ke Bali mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas politik nasional, serta ada larangan pejabat dan aparat pemerintah menyelenggarakan rapat di Hotel. Berdasarkan data statistik, jumlah kunjungan wisatawan domestik yang datang berlibur ke Bali selama tahun politik 2014 hampir setiap bulan berkurang, kecuali pada Hari Raya Idul Fitri ada pelonjakan kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan domestik selama tahun 2014 sebanyak 5,1 juta orang selama Bulan Januari-Oktober 2015, berkurang 5,95% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 mencapai 5,4 juta orang (Dinas Pariwisata Prov. Bali). Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri-industri pariwisata, terutama industri perhotelan.

Implikasi dari perkembangan industri perhotelan tidak berarti bahwa masing-masing hotel mengalami perkembangan yang signifikan, sangat tergantung dari manajemen masing-masing hotel dalam memasarkan hotelnya. Semua Perusahaan tanpa terkecuali perusahaan dalam industri perhotelan diharapkan memiliki suatu strategi agar mampu bersaing dalam suatu industrinya. Manajemen suatu perusahaan yang tidak jeli dalam memantau perubahan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan manajemen yang jeli melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal. POP Hotel Singaraja merupakan salah satu *city hotel* yang berlokasi di Jalan Surapati No 12-14, Pertokoan Hardys Singaraja Square, Singaraja. POP Hotels merupakan sebuah jaringan *modern stylish budget hotel for smart & eco-friendly travellers* dan merupakan hotel pertama yang didirikan di pusat kota Singaraja. Hotel ini memiliki 5 lantai dengan 149 kamar serta dilengkapi fasilitas ruang *meeting* serta fasilitas kolam renang yang

terletak di pinggir pantai Eks. Pelabuhan Buleleng. Hotel ini memiliki 7 departemen fungsional yaitu: Departemen Kantor Depan, Tata Graha, Makanan dan Minuman, Keuangan, *Engineering*, Sumber Daya Manusia, dan Pemasaran. Dengan dukungan tenaga ahli disemua bidang berusaha memberikan pelayanan kepada konsumennya.

Manajemen hotel dituntut suatu kejelian untuk melakukan strategi-strategi bisnis guna meningkatkan profit perusahaan. Strategi pemasaran merupakan salah satu strategi yang harus diterapkan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Tentunya banyak biaya yang telah dianggarkan dalam memasarkan produknya dengan segala strategi pemasaran yang telah dilakukan, seperti bauran pemasaran jasa 7P yaitu: *Product, Place, Price, Promotion, Process, People* dan *Physical Evidence*. Disamping itu manajemen juga melakukan perbaikan dari sisi internalnya yaitu dengan memperkuat pengelolaan fungsi-fungsi manajemennya. Hal itu dilakukan untuk memenangkan persaingan yang ketat ditengah-tengah menjamurnya bisnis akomodasi di Singaraja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi (pengamatan langsung di objek penelitian), wawancara mendalam terhadap pihak responden yang telah ditetapkan, dan studi dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah Pop Hotel Singaraja dan objeknya *marketing mix*. Definisi operasional variabel yang dapat diidentifikasi adalah *marketing mix* (7P) yaitu: (1) *Product* adalah: jasa pelayanan yang dijual kepada wisatawan berupa kamar tidur, makanan dan minuman, dan ruang pertemuan.

(2)*Price* adalah: sejumlah nominal yang ditawarkan kepada tamu sebagai nilai tukar suatu jasa perhotelan. Harga yang fleksibel memudahkan dalam pemasaran produk.

(3)*Place* adalah: letak suatu hotel dalam suatu daerah, letak hotel yang berada pada daerah pinggir pantai merupakan tempat yang strategis. Efektifitas penggunaan saluran distribusi adalah: ketepatan perusahaan dalam memilih biro perjalanan yang *benefit*.

(4)*Promotion* adalah Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produk dengan harapan produknya tersebut dibeli oleh konsumen. Semakin sering kegiatan tersebut dilakukan semakin gencar promosi dilakukan.

(5)*People* adalah: Karyawan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Karyawan yang dapat memberikan *satisfaction* kepada konsumen adalah karyawan yang profesional.

(6)*Process* adalah: kemudahan konsumen melakukan proses sewaktu datang dan tiba di hotel sampai berangkat kembali ke daerah asalnya. Proses yang tidak berbelit-belit adalah proses yang dibutuhkan wisatawan.

(7)*Physical Evidence*: fisik bangunan perusahaan berupa kemegahan eksterior hotel dan kemewahan interior ruangan kamar dan *meeting room*. Semakin megah eksterior dan semakin mewah interior, mempermudah dalam pemasaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan pengelolaan fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pop hotel hardys merupakan hotel yang berdiri di pusat perkotaan. Hotel ini terletak di Jalan Surapati no 12-14, Singaraja. Hotel ini didirikan pada tahun 2012 dan diresmikan pada tahun 2014. Hotel ini memiliki 149 kamar dengan harga yang sama dan fasilitas yang sama. Hotel ini mengklaim dirinya sebagai “*modern stylish budget for smart &eco-friendly travelers*” yang merupakan hotel bergaya modern pertama di Kota Singaraja. Hotel ini didirikan oleh PT. Hardys Hotel Indonesia yang bekerja sama dengan Tauzia Hotel Management dibawah kepemimpinan Presdir GH Holding, Ir. Gede Agus Hardyawan. Hotel ini menyasar kalangan bisnis, *travel agent* dan para *traveler* yang datang ke Singaraja.

Visi Misi dari Grup Hardys yaitu:

Visi

Menjadi salah satu grup usaha terdepan dan terpercaya yang mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Bali dan mampu bersaing di tingkat nasional melalui penerapan *good governance* (GCG).

Misi

Menjalankan 9 bidang usaha yang menjadi *core business* perseroan yaitu *Retail, Property, Land, Hotels, Agro, Rekreasi keluarga, Investment, Transportasi dan Advertising* dengan tetap menjalankan tanggung jawab sosial melalui Hardy's Foundation.

Menjadikan perusahaan sebagai suatu badan usaha yang dapat dipercaya oleh *stakeholders* dengan selalu memberikan yang terbaik melalui *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha. Menjadikan perusahaan sebagai bagian bagi karyawan dengan menciptakan pendidikan,

pelatihan, dan sistem karir yang memungkinkan karyawan untuk berkembang serta memberikan kesejahteraan kepada karyawan sesuai dengan standar industri dimasing-masing unit bisnis.

Memberikan pelayanan optimal melalui kemudahan akses informasi secara *online* bagi para pelanggan/*stakeholders*.

Bauran Pemasaran

(1) *Product*, yang merupakan produk yang dijual yaitu kamar, makanan dan minuman yang ada di restaurant dan bar, sarana olahraga, kolam berenang dan yang lainnya. Hotel ini terdiri dari 5 lantai dan 149 kamar yang disewakan. Kamar hotel ini memiliki dua *view* yaitu *mount* dan *beach*. Adapun fasilitas kamar yaitu *bath and toilet all rooms, shower all rooms, air conditioner all rooms, shower toilet, tv, trouser press, bath towel, shampoo, soap, dan shower toilet*.

Adapun fasilitas-fasilitas lain yang ada di hotel ini yaitu *swimming pool, free wifi, air conditioning, airport transportation, bar/lounge, beach, business center, concierge, fitness center, free breakfast, free parking, kitchenette, meeting rooms, restaurant, room service, spa, suites*.

Price,

Hanya ada satu tipe kamar yang disebut *pop room*, dengan luas 15 m², dengan sewa kisaran Rp 300.000 per malam. Kebijakan harga yang diterapkan Pop Hotel Singaraja berbasis permintaan yaitu: *budget pricing*. *Budget pricing* merupakan suatu kebijakan penetapan yang dapat dijangkau oleh konsumen. Diskon untuk tamu yang check-in langsung diberikan diskon dengan potongan 10% hingga 15%. Selain itu *allowance* (pengurangan harga) juga diberikan kepada konsumen, apabila melakukan kegiatan/aktivitas tertentu.

Secara umum kebijakan harga yang diterapkan Pop Hotel Singaraja sangat fleksibel baik diberikan kepada saluran distribusi, maupun kepada konsumen akhirnya.

(3)*Place/ saluran distribusi*

Banyak saluran distribusi yang digunakan sebagai sumber bisnis Pop Hotel Singaraja, diantaranya melakukan kerjasama dengan *travel agent* baik *travel agent* lokal maupun dengan *travel agent* nasional dan internasional. Lingkungan pemerintahan juga membantu perusahaan didalam penjualan produknya. Asosiasi, penerbangan merupakan saluran distribusi yang membantu Pop Hotel Singaraja memperoleh konsumen.

Promotion

Promosi yang dilakukan oleh Pop Hotel Singaraja adalah dengan via *online* dengan *web* dan *offline*.

(5) *People* (Orang/Karyawan)

Pop Hotel Singaraja sangat memperhatikan karyawannya dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Semua karyawan senantiasa

memberikan pelayanan sesuai dengan budaya perusahaannya.

Proses (*process*)

Proses *check in-out* sudah dirancang sesuai dengan standard hotel internasional, konsumen yang datang untuk melakukan *check in* diterima di resepsionis dan dilakukan suatu registrasi guna keperluan perusahaan dan *report* ke pihak yang berwenang, kemudian dengan bantuan *bell boy* konsumen diantar ke kamar, demikian pula sebaliknya apabila tamu melakukan proses *check out*.

Lingkungan Fisik (*Physical Evidence*)

Lingkungan fisik ini senantiasa dilakukan perawatan, misalnya dengan pemeliharaan bertahap interior dan eksterior perusahaan.

Disamping itu Pop Hotel senantiasa melakukan kegiatan kebersihan bersama-sama seluruh karyawan dan warga sekitar untuk menjaga kebersihan pantai dan lingkungannya.

Analisis POAC (*Planning, Organizing, Actuating, controlling*)

Planning

Pop Hotel Hardys merupakan hotel bisnis yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan menyediakan tempat menginap yang layak dan profesional. Pop Hotel Hardys melakukan promosinya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Singaraja maupun di luar Singaraja. Sebagai hotel bisnis yang target pasarnya merupakan para pembisnis Pop Hotel Hardys menyediakan hanya satu kelas kamar yang disebut *pop room*, untuk mempermudah cara pemesanan. Karena pada umumnya para pembisnis tidak membawa keluarga dan hanya memerlukan kebutuhan dasar menginap.

Organizing

Organisasi merupakan suatu kegiatan atau menggabungkan seluruh potensi yang ada dari seluruh bagian dalam suatu kelompok orang atau badan atau organisasi untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, baik untuk tujuan pribadi atau tujuan kelompok dan organisasi.

Adapun bentuk organisasi yang digunakan di hotel ini yaitu organisasi lini dan staf, yang merupakan kombinasi dari organisasi lini atau komando dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, dimana staf berperan memberikan masukan, bantuan pikiran, saran-saran, data informasi yang dibutuhkan.

Adapun struktur organisasi di Pop Hotel Hardys dipimpin oleh manajer hotel dibawahnya ada *supervisor*, yang terdiri dari *supervisor front office*, *supervisor housekeeping*, *supervisor engineering*, *supervisor sales*, dan di posisi paling bawah ada karyawan-karyawan di setiap divisinya.

Actuating

Hotel merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa, sehingga kinerja dari karyawan sangat menentukan keberhasilan usahanya. Karyawan Pop Hotel Hardys dilatih untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, dengan menerapkan konsep "*bukan tamu yang datang pertama, tapi karyawan yang datang pertama*".

Dalam memberikan pengarahan kerja tersebut setiap pagi diadakan morning briefing di masing-masing department dengan memberikan program kerja perharinya. Dalam memberikan motivasi kepada karyawan pemimpin selalu berinteraksi langsung dengan para karyawan untuk memberikan pengarahan atau motivasi-motivasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Setiap bulan diadakan pertemuan bersama untuk menerima keluhan dan masukan dari setiap staf demi kemajuan hotel, dan untuk membangun hubungan yang baik antar staf dan pegawai diadakan acara music, game, atau outbound.

Controlling

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Dengan pengontrolan pemimpin dapat mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Dalam mengevaluasi program kerjanya Pop Hotel Hardys melakukan pengecekan setiap minggu, bulanan, terhadap rencana kerja.

Tiap-tiap departemen mengenai program kerja yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan, kemudian di review saat pertemuan bersama untuk membahas rencana kerja yang akan dilakukan satu bulan ke depan. Dalam pertemuan itu juga hotel manajer mempresentasikan pencapaian pendapatan dan pengeluaran dari tiap departemen. Jika diketahui ada penyimpangan dari program yang telah ditetapkan maka akan dilakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan program tersebut.

4. SIMPULAN

Manajemen hotel menuntut suatu kejelian untuk melakukan strategi-strategi bisnis guna meningkatkan profit perusahaan. Strategi pemasaran merupakan salah satu strategi yang harus diterapkan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Tentunya banyak biaya yang telah dianggarkan dalam memasarkan produknya dengan segala strategi pemasaran yang telah dilakukan, seperti bauran pemasaran jasa 7P yaitu: *Product, Place, Price, Promotion, Process*,

People dan *Physical Evidence*. Disamping itu manajemen juga melakukan perbaikan dari sisi internalnya yaitu dengan memperkuat pengelolaan fungsi-fungsi manajemennya. Hal itu dilakukan untuk memenangkan persaingan yang ketat ditengah-tengah menjamurnya bisnis akomodasi di Singaraja.

Berdasarkan analisis marketing mix, bahwa Pop Hotel Singaraja menjual produknya berupa kamar, makanan dan minuman di restoran serta kolam berenang. Semua kamar sama jenisnya, merupakan pop room dimana harga sewanya rata-rata Rp 300.000/hari. Pop Hotel Singaraja, melakukan kerjasama dengan *travel agent* baik *travel agent* lokal maupun dengan *travel agent* nasional dan internasional. Promosi yang dilakukan melalui *online* yaitu melalui web maupun *offline*.

Semua karyawan senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan budaya perusahaannya. Lingkungan fisik ini senantiasa dilakukan perawatan, misalnya dengan pemeliharaan bertahap interior dan eksterior perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hiam, Alexsander dan Charles Schewe. 1994. ***The Portable MBA Pemasaran***. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Kotler, Philip. 1994. ***Manajemen Pemasaran***. Edisi VI. Vorthwestern University, Erlangga
- _____, 1997. ***Manajemen Pemasaran***. Edisi Indonesia pada Simon & Schuster Pte. Ltd.
- _____, dan Gary Amstrong. 1994. ***Principle of Marketing. 6th Edition***. USA: Prentice Hall International, Inc.
- _____, John Bowen, dan James Makens. 2002. ***Pemasaran Perhotelan dan Kepariwisataaan***. Edisi II, Prenhallindo, Jakarta.
- Lupiyoadi, Rambat. 2001 ***Manajemen Pemasaran Jasa***. Salemba Empat Jakarta.
- Mangkuwredoyo, Sudiarto. 1999. ***Pengantar Industri Akomodasi dan Restoran***. Fakultas Ekonomi UI Jakarta.
- Mursid.M. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Bumi Aksara Jakarta
- Rangkuti, Freddy. 1997. ***Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis***. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2002. ***Riset Pemasaran***. Cetakan V, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
-
- Sulastiono, Agus. 2001. ***Manajemen Penyelenggaraan Hotel***. Cetakan II, Alvabeta Bandung.
- Tjiptono, Fandy. 2002. ***Strategi Pemasaran***. Edisi VI. Yogyakarta

PENYUSUNAN KAMUS SERAPAN DALAM BAHASA BALI (HASIL UJI EFEKTIVITAS DI LAPANGAN)

I Nengah Suandi, Ida Bagus Putrayasa

nengah_suandi@yahoo.co.id
Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

The objective of this third year study was to describe the result of the effectiveness testing in the field of the draft of Kamus Serapan dalam Bahasa Bali that has been successfully validated by linguists and lexicologists in the second year. This study was designed by following the stages of thinking in research and development adapted from the development of a set of teaching materials using the 4-D model (Define, Design, Develop, and Disseminate). The subjects of research for this third year were Balinese language teachers and the students of Balinese Language Department in the public as well as in private institutes of higher learning in Singaraja and Denpasar. The data were collected through questionnaire. The data that had been collected were analyzed by using a descriptive analysis. Based on the formulation of the problems in this third year research and data analysis that has successfully been done it can be concluded that quantitatively, the draft of Kamus Serapan dalam Bahasa Bali can be said to be effective since the mean score obtained was 3.6 (falling into effective category). However, qualitatively, there are reasonably many inputs given by the respondents for the purpose of improving the draft of the dictionary. The inputs given are related to the aspects of (1) the appearance, (2) the title of the dictionary, (3) the foreword, (4) the guide to the use of the dictionary , (5) the quality of the contents of the dictionary and (6) bibliography.

Keywords: dictionary of loan words, effectiveness testing.

ABSTRAK

Tujuan penelitian pada tahun ke-3 ini adalah mendeskripsikan hasil uji efektivitas di lapangan terhadap draf Kamus Serapan dalam Bahasa Bali yang telah berhasil divalidasi oleh ahli bahasa dan ahli perkamusan pada tahun II. Penelitian ini dirancang sesuai alur pemikiran penelitian pengembangan (Research and Development) yang diadaptasi dari pengembangan perangkat pembelajaran model 4-D (Define, Design, Develop, dan Disseminate). Subjek penelitian pada tahun III ini adalah guru bahasa Bali dan mahasiswa Jurusan Bahasa Bali serta Jurusan Pendidikan Bahasa Bali pada perguruan tinggi negeri dan swasta di Singaraja dan Denpaasar. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan rumusan masalah penelitian tahun III dan analisis data yang telah berhasil dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara kuantitatif, draf Kamus Serapan dalam Bahasa Bali dinyatakan efektif karena skor rata-rata yang diperoleh sebesar 3.6 (kategoriefektif). Namun, secara kualitatif, cukup banyak masukan yang diberikan para responden demi penyempurnaan draf kamus. Masukan yang diberikan menyangkut aspek-aspek (1) perwajahan; (2) judul kamus; (3) prakata; (4) petunjuk penggunaan kamus; (5) kualitas isi kamus; (6) daftar pustaka.

Kata kunci: kamus serapan, uji efektivitas.

PENDAHULUAN

Dalam buku *POLITIK BAHASA* (Rumusan Seminar Politik Bahasa), dikatakan bahwa bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, serta (5) pendukung sastra daerah

dan sastra Indonesia (Alwi, dkk. ed., 2003:6). Sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia, bahasa Bali juga memiliki empat fungsi tersebut. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, terutama fungsinya sebagai lambang kebanggaan daerah dan alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sudah sepatutnya bahasa Bali, terbuka terhadap pengaruh unsur-unsur bahasa lain baik dari bahasa Indonesia sebagai

bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa negara maupun dari bahasa asing khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pelestarian bahasa Bali tidak mesti dijadikan alasan untuk menolak pengaruh unsur-unsur bahasa lain.

Dewasa ini, cukup banyak kata baru dalam bahasa Bali yang bentuk dasarnya berasal dari luar bahasa Bali. Dari bentuk dasar *deposito*, misalnya, dalam bahasa Bali muncul bentuk turunan *depositoang* 'depositokan', *depositone* 'depositonya', *depositoanga* 'didepositokan'. Dari bentuk dasar *print* (Inggris) 'cetak', dalam bahasa Bali dewasa ini muncul bentuk turunan *prinang* 'prinakan,' *ngeprin* 'nyetak/mencetak,' *prinanga* 'dicetakkan,' *prinane* 'cetakannya,' dan *prina* 'dicetak.' Kata-kata itu telah digunakan secara empiris di lingkungan penutur bahasa Bali, tetapi bentukan baru tersebut belum tercantum dalam sejumlah kamus bahasa Bali saat ini, seperti: (1) *Kamus Bahasa Lumrah* (Kersten, S.V.D., 1980),

Kamus Bahasa Bali Modern (Tinggen, 2005),

Kamus Bahasa Bali (Simpen, 1985), (4)

Kamus Bahasa Bali (Bali Indonesia, Indonesia-Bali) (Anandakusuma, 1986).

Hadirnya bentukan kata baru dalam bahasa Bali dewasa ini merupakan cerminan bahwa bahasa Bali bersifat terbuka terhadap pengaruh bahasa lain terutama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini sejalan dengan pendapat Simatupang dalam *Harian Kompas* (17 Oktober 1993:17) bahwa pemungutan kosakata dari bahasa lain ke dalam suatu bahasa merupakan hal yang lumrah dan pertanda bahwa bahasa penerima bertumbuh dan berkembang serta dilakukan secara sadar oleh pemilik bahasa yang bersangkutan.

Jumlah bentukan kata baru tersebut di atas tentu akan mengalami perkembangan setiap saat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa-masa mendatang. Perkembangan bentukan kata baru bahasa Bali baik yang bentuk dasarnya berasal dari bahasa Indonesia maupun bahasa asing tentu tidak bisa dihindarkan. Hal ini tampaknya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (1) Bahasa Bali tidak

mempunyai kata-kata sendiri untuk menggambarkan benda atau gagasan asing yang diperkenalkan atau diimpor melalui berbagai jenis kontak; (2) Kata atau bentukan baru dapat membantu seseorang untuk mengekspresikan buah pikirannya secara lebih cermat dan lebih sesuai; (3) Kata pungut atau kata serapan biasanya mengarah pada kemudahan, keringkasan, dan kehematan; (4) Kata pungut atau kata serapan terutama yang berasal dari bahasa Inggris dianggap memiliki gengsi tersendiri dan kebudayaan yang diwakilinya dianggap patut ditiru (Cf. Gonda, 1973:19-20)

Senada dengan pendapat di atas, Grosjean (1982:31), seorang dwibahasawan meminjam leksikon dari bahasa lain dalam tuturannya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (1) Bila seorang dwibahasawan tidak mampu menemukan kata yang maknanya ingin disampaikan dalam bahasanya; (2) Bila kata tersebut memang tidak ada dalam bahasanya atau penutur belum mengetahuinya; (3) Kata tersebut (yang ada pada bahasa yang digunakan) belum begitu dikenal oleh penutur, maka ia lebih memilih kata yang ia kenal lebih dekat; (4) Bila dwibahasawan tersebut sedang dalam kondisi fisik dan mental yang payah, malas, stres sehingga ia cenderung mengeluarkan kata yang "siap tersedia."

Hal senada juga dikatakan oleh Mahon dalam Jendra (2002:54) yang mengatakan bahwa ada dua faktor penyebab timbulnya pembentukan kata baru (bahasa Bali) yaitu faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor sosial yang dimaksudkan adalah ketika peminjam didorong untuk memakai unsur-unsur bahasa dari kelompok tertentu yang dipandang lebih mempunyai prestise, sedangkan faktor bahasa yang dimaksudkan adalah bila munculnya peminjaman itu disebabkan oleh faktor peminjam harus mengungkapkan suatu konsep atau menamakan suatu objek yang tidak ada dalam bahasa yang digunakan.

Mencermati pandangan-pandangan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan kata baru dalam bahasa Bali tidak bisa dilepaskan dari faktor linguistik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Dari sudut pandang linguistik, faktor peminjaman unsur bahasa asing itu antara

lain disebabkan oleh faktor kekosongan kosakata dan kemungkinan kata asing itu masuk ke dalam system bahasa peminjam. Dari segi sociolinguistik, antara lain dimaksudkan untuk menunjukkan identitas personal dan memenuhi kebutuhan eufemisme. Selanjutnya, dari segi psikolinguistik, faktor-faktor yang mendasari proses peminjaman itu antara lain menyangkut taraf kemampuan masyarakat untuk berdwibahasa dan taraf tenggang rasa atau toleransi masyarakat pengguna bahasa terhadap bahasa asing atau bahasa yang dipinjam (Cf. Marcellino, 1994:237).

Uraian di atas menunjukkan betapa perlu dan pentingnya pemasukan kata-kata luar bahasa Bali (dari bahasa asing, bahasa-bahasa daerah di Indonesia, dan bahasa Indonesia) ke dalam bahasa Bali. Masuknya kata-kata atau istilah-istilah dari luar bahasa Bali ke dalam bahasa Bali tentu tidak cukup hanya didengar, dibaca, dan diucapkan, tetapi yang lebih penting adalah diinventarisasi dan dideskripsikan makna kata-kata atau istilah-istilah tersebut ke dalam sebuah buku yang berupa kamus, dalam hal ini *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali*, yang hingga saat ini belum ada dalam bahasa Bali.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian tahun ketiga ini adalah. Bagaimanakah hasil uji efektivitas di lapangan terhadap draf naskah kamus yang telah berhasil divalidasi oleh ahli bahasa dan ahli perkamusan pada tahun II?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dirumuskan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan hasil uji efektivitas di lapangan terhadap draf naskah kamus yang telah berhasil divalidasi oleh ahli bahasa dan ahli perkamusan pada tahun II.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kosa kata setiap bahasa, termasuk kosa kata bahasa Bali mengalami perkembangan dengan pesat dan terus-menerus. Perkembangan kosa kata tersebut makin dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos batas ruang dan waktu. Perkembangan jumlah kosa kata bahasa Bali belakangan ini tentu merupakan salah satu indikator kemajuan peradaban masyarakat Bali

karena kosakata merupakan sarana pengungkap iptekso.

Perkembangan kosakata bahasa Bali salah satunya tercermin dari keberadaan kamus bahasa Bali, terutama kamus serapan bahasa Bali. Oleh karena itu, keberadaan kamus ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali. Kamus ini sangat membantu masyarakat pengguna bahasa Bali dalam memahami makna kata-kata baru bahasa Bali yang sudah diserap ke dalam bahasa Bali sekaligus dalam menggunakan kata-kata tersebut secara tepat dalam berbahasa Bali. Tanpa keberadaan kamus ini, tentu konsep-konsep baru yang ada pada setiap pengguna bahasa Bali akan sulit dituangkan dengan kata-kata. Di samping itu, keberadaan kamus ini juga sangat penting dalam kaitannya dengan perwujudan kecermatan berpikir pengguna bahasa Bali. Kecermatan berpikir pengguna bahasa Bali tidak semata-mata ditentukan oleh ketepatan penggunaan kaidah-kaidah gramatika (morfologi dan sintaksis), tetapi juga ditentukan oleh ketepatan dalam memilih kosakata bahasa Bali.

Keberadaan kamus serapan juga bermanfaat bagi dunia pengajaran bahasa Bali. Tanpa kamus serapan, pengajaran bahasa Bali yang terkait dengan pilihan materi pengajaran kosakata bahasa Bali, baik pada aspek keterampilan menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis terkesan kurang inovatif sehingga kurang menarik dan bisa jadi menjemukan bagi mahasiswa/siswa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tanpa kehadiran kamus serapan, pengajaran bahasa Bali di sekolah-sekolah tampak kurang kontekstual karena kepada siswa tidak diperkenalkan kata-kata baru bahasa Bali yang secara nyata sudah digunakan dalam masyarakat Bali, tetapi belum mendapat sentuhan dalam dunia pengajaran bahasa Bali.

Manfaat lain penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam rangka menumbuhkembangkan bahasa Bali sebagai bagian budaya Bali sekaligus sebagai salah satu unsur pembentuk budaya Bali. Dengan hasil penelitian ini, bahasa Bali pada masa-masa yang akan datang diharapkan tetap eksis sehingga dapat

digunakan sebagai sarana komunikasi modern yang benar-benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Dikatakan demikian karena kamus berfungsi merekam perkembangan dan kemajuan peradaban dan kebudayaan daerah/bangsa, termasuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuannya. Kamus merupakan khazanah perbendaharaan kata dan istilah suatu bahasa yang menggambarkan tingkat peradaban daerah/bangsa pemilikinya. Sementara ini kosakata dan istilah terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan. Hal ini pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kelengkapan dan kemampuan bahasa Bali sebagai sarana komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan dan bidang ilmu. Lebih dari itu, pentingnya penelitian ini juga tampak dari aspek kepraktisannya, yaitu dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat Bali pada umumnya dan guru-guru bahasa Bali pada khususnya dalam rangka menggunakan kata-kata atau istilah-istilah baru bahasa Bali yang benar-benar sesuai dengan maknanya. Dalam hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Bali, kamus serapan ini harus kita lihat pada posisi utamanya sebagai perekam berbagai gagasan baru, yang dapat melengkapi sumber-sumber bacaan khazanah ilmu yang sudah ada.

Dalam penelitian ini, digunakan seperangkat teori berkaitan dengan pengertian kamus, jenis kamus, dan tahapan penyusunan kamus. Berkaitan dengan pengertian kamus, digunakan dasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008). Pembicaraan jenis kamus, disarikan dari beberapa pendapat ahli seperti Poerwadarminta (1949); Reksosiswojo, dkk (1969); Abdul Chaer (1976); Ali Marsaban, dkk. (1974); Zgusta, (1971); Harimurti Kridalaksana (1981); T. Heru Kasida Brataatmaja, dkk. (1985); Putrayasa (2009); Harimurti Kridalaksana (1993); dan Badudu, 2003). Berkaitan dengan tahapan penyusunan kamus, disarikan dari Depdikbud (1993); Sunaryo, (1999). Penelitian merupakan tindak lanjut dari penelitian Suandi (2006)

berjudul *Pembentukan Kata Baru dalam Bahasa Bali*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang mengikuti alur pemikiran penelitian pengembangan (*Research and Development*) yang diadaptasi dari pengembangan perangkat pembelajaran model 4-D (*Define, Design, Develop, dan Disseminate*) oleh Thiagarajan (1974). Pada tahun ketiga, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hasil uji efektivitas di lapangan terhadap draf naskah kamus yang telah berhasil divalidasi oleh ahli bahasa dan ahli perkamusan pada tahun II, dengan langkah-langkah (1) melakukan uji coba skala kecil; (2) melakukan revisi II; (3) melakukan uji coba skala besar dengan mengundang guru-guru bahasa Bali se-Bali dan mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Bali (Universitas Pendidikan Ganesha, IKIP PGRI Bali, Institut Agama Hindu Denpasar) dan mahasiswa Jurusan Bahasa Bali (Jurusan Bahasa Bali Fakultas Sastra Universitas Udayana; (4) melakukan revisi III; (5) penyusunan pelaporan, publikasi, dan sosialisasi kepada pemegang kebijakan (Balai Bahasa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat provinsi).

Dalam rangka uji efektivitas kamus, subjek penelitian pada tahun III meliputi guru bahasa Bali dan mahasiswa Jurusan bahasa Bali. Guru Bahasa Bali diambil dari empat kabupaten di Bali, yaitu Kabupaten Buleleng (wakil Bali Utara), Kabupaten Klungkung (wakil Bali Timur), Kabupaten Badung (wakil Bali Selatan), dan Kabupaten Tabanan (wakil Bali Barat). Dari masing-masing kabupaten diambil 3 orang guru dengan ketentuan (1) berlatar belakang pendidikan minimal S1 Jurusan Bahasa Bali atau Pendidikan Bahasa Bali dan diutamakan yang sedang atau sudah lulus S2 Pendidikan Bahasa;

memiliki pengalaman mengajarkan bahasa Bali minimal 3 tahun; (3) responden diupayakan berasal dari guru SMP, SMA, SMK (masing-masing 1 orang). Mahasiswa bahasa Bali diambil dari empat perguruan tinggi yang mengasuh jurusan atau prodi bahasa Bali atau pendidikan

bahasa Bali dengan ketentuan (1) sedang duduk di semester 6 dan (2) asli orang Bali dan tidak pernah berdomisili lama di luar Bali. Dengan memperhatikan jumlah mahasiswa yang ada pada masing-masing perguruan tinggi tersebut, ditetapkan subjek penelitian sebagai berikut, yaitu: Undiksha (6 orang), Universitas Udayana (6 orang), Institut Hindu Dharma (3 orang), dan IKIP PGRI (3 orang). Total jumlah subjek penelitian: 30 orang.

Uji coba skala kecil dilakukan terhadap 4 orang guru (2 orang muda dan 2 orang tua) dan 6 orang mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Bali Universitas Pendidikan Ganesha (2 orang kemampuan tinggi, 2 orang dengan kemampuan sedang, dan 2 orang dengan kemampuan rendah). Uji coba skala kecil difokuskan terhadap enam aspek, yaitu (1) perwajahan; (2) judul kamus; (3) prakata; (4) petunjuk penggunaan kamus; (5) kualitas isi kamus; dan (6) daftar pustaka. Untuk mendapatkan keenam data tersebut, digunakan metode kuesioner.

Pengumpulan data pada tahun III menggunakan metode kuesioner. Pada garis besarnya, materi instrumen yang berupa kuesioner ini meliputi (1) perwajahan; (2) judul kamus; (3) prakata; (4) petunjuk penggunaan kamus; (5) kualitas isi kamus; dan (6) daftar pustaka. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode

analisis deskriptif. Dengan analisis deskriptif, dimaksudkan bahwa hal-hal khusus yang berhasil ditemukan dalam penelitian dikumpulkan bersama-sama lalu dibuat abstraksinya. Dengan kata lain, data dan bukti-bukti yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk membuktikan atau menolak hipotesis. Pengelompokan dan pengabstraksian dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan data tanpa harus menunggu berakhirnya seluruh proses pengumpulan data.

Tahap-tahap analisis data yang dilakukan meliputi (1) reduksi data, (2) deskripsi data, (3) klasifikasi data, (4) interpretasi data, dan (5) penyimpulan hasil penelitian (Sugiyono, 2006:345). Pada tahap reduksi data, dilakukan pengkodean data dan pengurangan/ pembuangan data yang dianggap tidak perlu. Deskripsi data diartikan sebagai penampilan sekumpulan informasi yang sudah disusun secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan suatu simpulan yang kemudian dilanjutkan dengan pengklasifikasian data sesuai dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Data yang telah diklasifikasikan kemudian diinterpretasikan untuk kemudian sampai pada penarikan simpulan penelitian. Adapun kriteria penilaian efektivitas *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* adalah sebagai berikut.

Tabel 01: KRITERIA EFEKTIVITAS KAMUS SERAPAN DALAM BAHASA BALI

NO	NILAI	PREDIKAT
1	4	Sangat Efektif (dapat digunakan tanpa revisi)
2	3	Efektif (dapat digunakan dengan revisi kecil)
3	2	Kurang Efektif (tidak dapat digunakan)
4	1	Tidak Efektif (tidak dapat digunakan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, dikemukakan hasil penelitian tentang hasil uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam uji coba skala kecil, nilai rata-rata akhir yang diperoleh sebesar 3.4 (kategori

efektif). Dengan demikian, sesuai pedoman efektivitas kamus yang telah ditetapkan pada bab III, dapat dikatakan bahwa draf *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* dinyatakan efektif (dapat digunakan dengan revisi). Dari enam aspek yang diuji tingkat efektivitannya, tidak satu pun aspek yang dinyatakan tidak efektif karena nilai rata-rata semuanya berada di atas 3. Nilai rata-rata tertinggi

tampak pada aspek petunjuk penggunaan kamus (3.8), sedangkan nilai terendah tampak pada aspek isi kamus (3.3). Ditinjau secara kuantitatif, memang draf *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* sudah dinyatakan efektif karena nilai rata-rata berada di atas 3. Temuan secara kuantitatif ini juga didukung oleh temuan secara kualitatif dari beberapa orang responden. Secara umum, *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* sudah tergolong baik dari segi isi maupun sistematikanya dan dapat memperkaya kosakata bahasa Bali.

Namun, secara kualitatif, ada beberapa masukan penting yang perlu dijadikan pedoman dalam menyempurnakan produk penelitian yang berupa kamus. Ada satu masukan prinsip yang diberikan oleh responden berkaitan dengan kualitas isi kamus. Berdasarkan pencermatan terhadap keseluruhan isi kamus, ternyata ada satu unsur yang belum ditanyakan pada kuesioner, yaitu kelengkapan lema. Masukan penting lainnya meliputi kesalahan judul kamus di cover belakang, tata tulis (pemisahan suku kata, pengetikan huruf, dan pengetikan kata). Terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh responden, tindak lanjut yang dilakukan tim peneliti adalah melakukan pertemuan untuk membicarakan penyempurnaan kamus sesuai masukan-masukan yang diberikan oleh responden seperti menambahkan lema dan melakukan revisi terhadap aneka kesalahan pengetikan. Setelah dilakukan revisi berkaitan hasil uji coba terbatas, barulah dilakukan uji coba skala besar.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam uji coba skala besar, nilai rata-rata akhir yang diperoleh sebesar 3.6 (kategori efektif). Dengan demikian, sesuai pedoman efektivitas kamus yang telah ditetapkan pada bab III, dapat dikatakan bahwa draf *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* dinyatakan efektif (dapat digunakan dengan revisi kecil). Dari enam aspek yang diuji tingkat efektivitinya, tidak satu pun aspek yang dinyatakan tidak efektif karena nilai rata-rata semuanya berada di atas 3. Nilai rata-rata

tertinggi tampak pada aspek petunjuk penggunaan kamus, sedangkan nilai terendah tampak pada aspek isi kamus.

Ditinjau secara kuantitatif, memang draf *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* sudah dinyatakan efektif karena nilai rata-rata berada di atas 3. Temuan secara kuantitatif ini juga didukung oleh temuan secara kualitatif, yang pada intinya mengemukakan hal-hal yang positif terhadap draf kamus. Beberapa orang responden menyampaikan beberapa dukungannya terhadap kamus yang disusun seperti tampak berikut ini.

Secara umum, *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* sudah baik, mudah dipahami karena disertai dengan contoh penggunaan kata serapan di dalam kalimat. Kamus ini memberi petunjuk yang benar dalam menggunakan kata-kata serapan dari bahasa Indonesia dan bahasa asing ke dalam bahasa Bali sehingga memperkaya khazanah bahasa Bali. Hadirnya kamus serapan ini memudahkan para pembaca mencari kata yang belum diketahui artinya. Luaran penelitian dapat bermanfaat untuk masyarakat Bali umumnya dan guru/pendidik khususnya. Tanggapan secara lebih khusus berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi sasaran penilaian dari responden baik yang berupa kelebihan maupun kekurangannya dikemukakan berikut ini.

Dari segi perwajahan, secara kuantitatif, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3.7 (tergolong efektif). Temuan secara kuantitatif ini didukung oleh temuan secara kualitatif seperti dikemukakan berikut. (1) Dari segi sampul, *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* ini sudah menarik karena dari segi huruf dan ketepatan judul yang membuat si pembaca mudah memahami dan memotivasi pembaca untuk membaca kamus. (2) Dari segi tampilan/cover sudah bagus. Ada gambar pulau Bali yang dikelilingi oleh dua benua dan dua samudera menunjukkan bahasa Bali agar tetap eksis dan diakui oleh dunia, seperti UNESCO. (3) Dari segi gambar sampul sudah sangat bagus.

Namun, ada beberapa masukan penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas perwajahan kamus seperti dikemukakan berikut ini. Tampilan cover kurang menarik baik

dari segi warna, gambar, maupun bingkai *cover*. Perwajahan kamus sudah cukup menarik, tetapi akan lebih menarik lagi jika warna latar yang digunakan adalah warna lain, misalnya hitam, emas, atau merah padam. Atau sekalian warna kuning yang cerah agar tidak terlihat sayu. Antara warna latar dan lambang terlihat kurang menyatu. Agar terlihat menyatu, mungkin peta dunia yang melatari pulau Bali langsung saja dipergunakan sebagai latar keseluruhan. Jadi, latar warna kuning diganti dengan peta dunia dan pulau Bali sebagai lambangnya. Kualitas *cover* perlu ditingkatkan lagi agar lebih menarik dan di halaman *cover* belakang sebaiknya ditambahkan beberapa kata serapan dan sedikit pembahasannya agar pembaca lebih mengerti dan tertarik mempelajarinya.

Masih terdapat celah-celah kosong yang bisa diisi dengan hiasan-hiasan atau gambaran tipis sebagai *background* warna sampul buku kalau bisa dipadukan/digradasi agar tidak terpatok pada satu warna saja. Pada tulisan sampul, mungkin bisa dipakai warna *font* selain hitam agar terlihat hidup dan menarik. Pada *cover*, bisa ditambahkan gradasi warna pada *background* agar sampul terlihat lebih hidup. Untuk nama penulis, ukuran *font* hendaknya diperkecil lagi. Di bagian samping, untuk judul buku hendaknya diperpanjang dan dibesarkan lagi.

Akan terlihat lebih menarik apabila warna sampul diganti dengan warna yang lebih cerah, tetapi tidak mencolok (misal biru langit). Dalam hal ini, penempatan bingkai tampaknya tidak dibutuhkan karena akan mempersempit pandangan pembaca terhadap sampul sehingga mengurangi kemenarikannya. Adapun kemenarikan tulisan akan lebih terlihat apabila tulisan nama pengarang yang ada di bawah gambar diganti dengan *font* yang lebih segar seperti *vijaya* dll agar tidak terkesan kaku. Dalam hal ini, juga terjadi kekurangtepatan pemilihan gambar karena gambar pada sampul kamus terkesan seperti buku atlas. Sebaiknya, agar tidak mengganggu fokus dan pemahaman pembaca, cukup sampul tersebut diisi hiasan garis-garis ataupun permainan warna karena saya juga sangat jarang melihat kamus sampulnya diisi gambar.

Mungkin hal tersebut juga bertujuan agar pembaca tidak salah tangkap terhadap isinya.

Terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh responden, tindak lanjut yang dilakukan tim peneliti adalah meningkatkan kualitas *cover* kamus baik dari segi pemakaian huruf, gambar, dan variasi penggunaan warna dengan meminta bantuan kepada ahli bidang desain.

Dari segi judul kamus, secara kuantitatif, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3.7 (tergolong baik/efektif). Hal ini sejalan dengan tanggapan seorang responden yang menyatakan bahwa dari segi judul, pemakaian huruf sudah menarik. Namun, di balik itu, ada beberapa masukan yang disampaikan, yaitu (1) Judul sebaiknya diubah menjadi *Kamus Kata Serapan dalam Bahasa Bali*. *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* saya rasa agak kurang tepat dan akan membuat keambiguan antara isi kamusnya dalam bahasa Bali atau tentang kata-kata serapan dalam bahasa Bali. Judul kamus yang dapat saya sarankan adalah *Kamus Bahasa Bali Serapan* cukup sederhana. Namun, hasil diskusi tim peneliti menetapkan judul kamus yang lama yaitu *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali*, yang beranalogi dari kamus serupa berjudul *Kamus Serapan dalam Bahasa Indonesia*.

Dari segi prakata, secara kuantitatif, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3.4 (tergolong baik/efektif). Hal ini sejalan dengan tanggapan responden yang mengatakan bahwa prakata sudah bagus dan dapat mewakili arti. Karena pada bagian ini tidak ada masukan, maka prakata akan ditetapkan seperti semula.

Dari segi petunjuk penggunaan kamus, secara kuantitatif, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3.5 (tergolong baik/efektif). Hal ini sejalan dengan pengakuan responden bahwa petunjuk penggunaannya sudah baik. Meskipun demikian, ada beberapa masukan penting dari pakar yang perlu ditindaklanjuti oleh tim peneliti. Saran atau masukan yang diberikan adalah sebagai berikut. Dalam petunjuk penggunaan buku dari point 1-8, perlu adanya contoh yang menyertai pada masing-masing point agar

pembaca mengerti point-point tersebut. Perlu juga adanya korelasi antara petunjuk kamus dengan isi. Hal ini terlihat dari poin ke 7 dan 9. Pada poin 7, entri mengandung bunyi /e/ ditulis /é/ tetapi di dalam kamus hampir seluruhnya mengabaikan poin 7 tersebut karena saya membaca sebagian besar bunyi /e/ tidak ditulis /é/. Pada poin 9, saya hanya melihat ada petunjuk bahwa kurang lebih ada 8 kelas kata, tetapi pada daftar singkatan hanya ada singkatan untuk 3 kelas kata yaitu adjective, noun, dan verbal. Tim peneliti sangat memahami masukan di atas sehingga tindak lanjut yang dilakukan adalah menambahkan petunjuk pemakaian kamus terutama dari segi ejaan dan memberikan contoh-contoh pada setiap petunjuk.

Dari segi kualitas isi kamus, secara kuantitatif, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3.3 (tergolong baik/efektif). Hal ini juga didukung oleh pengakuan responden bahwa isi kamus sangat jelas, kualitas bahasa yang digunakan sangat baik. Isi keseluruhan sudah sangat bagus. Pendeskripsian makna sudah bagus sekali karena disertai dengan contoh penggunaan kata dalam suatu kalimat. Ini sangat memudahkan pembaca dalam memahami arti kata tersebut.

Meskipun demikian, secara kualitatif, cukup banyak masukan yang diberikan oleh responden yang perlu ditindaklanjuti oleh tim peneliti seperti dikemukakan berikut ini. (1) Ada salah satu kata yang belum diterjemahkan di kamus ini, contohnya kata *partisipan*. Intinya kamus ini sudah bagus, tetapi akan lebih bagus jika penbendaharaan kata-katanya ditambah lagi, tujuannya agar lebih lengkap. (2) Untuk pemenggalan suku kata, masih banyak yang melenceng dari petunjuk kamus pada halaman 6-

Contoh pada kata *uma* yang tetap ditulis *uma* bukan *u.ma*; masih tidak konsisten pada masing-masing entri dan untuk entri yang mengandung bunyi /e/ untuk penulisannya masih banyak yang tidak menggunakan aksent /é/ di atas huruf /e/. (3) Masih ada kata-kata serapan yang tercacar di antaranya: *anggunan*, *alpa*, *antisipasi*, *alamat*, *cekatan*, *cek*, *cambuk*, *donor*, *dekorasi*, *dobrak*, *eksekusi*, *emansipasi*, *embel-embel*; *eboh*; *erosi*, *gerbong*, *gembong*, *instrument*, *inisiatif*, *meriah*, *nomaden*, *nota*, *netral*, *obral*; *otot*; *organ*;

ornament, *palsu*, *pesawat*, *popular*, *predikat*, *rahasia*, *ancu*, *rekreasi*, *rekan*, *sensitif*, *tobat*, *trotoar*, *urbanisasi*, *vaksin*, dan *waras*.

Pendeskripsian makna agar lebih disederhanakan agar dapat mudah dimengerti maksudnya. (5) Masih banyak kesalahan penulisan kata seperti kata *melajah* seharusnya ditulis *malajah*. (6) Perlu ditambahkan deretan alfabet di bagian samping kamus sehingga memudahkan pembaca dalam mencari kata dalam kamus menurut abjad seperti kamus Indonesia-Inggris. (7) Pemenggalan suku kata antara di petunjuk kamus dan isi kamus kurang konsisten. Seperti: pada petunjuk kamus point 10 – (6) suku kata berupa huruf vokal yang terdapat pada awal atau akhir kata dasar ditulis [alu] bukan [a.lu]. Pada daftar singkatan untuk kata Inggris disingkat menjadi Ing. Namun, dalam penerapannya justru kebanyakan menggunakan Igr. (8) Masih terdapat beberapa kata dasar yang belum mengalami pemenggalan seperti kata *alam* (halaman 5); *alat* (halaman 6); *edar* (halaman 53); *efek* (halaman 53). (9) Terdapat juga kesalahan dalam penempatan kelas kata seperti kata *jorok* yang ditulis pada buku adalah *noun* namun sebenarnya adalah termasuk kata sifat. Semua masukan terkait dengan isi kamus ditindaklanjuti oleh tim peneliti dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai masukan-masukan tersebut.

Dari segi daftar pustaka, secara kuantitatif, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3.6 (tergolong baik). Hal ini juga didukung oleh tanggapan responden yang mengatakan bahwa daftar pustaka sudah baik dari segi relevansi, ketercukupan, maupun kemutakhirannya.

Hasil penting penelitian ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, draf *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* dinyatakan efektif karena skor rata-rata yang diperoleh sebesar 3.6 (kategori baik atau efektif). Hal ini tentu tidak terlepas dari serangkaian langkah kegiatan yang telah dilakukan mulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-3 berdasarkan model penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu model 4D (*Define, Design, Develop, dan Disseminate*) oleh Thiagarajan (1974) seperti telah dikemukakan pada bagian metode penelitian.

Walaupun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara kualitatif, cukup banyak masukan yang diberikan para praktisi ketika dilakukan uji efektivitas kamus. Masukan kualitatif ini wajar terjadi karena pada tahun III, uji efektivitas dilakukan pada praktisi kamus seperti guru bahasa Bali dan mahasiswa bahasa Bali yang dari segi bidangnya lebih banyak bergerak pada bidang penerapan teori, sedangkan pada validasi ahli pada tahun II lebih banyak menyoroti dari aspek teori perkamusan.

Berdasarkan kamus serapan yang berhasil disusun pada tahun III, dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama* banyaknya kata serapan dalam bahasa Bali seperti dikemukakan di atas tidak terlepas dari keterbatasan kosakata bahasa Bali dalam mewadahi berbagai ide/gagasan sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. Keterbukaan bahasa Bali untuk menyerap kata-kata dari luar bahasa Bali juga sejalan dengan salah satu fungsi bahasa Bali yaitu sebagai lambang kebanggaan masyarakat Bali. Banyaknya kata serapan dalam bahasa Bali seperti dikemukakan di atas sejalan dengan pendapat Sugono (2008) bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan modern harus diimbangi dengan percepatan pengembangan kosakata. Temuan ini juga sejalan dengan pendapat Muslich, dkk. (2010) bahwa bahasa itu dinamis sehingga menyebabkan bahasa itu hidup, berubah, dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat pemakai bahasa tersebut.

Kedua kata serapan bahasa Bali yang dianggap bersumber dari bahasa Indonesia sebenarnya sebagian juga merupakan kata serapan bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Kata-kata dalam bahasa Indonesia seperti deposito, kuantitatif, kualitatif, praktis, valid, signifikan, inovatif, dan kreatif sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, tetapi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan mengalami sedikit perubahan bentuk sesuai pedoman pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut kemudian

digunakan dalam konteks bahasa Bali, khususnya dalam wacana ilmiah seperti dalam skripsi.

Ketiga banyaknya kata serapan bahasa Bali yang berasal dari bahasa Indonesia tampaknya juga terkait dengan kondisi masyarakat Bali saat ini yang sebagian besar tergolong masyarakat dwibahasawan, yaitu dwibahasawan Bali–Indonesia bukan dwibahasawan Bali–Inggris. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, hampir tidak ada satu daerah pun yang terisolir yang sulit dijangkau oleh media massa seperti televisi dan radio. Pesatnya perkembangan teknologi informasi sekarang ini juga ikut menunjang masuknya kata-kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Bali.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tahun III dan analisis data yang telah berhasil dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara kuantitatif, draf *Kamus Serapan dalam Bahasa Bali* dinyatakan efektif karena skor rata-rata yang diperoleh sebesar 3.6 (kategori baik). Namun, secara kualitatif, cukup banyak masukan yang diberikan para responden demi penyempurnaan draf kamus. Masukan yang diberikan menyangkut aspek-aspek (1) perwajahan; (2) judul kamus; (3) prakata; (4) petunjuk penggunaan kamus; (5) kualitas isi kamus; (6) daftar pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan dua hal berikut. (1) Perlu dilakukan penelitian penyusunan kamus serapan untuk berbagai bahasa daerah di Indonesia dalam rangka pelestarian bahasa-bahasa daerah di Indonesia dan (2) Dalam rangka penyusunan kamus serapan tersebut, penelitian pengembangan 4D (*Define, Design, Develop, dan Disseminate*) oleh Thiagarajan (1974) dapat digunakan sebagai salah satu model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. (ed.). 2003. *Politik Bahasa, Rumusan Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Anandakusuma, Sri Reshi. 1986. *Kamus Bahasa Bali (Bali-Indonesia, Indonesia-Bali)*. Denpasar : CV Kayumas

- Badudu, J.S. 1975. Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Badudu, J.S. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Badudu, J.S. 2003. Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Brataatmaja, T.H.K., dkk. 1985. Khazanah Lawan Kata (Antonim). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. Panduan Penyusunan Kamus Bidang Ilmu. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djendra, I Nyoman. 2012. Kamus Ideal Bahasa Bali, Bali—Indonesia. Denpasar: Yayasan Dharma Pura
- Gonda, J. 1973. Sankirt in Indonesia. New Delhi: International Academy of Indian Culture
- Grosjean, Francois. 1982. Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. Cambridge, Massachusett, and London: Routledge and Kegan Paul
- Jendra, I Wayan. 2002. Seni Mabebasan sebagai Sumber Inspirasi Seni Budaya Bali dan Pemakaian Bahasanya. Denpasar: Deva
- Kersten SVD, J. 1984. Bahasa Bali (Tata Bahasa dan Kamus Bahasa Lumrah). Ende Flores : Nusa Indah,
- Kridalaksana, H. 1981. Kamus Sinonim Bahasa Indonesia. Ende-Flores: Nusa Indah.
- Kridalaksana, H. 1993. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia.
- Marcellino, M. 1994. “Penyerapan Unsur Bahasa Asing dalam Pers Indonesia” dalam Dardjowidjojo, Soenjono (Penyunting). Mengiring Rekan Sejati. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Muslich, Masnur, dkk. 2010. Perencanaan Bahasa pada Era Globalisasi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Parera, J.D. 1993. Leksikon Istilah Pembelajaran Bahasa. Jakarta: Gramedia.
- Simatupang, Maurits. 1993. “Masuknya Kosakata Bahasa Daerah ke dalam Bahasa Indonesia” Kompas, 17 Oktober 1993
- Simpin AB, I W. 1983. Kamus Bahasa Bali. Denpasar: PT Mabhakti
- Suandi, I Nengah. 2008. “Pembentukan Kata-kata Baru dalam Bahasa Bali” dalam jurnal terakreditasi Linguistik Indonesia: Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia, Tahun ke-26 Nomor 2
- Sugono, Dendy dalam Hermikna Sutami (2008). “Strategi Pengembangan Kosakata Bahasa Indonesia” dalam Kosakata Bahasa Indonesia Mutakhir. Jakarta: Pusat leksikologi dan Leksikografi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Sumarsono dan Suandi, I Nengah. 1995. Penggunaan Konstruksi Morfologis Baru dalam Kompas dan Tempo 1989—1994 (Laporan Penelitian STKIP Singaraja)
- Supatra, N. Kanduk. 2010. Kamus Bahasa Bali. Denpasar: CV Kayu Mas Agung

- Sunaryo, A. 1999. "Paradigma Leksikografi"
dalam Telaah Bahasa dan Sastra. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa.
- Sutjaja, I Gusti Made. 2006. Inggris Bali
Indonesia. Denpasar.:Lotus Widya Suari
Bekerja Sama dengan Penerbit Unud
- Suwija. 2008. Kamus Anggah Ungguhing Basa
Bali. Denpasar: Pelawa Sari
- Tim Penyusun. 2005. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tinggen, I Nengah. 2005. Kamus Bahasa Bali
Modern. Singaraja : tanpa penerbit
- Zgusta, L. 1971. Manual of Lexicography.
Mouton: The Hague.

IMPLEMENTASI USADA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL BALI DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT DAN WISATAWAN MENGONSUMSI KULINER LOKAL UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT BALI

Dewa Komang Tantra, I Wayan Rasna

Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRAK

Tujuan penelitian pada tahun pertama ini adalah menginventarisasi unsur-unsur tanaman obat dalam lontar usadha dan balian yang dapat diolah menjadi minuman siap dijual ke masyarakat, 2) wisatawan Nusantara maupun wisatawan Mancanegara dapat dengan mudah dan cepat memperoleh minuman tradisional, baik sebagai *well come drink* maupun sebagai minuman makan siang atau makan malam; 3) tersedianya minuman tradisional Bali yang bukan hanya berfungsi sebagai minuman yang mengandung unsur obat tetapi juga sebagai penangkal rasa haus. Populasi dalam penelitian ini, yaitu (1) populasi lontar usadha dan populasi balian. Sampel penelitian ini terdiri atas lontar usadha dan balian. Desain penelitian yang diterapkan dalam penelitian untuk mendokumentasikan unsur tanaman obat dalam : 1) usadha, 2) dari dukun, dan 3) unsur minuman yang dapat menarik konsumen dari sekolah pariwisata. Proses pengumpulan data dilakukan dengan 1) mendokumentasikan unsur tanaman obat dari usadha, 2) mengajukan pertanyaan kepada dukun tentang pengetahuan dan pengalaman masing-masing, dan 3) mengajukan pertanyaan kepada guru, dosen, maupun pihak hotel tentang unsur-unsur minuman yang dapat menarik konsumen. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Tanaman obat yang bersumber dari usadha yang digunakan sebagai obat dalam bentuk jamu banyak sekali. Namun di antara yang banyak itu, tidak semua jamu (luluh) dapat digunakan sebagai kuliner yang dapat dijual kepada konsumen. Yang tidak dapat dijual sebagai kuliner kepada konsumen adalah akar pohon pisang meskipun dia digunakan sebagai jamu dalam pengobatan demikian juga data tanaman obat yang bersumber dari dukun.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa lontar di Bali, obat dibagi menurut khasiatnya, yaitu obat berkhasiat *anget* (hangat), *tis* (dingin) dan *dumalada* (sedang, netral). Bagaimana menentukan khasiat obat ini belum ditemukan jawabannya di dalam lontar *usadha*. Lontar Tarupramana hanya menyebutkan berbagai jenis tanaman yang berkhasiat *anget*, *tis* dan *dumalada*, tanpa mengulas bagaimana cara mengetahui khasiat yang dikandung tanaman tersebut. Misalnya daun *paya* (pare) *babakan* atau kulit pohon *belimbing* memiliki khasiat *anget*. Tanaman yang berkhasiat *tis* adalah getah awar-awar, akar dan buah *belego* (sebangsa labu), akar dan daun kayu

manis. Tanaman yang mempunyai khasiat *dumelada* antara lain akar delima, akar kenanga, daun sembung (Nala, 2007 : 4).

Tumbuhan atau tanaman yang berfungsi sebagai minuman banyak terdapat di Provinsi Bali, seperti : kencur (*kaempferia galanga* L); temutis (*curcuma purpuraceus*); gamongan = lempuyang (*zingiber Cassumianar Roxb*), belimbing buluh (*Averrhwa belimbi* L); sembung (*blumea balsamifera* L) *kacemcem* (*spondias pinnata* L *Anacardiaceae*), kunir (*Curcuma domestica*), *tibah* (mengkudu= *morinda citrifolia* L *rubiaceae*) sirih (*piper betle* L); belimbing besi (*Averrhwa carambola* L. *Oxalidaceae*); beras merah (*Oryza*

sativa linn f); kayu manis (*cnina momum zeyla nicum Ness*).

Tanaman atau tumbuhan ini belum banyak diolah menjadi minuman siap saji sebagai bagian wisata kuliner yang disuguhkan untuk masyarakat maupun untuk kepentingan wisatawan. Padahal wisata kuliner dalam hal ini minuman khas Bali merupakan minuman potensial yang bukan saja penting untuk keperluan masyarakat lokal, tetapi juga untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara sebagai minuman selamat datang. Di samping sebagai minuman selamat datang bagi wisatawan, juga berfungsi untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, sebab tanaman baik yang difungsikan sebagai tanaman

upakara, obat maupun minuman merupakan fenomena sosial, yaitu membawa konsekuensi aktivitas ekonomi, di samping juga konsekuensi sosiologi, hukum, filsafat, politik, bahasa dan lain-lain (Sukarsa, 2004:43). Sebab itu tanaman yang berfungsi sebagai minuman wisata kuliner perlu dikembangkan dan diolah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal maupun oleh wisatawan sebagai bagian ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu *usadha* sebagai ilmu pengetahuan tradisional Bali belum banyak dimanfaatkan baik untuk pengobatan maupun wisata kuliner. Padahal, *usadha* banyak mengungkapkan bahan-bahan yang bersumber dari tanaman untuk digunakan sebagai obat dalam bentuk jamu.

Usadha “ilmu pengobatan” tradisional Bali belum banyak digarap secara ilmiah baik untuk kepentingan pengobatan maupun untuk konsumsi minuman secara lokal, apalagi global. Bali memiliki sekitar 50.000 lontar usada yang merupakan sumber pengobatan herbal yang belum tergarap. Sangat aneh

tentunya, Bali yang memiliki banyak sumber, baik sumber tertulis tentang pengobatan maupun sumber daya alam untuk meramu jamu, justru banjiriran produk herbal yang berasal dari luar Bali maupun mancanegara. Pada hal kalau *usadha* ini digarap secara seksama bukan saja dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat karena obat *usadha* sebagai obat herbal di samping tidak banyak memerlukan biaya, juga dampak kimianya tidak ada, tetapi dapat membantu kesehatan masyarakat. Selain hal ini, pembuatan minuman untuk kesehatan, juga pembuatan minuman yang dilakukan dalam penelitian ini diperlukan sebagai minuman selamat datang (*wellcome drink*) bagi para tamu di hotel maupun restoran yang dikemas secara apik dan higienis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Bali.

Masalah kesehatan dapat ditinjau dari segi ilmu ekonomi kesehatan. Karena sumber daya jumlahnya terbatas, sedangkan manusia mempunyai bermacam-macam keperluan, sehingga terjadi persaingan untuk memperoleh sumber daya yang dapat dialokasikan untuk keperluan kesehatan (Marimbi, 2009

18). Sumber daya (alam, manusia) akan memengaruhi bidang lainnya seperti ekonomi, kesehatan. Hal ini berarti bahwa tanaman baik yang berfungsi obat (*usadha*) maupun minuman sebagai bagian sumber daya alam mempunyai kaitan dengan aspek ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendekatan analogi organik Herbert Spencer dalam Marimbi (2009 :3) yang menyebutkan bahwa memahami masyarakat seperti memahami tubuh manusia, sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain.

Kesalingtergantungan inilah yang memengaruhi faktor lainnya, seperti :

kondisi ekonomi bisa saja berpengaruh terhadap perilaku pemakaian sistem pengobatan (kesehatan). Bahkan sekarang cara berpikir pun bisa memengaruhi pilihan konsumsi yang bukan berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi. Misalnya, ada kecenderungan pada lapisan masyarakat tertentu ingin dipandang supaya kelihatan trendi, sehingga berupaya tampil maksimal melalui penggunaan teknologi seperti HP canggih, pakaian, mobil baru, makanan, minuman bergensi, bir, wiski. Di sisi lain ada pula masyarakat lebih memilih pola hidup sederhana baik karena berfikir ekonomi maupun kesehatan sehingga lebih memilih *lolah* (jamu) yang berbahan tanaman. Dan inilah bagian ekonomi kesehatan (Marimbi, 2009 : 18). Keadaan ini merupakan implementasi perubahan sosial yang terjadi sebagai proses diversitas sosial. Perilaku sosial, status dan peran seseorang, yang kemudian mengalami pencairan dan pengkristalan pada satu identitas tertentu.

Hubungan agama dan kesehatan dari sudut pandang antropologi kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan masyarakat (Marimbi, 2009 : 45). Sebab kepercayaan seperti pada umumnya masyarakat Bali percaya bahwa penyakit itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) faktor *sekala* (= yang kelihatan) dan (2) faktor *niskala* (yang tidak kelihatan). Yang dimaksud dengan faktor *sekala* ialah penyakit yang tampak, nyata dan berwujud, misalnya luka kena pisau, pilek, demam dan sebagainya; faktor *niskala* ialah penyakit yang tidak tampak, tidak nyata, tanpa sebab pasti, tapi menderita sakit (Tinggen, tanpa tahun ; V, Foster dan Anderson, 1986 ; dan Nala, 1993 : 3).

Masyarakat dan pengobatan tradisional menganut dua konsep penyebab penyakit, yaitu naturalistik dan personalistik. Penyebab naturalistik, yaitu

seseorang menderita penyakit akibat pengaruh lingkungan, makanan, minuman, kebiasaan hidup, ketidakseimbangan dalam tubuh, termasuk juga kepercayaan panas-dingin seperti masuk angin dan penyakit bawaan. Penyebab personalistik menganggap munculnya penyakit disebabkan oleh intervensi suatu agen aktif yang dapat berupa makhluk bukan manusia (hantu, roh, leluhur atau roh jahat), atau makhluk manusia tukang sihir, tukang tenung) (Marimbi, 2009 : 44 – 45).

METODE

Populasi dan Sampel Penelitian

Ada 2 (dua) jenis populasi dalam penelitian ini, yaitu (1) populasi lontar *usadha* dan populasi *balian*. Pengambilan informan dari populasi ini bersifat terbatas, sehingga sampelnya juga terbatas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan sesuai dengan masalah yang dikaji, yaitu pendokumentasian unsur tanaman obat dari lontar *usadha* dan *balian*. Sampel lontar *usadha* terdiri atas lontar *usadha* yang tergambar pada tabel

berikut ini.

Tabel 01: Sebaran Lontar Usadha

No.	Nama Lontar	Penerjemah Alih Bahasa	/ Alih Aksara	Keterangan
1.	<i>Usadha Kalimosadha Kuranta Bolong</i>	Nyoka		Koleksi pribadi
2.	<i>Penangkal Upas</i>		Ki Dalang Sengit	Koleksi pribadi
3.	<i>Usadha Aserep</i>	Drs. Pande Ketut Tirta, dkk	-	Dinas Kesehatan Prov. Bali
4.	<i>Cukil Daki</i>	Wayan Suar- diana	-	Koleksi pribadi
5.	<i>Usadha Dalem</i>	Jro Mangku Pulasari.	-	Koleksi pribadi
6.	<i>Usadha Ila</i>	Drs. Pande Ketut Tirta.	-	Koleksi pribadi
7.	<i>Usadha Cetik</i>	-	Ki Dalang Sengit	Koleksi pribadi
8.	<i>Usadha Bhagawan Kasyapa.</i>	Jro Mangku Pulasari.	-	Koleksi pribadi Perpus Pemprov
9.	<i>Usadha Tiwas Pung- gung</i>	Jro Mangku Pulasari.	-	Koleksi pribadi Perpus Pemprov Bali / Gedong Kertya.
10.	<i>Usadha Penawar</i>	Jro Mangku Pulasari.	-	Koleksi pribadi Perpus Pemprov Bali / Gedong Kertya.
11.	<i>Usadha Tuju</i>	Nengah Tinggen	-	Koleksi pribadi Perpus Pemprov Bali.
12.	<i>Usadha Tumbal</i>	Drs. Pande Ketut Tirta	-	Dinas Kesehatan Prov. Bali.
13.	<i>Usadha Gering Agung</i>	Drs. Pande Ketut Tirta	-	Dinas Kesehatan Prov. Bali.
14.	<i>Usadha Anda Kecacar</i>	Drs. Pande Ketut Tirta	-	Dinas Kesehatan Prov. Bali.
15.	<i>Usadha Pengancingan Manik.</i>	Gede Netje.	-	Koleksi pribadi Perpus Pemprov .
16.	<i>Aji Kreket</i>	I Ketut Suwidja	-	Koleksi pribadi Perpus Pemprov .
17.	<i>Usadha Rare</i>	I Ketut Suwidja	-	Koleksi pribadi Perpus Pemprov .
18.	<i>Taru Premana</i>	Dra. I Gusti Segari Putra.	-	Koleksi pribadi

Tabel 02: Sebaran Responden Dukun Usadha di Provinsi Berdasarkan Perimbangan Jumlah Dukun di Masing-Masing Kabupaten.

K A B U P A T E N									
No	Buleleng	Jembrana	Tabanan	Badung	Kodya	Gianyar	Bangli	Klungkung	KarangJumlah

asem										
1.	15	15	20	20	10	10	10	10	15	105
Jml	15	15	20	20	10	10	10	10	15	105

Desain Penelitian

Desain penelitian yang diterapkan dalam penelitian untuk mendokumentasikan unsur tanaman obat dalam : 1) *usadha*, 2) dari dukun, dan 3) unsur minuman yang dapat menarik konsumen dari sekolah pariwisata seperti (STP

SMK jurusan tataboga maupun dari pihak hotel bidang FB (*Food and Beverages*) ialah desain riset kualitatif. Tujuannya ialah mendokumentasikan : 1) unsur tanaman obat dalam *usadha*, 2) unsur- unsur tanaman obat dari dukun, 3) unsur-unsur minuman yang dapat menarik konsumen sehingga unsur itu dapat digunakan sebagai komoditas industri kecil dalam upaya meningkatkan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah.

Metode Pengumpulan Data

Instrumen

Ada 3 (tiga) permasalahan utama yang dijawab dalam penelitian ini, yaitu 1) pendokumentasian unsur : 1) tanaman obat dalam *usadha*, 2) tanaman obat dari dukun, dan 3) minuman yang dapat menarik konsumen. Berdasarkan hal ini, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data ketiga masalah tersebut adalah sebagai berikut.

Daftar pertanyaan untuk mencari dan mengumpulkan unsur-unsur tanaman obat yang ada dalam *usadha* dengan jalan mendokumentasikan unsur tanaman obat khususnya yang berupa unsur yang digunakan untuk membuat *loloh* (jamu) untuk obat.

Lembar observasi berisi butir-butir yang dapat diamati dalam pengobatan yang dilakukan oleh para dukun di Provinsi Bali. Lembar observasi ini terdiri atas tiga variabel pokok, yaitu : 1)

perencanaan pembuatan *loloh* (jamu) : mulai menentukan bahan, mencari tanaman obat, mengumpulkan bahan, membersihkan bahan; 2) melaksanakan proses pembuatan *loloh* (jamu), misalnya mengiris, menentukan komposisinya, lalu proses pembuatannya sampai menjadi jamu, dan 3) aturan minumannya berapa kali sehari dengan takarannya.

- (3) Daftar pertanyaan untuk mendokumentasikan unsur minuman yang dapat menarik konsumen. Data ini dikumpulkan dari dosen perguruan tinggi pariwisata seperti STP, sekolah kejuruan yang ada pariwisatanya, seperti SMK jurusan boga.

Proses Pengumpulan Data

Pendokumentasian unsur tanaman obat dari *usadha* dilakukan / dikumpulkan dengan jalan mendokumentasikan unsur-unsur tanaman obat yang berfungsi sebagai jamu yang bersumber dari 17 *usadha*.

Daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada dukun berdasarkan pengetahuan, pengalaman masing-masing tanpa ada pengaruh atau bias eksternal.

Daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada pihak guru, dosen, maupun pihak hotel tentang unsur-unsur minuman yang dapat menarik konsumen.

Metode Analisis Data

Perolehan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendokumentasian data bersumber dari : 1) *usadha* di

perpustakaan pusat dokumentasi kebudayaan Bali di Denpasar, Balai Bahasa Provinsi Bali di Denpasar, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali di Denpasar, Gedong Kirtya Singaraja, 2) dari para dukun dan 3) dari sekolah pariwisata seperti STP + SMK Jurusan Tata Boga maupun hotel bidang FB untuk unsur minuman yang dapat menarik konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada lima jenis pemanfaatan tanaman obat tradisional (TOT) Bali yaitu :

- Loloh (jamu)
- Boreh (param)
- Tutuh (tetes)
- Simbuh (sembur)
- Oles (oles)

Kelima jenis pemanfaatan tanaman obat tradisional tersebut bersumber dari 2 hal, yaitu *dukun* dan lontar *usadha*. Dukun yang melakukan pengobatan ada 2 jenis, yaitu : 1) dukun yang belajar mengobati dengan menggunakan *usadha* yang disebut *dukun usadha*; 2) *dukun kapica*, yaitu dukun yang melakukan pengobatan karena anugrah Yang Kuasa. Baik dukun *usadha* maupun dukun *kapica* sama-sama menggunakan tanaman obat sebagai sarana mengobati pasien. Pemanfaatan tanaman obat mulai akar, kulit, daun, bunga, buah dan kayu.

Di antara lima jenis pemanfaatan tanaman obat tradisional Bali, yaitu : jamu, param, tetes, sembar dan oles, hanya jamu yang berpeluang sebagai kuliner. Namun tidak semua bahan jamu berpeluang sebagai kuliner, apalagi sebagai minuman selamat datang (welcome drink). Misalnya akar pisang busuk yang digunakan sebagai jamu untuk obat keracunan tidak dapat digunakan sebagai jamu yang dijual ke masyarakat, apalagi untuk minuman selamat datang. Hal ini terjadi karena rasanya yang tidak enak. Jamu yang dijual ke masyarakat, terlebih sebagai welcome drink, tidak cukup hanya berstatus enak saja, tetapi

juga harus memenuhi syarat : higienis, mulai proses pembuatan, pengemasan, penyimpanan termasuk peralatan yang digunakan pada saat pembuatan. Kemasannya harus menarik, rasanya enak. Namun untuk sampai menjadi minuman selamat datang, tahapan yang harus dilalui dalam penelitian ini adalah : 1) identifikasi tanaman obat tradisional baik yang ada dalam lontar *usadha* secara teoritis maupun yang digunakan oleh dukun secara praktis, 2) percobaan pembuatan minuman berdasar temuan 1) tanaman yang dapat digunakan sebagai minuman dan 3) uji klinis. Saat ini penelitian baru ada pada tahap pertama, yaitu identifikasi tanaman yang dapat digunakan untuk minuman, baik yang bersumber dari lontar maupun dari dukun.

Berikut ini disajikan data tanaman yang digunakan sebagai obat minum dalam lontar tetapi bukan minuman, misalnya : akar silaguri; kelapa panggang, kelapa muda, isen, kunir, asam, daun kentut, belimbing buluh, belimbing besi, mengkudu, kencur, daun pancarsona, daun temen, delima putih, kayu manis, gamongan (lempuyang), jahe, jerangan, mentimun gantung, kumis kucing, temu kunci, temu tis, lengkuas, sembung, silik, semanggi gunung, temen, temu giring, temulawak, sirih, ginten cemeng, kacemcem, sembung rambal, daun salam, tebu hitam, ketan gajih, liligundi, piduh (tapak kaki kuda), jerungga, waru.

Berikut dipaparkan data tanaman obat yang digunakan sebagai obat minum yang bersumber dari dukun, yaitu : adas, akar beluru, akar manis, andong, angšana, akar enau, asam jawa, bakung, daun bambu, bangle, belatung lengis, belimbing manis, belimbing wuluh, beluntas, benalu jeruk, benalu the, beras merah, biang sunda, binahong, bintangun, bimtemu, buangit, buni, bunga matahari, camplung, kayu cang, ceguk, cendana, cermai, cincau, cocor bebek, dadap wong, daun intaran, daun jinten, daun kentut, daun salam, sirih, daun delima, dewandaru, gadung, gatep, jerangau, jeruk nipis, jeruk purut, kaliasem, kayu manis, kayu jadmaj, kayu

kasturi, kayu kacemcem, kacemcem putih, kecombrang, beluntas, kencur, kumis kucing, kunir, lempuyang, lidah buaya, mahkota dewa, manggis, mengkudu, nagasari, pandan wangi, pancasona, sambiloto, samblung, selasih, semanggi gunung, sembung, sembung gunung, sirih, sirsak, srikaya, tapak liman, temu giring, temu kunci, temu lawak, temu tis, tingulun. Pemakaian tanaman obat tradisional belum banyak dikaji secara ilmiah sehingga

kandungan yang ada di dalamnya tidak diketahui kenapa dapat menyembuhkan. Penggunaannya lebih didasari oleh keyakinan dan pengalaman, serta fakta pasien yang disembuhkan. Namun dalam hubungannya dengan penggunaan jamu sebagai obat baik menurut lontar maupun dukun masih harus diseleksi lagi unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai kuliner. Berikut ini unsur tanaman yang diperkirakan sebagai kuliner :

No.	Bahan Minuman dari Daun/Tumbuhan		
	Bahasa Indonesia	Bahasa Daerah Bali	Bahasa Latin
1.	Kencur	Cekuh	<i>Kaempferia galanga L.</i>
2.	Temutis	Temutis	<i>Curcuma purpuracens</i>
3.	Lempuyang	Gamongan	<i>Ziginger cassuamianar</i>
4.	Belimbing wuluh	Belimbing buluh	<i>Averrhwa bilimbil</i>
5.	Sembung	Sembung	<i>Blumea balsamifera</i>
6.	Kacemcem	Cemcem	<i>Spondias pinnata L Anacardiaceae</i>
7.	Kunir	Kunyit	<i>Curcuma domestica</i>
8.	Mengkudu	Tibah	<i>Morinda citrifolia L rubiaceae</i>
9.	Sireh	Base	<i>Piper betle l</i>
10.	Belimbing besi	Belimbing besi	<i>Averrhwa carambola L oxalidaceae</i>
11.	Beras merah	Baas barak	<i>Oriza sativa Linnf</i>
12.	Kayu manis	Kayu manis	<i>Cinnamomun zeylanicum Ness</i>
13.	Ketan gajih	Ketan gajih	<i>Oryza sativa L Alatirosa</i>
14.	Jerangan	Jangu	<i>Acorus calamus L Anaceae</i>
15.	Sumanggi gunung	Sumanggi gunung	<i>Hydrocotyle podanta Molk</i>
16.	Sembung gantung	Sembung gantung	<i>Blumea balsamifera DC.f</i>
17.	Temu kunci	Temu kunci	<i>Bolsen bergia pandurata Schbzingibergia</i>
18.	Ginten cemeng	Ginten cemeng	<i>Cuminum cyminum L. umbelliferaceae</i>
19.	Beluntas	Beluntas	<i>Plucea undica</i>
20.	Silik	Srikaya	<i>Annona squamoza</i>

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tanaman obat yang bersumber dari usadha yang digunakan sebagai obat dalam bentuk jamu banyak sekali. Namun di antara yang banyak itu, tidak semua jamu (loloh) dapat digunakan sebagai kuliner yang dapat dijual kepada konsumen. Yang tidak

dapat dijual sebagai kuliner kepada konsumen adalah akar pohon pisang meskipun dia digunakan sebagai jamu dalam pengobatan demikian juga data tanaman obat yang bersumber dari dukun. Berdasar hal ini, maka tanaman obat yang dapat digunakan berpotensi sebagai kuliner bernilai ekonomis adalah tanaman obat sebagai berikut :

No.	Bahan Minuman dari Daun/Tumbuhan		
	Bahasa Indonesia	Bahasa Daerah Bali	Bahasa Latin

1. Kencur	Cekuh	<i>Kaempferia galanga L.</i>
2. Temutis	Temutis	<i>Curcuma purpuracens</i>
3. Lempuyang	Gamongan	<i>Ziginger cassuamianar</i>
4. Belimbing wuluh	Belimbing buluh	<i>Averrhwa bilimbil</i>
5. Sembung	Sembung	<i>Blumea balsamifera</i>
6. Kacemcem	Cemcem	<i>Spondias pinnata L Anacardiae</i>
7. Kunir	Kunyit	<i>Curcuma domestica</i>
8. Mengkudu	Tibah	<i>Mornida citrifolia L rubiaceae</i>
9. Sireh	Base	<i>Piper betle l</i>
10. Belimbing besi	Belimbing besi	<i>Averrhwa carambola L oxalidaceae</i>
11. Beras merah	Baas barak	<i>Oriza sativa Linnf Cinnamomun</i>
12. Kayu manis	Kayu manis	<i>zeylanicum Ness Oryza sativa L</i>
13. Ketan gajih	Ketan gajih	<i>Alatirosa</i>
14. Jerangan	Jangu	<i>Acorus calamus L Anaceae</i>
15. Sumanggi gunung	Sumanggi gunung	<i>Hydrocotyle podanta Molk</i>
16. Sembung gantung	Sembung gantung	<i>Blumea balsamifera DC.f</i>
17. Temu kunci	Temu kunci	<i>Bolsen bergia pandurata</i>
		<i>Schbzingibergia</i>
18. Ginten cemeng	Ginten cemeng	<i>Cuminum cyminum L. umbelliferaceae</i>
19. Beluntas	Beluntas	<i>Plucea undica</i>
20. Silik	Srikaya	<i>Annona squamoza</i>

Saran

Berdasar hasil penelitian/simpulan di atas, maka disarankan untuk melakukan percobaan membuat jamu berdasar kepada 20 (dua puluh) tanaman seperti yang disebutkan dalam simpulan. Diharapkan dari percobaan itu bukan hanya manfaatnya dari segi kesehatan, tetapi juga ditemukan komposisi yang tepat sehingga dihasilkan jamu yang dapat menarik konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Barbara Galatin. 1986. *Antropologi Kesehatan*. Jakarta : UI Press.
- Atmojo, H. Marsum Widjojo. 2004. *Bar, Minuman dan Pelayanannya*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Bali Post. Rabu Pon 22 Juni 2016. *Dongkrak Pertumbuhan Pengolahan Nonmigas Kontribusi Industri Makanan dan Minuman 31,5%*.
- Bates, Marston. 1953. *Human Ecology dalam Anthropology Today : An Encyclopedic*

Inventory. A.E. Kroeber Ed. Hlm. 700 –
Chicago : The University of
Chicago Press.

- Citra, I Putu Ananda. 2016. *Pemetaan Potensi Ekowisata Wilayah Pesisir di Kabupaten Buleleng dalam Jurnal Ilmu Sosial& Humaniora Volume 5, Nomor 1 April 2016*.
- Ford, R.I. 1978. *The Nature and Status of Ethnobotany Anthropological Papers, Museum of Anthropology*. University of Michigan No. 67. Ann Arbor, Michigan.
- Foster, George M dan Anderson Barbara. Gallatin. 1986. *Medical Anthropology* Diterjemahkan oleh Priyanti Pakan Suryadarma dan Meutia F. Hatta Swasono. Jakarta : UI Press.
- Gilmor, M.R. 1932. *Importance of Ethnobotanical Investigation*. American Anthropologist.
- Hardesty, Donald L. 1977. *Ecological Anthropology*. New York : John Wiley.

- Harsberger, J.W. 1895. *Some Idea*. Philadelphia Evening Telegram. December,5.
- Jones, V. 1941, The Nature and Scope of Ethnobotany. *Chron. Bot*, 6 (10), 219-221.
- Marimbi, Hanum. 2009. *Sisiologi dan Antropologi Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Nala, I Gusti Ngurah.1993. *Usadha Bali*. Denpasar Paramita.
- Nala, I Gusti Ngurah.2007. *Usadha di Bali dalam Usadha Majalah Kesehatan*. Denpasar Paramita.
- Oka, Ida Bagus 2002. *Potensi dan Tantangan Masa Depan Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Bali dalam Menuju Terwujudnya Ilmu Pariwisata di Indonesia*.Denpasar : Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana Bali.
- Ratna, Wahyu, 2010. *Sosiologi dan Antropologi Kesehatan*. Yogyakarta : Pustaka Rihama.
- Sarwono Solita.2007. *Sosiologi Kesehatan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Schultes, R.E. 1983. Richard Spuce : *an early ethnobotanish and explorer of the northwest Amazon and Northern Andes*, *Journal of Ethnobiology* 3 : 139 – 147 p.
- Sudarma, Momon. 2009. *Sosiologi Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Sujana dkk. 2014. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Warga Belajar dalam Mendukung Kepariwisata di Bali*. Laporan Penelitian MP3EI Undiksha Tidak Dipublikasikan.
- Sukantra, I Made. 1992. *Kamus Bali – Indonesia Bidang Istilah Pengobatan Tradisional Bali (Usadha)*. Denpasar : Upada Sastra.
- Sukarsa, I Made. 2004. *Sisi Ekonomi Sebuah Upacara dalam Prosiding Seminar Konservasi Tumbuhan Upacara Agama Hindu*. Candikuning : Bagian Proyek Pelestarian, Penelitian dan Pengembangan Flora Kawasan Timur Indonesia UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kabun Raya "Eka Akarya" Bali-LIPI.
- Sukerti Ni Wayan dkk. 2016. *Reinventarisasi Makanan Tradisional Buleleng sebagai Upaya Pelestarian Seni Kuliner Bali dalam Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora* Volume 5, Nomor 1 April 2016.
- Suriasumantri, Jujun S. 2002. *Pariwisata sebagai Sebuah Disiplin Ilmu.Sebuah Pendekatan Kefilsafatan dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Bali dalam MenujuTerwujudnya Ilmu Pariwisata di Indonesia*. Denpasar : Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Tim Penyusun KBBI, 2001. KBBI. Jakarta. Pusbinbangsa.
- Tinggen, Nengah. Tanpa Tahun. *Pengobatan Alternatif*. Singaraja : Indrajaya.
- Panitia Penyusunan Kamus Bali – Indonesia. 2005. *Kamus Bali Indonesia*. Denpasar : Balai Bahasa Denpasar.
- Walujo, Eko Baroto. 2004.*Tumbuhan Upacara Adat Bali dalam Perspektif Penelitian Etnobotani dalam Prosiding Seminar Konservasi Tumbuhan Upacara Agama Hindu*. Candikuning Bagian Proyek Pelestarian Penelitian dan Pengembangan Flora Kawasan Timur Indonesia : UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya "Eka Karya Bali – LIPI.
- Warna, I Wayan, dkk. 1978. *Kamus Bali – Indonesia*. Denpasar Dinas Pengajaran Provinsi Bali.

STUDI ETNOGRAFI PADA BUDAYA LOKAL SEBAGAI PENGEMBANGAN KREATIVITAS DALAM KONTEKS INDUSTRI KREATIF

I Made Darmada

m.darmada@yahoo.com
08124628716/081805367059

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara adi budaya yang dibuktikan dengan warisan budaya adiluhung yang telah ada sejak ratusan tahun silam, yang dibuktikan dengan adanya subak sebagai rekayasa sosial untuk pertanian, candi Borobudur dan Prambanan merupakan supremasi arsitektur, Keris adalah bukti nyata dalam metalurgi, batik merupakan fesien di jamannya, jamu dan ramuan tradisional merupakan research and development. Keadibudayaan Indonesia ini akan tidak terlepas dari budaya global yang sangat mempengaruhi masyarakatnya. Ekonomi pada era globalisasi merupakan ekonomi berkelanjutan/ekonomi kreatif yang berbasis pada pengetahuan. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan, paling tidak paradigmanya ada pada paradigma fungsional, yaitu berpengetahuan, berkemampuan, dan bersikap masa depan.

Jenis Penelitian ini adalah studi etnografi tentang konsepsi masyarakat Bali terhadap SMK sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia termasuk jenis kualitatif etnografi. Studi ini secara kualitatif memotret dan mendiskripsikan cara-cara masyarakat Bali berdasarkan budaya lokal sebagai pengembangan kreativitas dalam industri kreatif yang analisis data menggunakan Miles dan Huberman.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kreativitas berdasarkan modal sosial pada budaya lokal dalam industri kreatif dapat disimpulkan, bahwa Social balivogenic yaitu pengetahuan sosial/lembaga sosial yang membudaya dalam relativitas desa, kala, patra dapat menunjang, dan memupuk serta terbentuknya konsep kreativitas sosial. Konsep kreativitas Sosial merupakan peran modal sosial yang membudaya pada relativitas tempat, ruang, dan waktu sebagai pengembangan kreativitas sosial dalam industri kreatif.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara adi budaya yang dibuktikan dengan warisan budaya adiluhung yang telah ada sejak ratusan tahun silam, yang dibuktikan dengan adanya subak sebagai rekayasa sosial untuk pertanian, candi Borobudur dan Prambanan merupakan supremasi arsitektur, Keris adalah bukti nyata dalam metalurgi, batik merupakan fesien di jamannya, jamu dan ramuan tradisional merupakan *research and development*. Keadibudayaan Indonesia ini akan tidak terlepas dari budaya global yang sangat mempengaruhi masyarakatnya.

Ardika (2007) menyatakan bahwa kebudayaan global yang mempengaruhi masyarakat dalam berbagai dimensi, yaitu perpindahan orang (*ethnoscape*), pengaruh teknologi (*technoscape*), pengaruh aliran keuangan (*financescape*), pengaruh media informasi (*mediascape*), dan pengaruh ideologi

(*ideoscape*) seperti HAM dan demokrasi. Lebih lanjut, Hofstede (1970:11) menyatakan pula bahwa kehidupan di jaman global “*technology has brought the world much closer together. This means that people of different cultures find themselves working together and communicating more and more*”.

Hal itu memberikan gambaran bahwa *ethnoscape*, *technoscape*, *mediascape*, *financescape*, dan *ideoscape* dalam bentuk gerakan manusia, teknologi informasi, dan uang yang dibawa melalui kegiatan industri kreatif dalam destinasi kepariwisataan, tidak saja menimbulkan hubungan lintas budaya tetapi merangsang revitalisasi kesenian etnis dan adat istiadat melalui hubungan komunikasi berkelanjutan.

Masyarakat Hindu Bali merupakan masyarakat kreatif yang setiap karyanya selalu bertumpu pada nilai-nilai budaya lokal adiluhung yang dapat diwujudkan dalam berbagai komponen dalam berbagai subsektor

industri kreatif. Kemudian, kreativitas tersebut mendukung tumbuhnya industri pariwisata (Pemayun, 2010). Di sisi lain, Brahmantyo (2008) yang memposisikan pariwisata dalam wacana industri kreatif menyatakan bahwa industri kreatif berada dalam *cluster* yang dibangkitkan oleh ide-ide yang merupakan perpaduan antara seni budaya (kreativitas artistik), bisnis (*entrepreneurship*), dan teknologi (inovasi) yang bermuara pada nilai-nilai ekonomi baru.

Selanjutnya, Swarsi (2008:33) menyatakan bahwa budaya lokal Bali memiliki karakteristik yang unggul yaitu: (1) mengedepankan kualitas, keagungan, dan kehormatan sehingga sangat diagungkan; (2) menjadi sumber inspirasi, kreasi, sangat diapresiasi sebagai citra, referensi, dan jati diri;

diterima dan diasosiasikan oleh mayoritas populasi sebagai orientasi sikap hidup; (4) memiliki roh (*methaksu*), sifat khas, lentur, dan adaptif serta sarat dengan nilai-nilai lokal, nasional, dan universal; (5) mengandung sari-sari budaya dan peradaban yang mencakup etika, estetika, logika, solidaritas, spiritualitas, dan praktika. Kebudayaan lokal yang unggul dapat dirujuk sebagai wawasan kehidupan publik yang berdimensi sektoral dan lintas sektoral.

Konsep budaya lokal Bali yang unggul yakni (1) tataran konkret dengan filosofi Tri Hita Karana (THK), *ajaran tattwamasi*, *ajaran dharma*, *ajaran bhineka tunggal ika*, *ajaran trikaya parisudha*, *ajaran pancadatu*, *ajaran swastika*, *ajaran dewata nawa sanga*, dan lain sebagainya yang tumbuh di tanah Bali; (2) tataran *intangible* misalnya kerja tulus, etos kerja, pola hidup disiplin, sikap kreatif/individu kreatif, sistem subak, tradisi *nyastra*, kreasi seni; dan (3) tataran *tangible* misalnya warisan budaya arkeologis, karya arsitektur, gamelan, *pepatrean*, *pis bolong/pancadatu* (uang kepeng), senjata *dewata nawa sanga*, benda sakral, berbagai benda seni kria logam, benda seni kria kayu, benda seni kria keramik, dan bangunan-bangunan yang monumental.

Selanjutnya, warisan budaya yang fungsional dalam masyarakat Bali menjadi ikon kehidupan kreatif yang terkemas dalam *soroh/klen pande* dan *catur warna* yang melahirkan bakat/profesi. Profesi merupakan unsur kompetensi dan kewenangan atas “bisa dan boleh” dalam suatu pekerjaan, adanya

pengakuan yang dapat diterima oleh komunitas/organisasi, dan mampu memberikan pelayanan secara nyata pada masyarakat luas. Semisal yang berwenang mendidik adalah guru, maka profesinya disebut guru, dan yang berwenang dibidang kesehatan misalnya dokter, maka profesinya disebut dokter, serta orang yang berwenang dalam masyarakat tradisional Bali mengerjakan logam mulia adalah *pande*, maka profesinya disebut *pande*.

Pande dan *catur warna* itulah yang memunculkan bakat/profesi masyarakat Bali. Yang berprofesi di bidang kerohanian, pendidikan, dan pengobatan digolongkan *warna brahmana*. Yang berprofesi di bidang kepemimpinan digolongkan *warna ksatria*. Yang berprofesi di bidang ekonomi digolongkan *waisya*. Tetapi, ada juga yang tidak bisa menentukan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Klen inilah yang disebut *sudra*, yang hanya memiliki kemampuan tenaga fisik saja (Wiana, 2009).

Masyarakat Bali dalam tatanan kehidupannya berproses melalui pendidikan di keluarga, *banjar* sebagai aktivitas komunitas berupa *skaa*, pembelajaran yang berkaitan dengan *panca gita*, seni tari, serta *pesraman* di *desa adat/desa pekraman* dalam upaya peningkatan *sradha* (iman) dan keterampilan tentang pembuatan berbagai persiapan *panca yadnya*. Selanjutnya, pendidikan merupakan salah satu pilar untuk mempertahankan eksistensi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menjaga kesinambungan manusia itu sendiri. Kemudian, pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa dalam mengisi pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Sejalan dengan pembangunan pendidikan di Bali, fenomena kehidupan dalam arus globalisasi, tentu akan menjadi daya tawar pada penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, khususnya Bali yang mensinkronisasikan antara lokalitas, nasionalisme, dan globalisme.

Dengan demikian, sangat diperlukan pendidikan yang berakar pada budayanya sehingga dapat melahirkan insan-manusia yang kreatif dan inovatif, tumbuh subur dari keluarga, masyarakat yang berbudaya. Senada dengan hal di atas Tilaar (2002:34)

menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia haruslah bertolak dari *das sein* anak Indonesia agar anak tersebut tidak tercerabut dari budaya lokalnya dan

jangan dipaksakan untuk menerima suatu kebudayaan yang masih asing baginya. Di sisi lain, strategi pendidikan di Indonesia sekarang ini telah keluar dan terlepas dari rel ideologinya. Strategi pendidikan semestinya ditentukan oleh konsep ideologi bangsanya, tetapi yang terjadi akhir-akhir ini ditentukan oleh konsep politik suatu pemerintahan. Sementara itu, konsep suatu bangsa atau negara harus diatur berdasarkan pertimbangan kondisi alam tempat bangsa itu hidup, dan ke arah mana bangsa itu akan dididik agar mampu hadir di tengah-tengah masyarakat dunia yang maju, damai, dan sejahtera pada jamannya.

Bali dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. Pembangunan Bangsa Indonesia diyakini dapat diperoleh melalui pendidikan yang relevan apabila hasil yang diperoleh dari pendidikan itu mempunyai nilai fungsional bagi penghidupan manusia secara konkret dengan lingkungan hidupnya, perkembangan masa sekarang dan yang akan datang diharapkan setiap insan masyarakat Indonesia mendapatkan hak hidupnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Selanjutnya, strategi dan program pendidikan seharusnya sejalan dengan tujuan untuk membangkitkan harkat manusia yang berbudaya agar mampu berpacu secara mental untuk mengejar ketertinggalan dalam arena hidup di dunia tanpa menghilangkan kodratnya yang beragam. Oleh karena itu, pengembangan kreativitas di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan benar-benar berbasis budaya lokal yang berkolaborasi dengan perkembangan budaya industri kreatif. Sejalan dengan itu, Tilaar (2002:34) menyatakan bahwa pendidikan nasional harus dimulai dari lingkungan dan secara berangsur-angsur diarahkan kepada terwujudnya proses pembudayaan nasional melalui proses pendidikan nasional. Dengan demikian, setiap jenis kurikulum bukan menjadi tujuan, melainkan menjadi rel untuk mencapai tujuan dan salah satu alternatif dalam menyusun strategi, program dan kurikulum pendidikan meng-Indonesia yang selalu mengaktualisasikan budayanya.

Berikutnya, sumber daya alam dan sumber budaya masing-masing suku yang tersebar di Bumi Nusantara ini merupakan

kekayaan dan aset yang sangat luar biasa, dapat dikembangkan melalui kreativitas anak bangsa ini untuk menyongsong ekonomi era global yaitu ekonomi kreatif (industri kreatif). Hal ini para akademisi belum menyatukan berbagai program yang ada ditingkat SMK atau ditingkat perguruan tinggi untuk bersama-sama mendorong dan mendukung penggunaan sumber-sumber yang terbarukan.

SMK dalam dinamikanya dan pembinaanya harus terus dipacu, diinovasi dan dikembangkan melalui nilai-nilai dan budaya masyarakat lokal dan global. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan SMK yang menginternalisasikan nilai-nilai budaya masyarakat Bali merupakan harapan dan tantangan bagi masyarakat SMK di Bali.

SMK yang tumbuh di tanah Bali dipenuhi berbagai harapan dan tantangan diantaranya, yaitu: (1) SMK diharapkan mampu menghadirkan manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri (dudi) sebagai tenaga tingkat menengah sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya;

SMK ditantang agar mampu membekali siswanya dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan mengembangkan diri, yaitu berinovasi dan berkreaitivitas, berwirausaha/mandiri serta dapat meningkatkan kemampuannya melalui jenjang pendidikan/pelatihan lebih tinggi sesuai dengan kejuruannya untuk meraih peluang pada jamannya, yaitu jaman industri kreatif.

Penggalian kearifan lokal Bali melalui kreativitas dan bentuk industri kreatif akan membawa perubahan dalam tatanan pola pikir, sikap hidup, khususnya masyarakat SMK. Oleh karena itu, masyarakat Bali dihadapkan pada tantangan paradigma baru dalam melakukan inovasi pengembangan SMK yang digali dari pewarisan budaya sehingga benar-benar berbasis pada masyarakat dan berakar budaya lokal (kearifan lokal) untuk menentukan masa depannya.

Kemudian, kerajinan logam mulia yang merupakan aspek turunan dari subsektor industri kreatif, merupakan produk unggulan Disperindag Pemkab Gianyar dan Pemprop Bali. Produk dari kria kerajinan logam memiliki pasar lokal untuk kepentingan *panca yadnya* dan pasar global serta berkaitan erat dengan pariwisata. Lebih lanjut, program

keahlian disain dan produksi kria kerajinan logam satu-satu yang ada di Bali yaitu di SMK Negeri 2 Sukawati. Oleh karena itu, SMK Negeri 2 Sukawati dan lingkungannya sebagai sasaran untuk melaksanakan penelitian. Oleh karena itu adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah modal sosial dalam budaya lokal sebagai pengembangan kreativitas siswa SMK Negeri 2 Sukawati dalam konteks industri kreatif?

Dari permasalahan tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah: Menggali peran modal sosial dalam budaya lokal Bali sebagai pengembangan kreativitas siswa SMK dalam konteks industri kreatif dan Penelitian ini secara akademik mempunyai nilai manfaat besar dalam pengembangan konsep-konsep penyelenggaraan SMK yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, keunggulan dan kearifan lokal, selaras dengan roh perkembangan desentralisasi pendidikan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara utuh dan holistik. Konsep-konsep baru dan membumi tentang penyelenggaraan SMK yang digali secara empirik dari budaya lokal dengan metode induktif kemudian direkonstruksi dan dimaknai sebagai teori akan sangat besar manfaatnya bagi pengembangan ilmu pendidikan kejuruan di Indonesia. Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan pengambilan kebijakan pengembangan SMK di Propinsi Bali yang holistik dan humanis sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, SMK diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna serta mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran.

Tujuan SMK sebagaimana tertuang dalam PP 19 tahun 2005 pasal 26 ayat 3 dinyatakan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut sesuai dengan kejuruan. Berkaitan dengan pemetaan tujuan SMK tersebut, struktur kurikulum SMK Negeri 2 Sukawati terdiri dari program normatif, adaptif, dan produktif. Hal tersebut, memberikan pemetaan yang jelas bahwa di SMK Negeri 2 Sukawati berjalan pendidikan integralistik, yaitu program normatif mengandung filosofinya Friere dalam teori konsientisasi (humanis), program adaptif

mengandung filosofinya Dewey yang bermakna pragmatis (progresif/demokratis), dan program produktif mengandung filosofinya Prosser yang bermakna esensial dan eksistensial.

Zubaedi (2012:19) menyatakan bahwa pendidikan integralistik merupakan model pendidikan yang berorientasi pada komponen-komponen kehidupan yaitu; (1) pendidikan berorientasi pada ketuhanan, (2) kemanusiaan, dan (3) alamiah (alam pada umumnya). Kemudian, berkaitan dengan pendidikan integralistik adalah perwujudan kehidupan manusia yang merupakan pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan, dan individu-sosial.

Kesejahteraan masyarakatnya pada abad ke-21 ditandai dengan masyarakat ekonomi kreatif (industri kreatif) yang berbasis pengetahuan atau kreativitas. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan (SMK) seyogyanya terdisein dalam kurikulum yang relevan, berbasis keunggulan, di tempat tumbuhnya sekolah yang bersangkutan. Pembelajaran berbasis pengetahuan dari sumber daya dan sumber budaya akan diperoleh kejelasan tentang kemampuan/kreativitas. Hal tersebut menjadikan setiap insan SMK akan berorientasi pada rasa (ide, gagasan, konsep), karsa (proses perwujudan), dan cipta (bentuk perwujudan) yang kontekstual. Hal tersebut menandakan bahwa SMK membentuk keunggulan-keunggulan dan mengandalkan SDM, teknologi, dan manajemen yang menjadikan suatu tantangan (Pavlova, 2009).

Pengembangan kreativitas siswa SMK yang tepat akan berdampak ganda bagi pemerintah daerah baik dalam konspirasi politik, ekonomi, sosial dan budaya. SMK dapat mendorong proses-proses penyesuaian-penyesuaian terhadap pengaruh budaya global dengan tetap berpegang teguh pada akar budaya lokal Bali. Masyarakat Bali sebagai bagian dari Indonesia memiliki budaya lokal yang sangat kuat sebagai modal pelaksanaan proses akulturasi dan/atau penyesuaian diri, enkulturasi/pembawa perubahan, dan inkulturasi sebagai pewarisan. SMK yang mengakar pada kearifan lokal sangat mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan siswa, kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, program pemerintah daerah, dan masyarakat. Budaya lokal Bali yang unggul perlu dijadikan pengembangan kreativitas dan diwadahi dalam

penataan SMK untuk mendukung konteks industri kreatif.

Jaman globalisasi sangat erat kaitannya dengan perilaku mobilitas. Mobilitas ini juga akan mempengaruhi berbagai bentuk reorganisasi sosial, ekonomi, dan politik. Hal tersebut memberikan dampak pada reorganisasi ekonomi yaitu perwujudan dari usaha mencari hidup yang lebih baik secara ekonomi, dan mengakibatkan ketimpangan ekonomi regional dan nasional (Abdullah, 2010:116).

Kemudian, pada level yang lebih mikro untuk di Indonesia, yaitu gerakan orang yang terjadi yaitu meluas akibat dari transportasi dan media sosial yang semakin hari semakin baik dan hampir setiap tempat dapat terjangkau dengan relatif mudah. Berkaitan dengan itu, lingkungan hidup suatu tempat akan terdiri dari kaum pendatang yang sifatnya sesaat maupun permanen. Appadurai menyatakan bahwa gerakan manusia semacam itu merupakan tanda perkembangan yang paling penting dalam rekonstruksi sejarah kehidupan (Abdullah, 2010:117).

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas beragam suku bangsa, diantaranya suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, suku Bali, suku Sasak, suku Batak, suku Dayak, dan sebagainya. Keragaman suku ini, tentunya dapat menciptakan budaya yang beragam. Oleh karena itu, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam salah satu suku bangsa tersebut dapat dinamakan budaya tradisi atau budaya lokal. Selanjutnya budaya lokal merupakan sebuah hasil cipta, rasa, karsa, atau buah budi yang tumbuh dan berkembang pada alam serta masyarakatnya. Berkaitan dengan referensi itu, budaya lokal Bali yang merupakan vibrasi agama Hindu harus diperkuat bukan untuk meredam pengaruh budaya global, bahkan lebih dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai pelezat dan modal pengembangan budaya lokalnya.

Di sisi lain, bahwa budaya local Bali merupakan salah satu benteng tangguh menghadapi serbuan budaya global yang berpotensi menyalakan identitas bangsa. Selanjutnya, budaya lokal Bali memiliki kearifan yang berupa nilai, perilaku atau ekspresi dan bentuk-bentuk hasil kebudayaan (karya) yang bersifat material dan immaterial.

Budaya nilai memberikan sistem pengetahuan, budaya perilaku memberikan

semesta pengalaman nyata, dan budaya karya memberikan warisan budaya (*heritage*) kepada yang tidak terlepas dari tradisi adat berupa upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu produk budaya lokal. Hal ini memiliki beberapa fungsi mendasar, yakni ritus komunikasi (manusia dengan Tuhan), perekat sosial (*solidarity maker*), pengukuhan atas nilai-nilai tradisi, wahana ekspresi kolektif dan wahana pengembangan nilai-nilai ekonomi terkait dengan budaya wisata (<http://ikhsancrut.ngeblogs.com> budaya-lokal diunduh tanggal 1 Maret 2010).

Suryadarma (2011) menyatakan bahwa kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada *ajaran* agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan (*rwa bhineda*), yang sering ditentukan oleh relativitas tempat (*desa*), relativitas waktu (*kala*) dan relativitas situasi (*patra*). Konsep *desa*, *kala*, dan *patra* menyebabkan kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan selektif dalam menerima dan mengadopsi pengaruh kebudayaan luar.

Pengaruh kebudayaan luar akan memunculkan kreativitas budaya, yakni berbagai bentuk aneka produk kerajinan, sehingga *desa adat* yang semula bercorak agraris berubah menjadi *desa adat* agraris-industri. Perubahan ini menimbulkan kemakmuran seperti *desa-desi adat/pekraman* di Bali. Kemakmuran tercermin pada kehidupan *desa adat* sebagai tampak pada pemeliharaan Pura (tempat ibadah), penyelenggaraan ritual, dan lingkungan rumah yang asri serta tempat tinggal kebanyakan berbentuk rumah gedong atau lazim disebut rumah tipe kantor (Atmaja, 1999).

Kebudayaan Bali dalam relativitas *desa kala patra* (tempat, waktu, ruang) yang menunjang, memupuk dan memungkinkan terjadinya perkembangan kreativitas disebut dengan *balivogenic culture*. Adapun karakteristiknya sebagai berikut; (1) adanya sarana kebudayaan berupa alam geografis yang archipelago, dan alam demografis yang unik merupakan sarana/media tumbuhnya suatu kreativitas yang membudaya; (2) kebudayaannya sangat terbuka terhadap rangsangan dari berbagai lapisan masyarakat dan tidak bagi golongan tertentu yaitu berkaitan dengan *Tri Hita Karana* yaitu terjadinya relasi dengan Tuhan, relasi sesama manusia yaitu memiliki pribadi yang unik

dalam kehidupan sosial, dan relasi pada alam makrokosmos/mikrokosmos; (3) penekanan pada “*becoming*” (menjadi tumbuh) yaitu manusia yang kreatif menyadari bahwa kreativitas adalah sesuatu yang tumbuh, dan membutuhkan masa depan dan masa kini. Pada masyarakatnya bahwa individu sebagai manusia harus selalu berproses untuk memperoleh berbagai pengalaman berupa kemampuan/kreativitas. Hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan religius pada dasarnya memiliki kewajiban hidup yang berlandaskan pada *ajaran tri kaya parisudha*. *Ajaran tri kaya parisudha*, yaitu *manacika* (berpikir yang baik dan benar), *wacika* (bersikap yang baik dan benar), *kayika* (bertindak/berbuat yang baik dan benar). Kewajiban hidup yang layak, akan diraih melalui belajar sepanjang hayat melalui tiga pilar pendidikan (keluarga, *banjar/desa adat/pekraman*/masyarakat, dan sekolah) untuk dapat menjadi sejahtera dan terpenuhi *becoming*-nya dalam tradisi yang membumi;

kebudayaan *balivogenic* memberikan peluang terbuka/bebas terhadap media kebudayaan bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa pendidikan keluarga di Bali merupakan peletakan dasar atas relasi pada keyakinan akan Hyang Widi/Tuhan Yang Maha Esa, relasi pada sesama melalui penanaman etika-moral, dan menanamkan kemampuan dalam melakukan kegiatan ritualisasi. Kegiatan ritualisasinya yang membudaya dalam upaya individualisasi orang Bali berproses sejak dari perkawinan (*pewiwahan*) terjadinya benih dalam kandungan, kelahiran, kehidupan, kematian merupakan pembenihan *ajaran-ajaran tri kona* (*utpeti*, *stiti*, *pralina*), *ajaran pancadatu*, *ajaran tri kaya parisudha* untuk terjadi pencerahan yang dilatarbelakangi oleh spirit keagamaan. Hal tersebut memberikan arah bahwa manusia (mikrokosmos) dengan alam jagat raya (makrokosmos) menyatakan *Atman* adalah *Brahman* dan *Brahman* adalah *Atman* berarti manusia sama dihadapan Tuhan; (5) timbulnya kebebasan atau paling tidak hanya ada diskriminasi yang ringan setelah tekanan dan tindasan yang tulus, merupakan insentif dan tantangan terhadap pertumbuhan kreativitas. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, bahwa anak-anak yang tumbuh di Bali dibina melalui pendidikan keluarga,

banjar/desa adat, dan sekolah formal yang memiliki tantangan untuk masa depannya baik putra dan putri tidak ada perbedaan yang bersangkutan maju bersama dalam kreativitas untuk meraih harapan bagi masa depannya; (6) faktor *balifogenic* yang juga penting ialah keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan yang berbeda, bahkan kontras. Faktor keenam yang berkaitan dengan keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan yang berbeda yaitu budaya India yang berkaitan dengan Ramayana dan Mahabarata, serta ornamen dari Belanda disebut *patra olanda*, Mesir disebut *patra mesir*, China berupa *pis bolong* berupa media artefak atau media tradisional dan global yang mewarnai kreativitasnya; (7) toleransi dan minat terhadap pandangan divergen yang menyebar untuk memperoleh ide-ide terbaru melalui *ajaran pancadatu* yang dikonstelasi dengan *ajaran dewata nawa sanga* akan memunculkan konsep kreativitas sakral dan propan; (8) adanya interaksi antara pribadi-pribadi yang berarti, yaitu orang berarti diantaranya penggiat/seniman, tokoh masyarakat Bali saling mempengaruhi melalui produk yang mereka hasilkan maupun dengan kontak pribadi langsung; (9) adanya insentif, penghargaan atau hadiah. Kegiatan adat, budaya yang divibarsi Agama Hindu memberikan insentif bagi pengembangan kehidupan untuk melaksanakan *panca yadnya* yang meretas pula pada industri pariwisata/industri kreatif. Oleh karena itu, insentif bukan melihat hadiahnya tetapi yang lebih penting adalah dampak memperkuat (*reinforcing*) sebagai lambang penghargaan terhadap si pencipta.

Ekonomi pada era globalisasi adalah ekonomi berkelanjutan/ekonomi kreatif yang berbasis pada pengetahuan. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan, paling tidak paradigmanya ada pada paradigma fungsional, yaitu berpengetahuan, berkemampuan, dan bersikap masa depan. Kemudian, Piirto (2011, p 1) menyatakan bahwa abad ke 21 merupakan abad kreativitas yang dapat dinyatakan dalam kutipan berikut ini:

Think Creativity: (1) use a wide range of idea creation techniques (such as brainstorming); create new and worthwhile ideas (both incremental and radical concepts); (3) elaborate, refine, analyze and evaluate their

own ideas in order to improve and maximize creative efforts.

Works Creatively with Others: (4) *develop, implement, and communicate new ideas to others effectively;* (5) *be open and responsive to new and diverse perspectives; incorporate group input and feedback into the work;* (6) *demonstrate originality and inventiveness in work and understand the real world limits to adopting news ideas;* (7) *view failure as an opportunity to learn; understand that creativity and innovation is long-term, cyclical process of small successes and frequent mistakes*

Implement innovations: (8) *act on creative ideas to make a tangible and useful contribution to the field in which the innovation will occur.*

Hal tersebut di atas, menggambarkan bahwa poin 1 dan 3 terfokus pada berpikir divergen dan poin 2, 4, 5, 6, 7, 8 terfokus pada membuat sesuatu yang baru (*to make something new*). Kemudian, sistem kreativitas dalam Piirto (2011:3) yang berkaitan dengan *skill-skill* abad ke 21 mengenai *think creatively* pada *skill* kreativitas poin 1 menggunakan berbagai teknik penciptaan ide seperti *brainstorming* yaitu membutuhkan sistem kreativitas berupa sikap inti yang meliputi: keterbukaan terhadap pengalaman, berani mengambil risiko, toleransi untuk ambiguitas, yang dibangun melalui inspirasi, intuisi, wawasan, imajinasi, citra, inkubasi beserta aspek umum berupa latihan. Poin 2 *skill* yang dibutuhkan terciptanya ide-ide baru dan berharga (kedua konsep tambahan dan radikal) melalui sistem kreativitasnya dalam sikap inti yang terdiri dari: keterbukaan terhadap pengalaman, berani mengambil risiko, toleransi untuk ambiguitas, disiplin diri, kelompok sebagai kepercayaan yang dibangun melalui konsep inspirasi, intuisi, wawasan, imajinasi, citra, inkubasi, improvisasi beserta aspek-aspek umum lainnya. Poin 3 *skill* kreativitas yang dibutuhkan adalah elaborasi, memperbaiki, menganalisis dan mengevaluasi ide-idenya sendiri dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan upaya-upaya kreatif dengan sistem kreativitasnya yang dibangun melalui sikap inti berupa keterbukaan terhadap pengalaman, berani mengambil risiko, toleransi untuk ambiguitas dengan menerapkan

intuisi, inkubasi beserta aspek-aspek umum lainnya.

Bekerja kreatif dengan orang lain (*work creatively with others*) pada poin 4 membutuhkan *skill* yaitu mengembangkan, melaksanakan, dan mengkomunikasikan ide-ide baru kepada orang lain secara efektif dengan sistem kreativitas melalui sikap inti berupa keterbukaan terhadap pengalaman, berani mengambil risiko, toleransi untuk ambiguitas, kelompok kepercayaan yang dibangun dengan menerapkan imajinasi, citra, improvisasi beserta aspek-aspek umum lainnya. Sedangkan poin 5 membutuhkan *skill* kreativitas yaitu keterbukaan dan responsif terhadap perspektif baru dan beragam yang menggabungkan masukan kelompok dan umpan balik ke dalam pekerjaan dengan sistem kreativitas dalam sikap inti pada kelompok kepercayaan. Poin 6 membutuhkan *skill* kreativitas yaitu menunjukkan orisinalitas dan cipta dalam pekerjaan dan memahami batas-batas dunia nyata untuk mengadopsi ide-ide berita dengan sistem kreativitas dalam sikap inti berupa toleransi untuk ambiguitas, disiplin diri, kelompok kepercayaan dengan menerapkan inspirasi, intuisi, wawasan, inkubasi serta aspek-aspek umum berupa kreativitas sebagai proses kehidupan. Poin 7 membutuhkan *skill* kreativitas yaitu melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar yaitu memahami bahwa kreativitas dan inovasi adalah jangka panjang, proses siklus keberhasilan kecil dan sering kesalahan dengan sistem kreativitas dalam sikap inti yang terdiri dari keterbukaan terhadap pengalaman, berani mengambil risiko, toleransi untuk ambiguitas, disiplin diri, kelompok kepercayaan serta aspek-aspek umum berupa kreativitas sebagai proses kehidupan.

Berikutnya, (*implement innovations*) atau melaksanakan inovasi pada poin 8 bahwa *skill* kreativitas yang dibutuhkan pada abad ke 21 adalah tindakan pada ide-ide kreatif untuk memberikan kontribusi yang nyata dan berguna dalam bidang tertentu dimana inovasi akan terjadi dengan sistem kreativitasnya berupa sikap inti terdiri dari toleransi untuk ambiguitas, disiplin diri, kelompok kepercayaan dengan menerapkan inspirasi, intuisi, inkubasi yang memberikan petunjuk umum berupa kreativitas sebagai proses kehidupan.

Hal tersebut di atas dapat dicapai melalui kecerdasan. Kecerdasan merupakan sehimpunan kemampuan dan keterampilan dari individu yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui belajar. Oleh karena itu, berbagai kecerdasan yang dimiliki oleh individu dapat diungkapkan bahwa “ada banyak jendela menuju satu ruangan yang sama” di mana subjek-subjek yang belajar dapat didekati melalui berbagai perspektif. Dan ketika orang mampu menggunakan bentuk-bentuk kecerdasannya yang paling kuat, individu tersebut akan menemukan bahwa belajar itu mudah dan menyenangkan. Individu yang menemukan paradigma belajarnya, akan dipastikan menjadi cerdas. Sahib (2010) menguraikan pembelajaran dengan memadukan fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan. Gardner (1993) melalui multi kecerdasan dalam perspektif biologis dan Sudira (2011) melalui kecerdasan wiwekasanga dalam perspektif kontekstual akan dimungkinkan mewujudkan pengembangan kreativitas dengan memperhatikan berbagai potensi belajarnya. Berkaitan dengan kecerdasan dalam pengembangan kreativitas, Piirto (2011) mengungkapkan yaitu mengedepankan *skill-skill* kreativitas pada abad ke 21 dalam ranah berpikir divergen dan membuat sesuatu yang baru. Oleh karena itu, akan memungkinkan terjadinya pengembangan kreativitas dengan adanya keseimbangan cara berpikir konvergen (datang dari segala arah) dan berpikir divergen (menyebar ke segala arah).

Ekonomi kreatif dikembangkan dengan model layaknya sebuah bangunan, yang terdiri dari elemen-elemen berupa pondasi (landasan), bangunan (pilar) dan atap (aktor utama). Pondasi pengembangan ekonomi kreatif yaitu sumber daya manusia (insan kreatif). Insan kreatif memiliki peran sentral dalam pengembangan berbagai aktivitas ekonomi kreatif sebagai faktor produksi utama di dalam ekonomi kreatif. Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif perlu dilakukan pembangunan sumber daya manusia yang terampil untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas.

Lebih lanjut, Simatupang (2007) menjelaskan bahwa ekonomi kreatif diartikan sebagai sistem kegiatan lembaga dan manusia yang terlibat dalam produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang

bernilai kultural, artistik, dan hiburan. Dalam ekonomi kreatif itu sendiri terdapat bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif, yaitu: industri kreatif.

Produk industri kreatif menekankan pada aspek kreativitas, inovasi, dan invensi dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah budaya, sebagai sarana peningkatan ekonomi dan transformasi yang berjiwa diri dan berkarakter. Lingkup industri kreatif meliputi:

periklanan, (2) arsitektur, (3) pasar barang seni, (4) kerajinan, (5) disain, (6) fesyen (*fashion*), (7) video, film, fotografi, (8) permainan interaktif, (9) musik, (10) Seni pertunjukan, (12) penerbitan dan percetakan, (12) layanan komputer dan piranti lunak (13) televisi dan radio, (14) riset dan pengembangan (Saputra, 2010 : 44-46).

Uraian tersebut di atas, yaitu budaya lokal dalam modal ekonomi untuk pengembangan kreativitas dalam industri kreatif (kerajinan) akan dibedah melalui teori generatif Bourdieu, yaitu Praktik sosial = (*habitus* x modal) + *field* (Takwin, 2009 :114).

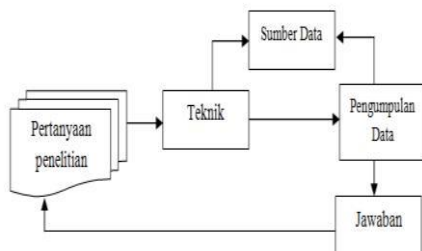
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah studi etnografi tentang konsepsi masyarakat Bali terhadap SMK sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia termasuk jenis kualitatif etnografi (Spradley, 2007). Studi ini secara kualitatif memotret dan mendiskripsikan cara-cara masyarakat Bali berdasarkan budaya lokal sebagai pengembangan kreativitas dalam industri kreatif.

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Sukawati, dan di lingkungan tempat tumbuhnya SMK Negeri 2 Sukawati pada *banjar*, dan *desa adat/desa pekramanya*, serta sentra berbagai bentuk kerajinan, Pasar Seni Sukawati, Pasar Seni Guwang, lingkungan keluarga seniman, dan Pemkab Gianyar juga mengusung kota budaya. Pra survei dilaksanakan November 2011 dan dilanjutkan penelitian sampai dengan juni 2014. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan kreativitas siswa SMK dan budaya lokal masyarakat Bali, serta bidang-bidang industri kreatif.

Sebagai subjek dalam penelitian ini dipilih secara purposif adalah orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai informan diantaranya: Kadisdikpora pemkab Gianyar, Disnaker pemkab Gianyar, kepala sekolah SMK Negeri 2 Sukawati dan wakil kepala SMK Negeri 2 Sukawati, guru SMK Negeri 2 Sukawati, Siswa SMK Negeri 2 Sukawati, Budayawan Bali, dan tokoh adat, tokoh Agama Hindu, Seniman, tokoh pendidikan. Sebagai objek penelitian antara lain program kerja SMK Negeri 2 Sukawati, peristiwa kegiatan belajar mengajar tentang pengembangan kreativitas siswa, peristiwa upacara adat dan budaya, organisasi Banjar dan *desa adat/pekraman*, artefak dalam sekolah, keluarga, masyarakat adat, dan teks berupa dokumen atau tulisan yang terpublikasikan di media Bali Post dan situs budaya Bali di internet terkait dengan permasalahan dan atau pertanyaan dalam penelitian.

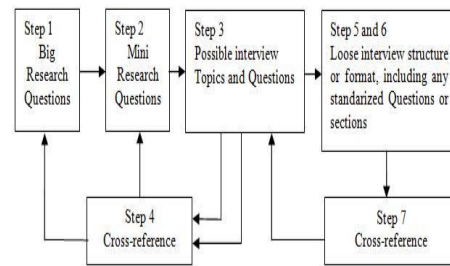
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: (1) interviu kualitatif, (2) observasi partisipatif, (3) analisis dokumen, (4) analisis situs dan pelacakan melalui internet dari sumber-sumber data yang sangat terkait dengan pertanyaan penelitian (Mason, 2006; Spradley, 2007). Menurut Mason (2006) secara strategis pemilihan teknik pengumpulan data terkait dengan upaya menjawab pertanyaan penelitian. Gambar 1 berikut ini, menunjukkan skema pemilihan teknik pengumpulan data.



Gambar 1. Skema metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan pendekatan induksi analitik yakni bertolak dari permasalahan atau pertanyaan penelitian. Mason menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dikembangkan melalui analisis sumber-sumber data dari masing-masing pertanyaan penelitian, kemudian teknik pengumpulan data yaitu; (1) interviu kualitatif, observasi partisipatif, (3) analisis dokumen, dan (4) analisis situs dengan prosedur

persiapan dan perencanaan interviu (Sudira, 2011:136) seperti Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Prosedur persiapan dan perencanaan interviu

Topik penelitian ini adalah pengembangan kreativitas siswa SMK berdasarkan modal ekonomi pada budaya lokal dalam industri kreatif. Oleh karena itu yang dijadikan pertanyaan pokok dari penelitian ini (*big research questions*) adalah *step 1* adalah bagaimanakah peran modal ekonomi pada budaya sebagai pengembangan kreativitas siswa SMK dalam industri kreatif? Kemudian *step 2* yaitu *mini research question* penelitian ini adalah bagaimanakah peran modal ekonomi pada budaya sebagai pengembangan kreativitas siswa SMK dalam industri kreatif? Selanjutnya, pada *step 3* dilakukan pengembangan kemungkinan-kemungkinan isu yang relevan dengan situasi interviu untuk permasalahan penelitian tersebut. Kemudian, apa sesungguhnya yang diketahui dari masing-masing permasalahan penelitian lalu dikembangkan menjadi topik-topik interviu dan beberapa kemungkinan pertanyaan. Untuk mengetahui keselarasan topik-topik interviu dan pertanyaan-pertanyaan interviu terhadap keseluruhan permasalahan penelitian dengan pertanyaan penelitian dilakukan pengecekan silang pada *step 4*. Hal ini dimaksudkan agar topik-topik interviu dan pertanyaan-pertanyaan interviu betul-betul dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian. Langkah selanjutnya pada *step 5/6* lepas dari pengembangan struktur atau format interviu termasuk standarisasi pertanyaan atau bagian-bagian interviu dengan observasi. Langkah terakhir pada *step 7* melakukan pengecekan silang antara struktur atau format, pertanyaan-pertanyaan standar dengan topik-topik interviu.

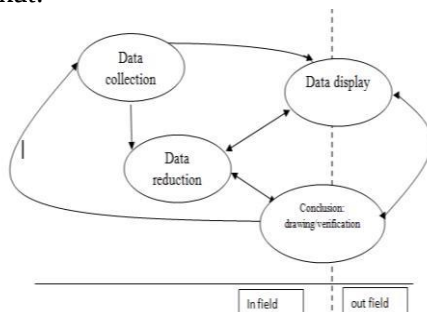
Dalam penelitian etnografi yang berbasis lapangan mengacu pada pendapat Mason (2006) bahwa keabsahan data dalam penelitian ini dinyatakan dengan penjelasan tahapan-

tahapan situasi kerja pada saat pengambilan data di lapangan dengan berbagai bukti-bukti temuan berupa rekaman suara, gambar dan suara, foto, kondisi nyata lapangan sebagai fenomena atau realita sosial yang alami. Kondisi peneliti juga harus direkam atau tergambarkan dalam catatan-catatan penelitian pada setiap interaksi atau interviu. Peneliti memotret apa yang hendak dikaji, juga menggambarkan kedudukan sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, keabsahan data dalam penelitian ini benar-benar efektif dan nantinya dapat menghasilkan suatu hasil kajian yang valid dan akurat.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif. Miles dan Huberman ((2007) menyatakan bahwa data dari empiri kemudian mencari abstraksinya dapat dianalisis dengan analisis model interaktif. Model analisis data ini dikenal dengan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Kemudian, Agus Salim (2006) dan Sugiyono (2010) menyatakan sebagai model alir (*flow model*), serta Sudira (2011) menyatakan bahwa ada data yang bersifat *in field* dan *out of field*. Oleh karena itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model interaktif (*interactive model analysis*) yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data display* (penyajian data), *data reduction* (reduksi data) dan *conclusion: drawing atau verification*; serta data dalam ranah (*in field*) dan di luar ranah (*out of field*).

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan analisis model interaktif seperti gambar 3 berikut:



Gambar 3. Analisis Data dengan Analisis Model Interaktif.

Data-data yang diperoleh baik melalui interviu, observasi partisipatif, analisis dokumen, simbol-simbol, arca/pretime, lukisan disajikan

dalam bentuk *fieldnotes* kemudian masing-masing diberikan kode dan catatan-catatan keterkaitannya dengan masing-masing pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah melalui reduksi atau langsung diverifikasi data-data dari masing-masing pertanyaan penelitian dimaknai sesuai dengan pertanyaan pokok penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Modal Sosial dalam Budaya Lokal sebagai Pengembangan Kreativitas Siswa SMK dalam Konteks Industri Kreatif.

Kelahiran manusia ke dunia sekarang ini akan selalu ada dalam rimbanya kehidupan masyarakat. Dewantara (1994) menyatakan bahwa masyarakat akan dapat menentukan terjadinya perubahan jaman, dengan kata lain masyarakatlah yang menentukan jamannya. Masyarakat Bali sebagai pewaris tradisi dan yang ada dalam ideologi Tri Hita Karana (THK), yaitu; pertama, keterkaitan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai *theocentrum* kehidupan; kedua, keterkaitan manusia dengan sesamanya yang akan menentukan jaman peradaban; ketiga, keterkaitan manusia dengan alam makrokosmos dan alam mikrokosmos (alam jagat raya dan alam dirinya). Di sisi lain, jagat raya dalam lingkungan masyarakat dunia yang dipandu oleh teknologi informasi komunikasi seperti internet, email, *tweeter*, sms, telpon seluler yang dapat menciptakan interkoneksi antar manusia yang membuat manusia menjadi semakin produktif.

Produktivitas manusia sebagai individu dalam bermasyarakat mutlak diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, tetapi manusia tetap memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Secara pribadi, individu sebagai manusia harus memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya diberbagai bidang utamanya Bali dikenal dengan pulau dewatanya, pariwisata budayanya, tradisi kerajinan logam (*pande wesi* dan *pande galuh*). Oleh karena itu, individu sebagai manusia harus selalu berproses untuk memperoleh berbagai pengalaman berupa kemampuan/kreativitas. Hal tersebut, seperti

yang dipaparkan oleh guru ilmu pengetahuan

sosial (IKS. L.10 B 28-38) berikut ini:

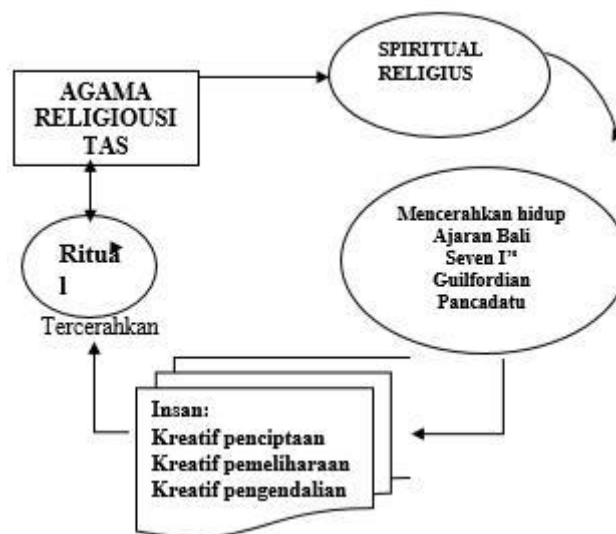
MD. Bagaimana interaksi sebagai proses sosial yang seharusnya ada pada siswa, agar terjadi kreativitas?
IKS. Tiga pilar Pendidikan, yaitu: Pendidikan di keluarga, Pendidikan di masyarakat, dan Pendidikan Sekolah merupakan tiga pilar yang dapat menumbuhkan dalam pengembangan kreativitas siswa. Secara hakikat bahwa siswa sebagai manusia makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk Tuhan. Dan kehidupan ini selalu harus belajar sepanjang hayat. Belajar tiada lain adalah untuk dapat hidup sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya. Sejahtera terjadi bila kebutuhannya terpenuhi secara sosial, spiritual, dan ekonomi.

Ungkapan di atas menyatakan bahwa hakikat manusia meliputi makhluk individu, sosial, dan religius pada dasarnya memiliki kewajiban hidup yang berlandaskan pada *ajaran tri kaya parisudha*. *Ajaran tri kaya parisudha*, yaitu *manacika* (berpikir yang baik dan benar), *wacika* (bersikap yang baik dan benar), *kayika* (bertindak/berbuat yang baik dan benar). Kewajiban hidup yang layak, akan diraih melalui belajar sepanjang hayat. Pendidikan dapat dilakukan melalui tiga pilar pendidikan (keluarga, *banjar/desa adat/pekraman*/masyarakat, dan sekolah) untuk dapat menjadi sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya.

Pendidikan keluarga di Bali merupakan peletakan dasar atas relasi pada keyakinan akan Hyang Widi/Tuhan Yang Maha Esa, relasi pada sesama melalui penanaman etika-moral, dan menanamkan kemampuan dalam melakukan kegiatan ritualisasi. Kegiatan ritualisasinya yang membudaya dalam upaya individualisasi orang Bali berproses sejak dari perkawinan (*pewiwahan*) terjadinya benih dalam kandungan, kelahiran, kehidupan, kematian merupakan pembenihan *ajaran-ajaran tri kona* (*utpeti, stiti, pralina*), *ajaran pancadatu*, *ajaran tri kaya parisudha* untuk terjadi pencerahan yang dilatarbelakangi oleh spirit

keagamaan. JMRNSA (L.12. B. 221-234) mengatakan bahwa ajaran Bali yang menempatkan apa yang ada pada alam makrokosmos demikian pula adanya pada alam mikrokosmos, kemudian alam mikrokosmos dalam *pancadatu* terdiri dari lima elemen yaitu: (1) timur simbol Iswara elemen kerelaan, (2) selatan simbol Brahma elemen dari kesadaran, (3) barat simbol Mahadewa elemen kasih sayang, (4) utara simbol Wisnu elemen kejujuran, dan di tengah simbol Siwa elemennya *Bhakti*. Kemudian, Donder (2013:101) menyatakan bahwa sifat-sifat ilahi dalam spiritualisasi religius yaitu *Satyam* (kebenaran), *Dharma* (kebajikan), *Prema* (kasih sayang), *Shanti* (kedamaian), dan *Ahimsa* (tanpa kekerasan).

Berikutnya, Piirto (2005:3) menyatakan bahwa kreativitas untuk keterampilan abad ke 21 (*creativity for 21st century skills*) merupakan upaya untuk mencerahkan hidup di abad ke 21 melalui sikap-sikap kunci yang dapat dilakukan melalui “*sevent I^s*” yaitu *inspiration, intuition, insight, imagination, imagery, incubation, and improvisation*. Berkaitan pula dengan konsep *Guilfordian operation* berupa “4 P’s” yaitu *process, product, person, and press*. Serangkaian dari penuangan konsep tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 4. Skema ritualisasi sebagai sumber kreativitas penciptaan, pemeliharaan, dan pengendalian

Gambar 4 tersebut memberikan gambaran bahwa agama sebagai pusat relegi merupakan sumber spirit religius untuk mencerahkan hidup sehingga tercerahkan dalam totalitasnya akan melahirkan insan kreatif dalam penciptaan, pemeliharaan, pengendalian. Interkorelasi antara ritual dan agama akan terus terbangun & tertatanya konsep-konsep kreativitas terbaru yang berkelanjutan. Hal ini di tunjang oleh lembaga sosial berupa *banjar/desa adat/desa pekraman* yang mewadahi pembelajaran keluarga dan masyarakat.

Di samping itu, *ajaran tri kaya parisudha* yaitu perpaduan secara proporsional antara *manacika* (pikiran-rasa/pengetahuan) dan *kayika* (tindakan) yang digerakan oleh rasa

bhakti akan melahirkan kemampuan/kreativitas. Selanjutnya, kreativitas diselaraskan dengan *wacika* (sikap/integritas) untuk dapat melaksanakan *panca yadnya* (lima cara melaksanakan kewajiban hidup untuk dapat melaksanakan *bhakti*) yang disebut sebagai modal/kompetensi. SMK Negeri 2 Sukawati dalam pengembangan kreativitasnya, juga terjadi relasi bahwa meyakini Hyang Widi/Tuhan Yang Maha Esa, relasi sesama manusia yaitu memiliki pribadi yang unik dalam kehidupan sosial, dan relasi pada alam makrokosmos/mikrokosmos. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh guru seni budaya (IPW. L.08 B 35-52) berikut ini:

IPW: Pengembangan kreativitas siswa, dibangun melalui mengapresiasi karya seni (keunikan, pesan moral dan atau, kearifan lokal, estetika, logika, dan etika). Di samping itu, siswa mampu berinteraksi dalam *desa kala patra*, misalnya *desa* (tempat) yaitu lingkungan keluarga, banjar, desa adat, sekolah serta alam lingkungan lainnya, *kala* (waktu) akan memberikan nuansa tersendiri masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, *patra* (kondisi) yaitu media bersifat elektronik, maupun koran dan seterusnya semuanya ini akan memberikan apresiasi sebagai pengetahuan untuk menjadi kreatif. Dan tak kalah pentingnya siswa harus diciptakan/penegasan agar mau memperhatikan penjelasan guru, berbaur dengan teman, bertatap muka/berkomunikasi dengan teman, dan terjadi respon/tanggap terhadap pelajaran. Kehidupan di Bali didominasi oleh kehidupan sosial (kolektivitas), orang Bali

meyakini diri sebagai makhluk Tuhan, dan sebagai yang berkepribadian (keunikan pada setiap manusia berbeda)

Ungkapan di atas dengan merujuk teori generatif dari Bourdieu bahwa tempat terjadinya relasi berdasarkan konsep THK yang melembaga di lingkungan keluarga, *banjar/desa adat*, sekolah merupakan ranah/*field*. Sedangkan pewarisan yang diterima begitu saja berupa lembaga sosial/organisasi sosial/organisasi formal yang terwariskan sebagai *habitus*. SMK Negeri 2 Sukawati yang teruntai dalam relativitas *desa, kala*, dan *patra*. Tempat (*desa*) yaitu lingkungan keluarga, *banjar, desa adat/pekraman*, sekolah serta alam lingkungan lainnya. Waktu (*kala*) yaitu akan memberikan nuansa tersendiri pada masa lampau, kini, dan mendatang. Kondisi (*patra*) yaitu relasi antara pewarisan tradisi, dan media sosial, elektronik, cetak dan seterusnya. Oleh karena itu, produk dari kalangan siswa yang diperoleh dari pengetahuan yang tercipta dari hidup bersama dalam keluarga, *banjar*, masyarakat *desa adat*, dan sekolah disebut modal sosial. Teori generatif dapat membedah bahwa tempat terjadinya relasi di tempat tumbuhnya SMK sebagai ranah/*field*, terwarisi adanya organisasi sosial yang diterima secara terbuka disebut *habitus*, sehingga terbentuklah praktik sosial. Pengembangan kreativitas siswa SMK Negeri 2 Sukawati yang ditunjang dan dipupuk oleh pengetahuan sosial/lembaga sosial yang membudaya pada lingkungan keluarga, masyarakat *banjar/desa adat*, masyarakat sekolah, dalam relativitas *desa kala patra* akan terbentuk *social balivogenic*. *Social balivogenic* adalah lembaga/pengetahuan sosial yang membudaya dalam relativitas *desa, kala, patra* akan dapat menunjang, dan memupuk serta memungkinkan terbentuknya konsep kreativitas sosial. Konsep kreativitas Sosial merupakan peran modal sosial yang membudaya pada relativitas tempat, ruang dan waktu sebagai pengembangan kreativitas sosial dalam industri kreatif.

Mencermati pada kajian teori, bahwa SMK mengakar pada kearifan lokal yang

mendorong sebagai modal pelaksanaan proses akulturasi/penyesuaian diri, enkulturasi/pembawa perubahan, dan inkulturasi sebagai pewarisan untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan siswa, kebutuhan penyelenggara pendidikan, program pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satu program Pemerintah Daerah Bali yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Bali No: 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kemudian, Kadisdikpora Pemkab Gianyar (DW. L 03 B 20-27) memaparkan Pemkab Gianyar telah bekerjasama dengan Politeknik Negeri UNUD membuka kualifikasi D1 Pariwisata yang mengambil tempat di kampus Batubulan untuk meningkatkan SDM Gianyar. Berkaitan dengan pengembangan kreativitas siswa Kaprodi disain dan produksi kria logam (NGK. L 06 B 90-98) mengatakan bahwa lemari pajang sebagai etelase yang merupakan tempat memajang hasil produksi dari kreasi kreatif siswa. Adapun bahan pajangan produksinya ada yang dari perak, tembaga, emas, besi, dan *pis bolong*. Hasil karya itu digunakan untuk memotivasi siswa dalam belajar, lomba, pameran, dan kepentingan cinderamata. Bahkan orang Jepang paling sering melakukan kunjungan ke SMK Negeri 2 Sukawati dan sekaligus membuat cinderamata sebagai tanda kenangan saat berkunjung ke Bali.

Kemudian, siswa SMK Negeri 2 Sukawati (NIWY. L 15 B 31-38) menuturkan bahwa Kampus Batubulan yang ditempati oleh SMK berbasis Seni dan Pariwisata, Informatika telah dilengkapi dengan hadirnya LPK kerjasama dengan *stakeholder*, dan D1 Pariwisata bekerjasama dengan politeknik UNUD, serta berbagi ilmu dengan wisatawan, adapun penyampaianya seperti berikut ini:

NIWY. Bapak rata-rata orang Bali sekolah di program studi apapun di Bali dimungkinkan untuk bekerja ke luar negeri, di SMK kita di kampus Batubulan, ada LPK dan Diploma 1

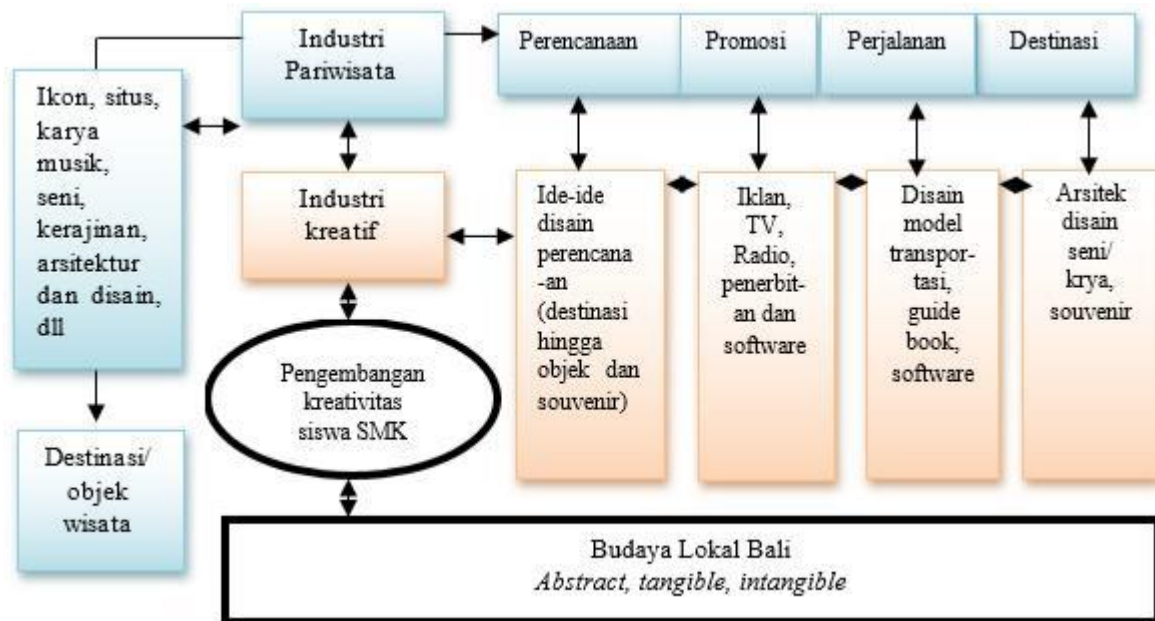
Pariwisata program Pemkab Gianyar dengan Politeknik UNUD
Misalnya pak, kita sering kedatangan siswa Jepang, dan mereka
buat cindramata sendiri di sini. Orang Jepang tersebut dalam
belajar bersama sering juga memberikan wawasan di negerinya
khayaknya sih menjanjikan.

Senada dengan itu, Disperindag
Pemkab Gianyar (WL. L 14 B 50-59)
mengatakan bahwa setiap perelatan pertemuan-
pertemuan mendunia di Nusa Dua merupakan
momen penting bagi pengerajin/pengusaha kria
logam untuk memenuhi kebutuhan industri
pariwisata tersebut.

Hal tersebut di atas, menandakan
bahwa konteks industri kreatif memandang
bahwa industri pariwisata terdapat keterjalinan
antara industri kreatif dan industri pariwisata
budaya Bali. Bali yang identik dengan industri

pariwisata budaya dan budaya lokal dalam
social balivogenic akan terbangun jejaring
yang dapat mensinergikan dan saling
menumbuhsuburkan antara sektor industri
pariwisata budaya dan sektor industri kreatif.

Hubungan timbal balik (interkorelasi)
antara industri pariwisata budaya, dan
berkembangnya kreativitas yang berdasarkan
budaya lokal Bali dalam konteks industri
kreatif yang dapat digambarkan/dipandang
sebagai berikut:



Gambar 5 Diadopsi dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata ITB serta diadaptasi untuk skema pengembangan kreativitas berdasarkan budaya lokal Bali dalam konteks industri kreatif dan industri pariwisata budaya di Bali.

Keterangan: Panah ke arah kiri bagaimana produk industri kreatif yang telah menjadi ikon, situs atau *landmark* bagi destinasi pariwisata budaya, dan panah ke arah kanan bagaimana industri pariwisata budaya tidak lepas dari kontribusi ide industri kreatif. Selanjutnya, panah dua arah naik turun

bagaimana budaya lokal memberikan interkorelasi pada pengembangan kreativitas dan berdampak pada industri kreatif dan industri pariwisata budaya.

Konsep interkorelasi antara industri kreatif dan industri pariwisata budaya dapat diaktualisasikan dari konsep kreativitas

sosial melalui praktik sosialnya. Konsep interkorelasi ini, akan mampu saling melengkapi untuk menguatkan di masing-masing bidang, antara industri kreatif dan pariwisata budaya Bali. Oleh karena itu, konteks tersebut di atas dapat dijadikan konsep interkorelasi industri kreatif dengan pariwisata budaya baik lokal maupun global dalam perencanaan, promosi, perjalanan, dan distensi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Studi etnografi tentang pengembangan kreativitas berdasarkan modal sosial pada budaya lokal dalam industri kreatif dapat disimpulkan, bahwa **social balivogenic** yaitu terjadinya sosial yang membudaya dalam relativitas tempat, waktu, dan ruang yang dapat menunjang, memupuk terbentuknya konsep kreativitas sosial. Konsep kreativitas sosial merupakan relasi modal sosial yang membudaya pada relativitas ruang, tempat, waktu sebagai pengembangan kreativitas sosial dalam industri kreatif.

Saran

Hasil penelitian ini menemukan konsep kreativitas sosial dalam pengembangan kreativitas sosial dalam industri kreatif yang akan berimplikasi pada pelestarian kesejahteraan rohani dan kesejahteraan jasmani. Oleh karena itu, disarankan untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki hak hidup terutamanya kepada pendidikan kejuruan Indonesia khususnya, dan masyarakat internasional pada umumnya melalui forum-forum ilmiah.

Hasil penelitian ini perlu dicarikan wadah publikasi melalui jurnal nasional dan internasional. Penelitian lebih lanjut, dalam pengembangan kreativitas di keluarga, di lingkungan tumbuhnya dan lingkungan sekolah disarankan untuk dapat dicarikan proporsi pembobotannya, baik untuk program studi kria logam sendiri atau pada program keahlian lainnya sehingga menjadi terarah dan tepat serta untuk 13 subsektor industri kreatif lainnya dalam pengembangan kreativitas dalam konteks industri kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2010). *Konstruksi dan reproduksi kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset.
- Atmaja. (1999). Era Multibudaya: Peluang dan Ancaman bagi eksistensi desa adat di Bali. Edisi Puputan. Widya Satya Dharma. Denpasar: Offset Bali Post. Jurnal Vol 6 No.2. 17-34.
- Donder, I Ketut. (2004). *Panca dhatu atom, atma, dan animisme*, Surabaya : Paramita
- Mason, J. (2006). *Qualitative researching*. London: SAGE Publication Ltd.
- Miles, M. B., & Huberman, A.M. (2007). *Analisis data kualitatif*. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pangestu, Mari Eka. (4-8 Juni 2008). *Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2025*, Hasil konvensi pengembangan ekonomi kreatif 2009-2015 yang diselenggarakan pada Pekan Produk Budaya Indonesia 2008 JCC: Jakarta.
- Piirto, J. (2011). *Creativity for 21st century skills: how to embed creativity into the curriculum*. Ohio: Sense Publishers.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma: penelitian sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Santoso, S. (2004). *Pendidikan Indonesia masa depan*. Proseding dari Lustrum Universitas Negeri Jakarta. Jakarta: UNJ Press.
- Saputra, W. (2010). *Industri kreatif*. Baduose: Praninta Offset.
- Shahib, N. (2010). *Pembinaan kreativitas anak guna membangun kompetensi*. Bandung: PT.Alumni.
- Slamet PH. (2008). *Desentralisasi pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Spradley, James P. (2007). *Metode etnografi*. (Terjemahan Misbah Zulfa Elizabeth). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sudira, Putu. (2011). *Praxis pembudayaan kompetensi berbasis ideologi tri hita karana*. Disertasi doktor tidak

- diterbitkan, Universitas Negeri
Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R.&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suryadarma, IGP. (2011). *Busana alam dan busana kehidupan: Dialog sains secara sambung budaya.* Denpasar: PT. Mabhakti.
- Susatya, Edhy. (2010). *Pengembangan model pelatihan guru produktif SMK kelompok seni dan budaya.* Disertasi doktor tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Takwin, Bagus. (2009). *Akar-akar ideologi.* Yogyakarta: Jalasutra.
- Zubaidi. (2012). *Filsafat pendidikan Islam: Isu-isu baru dalam diskursus.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PENGEMBANGAN MODEL PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH IRIGASI BERBASIS PENGELOLAAN SUBAK DI KABUPATEN BADUNG BALI

Putu Sriartha¹, I Putu Ananda Citra²
Jurusan Pendidikan Geografi, FHIS, UNDIKSHA
E-mail: psriartha@yahoo.com

ABSTRACT

This research was conducted in Badung District with a background of problems is land conversion of irrigated ricefield that rates are not controlled as a result of economic development and tourism development. Referring of the problem, so the purpose of the study include: (1) study the response / feedback of stakeholders on the model of control land conversion based of subak management; (2) produce models and operational guidelines for the implementation of the control land conversion based of subak management. The design study is a collaborative participatory action research involving staff and members (krama) subak and local government. The survey activities is done by interview the stakeholders to evaluate the response about the model of control land conversion based of subak management. Data analysis about response was conducted descriptive quantitative by scoring, tabulations and percentages and graphs. While the development of the model is done at 3 subak samples located in the upstream, midstream and downstream. The results showed that the stakeholders subak, the highest level of response was very positive, which is 69.56%, followed by 50.0% stakeholders of desa pakraman, and government stakeholders smallest is 37.14%. From the average score, two stakeholders show very positive responses namely from the subak with scores of 3.58 and 3.30 for desa pekruman. While the average score of the response from the government, show the smallest with score 2.89 but still quite at a positive level. Overall the average score responses of stakeholders reached 3.33, which means as very positive. It can be concluded that all stakeholders have a response and very positive support to the idea of developing a model of control land conversion based of subak management.
Key words: models of control irrigated ricefield land conversion, subak

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung dengan latar belakang permasalahan yang serius berupa alih fungsi lahan sawah irigasi yang lajunya tidak terkendali akibat dari pembangunan ekonomi dan perkembangan pariwisata. Mengacu pada permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian meliputi: (1) mengetahui respon/tanggapan *stakeholders* tentang model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak; (2) menghasilkan model dan pedoman operasional pelaksanaan (POP) pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kaji tindak partisipatif kolaboratif melibatkan pengurus dan anggota (*krama*) subak serta sasaran yang lain adalah pemerintah daerah, desa adat, dan desa dinas. Kegiatan survei dilakukan dengan teknik wawancara kepada *stakeholder* untuk mengetahui respon/tanggapannya tentang pengembangan model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak. Analisis data respon dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan cara skoring, tabulasi, persentase, dan grafik. Sedangkan pengembangan model dilakukan pada 3 subak sampel yang berlokasi di bagian hulu, tengah dan hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada *stakeholders* subak, tingkatan respon sangat positif terbanyak, yaitu 69,56%, disusul kemudian dengan *stakeholders* desa pekruman 50,0%, dan terkecil *stakeholders* pemerintah 37,14%. Dilihat dari skor rata-ratanya, dua *stakeholders* menunjukkan respon sangat positif yaitu dari subak dengan skor 3,58 dan desa pekruman sebesar 3,30. Sementara skor rata-rata respon dari pemerintah menunjukan paling kecil, yakni 2,89 namun masih tergolong pada level positif. Secara keseluruhan skor rata-rata respon *stakeholders* mencapai 3,33 yang berarti tergolong sangat positif. Dapat disimpulkan bahwa semua *stakeholders* memiliki tanggapan dan dukungan yang sangat positif terhadap gagasan pengembangan model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak.

Kata-kata kunci : model pengendalian alih fungsi lahan sawah irigasi, subak

PENDAHULUAN

Keberadaan sistem subak di Bali terutama yang wilayahnya berdekatan dengan kawasan pariwisata dan perkotaan sedang mengalami marjinalisasi menuju ketidakberlanjutan. Wujud marjinalisasi yang paling serius dialami adalah menyusutnya luas lahan sawah subak karena beralihfungsi ke penggunaan nonpertanian. Fenomena alih fungsi lahan sawah di Bali berlangsung semakin massif, sporadis, dan akseleratif seiring dengan lingkungan eksternal subak yang berkembang cepat, terutama sektor pariwisata dan hegemoni ekonomi pasar kapitalis. Perkembangan eksternal tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan yang bias pariwisata dan lemahnya sistem pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Sriartha, 2014).

Fakta di atas sejalan dengan hasil penelitian Hibah Bersaing tahun pertama yang dilakukan oleh Sriartha dan Made Suryadi (2015), bahwa dalam periode tahun 2002-2009, lahan sawah subak pada tiga kecamatan (Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi) di Kabupaten Badung mengalami alih fungsi seluas 468,34 hektar dengan rata-rata pertahunnya 66,91 hektar dan lajunya 6,71%. Alih fungsi lahan sawah secara massif dan sporadis dialami oleh subak yang berada di dekat pusat pariwisata Kuta. Hal ini terjadi karena kedudukan dan fungsi wilayah Kuta sebagai perkotaan inti di kawasan metropolitan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) dan simpul utama pariwisata berskala internasional, sehingga memiliki pengaruh efek serap (*backwash effect*) dan efek sebar (*spread effect*) yang besar terhadap dinamika sumberdaya (manusia, barang, dan jasa) di wilayah sekitarnya. Faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan sawah adalah : (1) faktor jarak wilayah subak ke pusat pariwisata, (2) faktor kerapatan jalan, (3) faktor keberadaan fasilitas sosial, (4) faktor keberadaan fasilitas ekonomi, (5) faktor kepadatan

penduduk, (6) faktor persentase keluarga nonpertanian, dan (7) faktor produktivitas lahan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa kebijakan dan program pengendalian alih fungsi lahan sawah yang dilakukan oleh pemerintah daerah berjalan kurang efektif. Hal ini didukung oleh tiga fakta penting, yaitu :

belum adanya peraturan zonasi tata ruang tingkat detail (tingkat kecamatan dan desa), dan beberapa peraturan tata ruang yang ada sudah tidak relevan dengan perkembangan wilayah, (2) makin marak dan massifnya laju alih fungsi lahan sawah dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, dan (3) adanya penilaian negatif dari masyarakat (ketua *subak/pekaseh*, klian desa *pekraman*, petani/*krama subak*) dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan sawah secara efektif.

Temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan formal yang ditetapkan oleh Pemerintah belum sepenuhnya menjamin keberhasilan dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah, sehingga membawa konsekuensi pentingnya pemerintah menerapkan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dengan melibatkan masyarakat lokal seperti *subak*, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengendalian alih fungsi lahan sawah. Pentingnya pelibatan lembaga lokal dalam pengelolaan lahan dan air di Bali telah diingatkan oleh Windia (2002), bahwa seiring dengan kehidupan manusia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang muncul berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan air tidak dapat dipecahkan hanya dengan aturan-aturan formal, tetapi diperlukan suatu lembaga yang dapat memadukan aturan-aturan formal dan norma-norma sosial-religius secara operasional sebagaimana halnya telah berlaku dalam sistem *subak* di Bali.

Pada dasarnya subak yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* (THK) memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkungan internalnya, sepanjang ada intervensi positif dari Pemerintah, seperti program pemberdayaan otonomi subak yang sejalan dengan peraturan-peraturan formal dari pemerintah. Bertolak dari hasil penelitian Hibah Bersaing tahun pertama (2015) beserta konsekuensinya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan (tahun 2016) dengan fokus kajian pada pengembangan model dan pedoman operasional pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pada pengelolaan subak. Mengacu pada permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian pada tahun kedua (2016) adalah untuk:

- 1) Mengetahui respon/tanggapan *stakeholders* tentang model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak
Menghasilkan model dan pedoman operasional pelaksanaan (POP) pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak.

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Kabupaten Badung, Bali yang didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, merupakan daerah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya paling pesat di Bali, yang angka PDRB-nya tertinggi diantara kabupaten/kota di Bali (BPS, 2012). *Kedua*, Sekitar 75% wilayahnya (kecuali Kecamatan Petang) ditetapkan sebagai kawasan metropolitan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011. *Ketiga*, berdirinya ibukota Kabupaten Badung yang baru, yakni Kota Mangupura sejak tahun 2009 yang terletak di bagian tengah, yang merupakan perpindahan dari Denpasar. *Keempat*, di daerah ini terdapat pusat pariwisata internasional, seperti kawasan Kuta dan Kawasan Nusa Dua

yang memiliki daya tarik dan daya dorong sumberdaya sangat tinggi.

2.2 Desain dan Produser Pelaksanaan Penelitian

Desain atau rancangan penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah rancangan penelitian dan pengembangan (Research and Development atau disingkat R&D). Penelitian ini termasuk skema penelitian Hibah Bersaing yang dirancang menghasilkan produk berupa model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak. Sesuai dengan yang dikemukakan Sugiyono (2009) bahwa metode penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.

Tahap-tahap Penelitian dan pengembangan dilakukan dengan mengacu pada konsep Sugiyono (2009) dan Henderson (2005) dengan modifikasi menjadi 4 tahap, yaitu (1) tahap persiapan dan perencanaan, (2) tahap pengembangan, (3) diseminasi atau pembiasaan model di lapangan, dan (4) tahap monitoring/evaluasi.

Tahap perencanaan mencakup kegiatan dengan kegiatan identifikasi kebutuhan/masalah dan membangun komitmen bersama. Tahap pengembangan mencakup kegiatan penyusunan draft desain model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak, validasi model, perbaikan desain model, dan penetapan/pengeuhan model. Tahap diseminasi atau pembiasaan penerapan model di lapangan dilakukan dengan memasang model pada papan informasi di sejumlah titik lokasi sawah subak yang strategis dan akses bagi semua orang. Pada tahap monitoring/evaluasi dilakukan kegiatan pemantauan/monitoring untuk melihat efektivitas hasilnya. Seluruh rangkaian tahap kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan melalui teknik kaji tindak dengan menekankan pada adalah metode aksi bersama seperti

metode diskusi kelompok, kerja kelompok, *Participatory Rural Appraisal* (PRA), dan seminar, dengan melibatkan partisipasi kolaboratif semua *stakeholders* (peneliti, subak, pemda, desa adat/pekraman).

2.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan tiga komponen *stakeholders*, yaitu subak, instansi pemerintah terkait, dan desa pekraman. Dengan demikian yang termasuk populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat subak, staf instansi pemerintah daerah terkait, dan masyarakat desa pekraman yang ada di tiga kecamatan yang menjadi lokasi penelitian. Instansi pemerintah daerah terkait yang dijadikan subjek penelitian meliputi staf Balai Penyuluhan pertanian Kabupaten Badung, staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pendapatan Bagian Persubakan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan di lingkungan Kabupaten Badung. Jumlah populasi secara keseluruhan tidak diketahui secara pasti, sehingga penetapan jumlah sampel sampel didasarkan secara purposif dengan mempertimbangkan keterwakilannya sebagai populasi dan tingkat kejenuhan data untuk keperluan analisis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sampel yang ditetapkan untuk masing-masing komponen adalah tidak kurang 30 orang.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yakni pengembangan model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak, akan dilakukan studi kasus terhadap satu subak sampel yang ditetapkan secara purposif. Dengan cara tersebut, subak sampel yang dipilih adalah Subak Tungkub Dalem, dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, subak tersebut berlokasi di bagian tengah sehingga dianggap mewakili subak-subak yang ada di bagian selatan (hilir) dan subak-subak yang ada di bagian utara (hulu). *Kedua*, Subak tersebut merupakan subak yang wilayahnya terluas

dibandingkan dengan subak lainnya yang ada di daerah penelitian. *Ketiga*, Lingkungan eksternal di sekitar wilayah subak merupakan lingkungan yang pembangunannya berkembang pesat sehingga potensi kerentanannya untuk mengalami gangguan cukup besar. *Keempat*, Walaupun rentan terhadap tekanan dari perkembangan eksternal, lahan sawah dan kegiatan-kegiatan di subak tersebut masih berjalan normal.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian pada tahun kedua adalah, sebagai berikut.

- a. Data pembuatan peta wilayah subak sampel diperoleh dari denah wilayah subak dan peta penggunaan lahan 2009 yang didapat dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung, interpretasi citra IKONOS, dan pengecekan lapangan. Proses pembuatan peta menggunakan bantuan *software* Sistem Informasi Geografi (SIG). Data tentang karakteristik subak sampel dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang tersimpan di kantor subak sampel dan wawancara dengan beberapa informan kunci yang mengetahui seluk beluk subak sampel.
- b. Data tentang respon/tanggapan *stakeholders* tentang gagasan pengembangan model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak diperoleh dari sampel *stakeholders* yang terdiri atas petani, *pekaseh*, Desa Dinas, Desa *Pekraman*, Penyuluh Lapangan, dan pimpinan dinas terkait di Kabupaten Badung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan. Adapun kuesioner yang dimaksud disajikan pada lampiran.
- c. Data sekunder seperti dokumen regulasi tata ruang wilayah, regulasi pertanian tanaman pangan termasuk regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan dokumen *awig-*

awig/pararem subak, dikumpulkan dengan cara pencatatan dokumen.

2.5 Analisis Data

Data tentang respon/tanggapan *stakeholders* terhadap pengembangan model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Respon *stakeholders* diukur dengan mengajukan pernyataan-pernyataan yang disusun berdasarkan model skala Likert. Setiap pernyataan terdiri dari 4 alternatif jawaban, yaitu:

sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Selanjutnya alternatif jawaban tersebut diberi skor/nilai bergerak dari 1 sampai 4 (1= tidak setuju/tidak positif ; 2= kurang setuju/kurang positif ; 3= setuju/positif ; dan 4= sangat setuju/sangat positif. Kriteria penilaian respon menggunakan skor rata-rata ideal dengan formula, sebagai berikut.

$$SRI = \frac{\sum X}{N}$$

SRI = Skor Rata-Rata Ideal
= frekuensi/jumlah individu ideal
X = Skor ideal.

Berdasarkan rumus di atas akan didapat skor rata-rata ideal tertinggi adalah 4 dan skor rata-rata ideal

terendah adalah 1. Selanjutnya dapat dibuat kriteria penilaian respon, seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kriteria Penilaian Respon Stakeholders Terhadap Pengembangan Model Alih Fungsi Lahan Sawah Berbasis Pengelolaan Subak.

No.	Kriteria Respon Stakeholders	Skor Rata-Rata Ideal
1.	Sangat Positif/Sangat Setuju	> 3 sampai 4
2.	Positif/Setuju	> 2 samapai 3
3.	Kurang/Tidak Positif/Kurang/Tidak Setuju	> 1 samapai 2

Selanjutnya kriteria penilaian di atas dihubungkan dengan skor empirik yang diperoleh dari penelitian, sehingga dapat diketahui posisi respon masing-masing stakeholders dan respon *stakeholders* secara keseluruhan. Analisis skor data kuantitatif tersebut disajikan dalam bentuk tabel frekuensi silang yang dilengkapi dengan nilai persentase dan dalam bentuk grafik untuk memperjelas pemaknaannya. Data-data penelitian kuantitatif tersebut kemudian diinterpretasikan secara deskriptif naratif sampai pada penarikan kesimpulan. Analisis karakteristik penerapan konsep Tri Hita Karana pada subak sampel dilakukan dengan teknik deskriptif. Pengembangan model, serta perumusan pedoman operasional prosedur dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif berdasarkan 4 tahap kegiatan sebagaimana dikemukakan di depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Respon Stakeholders Terhadap Pengembangan Model Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Berbasis Pengelolaan Subak*
Wujud rangsangan dalam penelitian ini berupa gagasan atau ide tentang pengembangan model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan suba. Gagasan tersebut disusun dalam bentuk kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan-pernyataan positif dan pernyataan negatif. Kuesioner tersebut disampaikan kepada stakeholders dengan cara wawancara langsung. Dalam wawancara stakeholders diminta untuk menyampaikan respon atau tanggapannya, dengan memilih salah satu dari 4 alternatif jawaban, yaitu: sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Jumlah seluruh pernyataan adalah 16 item pernyataan, terdiri atas 12 item pernyataan positif (item nomor 1-12) dan 4 item pernyataan negatif

(item nomor 13-16). Kuesioner penelitian dapat dilihat pada lampiran.

Analisis data respon dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan cara skoring, tabulasi, persentase, dan grafik. Kriteria penskoran yang digunakan yaitu: untuk pernyataan positif: sangat setuju, skor = 4; setuju, skor = 3; kurang setuju, skor = 2; dan tidak setuju, skor =

Untuk pernyataan negatif: sangat setuju, skor = 1; setuju, skor = 2; kurang setuju, skor = 3; dan tidak setuju, skor =

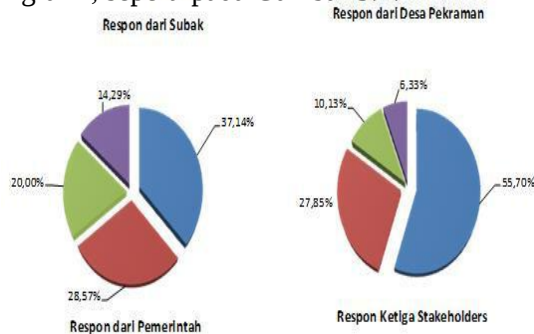
Berdasarkan hasil skoring selanjutnya dihitung frekuensi dan skor rata-ratanya. Kriteria penilaian respon stakeholders menggunakan pedoman yang telah dikemukakan pada Tabel 2.1.

Hasil analisis data penelitian tentang respon stakeholders disajikan pada Tabel 3.1. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan frekuensi tingkatan respon di masing-masing stakeholders maupun antar-stakeholders. Pada stakeholders subak, ditemukan tingkatan respon sangat positif terbanyak, yaitu 69,56%, disusul kemudian dengan stakeholders Desa Pekraman 50,0%, dan terkecil stakeholders pemerintah 37,14%. Walaupun ada variasi, namun secara umum respon stakeholders mendominasi pada jenjang sangat positif dan positif. Tabel 3.1. Sebaran Frekuensi Respon Stakeholders

No	Respon Stakeholders	Subak		Desa Pekraman		Pemerintah		Total	
		f	Jml Skor	f	Jml Skor	f	Jml Skor	f	Jml Skor
1	Sangat Positif	48 (69,56)	192	27 (50,0)	108	13 (37,14)	52	88 (55,70)	352
2	Positif	15 (21,17)	45	19 (35,19)	57	10 (28,57)	30	44 (27,85)	132
3	Kurang Positif	4 (5,80)	8	5 (9,26)	10	7 (20,0)	14	16 (10,13)	32
4	Tidak Positif	2 (2,90)	2	3 (5,56)	3	5 (14,29)	5	10 (6,33)	10
Total		69 (100,0)	247	54 (100,0)	178	35 (100,0)	101	158 (100,0)	526
Skor Rata-Rata			3,58		3,30		2,89		3,33

Sumber: Peneliti, 2016

Keterangan: () = Angka persentase ; f = frekuensi; Jml = Jumlah. Secara keseluruhan, stakeholders yang menyatakan respon sangat positif sebanyak 88 orang atau 55,70% dan respon positif 44 orang atau 27,85%, sedangkan yang menyatakan respon kurang positif dan tidak positif sebanyak 26 orang atau 16,46%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan respon antar-stakeholders dan respon stakeholders secara keseluruhan ditampilkan dalam grafik, seperti pada Gambar 3.1.



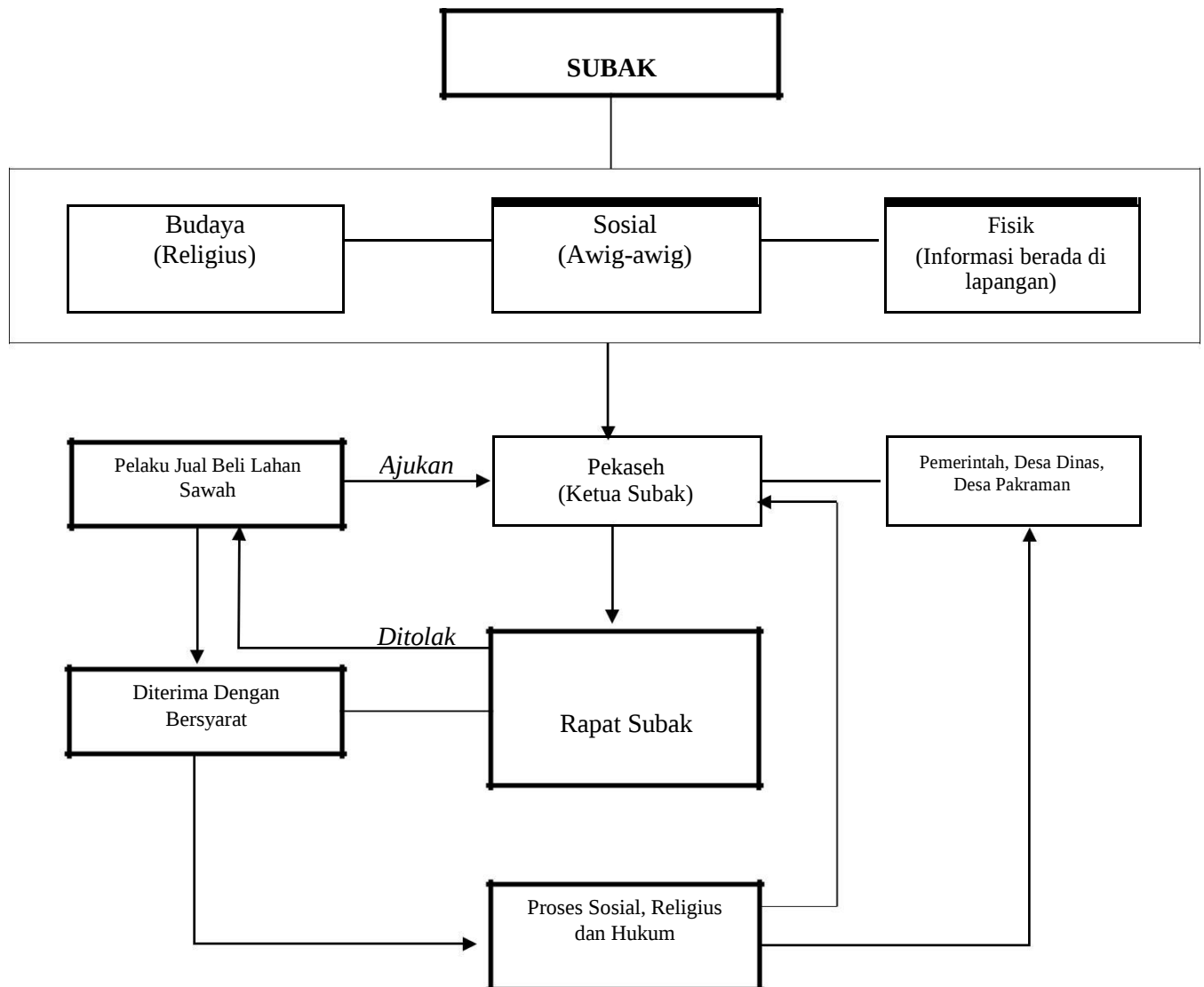
Gambar 3.1. Variasi Respon Antar-Stakeholders dan Respon Total Stakeholders.

Keterangan:

- Sangat Positif
- Positif
- Kurang Positif
- Tidak Positif

Dilihat dari skor rata-ratanya, respon dari subak juga menunjukkan angka tertinggi, yakni 3,58 tidak jauh berbeda dengan respon dari desa pekraman sebesar 3,30. Jika dikaitkan dengan kriteria penilaian pada Tabel 2.1, respon kedua stakeholders ini tergolong sangat positif. Sementara skor rata-rata respon dari pemerintah menunjukkan paling kecil, yakni 2,89 namun masih tergolong pada level positif. Secara keseluruhan skor rata-rata respon stakeholders mencapai 3,33 yang berarti tergolong sangat positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stakeholders yang terdiri atas komponen subak, desa pekraman, dan pemerintah daerah memiliki tanggapan atau pandangan dan dukungan yang sangat positif terhadap gagasan pengembangan model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak.

3.2 Model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan suba



Gambar 3.2. Model Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Berbasis Pengelolaan Subak

3.3 Pedoman operasional pelaksanaan (POP) pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan suba

A. Dasar Hukum

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsilahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009

Perpres Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

Perpres Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033

Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak

Awig-Awig dan Pararem Subak Tungku Dalem

Awig-Awig dan Pararem Desa Pekraman Kekeran

Peraturan Desa

B. Tujuan

Mengendalikan alih fungsi lahan sawah melalui pengelolaan oleh subak sebagai modal awal/kearifan lokal masyarakat Bali untuk mendukung kelestarian budaya pertanian Bali secara berkelanjutan

C. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup prosedur/tata cara, sanksi, dan insentif pengendalian alih fungsi lahan sawah yang dikelola subak

Prosedur

Subak sebagai organisasi tradisional pengelola air irigasi dan tanaman wajib menjaga lahan sawah yang

dikelolanya melalui pendekatan moral-religius, pengaturan dalam awig-awig dan pembiasaan/deseminasi di lingkungan wilayah subak

Setiap anggota/karma subak yang bermaksud menjual dan membuat rumah di lahan sawah miliknya harus melapor kepada Ketua/Pekaseh

Pihak luar anggota subak yang bermaksud melakukan pembelian lahan sawah harus melapor terlebih dahulu kepada Ketua/Pekaseh

Berdasarkanlaporandiatas, ketua/pekaseh melakukan rapat anggota subak

Keputusan hasil rapat anggota subak kemudian dikoordinasikan oleh Ketua/Pekaseh kepada Desa Pekraman dan Kepala Desa setempat dan Pemerintah Daerah

Hasil rapat anggota subak yang telah dikoordinasikan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu: ditolak dan diterima secara bersyarat

Setiap anggota subak atau pihak luar yang diijinkan melakukan alih fungsi lahan sawah wajib menindaklanjuti dalam bentuk proses administrasi

hukum, upacara keagamaan (Mantukan Bhataru Sri) dan kewajiban social lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan pararem dana wig-awig subak

Kewajiban, Larangan dan Sanksi

Setiap karma/anggota subak yang akan membangun di lahan sawahnya wajib menyetorkan dana ke subak setara dengan 150 kg beras

Setiap pihak luar yang akan membeli lahan sawah di wilayah subak wajib menyertakan dana ke subak sebesar 0,50% dari harga jual lahan sawah

Setiap pihak luar yang akan membangun rumah di lahan sawah subak wajib menyetorkan dana ke subak setara dengan 350 kg beras

Pihak pemerintah yang akan membangun fasilitas publik di wilayah subak harus mendapat persetujuan dari rapat subak

Setiap anggota subak atau pihak luar yang membangun di wilayah subak tanpa ijin atau persetujuan rapat subak

maka yang bersangkutan harus membongkar bangunannya dan melakukan upacara penyucian lahan sawah kembali

Apabila kewajiban pada poin 5 dilanggar, maka karma/anggota subak akan melakukan pembongkaran

Dilarang melakukan alih fungsi lahan sawah dalam skala besar di wilayah subak dalam bentuk pengaplingan yang dilakukan oleh para pengembang/investor property

Setiap karma/anggota subak atau pihak luar yang melanggar ketentuan dalam SOP ini dikenakan sanksi dan denda material dan non material sesuai dengan keputusan rapat subak dan pararem serta awig-awig subak

Sanksi dan denda terhadap pelanggar dikategorikan atas sanksi ringan, sedang, dan sanksi berat. Kriteria sanksi ringan, sedang dan berat diputuskan dalam rapat subak

Penghargaan/Insentif

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penghargaan/insentif dalam APBD untuk bantuan subak-subak yang berhasil melestarikan lahan sawahnya

Subak yang berhasil melestarikan lahan sawahnya secara berkelanjutan berhak mendapat penghargaan/insentif dari pemerintah

Penghargaan/insentif ditujukan kepada organisasi/lembaga subak dan kepada petani karma subak secara perseorangan

Penghargaan yang ditujukan kepada organisasi/lembaga subak berupa *block grant*, peralatan, dan pemberdayaan SDM yang diperuntukkan memperkuat kelembagaan subak

Penghargaan/insentif yang ditujukan kepada petani karma subak berupa sarana produksi pertanian, pembebasan pajak, dan bantuan lain yang diberikan secara gratis atau bersubsidi.

D. Simpulan

Respon stakeholders terhadap gagasan pengembangan model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak tergolong sangat positif. Ini berarti

stakeholders yang diteliti yang terdiri atas komponen subak, desa pekruman, dan pemerintah daerah menyambut sangat positif dilakukannya pengembangan model. Model yang dikembangkan untuk pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak memperhatikan aspek sosial (awig-awig), budaya (religious), dan fisik diintegrasikan dengan beberapa ketentuan menyangkut kewajiban, larangan dan sanksi yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Operasional Pelaksanaan (POP) pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak.

E. DAFTAR RUJUKAN

Badan Pusat Statistik Propinsi Bali. 2008. *Bali Dalam Angka*. Denpasar.

Badan Pusat Statistik Propinsi Bali. 2012. *Bali Dalam Angka*. Denpasar.

Henderson, D. 2005. Action Research as a Strategy for Advancing Community-Based Natural Resources Management. *A Resource Book (Editors : J. Gonsalves, et al) : International Potato Center – Users Perspective With Agricultural Research and Development, Philippines*

Sriartha, I Putu. 2011. Threat on Subak Preservation in Urban Fringe. *Proceeding of the International Conference on the Future of Urban and Peri-Urban Area, July 11th – 12 th, 2011 in Yogyakarta*. Departement of Environment Geography, Faculty of Geography, Gadjah Mada University.

_____. 2014. Kajian Spasial Keberlanjutan Sistem Subak Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Disertasi*. Yogyakarta : Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

Sriartha, I Putu dan Made Suryadi. 2015. Pengembangan Model Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Irigasi Berbasis Pengelolaan Subak Di Kabupaten Badung Bali. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing (HB)*

- Tahun Pertama (2015). Singaraja : _____, 2006. *Transformasi Sistem Irigasi Subak Yang Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana*. Denpasar : Pustaka Bali Post.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Windia, Wayan. 2002. *Transformasi Sistem Irigasi Subak Yang Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana. Disertasi (tidak dipublikasikan)*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- _____, 2005. *Rekonstruksi Subak Dalam Menghadapi Era Globalisasi. Dalam I Gede Pitana dan I Gede Setiawan AP., (Ed) : Revitalisasi Subak Dalam Memasuki Era Globalisasi*. Yogyakarta : ANDI OFFSET.
- _____, 2008. *Menuju Sistem Irigasi Subak Yang Berkelanjutan Di Bali. Orasi Ilmiah*. Disampaikan dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam bidang ilmu sosial ekonomi pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana tanggal 29 Maret 2008. Denpasar : Universitas Udayana.
- Windia, Wayan dan Wayan Alit Artha Wiguna. 2013. *Subak Warisan Budaya Dunia*. Denpasar : Udayana University Press.

INDEKS

A

Achmad Muhammad, 539
Agus Aan Jiwa Permana, 126
Agus Adiarta, 172
Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, 687
Ananda Citra, 789
Anastasia H. Muda, 133
Arief Hidayat, 614

C

Chusnul Azhar, 445

D

Desak Nyoman Sri Werastuti, 50
Desak Putu Parmiti, 555
Dessy Seri Wahyuni, 50
Dewa Bagus Sanjaya, 409
Dewa Komang Tantra, 764
Dewa Nyoman Sudana, 409, 656
Dewi Arum Widhiyanti Metra Putri, 470
Dwi Wulandari, 34

E

Emma Dwi Ariyani, 539

F

Fathorrahman, 580
Frieda Nurlita, 359

G

Gede Aditra Pradnyana, 2, 126
Gede Indrawan, 172
Gede Putu Agus Jana Susila, 629
Gede Rasben Dantes, 214
Gede Satya Hermawan, 265
Gede Sedanayasa, 461
Gede Widayana, 147, 190, 205

H

Heni Haryani, 376
Huddy Husin, 614

I

I Gede Batan, 286
I Gede Mahendra Darmawiguna, 2

I Gede Nurhayata, 60, 181
I Gede Sudirtha, 181
I Gusti Lanang Wiratma, 279, 352
I Ketut Purnamawan, 214
I Ketut Margi, 734
I Ketut Resika Arthana, 147, 214
I Ketut Sudiarmaka, 664
I Ketut Sudita, 656
I Ketut Suma, 545
I Ketut Supir, 545
I Made Ardana, 398
I Made Ardwi Pradnyana, 2
I Made Candiasa, 427
I Made Darmada, 773
I Made Gede Sunarya, 2
I Made Gunamantha, 120
I Made Sutama, 465
I Made Tegeh, 461
I Nengah Suandi, 753
I Nengah Suarmanayasa, 649
I Nyoman Jampel, 479
I Nyoman Pasek Nugraha, 190
I Nyoman Pursika, 664
I Nyoman Putu Suwindra, 200
I Nyoman Sila, 532
I Putu Mas Dewantara, 318
I Putu Parwata, 43, 162
I Putu Wisna Ariawan, 270
I Wayan Karyasa, 120
I Wayan Muderawan, 120
I Wayan Rasna, 721, 764
I Wayan Sadia, 545
I Wayan Santyasa, 254
I Wayan Suastra, 308
I Wayan Subagia, 279
I Wayan Suja, 359
I Wayan Sutaya, 9
I Wayan Widiana, 230, 479
Ida Ayu Made Darmayanti, 265
Ida Bagus Putrayasa, 753
Ida Bagus Made Astawa, 366

J

Januar Barkah, 614

K

Kadek Eva Krishna Adnyani, 521
Kadek Rihendra Dantes, 190
Ketut Chandra Adinata Kusuma, 240
Ketut Sudiarmaka, 687, 697
Ketut Udy Ariawan, 9

L

Lodofikus Dumin, 133
Luh Putu Sendratari, 734
Luh Putu Sri Ariyani, 709
Lukman Hakim, 219
Luthfiana Rahmasari, 114

M

Made Agus Wijaya, 380
Made Diah Angendari, 639
Made Kerta Adhi, 589
Made Santo Gitakarma, 172
Made Vivi Oviantari, 43, 162
Melchior Bria, 133

N

N. L. Henny Andayani, 748
N. Nym Yulianthini, 748
N. P. Ristiati, 24
Nengah Bawa Atmadja, 709
Nengah Suandi, 656
Ni Kadek Sinarwati, 573
Ni Ketut Sari Adnyani, 675, 697
Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 326
Ni Luh Putu Eka Sulistia Dewi, 286
Ni Luh Sili Antari, 604
Ni Luh W. Sayang Telagawathi, 604
Ni Made Pratiwi Pendit, 649
Ni Made Rai Wisudariani, 318
Ni Made Sri Mertasari, 436
Ni Made Wiratini, 107
Ni Nyoman Yulianthini, 604
Ni Putu Ayu Hervina Sanjayanti, 388
Ni Putu Rai Yuliantini, 675
Ni Putu Ristiati, 308
Nina Puspitaloka, 376

Nurhasanah, 219
Nyoman Arya Wigraha, 205
Nyoman Dantes, 470
Nyoman Santiyadnya, 60
Nyoman Suryawan, 562
Nyoman Wijana, 72, 84, 96

P

Putu Ari Dharmayanti, 461
Putu Dewi Merlyna Y.P, 265
Putu Hendra Suputra, 147
Putu Panca Adi, 465
Putu Sukma Kurniawan, 489

R

R. A. Adhiguna, 24
Rai Sujanem, 415
Ratna Artha Windari, 675, 697

S

S. Mulyadiharja, 24
Sasmito Budi Utomo, 34
Sriartha, 789
Supriyadi Sadikin, 539
Supriyanto, 114

T

Tin Agustina Karnawati, 580
Tuty Mariyati, 709

W

Wahjoedi, 465
Wasita Anggara, 34



LPPM UNDIKSHA
Jl. Udayana Kampus Tengah
Singaraja, Bali 81116
Tlp. +62362-22928 Fax. +62362-22928
<http://lppm.undiksha.ac.id/senari2016>

*"Memperkuat Jati Diri Bangsa
Melalui Riset Inovatif, Unggul,
dan Berkarakter"*